



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAPORAN KEUANGAN

**Tingkat Satker
(500100)**

TAHUN 2022

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

AUDITED

LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILU (500100)
TAHUN 2022 *AUDITED*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023
Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1 Dasar Hukum	9
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Strategis Bawaslu	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4 Basis Akuntansi	12
A.5 Dasar Pengukuran	13
A.6 Kebijakan Akuntansi	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	19
B.1 Pendapatan	19
B.2 Belanja	24
B.3 Belanja Pegawai	27
B.4 Belanja Barang	29
B.5 Belanja Modal	40
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	46
C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas	46
C.2 Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	48
C.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	48
C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	49
C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	50
C.6 Persediaan	51
C.7 Tanah	56
C.8 Peralatan dan Mesin	62
C.9 Gedung dan Bangunan	77
C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	82
C.11 Aset Tetap Lainnya	83
C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	87
C.13 Aset Tak Berwujud	96
C.14 Aset Lain-Lain	100
C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	106
C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga	107
C.17 Ekuitas	109
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	110
D.1 Pendapatan	110
D.2 Beban Pegawai	111
D.3 Beban Persediaan	112
D.4 Beban Barang dan Jasa	112
D.5 Beban Pemeliharaan	113

D.6	Beban Perjalanan Dinas	114
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115
D.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	117
D.9	Kegiatan Non Operasional	117
D.10	Pos Luar Biasa	119
D.11	Surplus/Defisit LO	119
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	120
E.1	Ekuitas Awal	120
E.2	Surplus/Defisit LO	121
E.3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	115
E.4	Transaksi Antar Entitas	116
E.5	Kenaikan dan Penurunan Ekuitas	124
E.6	Ekuitas Akhir	124
F.	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	125
F.1	Pengungkapan Pengembangan Organisasi	125
F.2	Pengungkapan Lain-lain	126
F.3	Tindak Lanjut BPK	134
F.4	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	134
F.5	Capaian Output Prioritas Nasional (PN)	135

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tabel 2.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Tabel 3.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Tabel 4.	Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran
Tabel 5.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022
Tabel 6.	Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Tabel 7.	Daftar Nomor Dokumen atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Tabel 8.	Daftar Nomor Dokumen atas TGR BMN Hilang a.n. Roy M. Siagian/Irfan
Tabel 9.	Rincian Pengembalian LS Bendahara Tahun 2021
Tabel 10.	Rincian Pengembalian sebagai Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja APIP dan BPK RI
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 12.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022
Tabel 13.	Realisasi Belanja Berdasarkan Program
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 15.	Pengembalian Belanja per 31 Desember 2022
Tabel 16.	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 17.	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS per 31 Desember 2022
Tabel 18.	Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS per 31 Desember 2022
Tabel 19.	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS per 31 Desember 2022
Tabel 20.	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 21.	Rincian Belanja Barang dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022
Tabel 22.	Rincian Pengembalian Jasa Profesi
Tabel 23.	Rincian Pengembalian Perjalanan Biasa
Tabel 24.	Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Tabel 25.	Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Tabel 26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 27.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 28.	Pembelian Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel)
Tabel 29.	Pembelian Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)
Tabel 30.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 31.	Realisasi Belanja Modal Lainnya Satuan Kerja Bawaslu
Tabel 32.	Rincian Sumber Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 33.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 34.	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 35.	Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 36.	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 37.	Perhitungan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 38.	Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tabel 39.	Rincian dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Tabel 40.	Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 41.	Rincian Persediaan per 31 Desember 2022
Tabel 42.	Pembelian Persediaan Berdasarkan Akun
Tabel 43.	Belanja Persediaan
Tabel 44.	Reklasifikasi Masuk per 31 Desember 2022
Tabel 45.	Pemakaian Persediaan
Tabel 46.	Reklasifikasi Keluar per 31 Desember 2022
Tabel 47.	Perbandingan Rincian Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 48.	Saldo Tanah per 31 Desember 2022
Tabel 49.	Transfer Masuk Tanah per 31 Desember 2022
Tabel 50.	Hibah Tanah per 31 Desember 2022
Tabel 51.	Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Tabel 52.	Pembelian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Akun
Tabel 53.	Pembelian Peralatan dan Mesin
Tabel 54.	Pembelian Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)
Tabel 55.	Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin
Tabel 56.	Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Tabel 57.	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin Bertambah per 31 Desember 2022
Tabel 58.	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin Berkurang per 31 Desember 2022
Tabel 59.	Transfer Keluar Peralatan dan Mesin Bertambah per 31 Desember 2022
Tabel 60.	Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin
Tabel 61.	Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
Tabel 62.	Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 63.	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Tabel 64.	Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Tabel 65.	Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 66.	Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 67.	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
Tabel 68.	Pembelian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
Tabel 69.	Koreksi Pencatatan ke Aset Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2022
Tabel 70.	Koreksi Pencatatan ke Aset Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) per 31 Desember 2022
Tabel 71.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 72.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022
Tabel 73.	Detail Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022
Tabel 74.	Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 75.	Rincian Aset Tak Berwujud
Tabel 76.	Pengembangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022
Tabel 77.	Perbandingan Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 78.	Rincian Aset Tetap Yang Tidak Lagi Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2022
Tabel 79.	Reklasifikasi Dari Aset Lancar ke Aset Lainnya per 31 Desember 2022
Tabel 80.	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) per 31 Desember 2022
Tabel 81.	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan per 31 Desember 2022
Tabel 82.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 83.	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022
Tabel 84.	Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
Tabel 85.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022
Tabel 86.	Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 87.	Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 88.	Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 89.	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 90.	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 91.	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 92.	Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 93.	Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 94.	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021
Tabel 95.	Rincian Koreksi Penyusutan atas Reklasifikasi Pencatatan Peralatan dan Mesin Instansi Pusat per 31 Desember 2022
Tabel 96.	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022
Tabel 97.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per 31 Desember 2022
Tabel 98.	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2022
Tabel 99.	Rincian Transfer Keluar pada Satker Bawaslu per 31 Desember 2022
Tabel 100.	Rincian Transfer Masuk Tanah serta Gedung dan Bangunan pada Satker Bawaslu per 31 Desember 2022
Tabel 101.	Kenaikan /Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2022
Tabel 102.	Daftar Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu RI dan Pejabat Pembuat Komitmen per 31 Desember 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2022
Lampiran II	Tindak Lanjut BPK Tahun 2009 sampai 2022
Lampiran III	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Tahun 2022 <i>Audited</i>
Lampiran IV	Capaian Output Prioritas Nasional Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Tahun 2022 <i>Audited</i>
Lampiran V	Face E-Rekon

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jl. MH. Thamrin, No.14, Jakarta

Telp. (021) 3905889, 3902116

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 *Audited* terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2022 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada tanggal 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp514.451.803,00 atau mencapai 223,67 persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp230.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp388.327.553.720,00 atau mencapai 87,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp444.552.892.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp182.924.695.131,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.790.825.507,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp172.855.371.176,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp8.278.498.448,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.192.944.964,00 dan Rp181.731.750.167,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.030.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp380.040.839.418,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp380.006.809.418,00. Surplus di Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp234.777.842,00 dan sebesar Rp0,00. Hasil dari pelaporan tersebut entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp379.772.031.576,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp150.810.278.116,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp379.772.031.576,00 ditambah Koreksi atas Reklasifikasi sebesar Rp0,00 dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp2.376.374,00; dikurangi Koreksi Lain-lain sebesar Rp0,00; dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp410.691.127.253,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp181.731.750.167,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILU (500100)
TAHUN 2022 AUDITED**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022		% thd Angg	31 DESEMBER 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		230.000.000,00	514.451.803,00	223,67	1.197.143.142,00
JUMLAH PENDAPATAN		230.000.000,00	514.451.803,00	223,67	1.197.143.142,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	34.901.577.000,00	34.040.144.918,00	97,53	38.398.245.770,00
Belanja Barang	B.4	385.758.869.000,00	332.046.173.551,00	86,08	162.891.493.244,00
Jumlah Belanja Operasi		420.660.446.000,00	366.086.318.469,00	87,03	201.289.739.014,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	23.892.446.000,00	22.241.235.251,00	93,09	10.105.248.394,00
Jumlah Belanja Modal		23.892.446.000,00	22.241.235.251,00	93,09	10.105.248.394,00
JUMLAH BELANJA		444.552.892.000,00	388.327.553.720,00	87,35	211.394.987.408,00

Jakarta, 5 Mei 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

II. NERACA

**BADAN PENGAWAS PEMILU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	1.289.220.969,00	137.876.501,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.2	0,00	428.553.333,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3	0,00	773.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	176.258.179,00	185.258.179,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(16.891.569,00)	(926.291,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		159.366.610,00	184.331.888,00
Persediaan	C.6	342.237.928,00	156.249.890,00
Jumlah Aset Lancar		1.790.825.507,00	907.784.612,00
ASET TETAP			
Tanah	C.7	99.806.795.296,00	86.987.072.933,00
Peralatan dan Mesin	C.8	79.741.035.906,00	75.977.010.461,00
Gedung dan Bangunan	C.9	44.556.760.764,00	33.446.055.684,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	569.111.000,00	569.111.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.11	11.387.350.252,00	7.672.270.350,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(63.205.682.042)	(58.362.164.736,00)
Jumlah Aset Tetap		172.855.371.176,00	146.289.355.692,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.13	18.275.832.162,00	11.702.612.438,00
Aset Lain-Lain	C.14	2.458.759.850,00	7.197.717.051,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(12.456.093.564,00)	(14.952.110.290,00)
Jumlah Aset Lainnya		8.278.498.448,00	3.948.219.199,00
JUMLAH ASET		182.924.695.131,00	151.145.359.503,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	1.192.944.964,00	335.081.387,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.192.944.964,00	335.081.387,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.192.944.964,00	335.081.387,00
EKUITAS			

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Ekuitas	C.17	181.731.750.167,00	150.810.278.116,00
JUMLAH EKUITAS		181.731.750.167,00	150.810.278.116,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		181.731.750.167,00	151.145.359.503,00

Jakarta, 5 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		34.030.000,00	9.276.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		34.030.000,00	9.276.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	34.035.679.419,00	38.410.718.383,00
Beban Persediaan	D.3	3.709.779.228,00	2.960.046.112,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	112.589.969.155,00	60.791.755.508,00
Beban Pemeliharaan	D.5	4.740.607.070,00	6.057.623.952,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	210.654.148.127,00	92.538.971.265,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	14.294.691.141,00	13.552.254.633,00
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.8	15.965.278,00	926.291,00
JUMLAH BEBAN		380.040.839.418,00	214.312.296.144,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(380.006.809.418,00)	(214.303.020.144,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		290.056.549,00	36.396.888,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		397.860.776,00	566.230.000,00
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(107.804.227,00)	(529.833.112,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		342.582.069,00	175.584.669,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		342.582.069,00	175.584.669,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		234.777.842,00	(354.248.443,00)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(379.772.031.576,00)	(214.657.268.587,00)
POS LUAR BIASA	D.10	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(379.772.031.576,00)	(214.657.268.587,00)

Jakarta, 5 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	150.810.278.116,00	158.184.267.793,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(379.772.031.576,00)	(214.657.268.587,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	2.376.374,00	2.279.894.831,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0,00	35.337.500,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	2.376.374,00	2.244.557.331,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	410.691.127.253,00	205.003.384.079,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	30.921.472.051,00	(7.373.989.677,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	181.731.750.167,00	150.810.278.116,00

Jakarta, 5 Mei 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-14/PB/PB.6/2023 tanggal 3 April 2023 hal Pelaksanaan Koreksi

Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2022 *Audited*.

15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Rencana Strategis Bawaslu

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *terpercaya*, adalah sebagai berikut:

Terpercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020 s.d. 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel; dan
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Sasaran Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih, dan modern.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satuan Kerja.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 3) Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 20 (dua puluh) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran berkaitan dengan adanya *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran

Uraian	31 Desember 2022	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	230.000.000,00	230.000.000,00
Total Pendapatan	230.000.000,00	230.000.000,00
Belanja:		
Belanja Pegawai	17.864.730.000,00	34.901.577.000,00
Belanja Barang	354.586.047.000,00	385.758.869.000,00
Belanja Modal	18.493.595.000,00	23.892.446.000,00
Total Belanja	390.944.372.000,00	444.552.892.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp514.451.803,00 atau 223,67 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp230.000.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	290.056.549,00	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	105.000.000,00	34.803.000,00	33,15
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	9.000.000,00	-

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	13.312.005,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	167.276.565,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.684,00	-
Total	230.000.000,00	514.451.803,00	223,67

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp514.451.803,00, merupakan PNPB Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp290.056.549,00 merupakan pendapatan penjualan lelang berupa 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa barang bergerak dengan risalah lelang Nomor 560/25/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan NTPN C5DC17QLU6UBADOM tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp282.856.550,00 dan 1 (satu) paket Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin dengan risalah lelang Nomor 715/25/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan NTPN 5574361QUHVJ7394 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp7.199.999,00;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp34.803.000,00 merupakan pembayaran sewa rumah negara golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok A dan B yang terdiri dari:

Tabel 6. Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

No	Nama	Jumlah Bulan	Periode	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gunawan Suswantoro	7	April s.d. Oktober 2022	773.000,00	5.411.000,00
2	La Bayoni	11	Desember 2021 s.d. Januari 2022 dan April s.d. Desember 2022	773.000,00	8.503.000,00
3	Ichsan Fuady	9	April s.d. Desember 2022	773.000,00	6.957.000,00

No	Nama	Jumlah Bulan	Periode	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
4	Hengky Pramono	9	April s.d. Desember 2022	387.000,00	3.483.000,00
5	Jufri Syahrudin	9	April s.d. Desember 2022	387.000,00	3.483.000,00
6	Yusti Erlina	4	September s.d. Desember	387.000,00	1.548.000,00
7	Rini Wartini	4	September s.d. Desember	387.000,00	1.548.000,00
8	Arya Mega N	2	November s.d Desember	387.000,00	774.000,00
9	Harimurti Wicaksono	4	September s.d. Desember	387.000,00	1.548.000,00
10	Pakerti Luhur	4	September s.d. Desember	387.000,00	1.548.000,00
Total					34.803.000,00

Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan pada Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum diperoleh melalui penyeteroran dan potongan SPM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Nomor Dokumen atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	06 Januari 2022	6AC077QLU634U161	773.000,00
2	21 Februari 2022	919CB61QUH1LS2O0	773.000,00
3	01 April 2022	221751503000180	1.546.000,00
4	01 Mei 2022	221751503000412	1.546.000,00
5	11 Mei 2022	221751303008643	1.547.000,00
6	25 Mei 2022	221751303009973	1.547.000,00
7	01 Juni 2022	221751503000556	1.546.000,00
8	27 Juni 2022	221751303013509	1.547.000,00
9	01 Juli 2022	221751503000689	1.546.000,00
10	25 Juli 2022	221751303017263	1.547.000,00
11	01 Agustus 2022	221751503000852	1.546.000,00
12	25 Agustus 2022	221751303020763	1.547.000,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
13	01 September 2022	221751503000943	1.546.000,00
14	26 September 2022	221751303024481	1.547.000,00
15	01 Oktober 2022	221751503001052	1.546.000,00
16	25 Oktober 2022	221751303028319	1.547.000,00
17	01 November 2022	221751503001187	1.546.000,00
18	18 November 2022	E99327QLU71A6QI4	774.000,00
19	24 November 2022	221751303032323	5.031.000,00
20	12 Desember 2022	221751303035821	2.709.000,00
Total			34.803.000,00

3. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp9.000.000,00 merupakan penyetoran atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang terdiri atas:
 - a. TGR Kegiatan Pengadaan dan Pengiriman ATK untuk Panwaslu LN Tahun 2014 sebesar Rp5.000.000,00 dengan NTPN 0C25C55DEMKS8J5J tanggal 5 April 2022;
 - b. TGR BMN Hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor a.n. Roy M. Siagian/Irfan sebesar Rp4.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Nomor Dokumen atas TGR BMN Hilang a.n. Roy M. Siagian/Irfan

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	14 Juni 2022	C7AEF7QLU6I9AEMS	500.000,00
2	4 Agustus 2022	C86EF7QLU6NU01VG	500.000,00
3	31 Oktober 2022	1DA348N3E1H3H3NV	500.000,00
4	21 Desember 2022	992981JNFD3L4LR7	2.000.000,00
5	26 Desember 2022	C4B5C0N9VIHDUFEU	500.000,00
Total			4.000.000,00

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas belanja tunjangan kinerja tahun 2018 dengan NTPN 400692G4V7LS6900 tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp13.312.005,00.
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp167.276.565,00 merupakan pengembalian belanja barang Tahun 2021 atau sebelumnya terdiri dari:
 - a. Pengembalian sisa LS Bendahara Tahun 2021 Biro Perencanaan dan Organisasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Inspektorat Utama senilai Rp132.876.501,00 dengan rincian:

Tabel 9. Rincian Pengembalian Sisa LS Bendahara Tahun 2021

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	06 Januari 2022	A692848VURPJ74I6	7.456.910,00
2	07 Januari 2022	B35666U8E387430J	4.746.942,00
3	07 Januari 2022	D71872G4UUC930EI	8.546.099,00
4	07 Januari 2022	E333B1JNF3PSM1TN	37.143,00
5	07 Januari 2022	ED4C848VUJH1T226	850.000,00
6	07 Januari 2022	478B32G4UUC932B6	2.262.200,00
7	07 Januari 2022	B04693CIEOULG2T1	539.774,00
8	26 Januari 2022	57C3A8N3E0M49TP5	2.533.779,00
9	26 Januari 2022	642DB55DEMCILVAD	105.893.654,00
10	26 Januari 2022	D91E02G4V6LDETU8	10.000,00
Total			132.876.501,00

- b. Pengembalian sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan keuangan dan kinerja APIP dan BPK RI sebesar Rp29.400.064,00 dengan rincian:

Tabel 10. Rincian Pengembalian sebagai Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja APIP dan BPK RI

No	Tanggal	NTPN	Jumlah (Rp)
1	01 April 2022	FDFO22G4V6RH10PM	14.050.564,00
2	04 April 2022	C38601JNF3B9K8RV	540.000,00
3	08 April 2022	E764E2G4V6TQ9STK	160.000,00
4	10 Mei 2022	236941JNFCEDMO13	248.000,00
5	10 Mei 2022	301A48N3E11GUO4F	800.000,00
6	10 Mei 2022	3FD908N3E11GUO9P	400.200,00
7	10 Mei 2022	5E53548VUS5ITO2O	545.000,00
8	10 Mei 2022	A3BC361QUHABNNT6	1.524.000,00
9	10 Mei 2022	C458C7QLU6F4HO7S	5.876.000,00
10	10 Mei 2022	D061255DEMNVANPD	72.000,00
11	10 Mei 2022	D64D548VUS5ITO6G	196.000,00
12	10 Mei 2022	F52761JNFCEDMO5F	720.500,00
13	11 Mei 2022	81C1A48VUS5K0BO2	240.000,00
14	11 Mei 2022	EAC180N9VHS2CBMC	27.800,00
15	15 Desember 2022	2ADBF6U8EHP49KD	4.000.000,00
Total			29.400.064,00

- c. Pengembalian kelebihan pengadaan pakaian dinas berupa uang jahit pakaian dinas tahun 2021 dengan NTPN 0A2C67QLU744F6FS tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000,00.
6. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan pengembalian belanja modal tahun 2019 dengan NTPN 4F8CA3CIF287G8AN tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp3.684,00.

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terdapat penurunan sebesar 57,03 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	290.056.549,00	31.508.000,00	820,58
Pendapatan dari Pindahtanganan BMN Lainnya	0,00	4.888.888,00	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34.803.000,00	8.503.000,00	309,30
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.000.000,00	3.000.000,00	200,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	13.312.005,00	52.525.530,00	(74,66)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	167.276.565,00	319.916.543,00	(47,71)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.684,00	776.801.181,00	(100,00)
Total	514.451.803,00	1.197.143.142,00	(57,03)

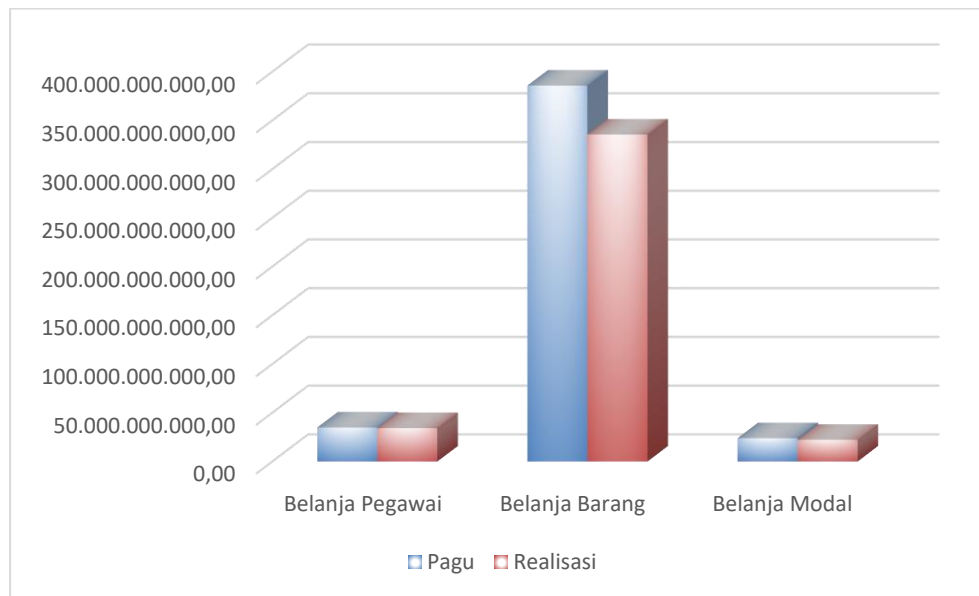
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp388.327.553.720,00 atau 87,35 persen dari anggaran belanja sebesar Rp444.552.892.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	34.901.577.000,00	34.260.831.539,00	98,16
Belanja Barang	385.758.869.000,00	335.530.818.370,00	86,98
Belanja Modal	23.892.446.000,00	22.241.235.251,00	93,09
Total Belanja Kotor	444.552.892.000,00	392.032.885.160,00	88,19
Pengembalian Belanja	-	3.705.331.440,00	-
Total Belanja	444.552.892.000,00	388.327.553.720,00	87,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Program	31 Desember 2022		% Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	239.474.115.000,00	203.498.583.712,00	84,9
Program Dukungan Manajemen	205.078.777.000,00	184.828.970.008,00	90,13
Total Belanja	444.552.892.000,00	388.327.553.720,00	87,35

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 83,70 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Dimulainya pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif; dan
2. Adanya peningkatan pengadaan barang yang menghasilkan aset akibat penambahan pegawai.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Pegawai	34.260.831.539,00	38.442.871.108,00	(10,88)
Belanja Barang	335.530.818.370,00	165.026.206.879,00	103,32
Belanja Modal	22.241.235.251,00	10.105.248.394,00	120,10
Total Belanja Kotor	392.032.885.160,00	213.574.326.381,00	83,56
Pengembalian Belanja	3.705.331.440,00	2.179.338.973,00	70,02
Total Belanja	388.327.553.720,00	211.394.987.408,00	83,70

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp388.327.553.720,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp392.032.885.160,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp3.705.331.440,00.

Pengembalian Belanja sebesar Rp3.705.331.440,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

1.	Belanja Pegawai sebesar	Rp	220.686.621,00
2.	Belanja Barang sebesar	Rp	3.484.644.819,00
	Total	Rp	3.705.331.440,00

Tabel 15. Pengembalian Belanja per 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.801,00
2	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	201.493.820,00
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	19.190.000,00
4	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	4.500.000,00
5	521211	Pengembalian Belanja Bahan	81.624,00
6	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	2.447.500,00
7	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	950.546.069,00
8	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.643.668,00
9	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.467.711.569,00

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
10	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.052.894.389,00
Total			3.705.331.440,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.040.144.918,00 dan Rp34.040.144.918,00 atau terjadi penurunan sebesar 11,35 persen. Penurunan belanja pegawai disebabkan oleh pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Bawaslu Provinsi Tahun 2020 telah dilakukan SKPP ke Satker Set. Bawaslu Provinsi masing-masing.

Tabel 16. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	18.201.049.779,00	22.186.479.173,00	(17,96)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.146.763.800,00	2.293.447.900,00	(6,40)
Belanja Lembur	368.232.000,00	416.118.000,00	(11,51)
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	13.544.785.960,00	13.546.826.035,00	(0,02)
Total Belanja Kotor	34.260.831.539,00	38.442.871.108,00	(10,88)
Pengembalian Belanja Pegawai	220.686.621,00	44.625.338,00	394,53
Total Belanja	34.040.144.918,00	38.398.245.770,00	(11,35)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.040.144.918,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS dan CPNS Bulan Januari s.d. Desember 2022;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional Bulan Januari s.d. Desember 2022;
3. Pembayaran uang makan PNS dan CPNS Bulan Januari s.d. Desember 2022;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2022;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Bulan Januari s.d. Desember 2022;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS dan CPNS Bulan Januari s.d. Desember 2022;

7. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas PNS dan CPNS Tahun 2022; dan
8. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Tahun 2022.

Belanja Pegawai sebesar Rp34.040.144.918,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp34.260.831.539,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp220.686.621,00.

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp220.686.621,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp2.801,00 yang terdiri atas:

Tabel 17. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS per 31 Desember 2022

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	24 Maret 2022	221751303003825	112,00
2	18 Mei 2022	221751303006937	50,00
3	24 Mei 2022	221751303000662	38,00
4	24 Mei 2022	221751303000158	336,00
5	09 Juni 2022	221751303011471	42,00
6	09 Juni 2022	221751303011472	248,00
7	22 Juni 2022	221751303013179	70,00
8	18 Juli 2022	221751303013398	320,00
9	25 Agustus 2022	221751303020921	14,00
10	25 Agustus 2022	221751303020922	14,00
11	19 September 2022	221751303023668	600,00
12	24 November 2022	221751303032227	460,00
13	13 Desember 2022	221751303035930	111,00
14	14 Desember 2022	221751303036490	176,00
15	14 Desember 2022	221751303036486	36,00
16	14 Desember 2022	221751303036485	174,00
Total			2.081,00

2. Pengembalian belanja tunjangan struktural PNS sebesar Rp201.493.820,00 yang terdiri atas:

Tabel 18. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS per 31 Desember 2022

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	18 Juli 2022	221751303013398	4.320.000,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
2	18 Juli 2022	221751303013400	2.160.000,00
3	23 Agustus 2022	221751303014952	1.070.000,00
4	02 September 2022	221751303021713	4.320.000,00
5	29 September 2022	221751303024879	17.280.000,00
6	01 Desember 2022	221751303033211	7.560.000,00
7	01 Desember 2022	221751303033210	7.560.280,00
8	09 Desember 2022	221751303035453	540.000,00
9	09 Desember 2022	221751303035454	540.000,00
10	13 Desember 2022	221751303035931	7.841.240,00
11	13 Desember 2022	221751303035927	6.430.000,00
12	13 Desember 2022	221751303035929	1.080.000,00
13	13 Desember 2022	221751303035915	6.970.000,00
14	13 Desember 2022	221751303035916	6.970.000,00
15	13 Desember 2022	221751303035928	7.560.000,00
16	13 Desember 2022	221751303035913	9.180.600,00
17	13 Desember 2022	221751303035914	102.601.700,00
18	14 Desember 2022	221751303036487	6.430.000,00
19	14 Desember 2022	221751303036488	1.080.000,00
Total			201.493.820,00

3. Pengembalian belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp19.190.000,00 yang terdiri atas:

Tabel 19. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS per 31 Desember 2022

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	21 April 2022	221751303007024	3.700.000,00
2	25 April 2022	221751303007600	2.960.000,00
3	18 Mei 2022	221751303006937	2.730.000,00
4	22 Juni 2022	221751303013179	370.000,00
5	07 Juli 2022	221751303014953	1.295.000,00
6	11 Juli 2022	221751303015480	190.000,00
7	11 Juli 2022	221751503000823	560.000,00
8	11 Juli 2022	221751303015466	910.000,00
9	24 Agustus 2022	221751303020923	1.295.000,00
10	19 September 2022	221751303023668	5.180.000,00
Total			19.190.000,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp332.046.173.551,00 dan Rp162.891.493.244,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022

mengalami kenaikan sebesar 103,85 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022, disebabkan oleh dimulainya pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024.

Tabel 20. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	17.817.146.510,00	15.556.107.294,00	14,53
Belanja Barang Non Operasional	32.754.432.219,00	12.584.570.801,00	160,27
Belanja Persediaan	3.894.147.266,00	2.991.545.722,00	30,17
Belanja Jasa	61.539.776.014,00	33.073.192.802,00	86,07
Belanja Pemeliharaan	4.927.919.570,00	6.053.549.420,00	(18,59)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	214.133.431.726,00	94.627.073.676,00	126,29
Belanja Perjalanan Luar Negeri	463.965.065,00	140.167.164,00	231,01
Total Belanja Kotor	335.530.818.370,00	165.026.206.879,00	103,32
Pengembalian Belanja	3.484.644.819,00	2.134.713.635,00	63,24
Total Belanja	332.046.173.551,00	162.891.493.244,00	103,85

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 sebesar Rp332.046.173.551,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Fasilitasi penyusunan program dan strategi pengawasan;
2. Koordinasi kerjasama dan hubungan antar lembaga;
3. Identifikasi kebutuhan kerjasama antar lembaga;
4. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Fasilitasi Pengawasan;
5. Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
6. Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan;
7. Fasilitasi pengelolaan dan analisis data pengawasan;
8. Fasilitasi pengelolaan data pengawasan siber dan isu khusus;
9. Rancang bangun sistem pengawasan pemilu;
10. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan;
11. Fasilitasi pengawasan partisipatif;
12. Fasilitasi penyusunan program dan strategi penanganan pelanggaran;
13. Peningkatan layanan kualitas penanganan pelanggaran;
14. Pengelolaan data penanganan pelanggaran;

15. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran;
16. Rancang bangun sistem penanganan pelanggaran berbasis IT;
17. Sosialisasi penanganan pelanggaran;
18. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penanganan pelanggaran;
19. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran;
20. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
21. Fasilitasi penyusunan program dan strategi penyelesaian sengketa;
22. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses;
23. Rancang bangun sistem penyelesaian sengketa proses;
24. Evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses;
25. Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa proses;
26. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
27. Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Kedeputian Teknis Pengawasan Pemilu;
28. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan;
29. Fasilitasi penyusunan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu;
30. Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu;
31. Penyusunan peraturan penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu;
32. Penyusunan peraturan penyelesaian sengketa proses pemilu;
33. Pedoman/juknis rekrutmen aparatur pengawas;
34. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu;
35. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu;
36. Pengendalian keuangan dan kinerja (SPIP);
37. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu;
38. Fasilitasi kehumasan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu;
39. Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu;
40. Pengawasan pemilu partisipatif;
41. Pengawasan perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;

42. Penguatan hubungan antar lembaga;
43. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu;
44. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu;
45. Fasilitasi koordinasi kegiatan pimpinan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu;
46. Penyusunan indeks kerawanan pemilu;
47. Penelitian kepemiluan dan demokrasi;
48. Pendidikan dan pelatihan pengawasan penyelenggaraan pemilu;
49. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan pengawasan penyelenggaraan pemilu;
50. Penguatan pengawasan netralitas ASN;
51. Rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
52. Pembentukan pengawas pemilu luar negeri;
53. Rekrutmen panwaslu kecamatan;
54. Rancang bangun sistem pengawasan;
55. Rancang bangun sistem penanganan pelanggaran;
56. Rancang bangun sistem penyelesaian sengketa proses;
57. Rancang bangun basis data aparaturngawas;
58. Pengembangan sistem informasi;
59. Publikasi dan dokumentasi;
60. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
61. Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
62. Fasilitasi sentra gakkumdu;
63. Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
64. Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, kearsipan dan umum lingkup Kedeputian Administrasi;
65. Fasilitasi urusan ketatausahaan pimpinan;
66. Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu;
67. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L);
68. Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran;
69. Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja;

70. Fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran;
71. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Organisasi;
72. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu;
73. Pembinaan rencana penyerapan anggaran;
74. Penyusunan dan implementasi SAKIP;
75. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu;
76. Penyusunan instrumen indeks kepuasan masyarakat;
77. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
78. Fasilitasi penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
79. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
80. Fasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN;
81. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan organisasi;
82. Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip;
83. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan;
84. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
85. Fasilitasi penatausahaan BMN;
86. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
87. Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan;
88. Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
89. Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan;
90. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN;
91. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Keuangan dan BMN;
92. Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum peraturan perundang-undangan;
93. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Hukum dan Humas;
94. Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa;
95. Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian;
96. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan;
97. Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum;
98. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH;

99. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum;
100. Penyelenggaraan dan koordinasi keamanan kantor;
101. Penyelenggaraan keprotokolan;
102. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan;
103. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
104. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
105. Fasilitasi koordinasi kegiatan pimpinan;
106. Rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi ASN;
107. Rekrutmen, pengangkatan dan evaluasi Kepala Sekretariat Bawaslu;
108. Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural;
109. Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional;
110. Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi aparatur pengawas pemilu;
111. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Biro SDM dan Umum
112. Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum lingkup Inspektorat Utama;
113. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah I;
114. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah II;
115. Koordinasi penyelenggaraan administrasi, tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat Wilayah III;
116. Fasilitasi pendampingan penilaian penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada Inspektorat Wilayah I;
117. Fasilitasi pendampingan penilaian penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada Inspektorat Wilayah II;
118. Fasilitasi pendampingan penilaian penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada Inspektorat Wilayah III;
119. Fasilitasi pengawasan internal dan pemantauan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah I;
120. Fasilitasi pengawasan internal dan pemantauan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah II;
121. Fasilitasi pengawasan internal dan pemantauan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah III;

122. Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Data dan Informasi;
123. Fasilitasi pengembangan sistem informasi Bawaslu;
124. Pemetaan dan desain arsitektur sistem informasi kepemiluan;
125. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
126. Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu;
127. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi;
128. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu;
129. Penelitian di bidang demokrasi dan kepemiluan;
130. Penyusunan dan publikasi Jurnal Adhyasta Pemilu;
131. Penelitian pengawasan pemilu;
132. Penelitian kelembagaan pengawas pemilu;
133. Penelitian pemantauan pemilu;
134. Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
135. Penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu;
136. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu Bawaslu;
137. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Bawaslu;
138. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
139. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu.

Dari Realisasi Belanja Barang sebesar Rp332.046.173.551,00 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp1.324.245.657,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Belanja Barang dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	220.234.924,00
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	807.756.576,00
3	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	296.254.157,00
Total			1.324.245.657,00

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dipergunakan untuk:

1. Pengadaan masker/*hand sanitizer* untuk persediaan;
2. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh; dan
3. Biaya pelaksanaan *rapid test/PCR* oleh pihak ketiga.

Belanja Barang sebesar Rp332.046.173.551,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp335.530.818.370,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp3.484.644.819,00. Adapun rincian Pengembalian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp4.500.000,00 merupakan pengembalian LS Bendahara atas pembayaran insentif kinerja Bulan Mei 2022 dengan NTPN D95906QR9C4J2BHN Tanggal 8 Juni 2022;
2. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp81.624,00 merupakan pengembalian atas Belanja Barang Konsumsi dan Snack UP KKP Tanggal 3 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp81.524,00 dengan NTPN 779D85UDPHI6JQIQ dan Rp100,00 dengan NTPN BF3AB7N8P6MVDKPI;
3. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp2.447.500,00 merupakan pengembalian atas pembayaran honorarium narasumber pada tahun 2022, dengan rincian: dalam Rangka Kegiatan Kompetensi Debat Penegakan Hukum Pemilu antar Perguruan Tinggi ke II se-Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2022 di Jakarta dengan NTPN 51C330JSQI3S8TI4 tanggal 14 Juni 2022;

Tabel 22. Rincian Pengembalian Jasa Profesi

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	14 Juni 2022	51C330JSQI3S8TI4	1.187.500,00
2	12 Desember 2022	083642CNQ78QOMPE	630.000,00
3	12 Desember 2022	3D867395A1R75NDF	630.000,00
Total			2.447.500,00

4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 950.546.069,00 merupakan pengembalian LS Bendahara atas perjalanan dinas Tahun 2022, dengan rincian:

Tabel 23. Rincian Pengembalian Perjalanan Biasa

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	17 Maret 2022	961B12CNQ78I6K6M	2.869.068,00
2	22 Maret 2022	30FDE5209MVNH0KP	1.117.494,00
3	22 Maret 2022	B4E635UDPHI3SPDQ	4.283.669,00
4	28 Maret 2022	BD6740JSQI3PI3PU	65.600,00
5	28 Maret 2022	361A97N8P6MSPT7J	682.808,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
6	11 April 2022	E2A6645IPSDBU4H6	810.543,00
7	26 April 2022	0EEC57N8P6MTNUN9	80.270,00
8	26 April 2022	3DB6E1GAACM6T0OC	58.708,00
9	25 Mei 2022	166738JM919B389N	144.045,00
10	31 Mei 2022	EA5E97N8P6MUNV6S	2.359.200,00
11	31 Mei 2022	F32A36QR9C4IASAB	751.097,00
12	31 Mei 2022	053002CNQ78K9UV6	18.687.400,00
13	31 Mei 2022	65AB12CNQ78KA0AU	456.700,00
14	31 Mei 2022	5CE722CNQ78K9NR2	4.969.679,00
15	31 Mei 2022	FC6190JSQI3RFII8	17.184.087,00
16	31 Mei 2022	71AD5395A1R0N0EN	2.327.700,00
17	31 Mei 2022	1331A5UDPHI5TVS2	1.134.168,00
18	31 Mei 2022	64C335UDPHI5TRKO	417.230,00
19	31 Mei 2022	C74FF5UDPHI5TI00	4.398.700,00
20	03 Juni 2022	585CD0JSQI3S5KA0	2,00
21	03 Juni 2022	BBF426QR9C4J0L3H	412.800,00
22	08 Juni 2022	3E3377N8P6MVFD0C	659.800,00
23	08 Juni 2022	BEF4C2CNQ78L1CO0	20.711.533,00
24	08 Juni 2022	E2E82395A1R1E87K	87.796,00
25	08 Juni 2022	129492CNQ78L15QL	163.434,00
26	08 Juni 2022	B6BFF5209MVQ8JKN	12.196.600,00
27	08 Juni 2022	EB59C5209MVQ8FQ7	10.507.900,00
28	08 Juni 2022	C34F95209MVQ8FJ1	11.611.700,00
29	09 Juni 2022	9BA446QR9C4J2O63	75.596.817,00
30	10 Juni 2022	2F0055UDPHI6LUTM	40.430,00
31	10 Juni 2022	3D47C5209MVQ984B	17.837.835,00
32	13 Juni 2022	BB3760JSQI3S952E	2.755.483,00
33	13 Juni 2022	A2F41395A1R1G55L	3.801.323,00
34	16 Juni 2022	F4F612CNQ78L3U7Q	16.184.599,00
35	17 Juni 2022	DF3025209MVQB8D7	33.300.227,00
36	28 Juni 2022	176766QR9C4J71JQ	253.618,00
37	01 Juli 2022	882B76QR9C4JUO2S	240.169,00
38	07 Juli 2022	9DBF08JM919CQL59	53.008.898,00
39	08 Juli 2022	FEA437N8P6N0DBI2	6.000,00
40	11 Juli 2022	96C100JSQI3T6S4Q	24.865.682,00
41	15 Juli 2022	BE7B85209MVR973L	22.395.220,00
42	15 Juli 2022	896AB5UDPHI7M33I	5.109.838,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
43	09 Agustus 2022	E1CC71GAACMAHUIQ	258.761,00
44	09 Agustus 2022	3BF7C395A1R3BTGL	306.923,00
45	11 Agustus 2022	ABF552CNQ78MVF6D	46.619,00
46	25 Agustus 2022	3E61C0JSQI3U9MO0	33.647.844,00
47	30 Agustus 2022	804C65UDPHI8P2VF	24.103,00
48	30 Agustus 2022	54EE35UDPHI8P41M	126.427,00
49	23 September 2022	48D4C395A1R4EAT1	37.603.990,00
50	21 Oktober 2022	7766D5UDPHIAIU1Q	51.052,00
51	21 Oktober 2022	3F2395209MVU60GR	221.530,00
52	21 Oktober 2022	9B93045IPSDHP2AM	176.720,00
53	01 November 2022	AD5077N8P6N3GN0P	82.500,00
54	01 November 2022	FDFE86QR9C4N3L3I	918.500,00
55	02 November 2022	D8DBD45IPSDHSHK7	342.969,00
56	09 November 2022	6F30F5UDPHIBE9SE	11.610,00
57	09 November 2022	D849545IPSDIKGP0	732.072,00
58	10 November 2022	44B2B45IPSDIKQ6R	142.310,00
59	10 November 2022	41F9C45IPSDIKK4M	69.428,00
60	11 November 2022	6D9891GAACMDDO20	470.000,00
61	11 November 2022	AE6257N8P6N48QF8	82.000,00
62	11 November 2022	283625209MVV1K17	18.500,00
63	24 November 2022	CC41C8JM919GPRE1	248.293,00
64	28 November 2022	281830JSQI4155E2	11.121.771,00
65	07 Desember 2022	CC2505UDPHICBRPC	1.927.780,00
66	08 Desember 2022	BE56E8JM919HJC6J	2.821.584,00
67	13 Desember 2022	1DE236QR9C4OPMOV	106.427,00
68	13 Desember 2022	2921C8JM919HL57T	559.122,00
69	13 Desember 2022	4C4F96QR9C4OOR3L	2.776.932,00
70	21 Desember 2022	86EB67N8P6N5AICA	2.470.891,00
71	21 Desember 2022	9A1417N8P6N5AFNU	825.097,00
72	21 Desember 2022	7EFB71GAACMEFIKQ	134.020,00
73	27 Desember 2022	41EBC45IPSDJO1TE	283.508.817,00
74	27 Desember 2022	D5A6B6QR9C4OV9BL	116.191.200,00
75	27 Desember 2022	8AD6D395A1R7AVF9	700.000,00
76	27 Desember 2022	B748C1GAACMEGF7R	1.900.000,00
77	30 Desember 2022	B9C100JSR3QRLQF0	480.746,00
78	30 Desember 2022	3878C2CNQOVKDBDM	71.859,00
79	30 Desember 2022	6B9F345IQE4CMHHS	1.374.269,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
80	30 Desember 2022	BF7146QR9TRI31AL	265.436,00
81	30 Desember 2022	F90B26QR9TRHQ0RN	2.411.998,00
82	30 Desember 2022	A9F055UDQ395SEEC	841.192,00
83	30 Desember 2022	A2A2345IQE4D67PO	4.935.030,00
84	30 Desember 2022	B7B5B5UDQ395IOVI	43.155,00
85	30 Desember 2022	3E0B12CNQOVK9TUS	5.232,00
86	30 Desember 2022	BF3AF395AJI0D6M9	677.638,00
87	30 Desember 2022	FB8742CNQOVK72R8	1.767.240,00
88	30 Desember 2022	6F6515209N006EHT	12.056.580,00
89	30 Desember 2022	14E741GAAUD84TOP	3.995.222,00
90	30 Desember 2022	322865UDQ3966A14	3.288.178,00
91	30 Desember 2022	806905UDQ395V8NO	2.498.091,00
92	30 Desember 2022	160EA5UDQ395P62C	4.555.047,00
93	30 Desember 2022	8C91D7N8PODUD728	4.750.906,00
94	30 Desember 2022	5C07E1GAAUD7STH3	454.046,00
95	30 Desember 2022	4C8BA520A8MPOT8B	8.083.201,00
96	30 Desember 2022	F5BBD0JSR3QR5PVA	19.798.685,00
97	30 Desember 2022	EEC676QR9TRIHQ17	2.411.045,00
98	30 Desember 2022	EE30E7N8PODU4O6O	459.913,00
99	30 Desember 2022	61A682CNQOVJLIRS	48.339,00
100	31 Desember 2022	CF07F520A8MPB1O5	101.359,00
Total			950.546.069,00

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp6.463.668,00 yang terdiri dari Pengembalian LS Bendahara dengan NTPN AE5405UDPHI5TIGS pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1.080.000,00 dan Pengembalian Belanja Tim Seleksi dengan NTPN 9EA871GAAUD7NLV7 pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp5.383.668,00.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp1.467.711.569,00 yang terdiri dari Pengembalian LS Bendahara tahun 2022, dengan rincian;

Tabel 24. Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	02 Februari 2022	B79CC1GAACM4OFMN	520.000,00
2	14 Juni 2022	993927N8P6MVH1VK	17.166,00
3	13 Desember 2022	5F6FA1GAACMED2SV	1.548.483,00
4	14 Desember 2022	C85025209N001FMP	110.000,00
5	14 Desember 2022	F56416QR9C4ORF4D	3.884,00

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
6	28 Desember 2022	0B7687N8P6N5AJUK	532.958,00
7	29 Desember 2022	913FE1GAACMEI2TJ	1.185.094.900,00
8	30 Desember 2022	A5D9545IQE4CUALE	100.985.426,00
9	30 Desember 2022	9EE4E8JM9J0B4DL7	232.932,00
10	30 Desember 2022	DACEA5UDQ395RFS8	80.000,00
11	30 Desember 2022	E47982CNQOVJT65Q	178.585.820,00
Total			1.467.711.569,00

7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.052.894.389,00 merupakan pengembalian LS Bendahara atas perjalanan dinas Tahun 2022, dengan rincian:

Tabel 25. Rincian Pengembalian Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

No	Tanggal	NTPN/No. SP2D	Jumlah (Rp)
1	17 Maret 2022	61847395A1QUJF13	48.205,00
2	03 Juni 2022	477436QR9C4J0L7J	8.482.126,00
3	03 Juni 2022	5D9BA5UDPHI6JQ94	442.310,00
4	06 Desember 2022	C638F2CNQ78QNSSC	1.499.000,00
5	12 Desember 2022	1274B2CNQ78QPOOI	143.796,00
6	13 Desember 2022	0D8B80JSQI41U4DS	11.922.232,00
7	21 Desember 2022	14E845209N00377L	266.913.918,00
8	28 Desember 2022	8248E8JM919HPQ2N	169.926.304,00
9	29 Desember 2022	885375UDPHICJ33C	343.708.865,00
10	29 Desember 2022	9A70C45IPSDJP2OC	110.746.006,00
11	30 Desember 2022	3E58345IQE4CJNF2	116.028,00
12	30 Desember 2022	98A487N8PODU76SS	24.328.472,00
13	30 Desember 2022	6C3867N8PODUS0UU	47.251.231,00
14	30 Desember 2022	07EA25UDQ395HSAC	3.492.058,00
15	30 Desember 2022	CEA8D5UDQ395HNCS	13.873.838,00
16	30 Desember 2022	0F6A80JSR3QQVESI	50.000.000,00
Total			1.052.894.389,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp22.241.235.251,00 dan Rp10.105.248.394,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 120,10 persen dari Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dikarenakan adanya pengadaan barang yang menghasilkan aset akibat penambahan pegawai.

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.203.384.136,00	4.496.398.675,00	82,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.283.232.500,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	14.037.851.115,00	4.325.617.219,00	224,53
Total Belanja Kotor	22.241.235.251,00	10.105.248.394,00	120,10
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total	22.241.235.251,00	10.105.248.394,00	120,10

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp22.241.235.251,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi ini digunakan untuk:

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.203.384.136,00 dan Rp4.496.398.675,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 82,44 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	30 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.203.384.136,00	4.496.398.675,00	82,44
Total Belanja Kotor	8.203.384.136,00	4.496.398.675,00	82,44
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-
Total	8.203.384.136,00	4.496.398.675,00	82,44

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.203.384.136,00 terdiri atas:

1. Pengadaan peralatan dan mesin intrakomptabel sebesar Rp8.198.011.736,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Pembelian Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel)

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	25	872.250.000,00
2	3030211008	Cermin Besar	1	3.163.500,00
3	3050102007	Mesin Penghitung Uang	4	45.600.000,00
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	9	17.853.000,00
5	3050104002	Lemari Kayu	7	56.195.766,00
6	3050104003	Rak Besi	2	5.918.300,00
7	3050104004	Rak Kayu	1	1.299.000,00
8	3050105015	Alat Penghancur Kertas	12	24.645.250,00
9	3050105017	Mesin Absensi	10	21.336.000,00
10	3050105048	LCD Projector/Infocus	11	100.397.124,00
11	3050105053	Acces Control System	2	4.900.000,00
12	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	21.978.000,00
13	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	49.062.000,00
14	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	1	2.199.000,00
15	3050201003	Kursi Besi/Metal	75	162.102.500,00
16	3050201004	Kursi Kayu	1	11.322.000,00
17	3050201005	Sice	6	227.328.000,00
18	3050201008	Meja Rapat	1	4.995.000,00
19	3050201011	Tempat Tidur Kayu	3	25.197.000,00
20	3050201016	Kasur/Spring Bed	1	7.437.000,00
21	3050201018	Meja Makan Besi	6	59.718.000,00
22	3050201022	Partisi	3	5.594.400,00
23	3050201033	Sofa	6	53.533.400,00
24	3050203004	Mesin Cuci	1	2.209.100,00
25	3050203005	Air Cleaner	2	49.506.000,00
26	3050204001	Lemari Es	1	2.830.000,00
27	3050204002	A.C. Sentral	1	109.609.725,00
28	3050204004	A.C. Split	10	106.168.290,00
29	3050206002	Televisi	18	344.063.349,00
30	3050206014	Microphone	9	58.325.700,00
31	3050206020	Camera Video	1	41.287.500,00
32	3050206036	Dispenser	8	18.050.000,00
33	3050206037	Mimbar/Podium	1	18.028.016,00
34	3050206058	Gordyin/Kray	2	66.183.750,00
35	3050206069	Lampu Belajar	2	3.774.000,00
36	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	96.570.000,00
37	3060101098	Mixer Sound Sistem	1	8.885.550,00
38	3060102045	Tripod Camera	4	13.260.060,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
39	3060102060	Camera Film	1	29.352.785,00
40	3060102061	Lensa Kamera	8	269.161.560,00
41	3060102118	Head Set	4	30.791.400,00
42	3060102128	Camera Digital	3	151.470.000,00
43	3060102129	Tas Kamera	3	7.212.780,00
44	3060102132	Video Conference	4	74.000.000,00
45	3060102159	Clipp On	4	21.880.000,00
46	3060199999	Alat Studio Lainnya	1	3.375.001,00
47	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	5	193.588.218,00
48	3070104108	Kursi Zeis	4	5.328.000,00
49	3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	1	6.382.500,00
50	3080113081	TV Monitor	1	24.326.500,00
51	3080141194	Personal Computer	1	13.320.000,00
52	3090402031	Kamera Digital	4	67.732.200,00
53	3090404030	Cellphone Video Camera	1	27.204.835,00
54	3100101002	Mini Komputer	1	14.985.000,00
55	3100102001	P.C Unit	19	393.836.266,00
56	3100102002	Lap Top	47	1.044.473.152,00
57	3100102003	Note Book	173	2.598.695.999,00
58	3100102009	Tablet PC	2	13.666.320,00
59	3100203002	Monitor	4	18.602.820,00
60	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	375.735.320,00
61	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	85.920.000,00
62	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	1.665.000,00
63	3100204039	CCTV Camera, 12v	2	2.530.800,00
Total			639	8.198.011.736,00

2. Pengadaan peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebesar Rp5.372.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Pembelian Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050206012	Wireless	1	133.200,00
2	3090402022	Adaptor PA-FA	2	777.000,00
3	3100202017	Speaker Komputer	1	555.000,00
4	3060102045	Tripod Camera	2	999.000,00
5	3060101005	Audio Amplifier	1	555.000,00
6	3100204013	Terminal	2	133.200,00
7	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	888.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
8	3050206071	Kabel	6	1.332.000,00
Total			17	5.372.400,00

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.037.851.115,00 dan Rp4.325.617.219,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 224,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	
Belanja Modal Lainnya	14.037.851.115,00	4.325.617.219,00	224,53
Total Belanja Kotor	14.037.851.115,00	4.325.617.219,00	224,53
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	-
Total	14.037.851.115,00	4.325.617.219,00	224,53

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp14.037.851.115,00,00 dipergunakan untuk pengadaan:

Tabel 31. Realisasi Belanja Modal Lainnya Satuan Kerja Bawaslu

No	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Data Center (DC) Bawaslu	1	180.042.000,00
2	Renewal License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Disaster Recovery Center (DRC) Bawaslu	1	180.042.000,00
3	Pengembangan Aplikasi e-PPID untuk 198 Bawaslu Kabupaten/Kota	0	96.570.000,00
4	Buku Lainnya	164	18.649.240,00
5	Pengembangan Aplikasi SAQ (Self Assesment Question) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	73.260.000,00
6	Pengembangan Website Bawaslu	0	88.467.000,00
7	Super Server Storage SSG 2029P-E1CR24h	2	2.282.182.200,00
8	Aplikasi Learning Management System (LMS)	1	1.609.000.024,00

No	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
9	Aplikasi Sistem Informasi Komunitas Digital Pengawas Partisipatif Bawaslu Tahun 2022	1	99.345.000,00
10	Paket Video Penanganan Pelanggaran Pemilu	1	134.976.000,00
11	Sistem Layanan Terintegrasi Lingkup Bawaslu Tahun 2022	1	1.570.650.000,00
12	Aplikasi Intelligence Media Management (IMM) Bawaslu Tahun 2022	1	2.204.204.700,00
13	Renovasi Lobby Lantai 5	0	196.596.540,00
14	Renovasi Lt.25 Puslitbangdiklat	0	60.939.000,00
15	Renovasi Mechanical Electrical Lobby Lantai 5	0	63.738.420,00
16	Renovasi Ruang Irtama	0	95.904.000,00
17	Renovasi Toilet Lt. 5	0	194.319.930,00
18	Renovasi dalam bentuk Sistem dan perbaikan kualitas Kelistrikan Bawaslu	0	2.204.138.100,00
19	Revitalisasi Kantin	0	31.338.075,00
20	Renovasi Ruang Pimpinan Lt. 2	0	93.878.000,00
21	Aplikasi SAIBERDIT	1	93.573.000,00
22	Pengembangan Aplikasi Layanan Terintegrasi Lingkup Bawaslu	0	96.570.000,00
23	Pengembangan Aplikasi	0	146.520.000,00
24	Renovasi Gedung dan Bangunan (Ruang Irtama)	0	70.263.000,00
25	Renovasi Gedung dan Bangunan (Ruang Irtama)	0	2.152.684.886
Total		174	14.037.851.115,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.289.220.969,00 dan Rp137.876.501,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Sumber Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	Jumlah	
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang kepada pihak ketiga lainnya	823.588,00,00	0,00
Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
Pengembalian belanja barang yang belum disetor ke Kas Negara	465.632.969,00	137.876.501,00
Total	1.289.220.969,00	137.876.501,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tahun 2022 sebesar Rp1.289.220.969,00 terdiri dari:

- a. Honorarium Gakkumdu yang belum diserahkan ke penerima sebesar Rp798.975.000,00;
- b. Uang perjalanan dinas Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu yang belum diserahkan ke pelaksana perjalanan dinas berdasarkan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar Rp17.826.000,00;
- c. Uang perjalanan dinas Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa yang belum diserahkan ke pelaksana perjalanan dinas berdasarkan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar Rp6.787.000,00;
- d. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01264A sebesar Rp3.215.997,00 yang telah disetor dengan NTPN B2AB461QUQ8NUBU2 tanggal 19 Januari 2023;
- e. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01363A sebesar Rp34.053.028,00 yang telah disetor dengan NTPN C005A2G4VVFV68A74 tanggal 18 Januari 2023;
- f. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01364A sebesar Rp10.320.070,00 yang telah disetor dengan NTPN 059150N9VQQJJKPM tanggal 24 Januari 2023;

- g. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01623A sebesar Rp8.332.143,00 yang telah disetor dengan NTPN 204042G4VFIIVD7G tanggal 01 Februari 2023;
- h. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01621A sebesar Rp9.920.223,00 yang telah disetor dengan NTPN DFEC561QUQ94J61A tanggal 01 Februari 2023;
- i. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01664A sebesar Rp479.000,00 yang telah disetor dengan NTPN 47F163CIFAHINC05 tanggal 19 Januari 2023;
- j. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01661A sebesar Rp27.334.790,00 yang telah disetor dengan NTPN 0667655DEVMO6CUR tanggal 01 Februari 2023;
- k. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01674A sebesar Rp9.969.230,00 yang telah disetor dengan NTPN A7AA355DEVMO6B35 tanggal 01 Februari 2023;
- l. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01675A sebesar Rp29.962.506,00 yang telah disetor dengan NTPN B73FE55DEVMO6BA1 tanggal 01 Februari 2023;
- m. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01676A sebesar Rp3.643.560,00 yang telah disetor dengan NTPN 625610N9VQQQ5C6A tanggal 01 Februari 2023;
- n. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01807A sebesar Rp11.181.402,00 yang telah disetor dengan NTPN 2E5918N3E9VT37HN tanggal 18 Januari 2023;
- o. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01831A sebesar Rp39.365.928,00 yang telah disetor dengan NTPN 4B6768N3E9VT5CED tanggal 19 Januari 2023;
- p. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01832A sebesar Rp22.560.863,00 yang telah disetor dengan NTPN E947E7QLUFDGOC6I tanggal 19 Januari 2023;
- q. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01833A sebesar Rp71.521.941,00 yang telah disetor dengan NTPN 2B3CE7QLUFDGM9MO tanggal 18 Januari 2023;
- r. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01891A sebesar Rp21.987.360,00 yang telah disetor dengan NTPN 0A0B97QLUFDGOGMU tanggal 19 Januari 2023;
- s. Sisa LS Bendahara TA 2022 Inspektorat Utama dengan nomor SPM 01944A sebesar Rp50.155.614,00 yang telah disetor dengan NTPN B03D21JNFLD6ICHJ tanggal 01 Februari 2021;

- t. Sisa LS Bendahara TA 2022 Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan nomor SPM 01888A sebesar Rp66.741.070,00 yang telah disetor dengan NTPN F3A5E7QLUFG09NF6 tanggal 03 Februari 2023;
- u. Sisa LS perjalanan dinas Biro SDM dan Umum yang belum disetorkan ke negara berdasarkan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar Rp16.386.483,00;
- v. Sisa LS perjalanan dinas Biro SDM dan Umum berdasarkan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar Rp18.924.070,00 yang telah disetor dengan NTPN CA0DB2G4VFCVCEICT tanggal 24 Januari 2023;
- w. Sisa LS perjalanan dinas Biro SDM dan Umum berdasarkan hasil reviu Inspektorat Utama sebesar Rp9.577.691,00 yang telah disetor dengan NTPN 50B3B8N3E9VLQ tanggal 10 Januari 2023;

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp428.553.333,00. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka sebagai berikut:

**Tabel 33. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Keterangan	Jumlah	
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	0,00	428.553.333,00
Total	0,00	428.553.333,00

C.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp773.000,00. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara.

Tabel 34. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Keterangan	Jumlah	
	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0,00	773.000,00

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp176.258.179,00 dan Rp185.258.179,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	176.258.179,00	185.258.179,00
Total	176.258.179,00	185.258.179,00

Tabel 36. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	TGR BMN Hilang a.n. Sdr Roy M. Siagian Siagian/Irfan Nugraha	0,00	4.000.000,00
2	TGR BMN Hilang a.n. Sdr Entis Supratman	7.728.939,00	7.728.939,00
3	TGR Panwaslu LN a.n. Sdr Roy M.Siagian	168.529.240,00	173.529.240,00
	Total	176.258.179,00	185.258.179,00

Tabel 37. Perhitungan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	Tanggal Tanda Tangan SKTJM	Jatuh Tempo	Nilai Piutang 31 Desember 2022	Status Collect	Bagian Lancar
1	TGR BMN Hilang a.n. Sdr Entis Supratman	20 Desember 2019	20 Desember 2021	7.728.939,00	Lancar	7.728.939,00
2	TGR Panwaslu LN a.n. Sdr Roy M.Siagian	20 Desember 2019	20 Desember 2020	168.529.240,00	Lancar	168.529.240,00
Total						176.258.179,00

Mutasi Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	185.258.179,00
Mutasi tambah:	Rp	0,00
Mutasi kurang:	Rp	9.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi BMN Hilang a.n. Roy M Siagian yang telah jatuh tempo	Rp	4.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Temuan BPK Panwaslu LN a.n. Roy. M. Siagian yang telah jatuh tempo	Rp	5.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	176.258.179,00

Saat ini penyelesaian tuntutan Ganti Rugi BMN hilang a.n. Entis Supratman sebesar Rp7.728.939,00 dialihkan kepada ahli waris dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Tuntutan Ganti Rugi a.n. Roy M. Siagian sebesar Rp168.529.240,00 merupakan TGR Panwaslu Luar Negeri Tahun 2015. Selain itu, Roy M. Siagian masih mempunyai kewajiban Belanja yang Masih Harus Dibayar terhadap Bawaslu atas belanja ATK Panwaslu Luar Negeri Tahun 2015 sebesar Rp125.907.500,00.

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.891.569,00 dan Rp926.291,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	16.891.569,00	926.291,00
Total	16.891.569,00	926.291,00

Tabel 39. Rincian dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

No	Uraian	Bagian Lancar	Penyisihan
1	TGR BMN Hilang a.n. Sdr Entis Supratman	7.728.939,00	38.645,00
2	TGR Panwaslu LN a.n. Sdr Roy M.Siagian	168.529.240,00	16.852.924,00
Total			16.891.569,00

C.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp342.237.928,00 dan Rp156.249.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	65.350.776,00	64.308.510,00
Persediaan Lainnya	276.887.152,00	91.941.380,00
Total	342.237.928,00	156.249.890,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
	117111	Barang Konsumsi	65.350.776,00
1	1010301001	Alat Tulis	195.000,00
2	1010301006	Ordner Dan Map	14.717.000,00
3	1010301010	Alat Perekat	34.000,00
4	1010301013	Isi Staples	277.500,00

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	1010301014	Barang Cetak	1.200.000,00
6	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	110.000,00
7	1010302001	Kertas HVS	892.500,00
8	1010302004	Amplop	13.975.000,00
9	1010302005	Kop Surat	21.450.000,00
10	1010304004	Tinta/Toner Printer	9.000.000,00
11	1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	3.499.776,00
	117199	Persediaan Lainnya	276.887.152,00
27	1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	13.134.385,00
28	1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	160.800.727,00
29	1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	10.033.755,00
30	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	92.918.285,00
Total			342.237.928,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	156.249.890,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	3.921.978.541,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	43.467.500,00
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	(3.735.990.503,00)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(43.467.500,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	342.237.928,00

Penjelasan Mutasi:

1. Pembelian sebesar Rp3.921.978.541,00 merupakan pembelian yang diperoleh dari akun:

Tabel 42. Pembelian Persediaan Berdasarkan Akun

No	Kode	Nama	Jumlah (Rp)
1	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (SP2D)	3.086.390.690,00
2	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (SP2D)	807.756.576,00
3	521211	Belanja Bahan (SP2D)	1.620.000,00
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (belanja barang yang masih harus dibayar)	5.595.900,00
4	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	20.615.375,00

No	Kode	Nama	Jumlah (Rp)
		(belanja barang yang masih harus dibayar)	
Total			3.921.978.541,00

Yang dipergunakan untuk belanja sebagai berikut :

Tabel 43. Belanja Persediaan

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	50	33.950.000,00
2	1010301001	Alat Tulis	2.258	50.101.660,00
3	1010301003	Penjepit Kertas	2.751	31.005.140,00
4	1010301004	Penghapus/Korektor	38	628.380,00
5	1010301005	Buku Tulis	1.400	8.730.000,00
6	1010301006	Ordner Dan Map	107.666	822.710.960,00
7	1010301007	Penggaris	2	6.660,00
8	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	477	13.703.560,00
9	1010301010	Alat Perekat	1.698	19.373.440,00
10	1010301011	Stadler HD	32	1.134.400,00
11	1010301012	Staples	249	9.040.900,00
12	1010301013	Isi Staples	1.943	10.153.000,00
13	1010301014	Barang Cetakan	1.386	65.123.500,00
14	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2.841	81.554.182,00
15	1010302001	Kertas HVS	64.846	227.546.550,00
16	1010302002	Berbagai Kertas	15.007	3.349.200,00
17	1010302003	Kertas Cover	2	150.000,00
18	1010302004	Amplop	80.825	150.266.200,00
19	1010302005	Kop Surat	64	89.600.000,00
20	1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	173	3.786.970,00
21	1010304004	Tinta/Toner Printer	1.706	1.166.213.400,00
22	1010304006	USB/Flash Disk	75	7.187.750,00
23	1010305999	Perabot Kantor Lainnya	1	120.000,00
24	1010306010	Batu Baterai	43	516.000,00
25	1010309001	Meterai	841	9.552.000,00
26	1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	23	426.600,00
27	1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	2.554	72.110.000,00
28	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	33	1.498.750,00

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
29	1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	258	31.500.000,00
30	1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	21	1.050.000,00
31	1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	3.966	232.156.690,00
32	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4	35.520,00
33	1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	524	39.104.519,00
34	1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	4.815	227.523.654,00
35	1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	38	10.113.992,00
36	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	6.957	491.557.464,00
37	1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	895	9.397.500,00
38	1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	50	33.950.000,00
Total			306.462	3.921.978.541,00

2. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp43.467.500,00 merupakan koreksi kode jenis barang persediaan yang terdiri dari:

Tabel 44. Reklasifikasi Masuk per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1	120.000,00
2	1010309001	Meterai	895	9.397.500,00
3	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	50	33.950.000,00
Total			946	43.467.500,00

3. Mutasi kurang berupa Pemakaian persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp3.735.990.503,00 terdiri dari :

Tabel 45. Pemakaian Persediaan

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010301001	Alat Tulis	2.253	49.906.660,00
2	1010301003	Penjepit Kertas	2.751	31.005.140,00
3	1010301004	Penghapus/Korektor	38	628.380,00
4	1010301005	Buku Tulis	1.400	8.730.000,00
5	1010301006	Ordner Dan Map	105.683	811.242.840,00

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
6	1010301007	Penggaris	2	6.660,00
7	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	477	13.703.560,00
8	1010301010	Alat Perekat	1.696	19.339.440,00
9	1010301011	Stadler HD	32	1.134.400,00
10	1010301012	Staples	249	9.040.900,00
11	1010301013	Isi Staples	1.940	9.875.500,00
12	1010301014	Barang Cetak	1.482	84.323.500,00
13	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2.840	81.564.182,00
14	1010302001	Kertas HVS	64.832	226.654.050,00
15	1010302002	Berbagai Kertas	15.007	3.349.200,00
16	1010302003	Kertas Cover	2	150.000,00
17	1010302004	Amplop	74.850	140.509.000,00
18	1010302005	Kop Surat	99	94.300.000,00
19	1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	173	3.786.970,00
20	1010304004	Tinta/Toner Printer	1.697	1.157.213.400,00
21	1010304006	USB/Flash Disk	75	7.187.750,00
22	1010306010	Batu Baterai	43	516.000,00
23	1010309001	Meterai	1.736	18.949.500,00
24	1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	23	426.600,00
25	1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	2.554	72.110.000,00
26	1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	33	1.498.750,00
27	1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	258	31.500.000,00
28	1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	21	1.050.000,00
29	1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	129	1.533.810,00
30	1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	5	23.700,00
31	1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	4.840	237.391.234,00
32	1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4	35.520,00
33	1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	518	29.565.152,00
34	1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	19.794	153.874.570,00
35	1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	16	649.162,00

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
36	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	6.442	433.214.973,00
Total			313.994	3.735.990.503,00

4. Reklasifikasi keluar sebesar Rp43.467.500,00 merupakan koreksi kode jenis barang persediaan yang terdiri dari:

Tabel 46. Reklasifikasi keluar per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	1010203010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set	50	33.950.000,00
2	1010305999	Perabot Kantor Lainnya	1	120.000,00
3	1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	895	9.397.500,00
Total			946	43.467.500,00

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Bawaslu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.806.795.296,00 dan Rp86.987.072.933,00,00. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.806.795.296,00 terdiri dari:

Tabel 47. Perbandingan Rincian Tanah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.544.900.000,00	0,00
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	554.011.175,00	551.250.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	96.044.827.121,00	86.435.822.933,00
4	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	79.200.000,00	0,00
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.583.857.000,00	0,00
Total		99.806.795.296,00	86.987.072.933,00

Tabel 48. Saldo Tanah per 31 Desember 2022

No	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik Kota Semarang	1.225 M2	551.250.000,00
2	Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah	3.483 M2	153.925.920,00
3	Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dompok Laut, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang	5.000 M2	22.642.899,00
4	Jalan Indragiri Nomor 1 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu	1.658 M2	135.956.000,00
5	Jalan Kolonel Wahab Uzir Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu	1.000 M2	72.000.000,00
6	Jl. K.H Wahid Hasyim No. 117 , Kebong Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	1029 M2	75.840.443.000,00
7	Diponegoro No. 35, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara	916 M2	562.424.000,00
8	Jalan Cipto Mangun Kusumo. Selong Lombok Timur	450 M2	45.000.000,00
9	Jalan Cipto Mangun Kusumo. Selong Lombok Timur	1.000 M2	32.999.999,00
10	Kedungdung, Kotapinang Labuhan Batu	3.324 M2	255.948.000,00
11	Kompleks Terpadu Mandiri (KTM), Bohomohoni, Bungku Tengah, Morowali	11.489 M2	735.296.000,00
12	Harapan Baru, Paringin, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan	3.983 M2	159.300.000,00
13	Dharma Praja Gunung Tinggi, Gunung Tinggi, Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu	4.484 M2	68.156.050,00
14	Desa Muara Beliti Baru Samping Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas	2.500 M2	1.342.500.000,00
15	Jl. Merdeka KM. 10, Handayani Mulia, Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir	15.000M2	1.278.530.492,00
16	Jl. Dr. Sam Ratulangi No 27, Kemaraya, Kendari Barat	2.062 M2	1.488.840.000,00
17	Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo	2.231 M2	21.025.505,00
18	Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual	5.900 M2	1.507.334.533,00
19	Kalabbirang, Pattalassang, kab. Takkalar	1.163 M2	111.648.000,00
20	Tiakur, Moa Lakor, Kab. Maluku Barat Daya	2.450 M2	9.136.050,00

No	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
21	Ulantha, Suwawa, Kab. Bonebolango	5.000 M2	50.000.000,00
22	Molosipat U, Sipatana, Gorontalo	5.192 M2	1.062.449.225,00
23	Jl. Adiwiyata, Kotabaru Selatan, Martapura, Kab. Oku Timur	2.500 M2	82.413.250,00
24	Namlea, Kab. Buru	4.785 M2	25.000.000,00
25	Jalan Timor Raya Km. 36 – Oelamasi, Naibonat, Kupang Timur, Kab.Kupang	5.000 M2	180.000.000,00
26	Desa Suak Buluh Kec.Simeulue Timur Kab.Simeulue	2.133 M2	107.209.732,00
27	Desa Olilit Kab.Kepulauan Tanimbar	3.000 M2	192.000.000,00
28	Jl. Pulau Panjang I Komplek Perkantoran , Pangkal Baru, Bangka Belitung	2.517 M2	25.028.278,00
29	Rokan Hilir	2.543M2	390.000.000,00
30	Puncak Indah, Malili, Luwu Timur	1.282M2	227.336.000,00
31	Kel.Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato	5.000 M2	116.280.000,00
32	Panaragan, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung	5.000 M2	135.000.000,00
33	Jl. Ksatria Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima	1.345 M2	455.700.000,00
34	Jl. Lintas Tebo-Bung Tengah, Kab. Tebo	2.500 M2	18.372.913,00
35	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	4.006 M2	243.973.332,00
36	Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato	475 M2	2.761.175,00
37	Jl. Santoso, No. 19 Kel. Dwi Tunggal, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong	1.112 M2	298.000.000,00
38	Jl. Bantilan No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulteng	2.000 M2	4.177.707.000,00
39	Jl. Raya Leuwidamar Blok Kadu Langgar Desa Aweh Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak	1.000 M2	27.000.000,00
40	Jl. Pertanian Kel. Kambulambulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton	1.516 M2	47.988.800,00
41	Desa Rojowinangun, Kec. Kota Gede, Kota Yogyakarta	700 M2	1.544.900.000,00
42	Jl. Raya Padang Ratu Kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah	1.120 M2	79.200.000,00
43	Jl. A. Yani No. 72 Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya	430 M2	1.583.857.000,00
44	Jl. Beringin No. D.06 Kel. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Bangga Laut	530 M2	50.350.000,00

No	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
45	Jl. Moh. Yamin No. 17-19, Renon Denpasar Bali	2.485 M2	2.783.200.000,00
46	Kel. Pondang, Kec. Amurang Timur, Minahasa Selatan	2.000 M2	23.674.584,00
47	Jl. Raya Pinoh – Kota baru Km. 7 Nanga Pinoh, Desa Kelakik, kec. Nanga Pinoh, Melawi	2.925 M2	51.187.500,00
48	Jl. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya, Kec. Sekayu (sebelah kantor kelurahan Kerasan Jaya)	2.048 M2	390.625.000,00
49	Jl. Pramuka No. 11 Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Sumatera Barat	1.300 M2	592.800.000,00
50	Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	2.000 M2	48.425.059,00
51	Jl. Dr. Ratulangi No. 73 Maros	1.000 M2	400.000.000,00
Total			99.806.795.296,00

Sedangkan rincian mutasi aset tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	86.987.072.933,00
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	7.306.464.000,00
Hibah Masuk	Rp	5.513.258.363,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	2.761.175,00
Mutasi Kurang:	Rp	
Transfer Keluar	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar	Rp	(2.761.175,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	99.806.795.296,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	99.806.795.296,00

Penjelasan Mutasi Tambah berupa:

1. Transfer Masuk sebesar Rp7.306.464.000,00 merupakan perolehan aset tanah yang terdiri dari :

Tabel 49. Transfer Masuk Tanah per 31 Desember 2022

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	500100	Badan Pengawas Pemilu	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu	Jl. Bantilan No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulteng	2.000 M2	4.177.707.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
2	500100	Badan Pengawas Pemilu	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	Jl. A. Yani No. 72 Kel. Lengkongsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya	430 M2	1.583.857.000,00
3	500100	Badan Pengawas Pemilu	BPS Provinsi D.I. Yogyakarta	Jalan Nyi Ageng Nis Nomor 544, Desa Rojowinangun, Kec. Kota Gede, Kota Yogyakarta	700 M2	1.544.900.000,00
Total						7.306.464.000,00

2. Hibah Masuk sebesar Rp5.513.258.363,00 merupakan hibah tanah yang berasal dari pemerintah daerah, yang terdiri dari:

Tabel 50. Hibah Tanah per 31 Desember 2022

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	500100	Badan Pengawas Pemilu	Sekda Kota Bima	Jl. Ksatria Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima	1.345 M2	455.700.000,00
2	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Tebo	Jl. Lintas Tebo-Bung Tengah, Kab. Tebo	2.500 M2	18.372.913,00
3	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Prov. Kalimantan Utara	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	4.006 M ²	243.973.332,00
4	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemda Kab. Pohuwato	Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato	475 M2	2.761.175,00
5	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	Jl. Santoso, No. 19 Kel. Dwi Tunggal, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong	1.112 M2	298.000.000,00
6	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Lebak	Jl. Raya Leuwidamar Blok Kadu	1.000 M2	27.000.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
				Langgar Desa Aweh Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak		
7	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemda Kab. Buton	Jl. Pertanian Kel. Kambula Mbulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton	1.516 M2	47.988.800,00
8	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemda kab. Lampung Tengah	Jl. Raya Padang Ratu Kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah	1.120 M2	79.200.000,00
9	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemkab. Banggai Laut	Jl. Beringin No. D.06 Kel. Lompio, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut	530 M2	50.350.000,00
10	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Prov. Bali	Jl. Moh. Yamin No. 17-19, Renon Denpasar Bali	2.485 M2	2.783.200.000,00
11	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	Kel. Pondang, Kec. Amurang Timur, Minahasa Selatan	2.000 M2	23.674.584,00
12	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Melawi	Jl. Raya Pinoh – Kota baru Km. 7 Nanga Pinoh, Desa Kelakik, kec. Nanga Pinoh, Melawi	2.925 M2	51.187.500,00
13	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah kab. Musi Banyuasin	Jl. Kol Wahid Udin Kel. Serasan Jaya, Kec. Sekayu (sebelah kantor kelurahan Kerasan Jaya)	2.048 M2	390.625.000,00
14	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemda Provinsi Sumatera Barat	Jl. Pramuka No. 11 Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Sumatera Barat	1.300 M2	592.800.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
15	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	2.000 M2	48.425.059,00
16	500100	Badan Pengawas Pemilu	Pemerintah Kab. Maros	Jl. Dr. Ratulangi No. 73 Maros	1.000 M2	400.000.000,00
Total						5.513.258.363,00

3. Reklasifikasi Masuk/Keluar sebesar Rp2.761.175,00 merupakan reklasifikasi aset tanah seluas 475 M2 atas Hibah Masuk dari Kabupaten Pohuwato semula tercatat Tanah Bangunan Kantor Pemerintah menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II.

C.8 Peralatan Dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp79.741.035.906,00 dan Rp75.977.010.461,00.

Rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp79.741.035.906,00 secara lengkap disajikan sebagai berikut :

Tabel 51. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3010302001	Elevator /Lift	6	3.136.250.929,00
2	3010304003	Stationary Generating Set	2	1.487.750.000,00
3	3010305003	Stationary Water Pump	5	40.982.363,00
4	3020101001	Sedan	16	4.659.450.000,00
5	3020101002	Jeep	2	498.000.000,00
6	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	590.150.000,00
7	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	48	12.206.471.000,00
8	3020104001	Sepeda Motor	61	1.527.934.000,00
9	3020105001	Mobil Ambulance	1	294.870.000,00
10	3030101018	Mesin Kompresor	2	11.000.000,00
11	3030304010	Channel Converter	2	14.035.000,00
12	3050102007	Mesin Penghitung Uang	7	70.350.000,00
13	3050104001	Lemari Besi/Metal	47	210.767.228,00
14	3050104002	Lemari Kayu	271	1.099.636.754,00
15	3050104003	Rak Besi	62	163.018.567,00
16	3050104004	Rak Kayu	37	306.054.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
17	3050104005	Filing Cabinet Besi	209	781.472.380,00
18	3050104007	Brandkas	9	89.681.700,00
19	3050104020	Lemari Display	1	4.176.930,00
20	3050105001	Tabung Pemadam Api	81	210.190.000,00
21	3050105002	Hydrant	1	240.046.833,00
22	3050105004	Fire Alarm	1	369.170.263,00
23	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	103	455.994.865,00
24	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2	184.800.000,00
25	3050105010	White Board	21	22.125.000,00
26	3050105015	Alat Penghancur Kertas	36	62.032.549,00
27	3050105017	Mesin Absensi	19	112.341.640,00
28	3050105039	Display	7	80.800.000,00
29	3050105048	LCD Projector/Infocus	60	530.184.124,00
30	3050105053	Acces Control System	2	4.900.000,00
31	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	8	391.446.500,00
32	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	27	156.076.285,00
33	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	49.062.000,00
34	3050105081	Papan Pengumuman	6	16.117.200,00
35	3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	2	101.140.000,00
36	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	12	114.348.474,00
37	3050201002	Meja Kerja Kayu	615	1.579.188.128,00
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	440	710.847.753,00
39	3050201004	Kursi Kayu	250	99.158.860,00
40	3050201005	Sice	137	853.433.900,00
41	3050201008	Meja Rapat	64	527.709.234,00
42	3050201009	Meja Komputer	4	2.475.000,00
43	3050201010	Tempat Tidur Besi	2	8.900.000,00
44	3050201011	Tempat Tidur Kayu	3	25.197.000,00
45	3050201014	Meja Resepsionis	4	46.244.021,00
46	3050201016	Kasur/Spring Bed	15	78.634.500,00
47	3050201018	Meja Makan Besi	6	59.718.000,00
48	3050201019	Meja Makan Kayu	4	13.750.000,00
49	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	664	705.068.600,00
50	3050201022	Partisi	3	5.594.400,00
51	3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	5	7.260.000,00
52	3050201028	Workstation	347	1.799.930.000,00
53	3050201033	Sofa	16	149.283.221,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
54	3050202003	Jam Elektronik	8	600.000,00
55	3050202004	Control Clock	16	67.925.000,00
56	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	28.700.000,00
57	3050203004	Mesin Cuci	1	2.209.100,00
58	3050203005	Air Cleaner	15	164.032.000,00
59	3050204001	Lemari Es	21	81.547.500,00
60	3050204002	A.C. Sentral	29	286.013.955,00
61	3050204004	A.C. Split	224	2.215.661.521,00
62	3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	476.776.146,00
63	3050204006	Kipas Angin	2	2.145.000,00
64	3050204007	Exhaust Fan	20	14.490.000,00
65	3050205002	Kompas Gas (Alat Dapur)	2	700.000,00
66	3050205008	Kitchen Set	1	29.496.141,00
67	3050205009	Tabung Gas	4	2.600.000,00
68	3050206002	Televisi	36	830.191.429,00
69	3050206005	Amplifier	2	6.490.000,00
70	3050206007	Loudspeaker	8	9.010.000,00
71	3050206008	Sound System	4	192.995.275,00
72	3050206012	Wireless	9	3.300.000,00
73	3050206014	Microphone	10	50.260.700,00
74	3050206016	Mic Conference	108	637.829.500,00
75	3050206019	Stabilisator	1	54.848.750,00
76	3050206020	Camera Video	2	71.867.500,00
77	3050206030	Tiang Bendera	11	124.000.000,00
78	3050206035	Kaca Hias	1	3.163.500,00
79	3050206036	Dispenser	35	84.543.000,00
80	3050206037	Mimbar/Podium	4	126.543.016,00
81	3050206042	Lambang Instansi	12	237.025.500,00
82	3050206046	Handy Cam	29	174.120.000,00
83	3050206056	Karpet	41	57.672.990,00
84	3050206058	Gordy/Kray	12	253.496.250,00
85	3050206069	Lampu Belajar	1	4.852.000,00
86	3050206071	Kabel	11	73.322.912,00
87	3050206072	Lampu	15	77.196.144,00
88	3050206080	Bracket Standing Peralatan	18	109.041.447,00
89	3050206084	Lampu Dinding	5	29.826.810,00
90	3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	7	18.943.260,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
91	3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	68.135.954,00
92	3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	7	301.753.302,00
93	3060101002	Audio Mixing Portable	2	50.556.000,00
94	3060101036	Microphone/Wireless MIC	16	51.604.000,00
95	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	167.410.000,00
96	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	8	3.109.480,00
97	3060101081	Celling Mount Bracket	9	5.000.000,00
98	3060101085	Cable	7	75.762.000,00
99	3060101088	Voice Recorder	60	9.182.950,00
100	3060101098	Mixer Sound Sistem	1	8.885.550,00
101	3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	18.500.000,00
102	3060102015	Video Mixer	3	70.492.400,00
103	3060102034	Teleprompter	1	1.445.900,00
104	3060102045	Tripod Camera	19	84.574.265,00
105	3060102055	Lighting Stand Tripod	1	840.000,00
106	3060102060	Camera Film	1	29.352.785,00
107	3060102061	Lensa Kamera	17	354.780.610,00
108	3060102068	Film Sound Recorder	1	10.225.297,00
109	3060102072	Camera Adaptor	1	6.468.000,00
110	3060102118	Head Set	15	37.721.400,00
111	3060102128	Camera Digital	44	662.958.200,00
112	3060102129	Tas Kamera	10	22.987.780,00
113	3060102130	Lampu Blitz Kamera	10	13.968.000,00
114	3060102132	Video Conference	8	681.157.998,00
115	3060102135	LCD Monitor	25	2.705.462.955,00
116	3060102140	Audio Converter	1	7.700.000,00
117	3060102159	Clipp On	4	21.880.000,00
118	3060102160	Computer Editing	1	16.818.416,00
119	3060102165	Camera Conference	24	274.823.400,00
120	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	3	221.967.564,00
121	3060199999	Alat Studio Lainnya	5	64.269.001,00
122	3060201003	Pesawat Telephone	7	5.874.242,00
123	3060201006	Handy Talky (HT)	42	169.100.000,00
124	3060201010	Facsimile	17	7.150.000,00
125	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	11	488.462.218,00
126	3060209010	Mobile Gateway	1	5.105.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
127	3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	35	7.282.275,00
128	3060318001	Dummy Load Pendingin Udara	5	34.952.500,00
129	3070101001	Sterilisator	1	3.500.000,00
130	3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	1.540.000,00
131	3070101005	Tensimeter	7	16.406.500,00
132	3070101007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	2.596.000,00
133	3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	1.210.000,00
134	3070101026	Tabung O2	1	2.150.000,00
135	3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	4	6.941.000,00
136	3070101065	Examination Table	1	5.852.000,00
137	3070101097	Lemari Obat (Kaca)	4	74.110.000,00
138	3070101127	Kursi Dorong	7	6.890.372,00
139	3070101155	UV Sterilizer	1	56.595.000,00
140	3070101158	Vena Sectie Set	1	2.596.000,00
141	3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2	9.570.000,00
142	3070102002	Dental Unit	2	156.750.000,00
143	3070102004	Air Set Airomatik	1	7.810.000,00
144	3070102005	Dental Hand Instruments Set	1	13.193.600,00
145	3070102006	Oral Surgical Set	2	784.000,00
146	3070102008	Aero Sterisator	1	88.385.000,00
147	3070102010	Infra Red	1	1.298.000,00
148	3070102011	Sendok Cetak	3	2.240.000,00
149	3070102015	Detal Sergion Set	1	1.364.000,00
150	3070102019	Portable Dental Unit	1	2.420.000,00
151	3070102020	Dental Ultra Sonic	1	2.750.000,00
152	3070102024	Airimatik 205 Dental Unit	1	22.000.000,00
153	3070102032	Bracket Holder	2	97.350.000,00
154	3070102034	Hand Piece	2	15.820.000,00
155	3070102036	Cirto Jec	1	6.600.000,00
156	3070102037	Contra Angel	2	5.720.000,00
157	3070102045	Electro Lyte Polisher	1	5.432.000,00
158	3070102047	Engine Portable Lengkap	1	18.150.000,00
159	3070102053	Hendpiece Airbin 400.000 Rpm	2	18.480.000,00
160	3070102067	Light Curing Unit	2	15.455.000,00
161	3070102069	Mouth Piece	1	3.080.000,00
162	3070102084	Prostetic Engine	1	2.200.000,00
163	3070102092	Tang Clamer	1	644.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
164	3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	3	29.740.000,00
165	3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	2	22.275.000,00
166	3070104072	Electric Table	1	5.500.000,00
167	3070104086	Heacting Set	1	5.200.000,00
168	3070104129	Micro Surgery Set	1	2.680.000,00
169	3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	1	1.342.000,00
170	3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	2.700.000,00
171	3070105106	Oxygen Therapy Set	1	11.850.000,00
172	3070106150	X-Ray Viewer	1	2.750.000,00
173	3070108024	Nebulizer	1	22.000.000,00
174	3070110033	HB Meter	1	3.784.000,00
175	3070110049	Meja Periksa 200X90X100 cc	1	26.880.000,00
176	3070110053	Pneumatic Torniquite	2	650.000,00
177	3070114006	Heart Rate Monitor	1	1.298.000,00
178	3070124004	Icu Bed Electric	1	49.850.000,00
179	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	10.598.500,00
180	3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	1	6.382.500,00
181	3070205999	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	5	27.500.000,00
182	3090404030	Cellphone Video Camera	1	27.204.835,00
183	3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	1	199.201.600,00
184	3100102001	P.C Unit	727	6.369.254.156,00
185	3100102002	Lap Top	102	924.822.000,00
186	3100102003	Note Book	341	5.564.885.051,00
187	3100102009	Tablet PC	48	714.786.320,00
188	3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	182.600.000,00
189	3100201012	Hard Disk	27	95.920.000,00
190	3100201017	Panaboard	4	48.400.000,00
191	3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	5.925.400,00
192	3100203002	Monitor	4	18.602.820,00
193	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	483	1.184.361.545,00
194	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	61	473.576.850,00
195	3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	1	2.064.480,00
196	3100203017	External/ Portable Hardisk	68	217.458.268,00
197	3100204001	Server	40	10.469.036.802,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
198	3100204002	Router	103	421.684.123,00
199	3100204003	Hub	4	11.294.000,00
200	3100204014	Rak Server	7	220.818.640,00
201	3100204021	Kabel UTP	1	12.650.000,00
202	3100204023	Wireless Access Point	67	673.343.000,00
203	3100204024	Switch	12	200.981.000,00
204	3100204027	Rackmount	2	110.727.925,00
205	3100204035	Modul Untuk Penambahan di Core Switch	8	52.800.000,00
206	3100204039	CCTV Camera, 12v	2	2.530.800,00
207	3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	2	1.590.000,00
208	3150302014	Tenda Pelampung	1	194.813.750,00
209	3150401012	Voice Recorder	2	2.100.080,00
210	3170119004	Jet Pump	4	58.180.000,00
211	3170119019	Blower	4	20.690.000,00
212	3190103009	Argocycle	1	11.495.000,00
Total			7.143	79.741.035.906,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	75.977.010.461,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	10.480.193.936,00
Transfer Masuk	Rp	1.805.785.888,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	1.293.885.452,00
Perolehan Lainnya	Rp	1.541.751.670,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	388.642.967,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(386.267.567,00)
Transfer Keluar	Rp	(7.041.721.867,00)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(1.293.885.452,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(3.024.359.582,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	79.741.035.906,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(57.174.160.894,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	22.566.875.012,00

Penjelasan Mutasi:

Mutasi Tambah

1. Pembelian sebesar Rp10.480.193.936,00 merupakan pembelian yang diperoleh dari akun:

Tabel 52. Pembelian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Akun

No	Kode	Nama	Jumlah (Rp)
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.203.384.136,00
2	536111	Belanja Modal Lainnya	2.282.182.200,00
Total			10.485.566.336,00

Tabel 53. Pembelian Peralatan dan Mesin

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	25	872.250.000,00
2	3030211008	Cermin Besar	1	3.163.500,00
3	3050102007	Mesin Penghitung Uang	4	45.600.000,00
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	9	17.853.000,00
5	3050104002	Lemari Kayu	7	56.195.766,00
6	3050104003	Rak Besi	2	5.918.300,00
7	3050104004	Rak Kayu	1	1.299.000,00
8	3050105015	Alat Penghancur Kertas	12	24.645.250,00
9	3050105017	Mesin Absensi	10	21.336.000,00
10	3050105048	LCD Projector/Infocus	11	100.397.124,00
11	3050105053	Acces Control System	2	4.900.000,00
12	3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	21.978.000,00
13	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	49.062.000,00
14	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	1	2.199.000,00
15	3050201003	Kursi Besi/Metal	75	162.102.500,00
16	3050201004	Kursi Kayu	1	11.322.000,00
17	3050201005	Sice	6	227.328.000,00
18	3050201008	Meja Rapat	1	4.995.000,00
19	3050201011	Tempat Tidur Kayu	3	25.197.000,00
20	3050201016	Kasur/Spring Bed	1	7.437.000,00
21	3050201018	Meja Makan Besi	6	59.718.000,00
22	3050201022	Partisi	3	5.594.400,00
23	3050201033	Sofa	6	53.533.400,00
24	3050203004	Mesin Cuci	1	2.209.100,00
25	3050203005	Air Cleaner	2	49.506.000,00
26	3050204001	Lemari Es	1	2.830.000,00
27	3050204002	A.C. Sentral	1	109.609.725,00
28	3050204004	A.C. Split	10	106.168.290,00
29	3050206002	Televisi	18	344.063.349,00
30	3050206014	Microphone	9	58.325.700,00
31	3050206020	Camera Video	1	41.287.500,00
32	3050206036	Dispenser	8	18.050.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
33	3050206037	Mimbar/Podium	1	18.028.016,00
34	3050206058	Gordyin/Kray	2	66.183.750,00
35	3050206069	Lampu Belajar	2	3.774.000,00
36	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	96.570.000,00
37	3060101098	Mixer Sound Sistem	1	8.885.550,00
38	3060102045	Tripod Camera	4	13.260.060,00
39	3060102060	Camera Film	1	29.352.785,00
40	3060102061	Lensa Kamera	8	269.161.560,00
41	3060102118	Head Set	4	30.791.400,00
42	3060102128	Camera Digital	3	151.470.000,00
43	3060102129	Tas Kamera	3	7.212.780,00
44	3060102132	Video Conference	4	74.000.000,00
45	3060102159	Clipp On	4	21.880.000,00
46	3060199999	Alat Studio Lainnya	1	3.375.001,00
47	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	5	193.588.218,00
48	3070104108	Kursi Zeis	4	5.328.000,00
49	3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	1	6.382.500,00
50	3080113081	TV Monitor	1	24.326.500,00
51	3080141194	Personal Computer	1	13.320.000,00
52	3090402031	Kamera Digital	4	67.732.200,00
53	3090404030	Cellphone Video Camera	1	27.204.835,00
54	3100101002	Mini Komputer	1	14.985.000,00
55	3100102001	P.C Unit	19	393.836.266,00
56	3100102002	Lap Top	47	1.044.473.152,00
57	3100102003	Note Book	173	2.598.695.999,00
58	3100102009	Tablet PC	2	13.666.320,00
59	3100203002	Monitor	4	18.602.820,00
60	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	375.735.320,00
61	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	85.920.000,00
62	3100203017	External/ Portable Hardisk	1	1.665.000,00
63	3100204001	Server	2	2.282.182.200,00
64	3100204039	CCTV Camera, 12v	2	2.530.800,00
Total			639	10.480.193.936,00

Selisih antara pembelian belanja modal sebesar Rp10.485.566.336,00 dengan pencatatan peralatan dan mesin sebesar Rp10.480.193.936,00

disebabkan adanya pencatatan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi (ekstrakomptabel) sebesar Rp5.372.400,00, yang terdiri dari :

Tabel 54. Pembelian Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050206012	Wireless	1	133.200,00
2	3090402022	Adaptor PA-FA	2	777.000,00
3	3100202017	Speaker Komputer	1	555.000,00
4	3060102045	Tripod Camera	2	999.000,00
5	3060101005	Audio Amplifier	1	555.000,00
6	3100204013	Terminal	2	133.200,00
7	3100203017	External/ Portable Hardisk	2	888.000,00
8	3050206071	Kabel	6	1.332.000,00
Total			17	5.372.400,00

- Transfer Masuk sebesar Rp1.805.785.888,00 merupakan perolehan peralatan mesin berupa 2 (dua) Unit Elevator / Lift sebesar Rp1.805.785.888,00 yang diperoleh dari Ditjen Perbendaharaan.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.293.885.452,00 merupakan perubahan kode barang peralatan dan mesin atas transaksi reklasifikasi keluar yang terdiri dari:

Tabel 55. Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	5.328.000,00
2	3050206002	Televisi	1	24.326.500,00
3	3050206035	Kaca Hias	1	3.163.500,00
4	3060102128	Camera Digital	4	67.732.200,00
5	3060199999	Alat Studio Lainnya	1	16.095.000,00
6	3100102001	P.C Unit	6	117.782.100,00
7	3100102003	Note Book	48	1.059.458.152,00
Total			65	1.293.885.452,00

- Perolehan lainnya sebesar Rp1.541.751.670,00 merupakan peralatan dan mesin yang diperoleh dari Bank Negara Indonesia (BNI) berupa 1 (satu) unit Mobil Ambulance sebesar Rp294.870.000,00 dan adanya koreksi input atas akun belanja barang yang diterima sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.246.881.670,00.

Tabel 56. Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	3020105001	Mobil Ambulance	1	294.870.000,00	Reward Bank

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	3050104002	Lemari Kayu	4	18.180.912,00	kesalahan pencatatan ATR
3	3050104003	Rak Besi	5	23.820.267,00	kesalahan pencatatan ATR
4	3050104005	Filing Cabinet Besi	15	53.829.450,00	kesalahan pencatatan ATR
5	3050104020	Lemari Display	1	4.176.930,00	kesalahan pencatatan ATR
6	3050105081	Papan Pengumuman	6	16.117.200,00	kesalahan pencatatan ATR
7	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	10	105.697.974,00	kesalahan pencatatan ATR
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	16.323.327,00	kesalahan pencatatan ATR
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	47	101.106.703,00	kesalahan pencatatan ATR
10	3050201004	Kursi Kayu	6	37.768.860,00	kesalahan pencatatan ATR
11	3050201008	Meja Rapat	1	9.543.447,00	kesalahan pencatatan ATR
12	3050201014	Meja Resepsionis	1	7.194.021,00	kesalahan pencatatan ATR
13	3050201033	Sofa	10	95.749.821,00	kesalahan pencatatan ATR
14	3050204004	A.C. Split	14	314.315.703,00	kesalahan pencatatan ATR
15	3050205008	Kitchen Set	1	29.496.141,00	kesalahan pencatatan ATR
16	3050206002	Televisi	4	71.301.960,00	kesalahan pencatatan ATR
17	3050206036	Dispenser	5	22.061.250,00	kesalahan pencatatan ATR

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)	Keterangan
18	3050206056	Karpet	1	26.649.990,00	kesalahan pencatatan ATR
19	3050206058	Gordyin/Kray	10	187.312.500,00	kesalahan pencatatan ATR
20	3050206072	Lampu	10	57.465.144,00	kesalahan pencatatan ATR
21	3050206084	Lampu Dinding	5	29.826.810,00	kesalahan pencatatan ATR
22	3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	7	18.943.260,00	kesalahan pencatatan ATR
Total			168	1.541.751.670,00	

- Koreksi Pencatatan Nilai bertambah sebesar Rp388.642.967,00 merupakan koreksi atas kekurangan pencatatan nilai aset peralatan dan mesin.

Tabel 57. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin Bertambah per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	3060102128	Camera Digital	32.967.000,00
2	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	155.594.416,00
3	3100102001	P.C Unit	14.918.400,00
4	3100102003	Note Book	185.163.151,00
Total			388.642.967,00

Mutasi Kurang

- Koreksi Pencatatan Nilai berkurang sebesar Rp386.267.567,00 merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan pembukuan berupa kelebihan dan/atau kesalahan pencatatan, yang terdiri dari:

Tabel 58. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin Berkurang per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	3060102128	Camera Digital	32.190.000,00
2	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	155.594.416,00
3	3100102001	P.C Unit	13.320.000,00

No	Kode	Nama Barang	Jumlah (Rp)
4	3100102003	Note Book	185.163.151,00
Total			386.267.567,00

2. Transfer Keluar sebesar Rp7.041.721.867,00 merupakan merupakan pelimpahan aset dari Bawaslu ke Bawaslu Provinsi serta ke Instansi lainnya yang terdiri dari:

Tabel 59. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin Bertambah per 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)	Di Kirim Ke
1	3020101001	Sedan	1	589.600.000,00	DKPP
2	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	2.475.550.000,00	DKPP
3	3020104001	Sepeda Motor	6	113.802.500,00	DKPP
4	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	6.603.396,00	DKPP
5	3050104002	Lemari Kayu	8	99.550.000,00	DKPP
6	3050104005	Filing Cabinet Besi	47	140.101.465,00	DKPP
7	3050104007	Brandkas	1	6.941.300,00	DKPP
8	3050105010	White Board	6	6.000.000,00	DKPP
9	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	8.550.000,00	DKPP
10	3050105039	Display	4	24.668.000,00	DKPP
11	3050105048	LCD Projector/Infocus	4	61.154.000,00	DKPP
12	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	39.422.955,00	DKPP
13	3050201002	Meja Kerja Kayu	83	228.057.080,00	DKPP
14	3050201003	Kursi Besi/Metal	16	68.420.000,00	DKPP
15	3050201008	Meja Rapat	5	231.550.000,00	DKPP
16	3050201019	Meja Makan Kayu	1	1.250.000,00	DKPP
17	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	79	121.279.350,00	DKPP
18	3050201028	Workstation	2	139.400.000,00	DKPP
19	3050204001	Lemari Es	3	8.437.500,00	DKPP
20	3050204004	A.C. Split	40	342.501.818,00	DKPP
21	3050206002	Televisi	7	33.800.000,00	DKPP
22	3050206014	Microphone	7	55.000.924,00	DKPP
23	3050206036	Dispenser	1	1.500.000,00	DKPP
24	3050206046	Handy Cam	2	17.094.000,00	DKPP
25	3050206080	Bracket Standing Peralatan	2	21.458.000,00	DKPP
26	3060102045	Tripod Camera	4	10.642.500,00	DKPP

No	Kode	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)	Di Kirim Ke
27	3060102118	Head Set	2	2.282.280,00	DKPP
28	3060102128	Camera Digital	8	160.695.531,00	DKPP
29	3060102130	Lampu Blitz Kamera	1	2.498.135,00	DKPP
30	3060102131	Lensa Filter	1	555.450,00	DKPP
31	3060102135	LCD Monitor	2	170.695.000,00	DKPP
32	3060201010	Facsimile	3	14.700.000,00	DKPP
33	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	5	69.876.500,00	DKPP
34	3070120010	Kursi Gynecologi	1	99.000.000,00	DKPP
35	3100102001	P.C Unit	67	875.642.246,00	DKPP
36	3100102002	Lap Top	5	91.043.119,00	DKPP
37	3100201017	Panaboard	1	16.500.000,00	DKPP
38	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	97.906.746,00	DKPP
39	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	27.617.747,00	DKPP
40	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	3.994.325,00	DKPP
41	3100204024	Switch	4	342.450.000,00	DKPP
42	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	213.930.000,00	Prov. Banten
Total			491	7.041.721.867,00	

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.293.885.452,00 merupakan perubahan kode barang peralatan dan mesin yang terdiri dari:

Tabel 60. Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3090402031	Kamera Digital	4	67.732.200,00
2	3100101002	Mini Komputer	1	14.985.000,00
3	3100102002	Lap Top	47	1.044.473.152,00
4	3030211008	Cermin Besar	1	3.163.500,00
5	3050206014	Microphone	1	16.095.000,00
6	3070104108	Kursi Zeis	4	5.328.000,00
7	3080113081	TV Monitor	1	24.326.500,00
8	3080141194	Personal Computer	1	13.320.000,00
9	3050206002	Televisi	5	104.462.100,00
Total			65	1.293.885.452,00

4. Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp3.024.359.582,00 merupakan aset-aset yang rusak berat, usang atau hilang, yang berada di Satker Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 61. Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3020104001	Sepeda Motor	8	163.551.000,00
2	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	2	6.270.000,00
3	3050104002	Lemari Kayu	1	29.812.750,00
4	3050104005	Filing Cabinet Besi	1	250.000,00
5	3050104020	Lemari Display	3	15.774.000,00
6	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	58.410.000,00
7	3050105028	Overhead Projector	1	16.830.000,00
8	3050105029	Hand Metal Detector	2	8.900.000,00
9	3050105038	Laser Pointer	2	977.500,00
10	3050105044	Mesin Laminating	2	1.900.000,00
11	3050105048	LCD Projector/Infocus	6	93.211.000,00
12	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	90.000.000,00
13	3050201005	Sice	1	7.590.000,00
14	3050201008	Meja Rapat	1	8.800.000,00
15	3050204002	A.C. Sentral	8	193.230.000,00
16	3050206001	Radio	1	3.300.000,00
17	3050206002	Televisi	23	270.850.000,00
18	3050206007	Loudspeaker	1	41.800.000,00
19	3050206008	Sound System	2	9.421.500,00
20	3050206014	Microphone	1	7.150.132,00
21	3050206016	Mic Conference	30	209.654.500,00
22	3060101037	Microphone/Boom Stand	1	340.000,00
23	3060101040	Power Supply Microphone	1	38.439.280,00
24	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	3	5.148.000,00
25	3060101088	Voice Recorder	4	4.884.000,00
26	3060102033	Camera Wall Box	1	13.200.000,00
27	3060102061	Lensa Kamera	1	6.930.000,00
28	3060102072	Camera Adaptor	1	1.705.000,00
29	3060102128	Camera Digital	2	112.942.060,00
30	3060102145	Connectors	3	6.600.000,00
31	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	2	6.710.000,00
32	3060201001	Telephone (PABX)	1	45.485.000,00
33	3060201015	Telepon Lapangan	10	69.615.000,00
34	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	17	176.606.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
35	3060205003	Unit Tranceiver UHF Stationary	4	42.800.000,00
36	3060323016	Audio Monitor	2	9.000.000,00
37	3060334009	Signal Velvoger Grounding	1	16.445.000,00
38	3060347004	Charger	2	970.000,00
39	3100102001	P.C Unit	15	224.124.500,00
40	3100102002	Lap Top	10	180.950.000,00
41	3100102003	Note Book	15	414.210.400,00
42	3100201012	Hard Disk	1	44.000.000,00
43	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	23.650.000,00
44	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	13.422.300,00
45	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	37.545.500,00
46	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	11.660.000,00
47	3100204014	Rak Server	3	52.195.000,00
48	3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	196.900.000,00
49	3150401012	Voice Recorder	6	6.400.160,00
50	3190103010	Treadmill	1	23.800.000,00
Total			223	3.024.359.582,00

C.9 Gedung Dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp44.556.760.764,00 dan Rp33.446.055.684,00. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.556.760.764,00, terdiri dari:

**Tabel 62. Perbandingan Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

No	Kode	Nama	Jumlah	
			31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	22.841.562.074,00	13.646.482.000,00
2	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	92.000.000,00	0,00
3	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	255.930.000,00	0,00
4	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	54.000.000,00	0,00

No	Kode	Nama	Jumlah	
			31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5	4010112004	Bangunan Kantin	92.000.000,00	0,00
6	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	216.000.000,00	216.000.000,00
7	4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	99.494.000,00	99.494.000,00
8	4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1.033.861.000,00	0,00
9	4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	18.840.466.000,00	18.840.469.684,00
10	4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	60.300.000,00	0,00
11	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	575.277.690,00	247.740.000,00
12	4040104001	Pagar Permanen	182.250.000,00	182.250.000,00
13	4040104002	Pagar Semi Permanen	213.620.000,00	213.620.000,00
Total			44.556.760.764,00	33.446.055.684,00

Tabel 63. Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022

No	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	Apartemen Puri Casablanca, DKI Jakarta	27 unit	18.840.466.000,00
2	Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	400 M ²	247.740.000,00
3	Jl. K.H Wahid Hasyim No. 117 , Kebong Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	1029 M ²	10.661.982.000,00
4	Jalan Diponegoro No. 35, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara	590 M ²	708.000.000,00
5	Gedung Set. Bawaslu Provinsi Sultra		2.612.364.000,00
6	Pagar Besi Tanah Bawaslu Balangan		213.620.000,00
7	Kantor Bawaslu Kab. Luwu Timur		161.880.000,00
8	Kantor Bawaslu Kab. Bima Jl. Ksatria Kel. Penatoi,	311 M ²	482.212.000,00

No	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
	Kec. Mpunda, Kota Bima		
9	Kantor Bawaslu Kab. Tebo, Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.11 Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo	600 M2	198.788.000,00
10	Jl. Bantilan No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulteng	242 M2	178.634.000,00
11	Jl. Pertanian, Kel. Kabulambulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton	360 M2	756.303.074,00
12	Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato	56 M2	304.493.690,00
13	Jl. Santoso No. 19 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong	556 M2	445.188.000,00
14	Jl. Pramuka RT. 19 Kel. Muara Bulian, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari	200 M2	564.907.000,00
15	Jl. Pramuka No. 11 Kel. Lolong Belanti Padang Utara, Sumatera Barat		2.299.627.000,00
16	Jl. Dr. Ratulangi No. 73 Maros	252 M2	200.800.000,00
17	Jl. Beringin No. D06 Kel. Lompio Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut	312 M2	581.200.000,00
18	Jl. Moh. Yamin NO. 17-19 Renon Denpasar	330 M2	1.251.349.000,00
19	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	1.124 M2	2.259.116.000,00
20	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	72 M2	92.000.000,00
21	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	54 M2	92.000.000,00
22	Jl. A. Yani No. 72 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya	205 M2	255.930.000,00
23	Jl.Raya Padang Ratu kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah	254 M2	114.300.000,00
24	Desa Rojowinangun, Kec. Kota Gede, Kota Yogyakarta	300 M2	1.033.861.000,00
Total			44.556.760.764,00

Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	33.446.055.684,00
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk	Rp	1.468.425.000,00
Hibah Masuk	Rp	9.642.283.764,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	304.493.690,00

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Keluar	Rp	(304.493.690,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(3.684,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	44.556.760.764,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(5.621.238.862,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	38.935.521.902,00

Penjelasan Mutasi**Tambah**

- Transfer Masuk sebesar Rp1.468.425.000,00 merupakan perolehan aset dari entitas lain yang terdiri dari:
 - Perolehan aset Gedung dan bangunan dari Satker 119919 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melalui BAST Nomor BA-13/MK.1/SJ.7/2022 Tgl 29 Maret 2022 berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas sebesar Rp155.590.000,00 dan 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen sebesar Rp23.044.000,00 yang berlokasi di Jl. Bantilan No. 22 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulteng;
 - Perolehan aset Gedung dan bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya melalui BAST Nomor BA-30/MK.1/SJ.7/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 yang berlokasi Jl. A. Yani No. 72 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya seluas 205 M2 sebesar Rp255.930.000,00;
 - Perolehan Aset Gedung dan bangunan dari Badan Pusat Statistik yang berlokasi di Desa Rojowinangun, Kec. Kota Gede, Kota Yogyakarta seluas 300 M2 sebesar Rp1.033.861.000,00.
- Hibah masuk sebesar Rp9.642.283.764,00 merupakan hibah gedung dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari:

**Tabel 64. Hibah Masuk Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi Hibah	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
1	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kota Bima	Kantor Bawaslu Kab. Bima Jl. Ksatria Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima	311 M2	482.212.000,00
2	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Tebo	Kantor Bawaslu Kab. Tebo, Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.11 Kec. Tebo	600 M2	198.788.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi Hibah	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
				Tengah, Kab. Tebo		
3	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Buton	Jl. Pertanian, Kel. Kabulambulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton	360 M2	756.303.074,00
4	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemda. Kab. Pohuwato	Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato	56 M2	304.493.690,00
5	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	Jl. Santoso No. 19 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong	556 M2	445.188.000,00
6	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Batanghari	Jl. Pramuka RT. 19 Kel. Muara Bulian, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari	200 M2	564.907.000,00
7	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemda Prov. Sumatera Barat	Jl. Pramuka No. 11 Kel. Lolong Belanti Padang Utara, Sumatera Barat		2.299.627.000,00
8	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Maros	Jl. Dr. Ratulangi No. 73 Maros	252 M2	200.800.000,00
9	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Banggai Laut	Jl. Beringin No. D06 Kel. Lompio Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut	312 M2	581.200.000,00
10	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Prov. Bali	Jl. Moh. Yamin NO. 17-19 Renon Denpasar	330 M2	1.251.349.000,00
11	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	1.124 M2	2.259.116.000,00

No	Kode Satker	Nama Satker	Pemberi Hibah	Lokasi	Luas	Nilai (Rp)
12	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	72 M2	92.000.000,00
13	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu (Sebelah kantor keluaran Serasan Jaya)	54 M2	92.000.000,00
14	500100	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	Jl. Raya Padang Ratu kec. Gunung Sugih, Lampung Tengah	254 M2	114.300.000,00
Total						9.642.283.764,00

3. Mutasi tambah dan kurang berupa transfer masuk dan transfer keluar merupakan koreksi atas gedung dan bangunan atas Hibah dari Pemerintah Kabupaten Puhwato untuk Rumas Dinas Bawaslu Kabupaten Puhwato seluas 56 M2 yang beralamat di Desa Puhwato Timur Kecamatan Marisa Kab. Puhwato senilai Rp304.493.690,00 yang semula tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen.
4. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp3.684,00 merupakan koreksi atas aset Gedung apartemen Casablanca pada Satker Bawaslu.

C.10 Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp569.111.000,00 dan Rp569.111.000,00.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp569.111.000,00, terdiri dari:

**Tabel 65. Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

No	Kode	Uraian	Jumlah	
			31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	467.443.500,00	467.443.500,00
2	5030603999	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya	7.667.000,00	7.667.000,00
3	5031001003	Instalasi Building Automation System (BAS)	94.000.500,00	94.000.500,00
Total			569.111.000,00	569.111.000,00

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	569.111.000,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	00,00
Mutasi kurang:	Rp	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	569.111.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(212.682.286,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	356.428.714,00

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp11.387.350.252,00 dan Rp7.672.270.350,00. Aset tetap lainnya sebesar Rp11.387.350.252,00 terdiri dari:

**Tabel 66. Perbandingan Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

No	Kode	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		ASET TETAP RENOVASI		
1	60703	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	7.365.099.757,00	3.306.922.654,00
2	60705	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	2.886.896.304,00	2.886.896.304,00

No	Kode	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		ASET TETAP LAINNYA		
3	60101	Bahan Perpustakaan Tercetak	233.567.240,00	313.331.392,00
4	60102	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	667.730.000,00	967.520.000,00
5	60103	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	36.456.951,00	0,00
6	60201	Barang Bercorak Kesenian	197.600.000,00	197.600.000,00
Total			11.387.350.252,00	7.672.270.350,00

**Tabel 67. Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Tetap dalam Renovasi		
A	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	13	7.365.099.757,00
B	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	2	2.886.896.304,00
	Jumlah	15	10.251.996.061,00
2	Aset Tetap Lainnya		
A	Bahan Perpustakaan Tercetak	166	233.567.240,00
B	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	13	667.730.000,00
C	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4	36.456.951,00
D	Barang Bercorak Kesenian	20	197.600.000,00
	Jumlah	203	1.135.354.191,00
Total		218	11.387.350.252,00

Aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	7.672.270.350,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	2.959.501.305,00
Perolehan Lainnya	Rp	36.456.951,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	2.222.947.886,00
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(1.105.622.848,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(398.203.392,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	11.387.350.252,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(197.600.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	11.189.750.252,00

Penjelasan Mutasi:

1. Pembelian aset tetap lainnya sebesar Rp2.959.501.305,00 diperoleh dari belanja akun modal lainnya, yang dipergunakan untuk :

**Tabel 68. Pembelian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022**

No	Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Jumlah (Rp)
1	500100	Badan Pengawas Pemilu	Buku Produk-Produk Hukum (perpustakaan)	18.649.240,00
2	500100	Badan Pengawas Pemilu	Renovasi Gedung Bawaslu	95.904.000,00
3	500100	Bawaslu	Renovasi Lobby Lantai 5	196.596.540,00
4	500100	Bawaslu	Renovasi Lt.25 Puslitbangdiklat	60.939.000,00
5	500100	Bawaslu	Renovasi Mechanical Electrical Lobby Lantai 5	63.738.420,00
6	500100	Bawaslu	Renovasi Toilet Lt. 5	194.319.930,00
7	500100	Bawaslu	Renovasi dalam bentuk Sistem dan perbaikan kualitas Kelistrikan Bawaslu	2.204.138.100,00
8	500100	Bawaslu	Revitalisasi Kantin	31.338.075,00
9	500100	Bawaslu	Renovasi Ruang Pimpinan Lt. 2	93.878.000,00
Total				2.959.501.305,00

2. Perolehan Lainnya sebesar Rp36.456.951,00 merupakan sebuah lukisan yang diperoleh dari hasil koreksi belanja modal lainnya atas renovasi Gedung Lantai 2 Bawaslu.
3. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp2.222.947.886,00 merupakan renovasi Gedung kantor Bawaslu (Ruang Irtama).
4. Mutasi kurang berupa Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.105.622.848,00, terdiri dari:
 - 1) Aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal lainnya atas renovasi Gedung Lantai 2 Bawaslu semula dicatat sebagai ATR sebesar Rp9.596.727,00;

**Tabel 69. Koreksi Pencatatan ke Aset Peralatan dan Mesin (Ektrakomptabel)
Per 31 Desember 2022**

No	Kode	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	1	528.249,00
2	3050201003	Kursi Besi/Metal	4	3.832.608,00
3	3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	8	5.235.870,00
Total			13	9.596.727,00

- 2) Peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal lainnya atas renovasi Gedung Lantai 2 Bawaslu semula dicatat sebagai ATR sebesar Rp1.059.569.170,00;

**Tabel 70. Koreksi Pencatatan ke Aset Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel)
Per 31 Desember 2022**

No	Kode	Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050104002	Lemari Kayu	4	18.180.912,00
2	3050105081	Papan Pengumuman	6	16.117.200,00
3	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	10	105.697.974,00
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	16.323.327,00
5	3050201003	Kursi Besi/Metal	47	101.106.703,00
6	3050201004	Kursi Kayu	6	37.768.860,00
7	3050104003	Rak Besi	5	23.820.267,00
8	3050104005	Filing Cabinet Besi	15	53.829.450,00
9	3050104020	Lemari Display	1	4.176.930,00
10	3050206002	Televisi	4	71.301.960,00
11	3050201033	Sofa	10	95.749.821,00
12	3050204004	A.C. Split	14	314.315.703,00
13	3050205008	Kitchen Set	1	29.496.141,00
14	3050201008	Meja Rapat	1	9.543.447,00
15	3050201014	Meja Resepsionis	1	7.194.021,00
16	3050206036	Dispenser	5	22.061.250,00
17	3050206056	Karpet	1	26.649.990,00
18	3050206072	Lampu	10	57.465.144,00
19	3050206084	Lampu Dinding	5	29.826.810,00
20	3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	7	18.943.260,00
Total			157	1.059.569.170,00

- 3) Aset tetap lainnya berupa lukisan yang berasal dari belanja modal lainnya atas renovasi Gedung Lantai 2 Bawaslu semula dicatat sebagai ATR sebesar Rp36.456.951,00.

5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp398.203.392,00 merupakan penghentian aset yang sudah usang/rusak berat pada Satker Bawaslu yang terdiri 1 buah buku lainnya sebesar Rp98.413.392,00 dan 2 (dua) buah video sebesar Rp299.790.000,00.

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp63.205.682.042,00 dan Rp58.362.164.736,00.

Tabel 71. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	57.174.160.894,00	53.761.931.932,00
3	Gedung dan Bangunan	5.621.238.862,00	4.205.723.643,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.682.286,00	196.909.161,00
5	Aset Tetap Lainnya	197.600.000,00	197.600.000,00
Total		63.205.682.042,00	58.362.164.736,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Tabel 72. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	99.806.795.296,00	0,00	99.806.795.296,00
2	Peralatan dan Mesin	79.741.035.906,00	57.174.160.894,00	22.566.875.012,00
3	Gedung dan Bangunan	44.556.760.764,00	5.621.238.862,00	38.935.521.902,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	569.111.000,00	212.682.286,00	356.428.714,00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya	11.387.350.252,00	197.600.000,00	11.189.750.252,00
Total		236.061.053.218,00	63.205.682.042,00	172.855.371.176,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.205.682.042,00 secara detail sebagai berikut :

Tabel 73. Detail Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
131111	Tanah		144.914	99.806.795.296,00	0,00	99.806.795.296,00
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	700	1.544.900.000,00	0,00	1.544.900.000,00
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1.700	554.011.175,00	0,00	554.011.175,00
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	140.964	96.044.827.121,00	0,00	96.044.827.121,00
2010104006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	M2	1.120	79.200.000,00	0,00	79.200.000,00
2010104999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	M2	430	1.583.857.000,00	0,00	1.583.857.000,00
132111	Peralatan dan Mesin		4.644	79.741.035.906,00	(57.174.160.894,00)	22.566.875.012,00
3010302001	Elevator /Lift	Unit	5	3.136.250.929,00	(3.136.250.929,00)	0,00
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	1.487.750.000,00	(1.487.750.000,00)	0,00
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	2	40.982.363,00	(40.982.363,00)	0,00
3020101001	Sedan	Unit	10	4.659.450.000,00	(3.869.978.576,00)	789.471.424,00
3020101002	Jeep	Unit	1	498.000.000,00	(249.000.001,00)	248.999.999,00
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	590.150.000,00	(463.689.286,00)	126.460.714,00
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	33	12.206.471.000,00	(9.560.728.873,00)	2.645.742.127,00
3020104001	Sepeda Motor	Unit	56	1.527.934.000,00	(662.541.143,00)	865.392.857,00
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	294.870.000,00	(42.124.286,00)	252.745.714,00
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	11.000.000,00	(9.350.000,00)	1.650.000,00
3030304010	Channel Converter	Buah	1	14.035.000,00	(14.035.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	70.350.000,00	(29.310.000,00)	41.040.000,00
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	20	210.767.228,00	(123.525.915,00)	87.241.313,00
3050104002	Lemari Kayu	Buah	182	1.099.636.754,00	(583.056.382,00)	516.580.372,00
3050104003	Rak Besi	Buah	55	163.018.567,00	(112.053.856,00)	50.964.711,00
3050104004	Rak Kayu	Buah	22	306.054.000,00	(280.134.900,00)	25.919.100,00
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	195	781.472.380,00	(716.290.365,00)	65.182.015,00
3050104007	Brandkas	Buah	9	89.681.700,00	(85.832.200,00)	3.849.500,00
3050104020	Lemari Display	Buah	1	4.176.930,00	(417.693,00)	3.759.237,00
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	70	210.190.000,00	(210.190.000,00)	0,00
3050105002	Hydrant	Buah	1	240.046.833,00	(240.046.833,00)	0,00
3050105004	Fire Alarm	Buah	1	369.170.263,00	(258.419.184,00)	110.751.079,00
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	68	455.994.865,00	(402.899.906,00)	53.094.959,00
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	184.800.000,00	(147.840.000,00)	36.960.000,00
3050105010	White Board	Buah	14	22.125.000,00	(18.000.000,00)	4.125.000,00
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	28	62.032.549,00	(35.406.640,00)	26.625.909,00
3050105017	Mesin Absensi	Buah	18	112.341.640,00	(71.718.148,00)	40.623.492,00
3050105039	Display	Buah	7	80.800.000,00	(80.800.000,00)	0,00
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	38	530.184.124,00	(398.483.135,00)	131.700.989,00
3050105053	Acces Control System	Buah	2	4.900.000,00	(490.000,00)	4.410.000,00
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	7	391.446.500,00	(297.772.598,00)	93.673.902,00
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	24	156.076.285,00	(146.847.162,00)	9.229.123,00
3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	Buah	1	49.062.000,00	(4.906.200,00)	44.155.800,00
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	6	16.117.200,00	(1.611.720,00)	14.505.480,00
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	2	101.140.000,00	(80.912.000,00)	20.228.000,00
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	12	114.348.474,00	(17.241.200,00)	97.107.274,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	380	1.579.188.128,00	(1.343.212.526,00)	235.975.602,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	307	710.847.753,00	(399.436.579,00)	311.411.174,00
3050201004	Kursi Kayu	Buah	14	99.158.860,00	(24.693.286,00)	74.465.574,00
3050201005	Sice	Buah	75	853.433.900,00	(407.598.250,00)	445.835.650,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3050201008	Meja Rapat	Buah	35	527.709.234,00	(423.057.397,00)	104.651.837,00
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	2.475.000,00	(2.475.000,00)	0,00
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	2	8.900.000,00	(8.900.000,00)	0,00
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	3	25.197.000,00	(5.039.400,00)	20.157.600,00
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	46.244.021,00	(25.634.402,00)	20.609.619,00
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	10	78.634.500,00	(60.520.450,00)	18.114.050,00
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	6	59.718.000,00	(11.943.600,00)	47.774.400,00
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	4	13.750.000,00	(12.925.000,00)	825.000,00
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	407	705.068.600,00	(642.646.340,00)	62.422.260,00
3050201022	Partisi	Buah	3	5.594.400,00	(559.440,00)	5.034.960,00
3050201024	Rak Sepatu (Alumunium)	Buah	5	7.260.000,00	(5.808.000,00)	1.452.000,00
3050201028	Workstation	Buah	347	1.799.930.000,00	(1.059.817.000,00)	740.113.000,00
3050201033	Sofa	set	16	149.283.221,00	(14.928.323,00)	134.354.898,00
3050202003	Jam Elektronik	Buah	1	600.000,00	(600.000,00)	0,00
3050202004	Control Clock	Buah	13	67.925.000,00	(67.925.000,00)	0,00
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	28.700.000,00	(28.700.000,00)	0,00
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	2.209.100,00	(441.820,00)	1.767.280,00
3050203005	Air Cleaner	Buah	15	164.032.000,00	(80.556.100,00)	83.475.900,00
3050204001	Lemari Es	Buah	17	81.547.500,00	(51.634.000,00)	29.913.500,00
3050204002	A.C. Sentral	Buah	6	286.013.955,00	(169.724.783,00)	116.289.172,00
3050204004	A.C. Split	Buah	151	2.215.661.521,00	(1.349.549.116,00)	866.112.405,00
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	476.776.146,00	(333.743.303,00)	143.032.843,00
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	2.145.000,00	(1.716.000,00)	429.000,00
3050204007	Exhause Fan	Buah	18	14.490.000,00	(14.490.000,00)	0,00
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	2	700.000,00	(700.000,00)	0,00
3050205008	Kitchen Set	Buah	1	29.496.141,00	(2.949.614,00)	26.546.527,00
3050205009	Tabung Gas	Buah	4	2.600.000,00	(2.600.000,00)	0,00
3050206002	Televisi	Buah	36	830.191.429,00	(412.763.074,00)	417.428.355,00
3050206005	Amplifier	Buah	1	6.490.000,00	(5.841.000,00)	649.000,00
3050206007	Loudspeaker	Buah	6	9.010.000,00	(7.558.000,00)	1.452.000,00
3050206008	Sound System	Buah	1	192.995.275,00	(192.995.275,00)	0,00
3050206012	Wireless	Buah	1	3.300.000,00	(2.970.000,00)	330.000,00
3050206014	Microphone	Buah	10	50.260.700,00	(13.213.390,00)	37.047.310,00
3050206016	Mic Conference	Buah	44	637.829.500,00	(445.819.550,00)	192.009.950,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3050206019	Stabilisator	Buah	1	54.848.750,00	(54.848.750,00)	0,00
3050206020	Camera Video	Buah	2	71.867.500,00	(28.592.750,00)	43.274.750,00
3050206030	Tiang Bendera	Buah	11	124.000.000,00	(88.360.000,00)	35.640.000,00
3050206035	Kaca Hias	Buah	1	3.163.500,00	(632.700,00)	2.530.800,00
3050206036	Dispenser	Buah	27	84.543.000,00	(40.501.525,00)	44.041.475,00
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	126.543.016,00	(81.876.104,00)	44.666.912,00
3050206042	Lambang Instansi	Buah	5	237.025.500,00	(216.012.750,00)	21.012.750,00
3050206046	Handy Cam	Buah	5	174.120.000,00	(173.306.000,00)	814.000,00
3050206056	Karpet	Buah	5	57.672.990,00	(30.839.499,00)	26.833.491,00
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	12	253.496.250,00	(44.080.875,00)	209.415.375,00
3050206069	Lampu Belajar	Buah	3	4.852.000,00	(1.186.000,00)	3.666.000,00
3050206071	Kabel	Buah	11	73.322.912,00	(70.914.435,00)	2.408.477,00
3050206072	Lampu	Buah	14	77.196.144,00	(25.477.512,00)	51.718.632,00
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	16	109.041.447,00	(89.585.915,00)	19.455.532,00
3050206084	Lampu Dinding	dummy	5	29.826.810,00	(2.982.680,00)	26.844.130,00
3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	Buah	7	18.943.260,00	(1.894.326,00)	17.048.934,00
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	68.135.954,00	(47.695.168,00)	20.440.786,00
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	5	301.753.302,00	(211.227.311,00)	90.525.991,00
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	50.556.000,00	(31.649.200,00)	18.906.800,00
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	5	51.604.000,00	(51.190.400,00)	413.600,00
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	167.410.000,00	(80.497.000,00)	86.913.000,00
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	3.109.480,00	(3.004.980,00)	104.500,00
3060101081	Celling Mount Bracket	Buah	1	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
3060101085	Cable	Buah	1	75.762.000,00	(75.762.000,00)	0,00
3060101088	Voice Recorder	Buah	4	9.182.950,00	(8.632.950,00)	550.000,00
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	8.885.550,00	(1.777.110,00)	7.108.440,00
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	18.500.000,00	(14.800.000,00)	3.700.000,00
3060102015	Video Mixer	Buah	2	70.492.400,00	(70.492.400,00)	0,00
3060102034	Teleprompter	Buah	1	1.445.900,00	(433.770,00)	1.012.130,00
3060102045	Tripod Camera	Buah	19	84.574.265,00	(53.406.417,00)	31.167.848,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	1	840.000,00	(840.000,00)	0,00
3060102060	Camera Film	Buah	1	29.352.785,00	(5.870.557,00)	23.482.228,00
3060102061	Lensa Kamera	Buah	12	354.780.610,00	(109.994.206,00)	244.786.404,00
3060102068	Film Sound Recorder	Buah	1	10.225.297,00	(10.225.297,00)	0,00
3060102072	Camera Adaptor	Buah	1	6.468.000,00	(5.821.200,00)	646.800,00
3060102118	Head Set	Buah	5	37.721.400,00	(10.316.280,00)	27.405.120,00
3060102128	Camera Digital	Buah	18	662.958.200,00	(388.874.940,00)	274.083.260,00
3060102129	Tas Kamera	Buah	9	22.987.780,00	(9.725.778,00)	13.262.002,00
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	3	13.968.000,00	(11.120.400,00)	2.847.600,00
3060102132	Video Conference	Buah	8	681.157.998,00	(486.591.710,00)	194.566.288,00
3060102135	LCD Monitor	Buah	15	2.705.462.955,00	(1.580.998.908,00)	1.124.464.047,00
3060102140	Audio Converter	Buah	1	7.700.000,00	(4.620.000,00)	3.080.000,00
3060102159	Clipp On	Buah	4	21.880.000,00	(2.188.000,00)	19.692.000,00
3060102160	Computer Editing	Buah	1	16.818.416,00	(16.818.416,00)	0,00
3060102165	Camera Conference	Buah	19	274.823.400,00	(121.079.020,00)	153.744.380,00
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	3	221.967.564,00	(221.153.014,00)	814.550,00
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	5	64.269.001,00	(23.871.200,00)	40.397.801,00
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	5	5.874.242,00	(5.874.242,00)	0,00
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	23	169.100.000,00	(169.100.000,00)	0,00
3060201010	Facsimile	Buah	2	7.150.000,00	(7.150.000,00)	0,00
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	16	488.462.218,00	(210.917.343,00)	277.544.875,00
3060209010	Mobile Gateway	Buah	1	5.105.000,00	(5.105.000,00)	0,00
3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	dummy	1	7.282.275,00	(5.097.593,00)	2.184.682,00
3060318001	Dummy Load Pendingin Udara	Buah	5	34.952.500,00	(15.728.625,00)	19.223.875,00
3070101001	Sterilisator	Buah	1	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1.540.000,00	(1.540.000,00)	0,00
3070101005	Tensimeter	Buah	7	16.406.500,00	(13.380.400,00)	3.026.100,00
3070101007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	2.596.000,00	(2.596.000,00)	0,00
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	1.210.000,00	(1.210.000,00)	0,00
3070101026	Tabung O2	Buah	1	2.150.000,00	(2.150.000,00)	0,00
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	4	6.941.000,00	(6.941.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3070101065	Examination Table	Buah	1	5.852.000,00	(5.852.000,00)	0,00
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	4	74.110.000,00	(74.110.000,00)	0,00
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	6.890.372,00	(6.890.372,00)	0,00
3070101155	UV Sterilizer	Buah	1	56.595.000,00	(56.595.000,00)	0,00
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	2.596.000,00	(2.596.000,00)	0,00
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	2	9.570.000,00	(6.699.000,00)	2.871.000,00
3070102002	Dental Unit	Buah	2	156.750.000,00	(145.750.000,00)	11.000.000,00
3070102004	Air Set Airomatik	Buah	1	7.810.000,00	(7.810.000,00)	0,00
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	1	13.193.600,00	(13.193.600,00)	0,00
3070102006	Oral Surgical Set	Buah	2	784.000,00	(784.000,00)	0,00
3070102008	Aero Sterisator	Buah	1	88.385.000,00	(88.385.000,00)	0,00
3070102010	Infra Red	Buah	1	1.298.000,00	(1.298.000,00)	0,00
3070102011	Sendok Cetak	Buah	3	2.240.000,00	(2.240.000,00)	0,00
3070102015	Detal Sergion Set	Buah	1	1.364.000,00	(1.364.000,00)	0,00
3070102019	Portable Dental Unit	Buah	1	2.420.000,00	(2.420.000,00)	0,00
3070102020	Dental Ultra Sonic	Buah	1	2.750.000,00	(2.750.000,00)	0,00
3070102024	Airimatik 205 Dental Unit	Buah	1	22.000.000,00	(22.000.000,00)	0,00
3070102032	Bracket Holder	Buah	2	97.350.000,00	(97.350.000,00)	0,00
3070102034	Hand Piece	Buah	2	15.820.000,00	(15.820.000,00)	0,00
3070102036	Cirto Jec	Buah	1	6.600.000,00	(6.600.000,00)	0,00
3070102037	Contra Angel	Buah	2	5.720.000,00	(5.720.000,00)	0,00
3070102045	Electro Lyte Polisher	Buah	1	5.432.000,00	(5.432.000,00)	0,00
3070102047	Engine Portable Lengkap	Buah	1	18.150.000,00	(18.150.000,00)	0,00
3070102053	Hendpiece Airbin 400.000 Rpm	Buah	2	18.480.000,00	(18.480.000,00)	0,00
3070102067	Light Curing Unit	Buah	2	15.455.000,00	(15.455.000,00)	0,00
3070102069	Mouth Piece	Buah	1	3.080.000,00	(3.080.000,00)	0,00
3070102084	Prostetic Engine	Buah	1	2.200.000,00	(2.200.000,00)	0,00
3070102092	Tang Clamer	Buah	1	644.000,00	(644.000,00)	0,00
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	Buah	3	29.740.000,00	(29.740.000,00)	0,00
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	2	22.275.000,00	(22.275.000,00)	0,00
3070104072	Electric Table	Buah	1	5.500.000,00	(5.500.000,00)	0,00
3070104086	Heacting Set	Buah	1	5.200.000,00	(5.200.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3070104129	Micro Surgery Set	Buah	1	2.680.000,00	(2.680.000,00)	0,00
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	1	1.342.000,00	(1.342.000,00)	0,00
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	1	2.700.000,00	(2.700.000,00)	0,00
3070105106	Oxygen Therapy Set	Buah	1	11.850.000,00	(11.850.000,00)	0,00
3070106150	X-Ray Viewer	Buah	1	2.750.000,00	(2.750.000,00)	0,00
3070108024	Nebulizer	Buah	1	22.000.000,00	(22.000.000,00)	0,00
3070110033	HB Meter	Buah	1	3.784.000,00	(3.784.000,00)	0,00
3070110049	Meja Periksa 200X90X100 cc	Buah	1	26.880.000,00	(26.880.000,00)	0,00
3070110053	Pneumatic Torniquite	Buah	2	650.000,00	(650.000,00)	0,00
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	1	1.298.000,00	(1.298.000,00)	0,00
3070124004	Icu Bed Electric	Buah	1	49.850.000,00	(49.850.000,00)	0,00
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	dummy	2	10.598.500,00	(10.598.500,00)	0,00
3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	6.382.500,00	(638.250,00)	5.744.250,00
3070205999	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	dummy	5	27.500.000,00	(27.500.000,00)	0,00
3090404030	Cellphone Video Camera	Buah	1	27.204.835,00	(3.400.604,00)	23.804.231,00
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	dummy	1	199.201.600,00	(199.201.600,00)	0,00
3100102001	P.C Unit	Buah	420	6.369.254.156,00	(5.086.949.647,00)	1.282.304.509,00
3100102002	Lap Top	Buah	50	924.822.000,00	(892.157.001,00)	32.664.999,00
3100102003	Note Book	Buah	287	5.564.885.051,00	(1.753.344.313,00)	3.811.540.738,00
3100102009	Tablet PC	Buah	48	714.786.320,00	(328.838.042,00)	385.948.278,00
3100201004	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	1	182.600.000,00	(182.600.000,00)	0,00
3100201012	Hard Disk	Buah	9	95.920.000,00	(85.470.000,00)	10.450.000,00
3100201017	Panaboard	Buah	2	48.400.000,00	(48.400.000,00)	0,00
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	5.925.400,00	(2.222.025,00)	3.703.375,00
3100203002	Monitor	Buah	4	18.602.820,00	(2.325.353,00)	16.277.467,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	374	1.184.361.545,00	(816.993.426,00)	367.368.119,00
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	33	473.576.850,00	(285.144.439,00)	188.432.411,00
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	1	2.064.480,00	(2.064.480,00)	0,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	40	217.458.268,00	(206.672.018,00)	10.786.250,00
3100204001	Server	Buah	15	10.469.036.802,00	(8.047.776.673,00)	2.421.260.129,00
3100204002	Router	Buah	5	421.684.123,00	(421.100.608,00)	583.515,00
3100204003	Hub	Buah	4	11.294.000,00	(10.415.875,00)	878.125,00
3100204014	Rak Server	Buah	7	220.818.640,00	(193.216.310,00)	27.602.330,00
3100204021	Kabel UTP	Buah	1	12.650.000,00	(12.650.000,00)	0,00
3100204023	Wireless Access Point	Buah	34	673.343.000,00	(529.366.744,00)	143.976.256,00
3100204024	Switch	Buah	7	200.981.000,00	(191.053.500,00)	9.927.500,00
3100204027	Rackmount	Buah	2	110.727.925,00	(96.886.935,00)	13.840.990,00
3100204035	Modul Untuk Penambahan di Core Switch	unit	8	52.800.000,00	(52.800.000,00)	0,00
3100204039	CCTV Camera, 12v	unit	2	2.530.800,00	(316.350,00)	2.214.450,00
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	1	1.590.000,00	(596.250,00)	993.750,00
3150302014	Tenda Pelampang	Buah	1	194.813.750,00	(194.813.750,00)	0,00
3150401012	Voice Recorder	Buah	2	2.100.080,00	(1.575.061,00)	525.019,00
3170119004	Jet Pump	Buah	3	58.180.000,00	(53.340.000,00)	4.840.000,00
3170119019	Blower	Buah	4	20.690.000,00	(20.690.000,00)	0,00
3190103009	Argocycle	Buah	1	11.495.000,00	(11.495.000,00)	0,00
133111	Gedung dan Bangunan		64	44.556.760.764,00	(5.621.238.862,00)	38.935.521.902,00
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	16	22.841.562.074,00	(2.531.833.613,00)	20.309.728.461,00
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	1	92.000.000,00	(920.000,00)	91.080.000,00
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	255.930.000,00	(35.190.375,00)	220.739.625,00
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	54.000.000,00	(540.000,00)	53.460.000,00
4010112004	Bangunan Kantin	Unit	1	92.000.000,00	(920.000,00)	91.080.000,00
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	216.000.000,00	(10.800.000,00)	205.200.000,00
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	1	99.494.000,00	(4.974.700,00)	94.519.300,00
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	1	1.033.861.000,00	(129.232.622,00)	904.628.378,00

Kode	Uraian	Sat	Q	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	27	18.840.466.000,00	(2.728.461.341,00)	16.112.004.659,00
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	2	60.300.000,00	(603.000,00)	59.697.000,00
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	10	575.277.690,00	(155.833.511,00)	419.444.179,00
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	182.250.000,00	(9.112.500,00)	173.137.500,00
4040104002	Pagar Semi Permanen	Unit	1	213.620.000,00	(12.817.200,00)	200.802.800,00
134113	Jaringan		5	569.111.000,00	(212.682.286,00)	356.428.714,00
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	3	467.443.500,00	(116.860.873,00)	350.582.627,00
5030603999	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lainnya	dummy	1	7.667.000,00	(1.820.913,00)	5.846.087,00
5031001003	Instalasi Building Automation System (BAS)	Unit	1	94.000.500,00	(94.000.500,00)	0,00
135111	Aset Tetap Renovasi		15	10.251.996.061,00	0,00	10.251.996.061,00
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	13	7.365.099.757,00	0,00	7.365.099.757,00
6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	dummy	2	2.886.896.304,00	0,00	2.886.896.304,00
135121	Aset Tetap Lainnya		203	1.135.354.191,00	(197.600.000,00)	937.754.191,00
6010101999	Buku Lainnya	dummy	166	233.567.240,00	0,00	233.567.240,00
6010201002	Video	Buah	13	667.730.000,00	0,00	667.730.000,00
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	4	36.456.951,00	0,00	36.456.951,00
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	20	197.600.000,00	(197.600.000,00)	0,00
TOTAL			149.845	236.061.053.218,00	(63.205.682.042,00)	172.855.371.176,00

C.13 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp18.275.832.162,00 dan Rp11.702.612.438,00. Adapun saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kode	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	8010101001	Software Komputer	16.582.935.662,00	10.189.757.938,00
2	8010101002	Lisensi	1.549.896.500,00	1.369.854.500,0
3	8010101007	Hasil Kajian/ Penelitian	143.000.000,00	143.000.000,00
Total			18.275.832.162,00	11.702.612.438,00

Uraian saldo Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut:

Tabel 75. Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sistem Pengendalian Peraturan Bawaslu	4.411.660,00
2	Microsoft SQL Server	16.700.000,00
3	Windows Server	16.990.000,00
4	Web Hosting Management	24.841.300,00
5	Aplikasi Pelantikan Pegawai	25.000.000,00
6	CPanelLisense VPS Wil Barat	27.550.000,00
7	CPanelLisenseVPS Wil Timur	27.550.000,00
8	Web Hosting Management	27.797.000,00
9	CPANEL LIICENSE DEDICATED	32.840.000,00
10	CPANEL L	34.570.000,00
11	vMix PRO Original	35.600.000,00
12	Software Bagian Umum	45.174.360,00
13	Prototipe Gedung Kantor Bawaslu Provinsi	48.000.000,00
14	Aplikasi CAT 2017-2022	49.000.000,00
15	Aplikasi LHKASN	49.500.000,00
16	Aplikasi Pengawasn Pemilu Partisipatif	49.500.000,00
17	Apk. Sistem Honor Kegiatan & Pajak Online	54.450.000,00
18	Penyusunan Aplks Data Pelanggaran Gakkumdu Pemilu	67.650.000,00
19	SMTp Relay+Mail Gateway+Annual FeeIP-ADD/24	68.706.000,00
20	Aplikasi E-Dupak	70.125.000,00
21	Sistem Aplikasi Verifikasi Online	72.820.000,00
22	Aplikasi SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran	73.150.000,00
23	Aurel	75.075.000,00
24	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Temuan	75.570.000,00
25	Sistem Map Infografis IKP	86.405.000,00
26	Aplikasi Manajemen Pengetahuan	91.355.000,00
27	Aplikasi SIMPEG (SI Manaj Kepegawaian)	91.490.000,00
28	Aplikasi Open Data Bawaslu	94.600.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
29	ILM Peningkatan Partisipasi Masyarakat	95.000.000,00
30	Apk. Layanan Terintegrasi Lingkup Bawaslu	95.150.000,00
31	Website DKPP	98.395.000,00
32	Sistem Aplikasi Perencanaan Anggaran (SAPA)	98.642.500,00
33	Software Uc	115.775.000,00
34	Aplikasi E-Performance	121.220.000,00
35	Aplikasi SIM Perjalanan Dinas	124.707.000,00
36	Aplikasi Monitoring Sentra Gakkumdu	147.416.000,00
37	Software Datin	156.849.000,00
38	Aplikasi Pengawasan Dukungan Calon Perseorangan	158.000.000,00
39	Tutorial dan Portal SKPP	184.250.000,00
40	Aplikasi SISLO PILKADA	186.670.000,00
41	Sistem SKPP Daring	187.803.000,00
42	Konfigurasi/Instal Mail Server	196.900.000,00
43	Aplikasi Pengawasan Data Pemilih 2020	197.000.000,00
44	Website DKPP	198.165.000,00
45	Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)	198.550.000,00
46	Aplikasi PPID Online	317.120.000,00
47	Aplikasi Data Pelanggaran Pemilihan Presiden, Wapres	221.248.500,00
48	www.Bawaslu.go.id	335.774.500,00
49	Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran	248.215.000,00
50	Jasa Pengelolaan&Pengembangan JDIIH	279.455.000,00
51	Aplikasi Pengawasan Formulir LHP Daring	281.800.000,00
52	Lisensi Zimbra	293.122.500,00
53	Aplikasi Gowaslu (Android)	438.351.818,00
54	Sistem Informasi Pengawas Pemilu	496.903.000,00
55	Sistem Informasi Pengawas Pemilu (SIPP)	878.858.000,00
56	Lisensi Keamanan Jaringan	901.692.000,00
57	Data Early Warning System	984.666.300,00
58	UNIFIED TREAT MANAJEMEN	551.430.000,00
59	SECURITY FUNCTION	1.014.750.000,00
60	Security Firewall System Shopos	506.000.000,00
61	PERIJINAN RADIO DIGITAL REPEATER + SEWA TEMPAT	141.350.000,00
62	License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Data Center (DC) Bawaslu	180.042.000,00
63	Renewal License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Disaster Recovery Center (DRC) Bawaslu	180.042.000,00
64	Learning Management System (LMS) Bawaslu	1.609.000.024,00
65	Aplikasi Sistem Informasi Komunitas Digital Pengawas Partisipatif Bawaslu Tahun 2022	99.345.000,00
66	Paket Video Penanganan Pelanggaran Pemilu	134.976.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
67	Sistem Layanan Terintegrasi Lingkup Bawaslu Tahun 2022	1.570.650.000,00
68	Aplikasi Intelligence Media Management (IMM) Bawaslu Tahun 2022	2.204.204.700,00
69	SAIBERDIT	93.573.000,00
70	Pengadaan Pengembangan Aplikasi SAQ (Self Assesment Question) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	73.260.000,00
71	Pengadaan Portal Helpdesk Pusat Data & Informasi Bawaslu Tahun 2022	96.570.000,00
72	Pengembangan website e-PPID Bawaslu Tahun 2022	73.260.000,00
73	Pengembangan Portal Helpdesk Pusdatin Tahun 2022	73.260.000,00
Total		18.275.832.162,00

Rincian lebih lanjut terkait mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	11.702.612.438,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.071.832.724,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp	501.387.000,00
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	18.275.832.162,00
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2022	Rp	(10.414.404.514,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	7.861.427.648,00

Penjelasan Mutasi :

Mutasi tambah:

1. Pembelian sebesar Rp6.071.832.724,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Data Center (DC) Bawaslu	180.042.000,00
2	Renewal License Sangfor Hyper Converged Infrastructure (HCI) Disaster Recovery Center (DRC) Bawaslu	180.042.000,00
3	Learning Management System (LMS) Bawaslu	1.609.000.024,00
4	Aplikasi Sistem Informasi Komunitas Digital Pengawas Partisipatif Bawaslu Tahun 2022	99.345.000,00
5	Paket Video Penanganan Pelanggaran Pemilu	134.976.000,00
6	Sistem Layanan Terintegrasi Lingkup Bawaslu Tahun 2022	1.570.650.000,00
7	Aplikasi Intelligence Media Management (IMM) Bawaslu Tahun 2022	2.204.204.700,00
8	Aplikasi SAIBERDIT	93.573.000,00
Total		6.071.832.724,00

2. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp501.387.000,00, terdiri dari:

**Tabel 76. Pengembangan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembangan Aplikasi e-PPID untuk 198 Bawaslu Kabupaten/Kota	96.570.000,00
2	Pengembangan Website Bawaslu	88.467.000,00
3	Pengadaan Pengembangan Aplikasi SAQ (Self Assesment Question) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	73.260.000,00
4	Pengadaan Portal Helpdesk Pusat Data & Informasi Bawaslu Tahun 2022	96.570.000,00
5	Pengembangan website e-PPID Bawaslu Tahun 2022	73.260.000,00
6	Pengembangan Portal Helpdesk Pusdatin Tahun 2022	73.260.000,00
Total		501.387.000,00

C.14 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.458.759.850,00 dan Rp7.197.717.051,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 77. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.458.759.850,00	7.197.717.051,00
Total		2.458.759.850,00	7.197.717.051,00

Adapun rincian Aset Tetap yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp2.458.759.850,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 78. Rincian Aset Tetap Yang Tidak Lagi Digunakan
Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2022**

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	628.550.000,00
2	3020104001	Sepeda Motor	5	110.967.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
3	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	1	188.815.000,00
4	3050201003	Kursi Besi/Metal	27	9.652.500,00
5	3050201005	Sice	6	27.673.350,00
6	3050206005	Amplifier	1	2.150.000,00
7	3050206007	Loudspeaker	2	1.364.000,00
8	3050206042	Lambang Instansi	1	194.000.000,00
9	3060101065	Chairman/Audio Conference	1	172.500.000,00
10	3060201001	Telephone (PABX)	1	197.560.000,00
11	3100204001	Server	2	305.178.000,00
12	3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	196.900.000,00
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	123.660.000,00
14	6010201002	Video	2	299.790.000,00
Total			55	2.458.759.850,00

Adapun mutasi aset lain-lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	7.197.717.051,00
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	3.422.562.974,00
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	Rp	(366.019.113,00)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	(7.795.501.062,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.458.759.850,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain-Lain s.d. 31 Desember 2022	Rp	(2.041.689.050,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	417.070.800,00

Penjelasan mutasi :

Mutasi Tambah :

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp3.422.562.974,00, terdiri dari:

Tabel 79. Reklasifikasi Dari Aset Lancar ke Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3100204014	Rak Server	1	27.445.000,00
2	3020104001	Sepeda Motor	8	163.551.000,00
3	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	2	6.270.000,00
4	3050104005	Filing Cabinet Besi	1	250.000,00
5	3050105029	Hand Metal Detector	2	8.900.000,00
7	3050105044	Mesin Laminating	2	1.900.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
6	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	90.000.000,00
7	3050204002	A.C. Sentral	8	193.230.000,00
8	3050206002	Televisi	22	268.100.000,00
9	3060201001	Telephone (PABX)	1	45.485.000,00
10	3100102003	Note Book	1	23.200.000,00
11	3050206007	Loudspeaker	1	41.800.000,00
12	3050206008	Sound System	2	9.421.500,00
13	3050206014	Microphone	1	7.150.132,00
14	3050206016	Mic Conference	30	209.654.500,00
15	3060101037	Microphone/Boom Stand	1	340.000,00
16	3060101040	Power Supply Microphone	1	38.439.280,00
17	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	3	5.148.000,00
18	3060101088	Voice Recorder	4	4.884.000,00
19	3060102033	Camera Wall Box	1	13.200.000,00
20	3060102061	Lensa Kamera	1	6.930.000,00
21	3060102072	Camera Adaptor	1	1.705.000,00
22	3060102128	Camera Digital	2	112.942.060,00
23	3060102145	Connectors	3	6.600.000,00
24	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	2	6.710.000,00
25	3060201015	Telepon Lapangan	10	69.615.000,00
26	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	17	176.606.000,00
27	3060205003	Unit Tranceiver UHF Stationary	4	42.800.000,00
28	3100201012	Hard Disk	1	44.000.000,00
29	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	23.650.000,00
30	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	13.422.300,00
31	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	37.545.500,00
32	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	11.660.000,00
33	3100204014	Rak Server	2	24.750.000,00
34	3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	196.900.000,00
35	3150401012	Voice Recorder	6	6.400.160,00
36	3190103010	Treadmill	1	23.800.000,00
37	6010101999	Buku Lainnya	1	98.413.392,00
38	6010201002	Video	2	299.790.000,00
39	3050104002	Lemari Kayu	1	29.812.750,00
40	3050104020	Lemari Display	3	15.774.000,00
41	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	2	58.410.000,00
42	3050105028	Overhead Projector	1	16.830.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
43	3050105038	Laser Pointer	2	977.500,00
44	3050105048	LCD Projector/Infocus	6	93.211.000,00
45	3050201005	Sice	1	7.590.000,00
46	3050206002	Televisi	1	2.750.000,00
47	3050206001	Radio	1	3.300.000,00
48	3100102003	Note Book	14	391.010.400,00
49	3100102002	Lap Top	10	180.950.000,00
50	3100102001	P.C Unit	15	224.124.500,00
51	3060347004	Charger	2	970.000,00
52	3050201008	Meja Rapat	1	8.800.000,00
53	3060323016	Audio Monitor	2	9.000.000,00
54	3060334009	Signal Velvoger Grounding	1	16.445.000,00
Total			59	3.422.562.974,00

Mutasi kurang :

1. Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp366.019.113,00 adalah aset yang dihentikan dari Satuan Kerja Bawaslu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80.**Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) per 31 Desember 2022**

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3050206042	Lambang Instansi	1	16.500.000,00
2	3050206080	Bracket Standing Peralatan	1	7.458.000,00
3	3060101088	Voice Recorder	1	710.000,00
4	3100102001	P.C Unit	1	11.187.000,00
5	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	131.200.000,00
7	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	5.610.000,00
6	3050105010	White Board	1	1.500.000,00
7	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	30.089.723,00
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	20	80.211.780,00
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	14	5.005.000,00
10	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	17	25.121.950,00
11	3050202004	Control Clock	3	15.675.000,00
12	3050206014	Microphone	5	35.750.660,00
Total			70	366.019.113,00

2. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp7.795.501.062,00 adalah aset yang akan dihapuskan dari daftar transaksi BMN, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 81. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan
per 31 Desember 2022**

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
1	3100204001	Server	2	80.717.795,00
2	3100204002	Router	1	38.915.500,00
3	3100204008	rack Modem	1	17.765.000,00
4	3100204014	Rak Server	3	52.195.000,00
5	3100204024	Switch	3	72.121.554,00
7	3150401012	Voice Recorder	6	6.400.160,00
6	3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles	7	112.500.000,00
7	3190103010	Treadmill	1	23.800.000,00
8	6010101999	Buku Lainnya	1	98.413.392,00
9	3020101001	Sedan	1	379.900.000,00
10	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	548.700.000,00
11	3020104001	Sepeda Motor	10	206.808.500,00
12	3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	2	6.270.000,00
13	3050104002	Lemari Kayu	1	29.812.750,00
14	3050104003	Rak Besi	6	25.080.000,00
15	3050104004	Rak Kayu	1	16.555.000,00
16	3050104005	Filing Cabinet Besi	1	250.000,00
17	3050104020	Lemari Display	3	15.774.000,00
18	3050105001	Tabung Pemadam Api	13	13.530.000,00
19	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	76.160.000,00
20	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	8.550.000,00
21	3050105028	Overhead Projector	1	16.830.000,00
22	3050105029	Hand Metal Detector	2	8.900.000,00
23	3050105038	Laser Pointer	2	977.500,00
24	3050105044	Mesin Laminating	3	2.850.000,00
25	3050105048	LCD Projector/Infocus	13	210.576.000,00
26	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	90.000.000,00
27	3050201002	Meja Kerja Kayu	35	81.235.940,00
28	3050201008	Meja Rapat	3	33.000.000,00
29	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	8	11.616.750,00
30	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	14.350.000,00
31	3050204002	A.C. Sentral	8	193.230.000,00
32	3050205019	Mixer	1	28.000.000,00
33	3050206001	Radio	1	3.300.000,00
34	3050206002	Televisi	27	287.350.000,00
35	3050206007	Loudspeaker	1	41.800.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
36	3050206008	Sound System	3	94.421.500,00
37	3050206014	Microphone	1	7.150.132,00
38	3050206015	Microphone Table Stand	7	10.715.000,00
39	3050206016	Mic Conference	44	323.614.500,00
40	3050206046	Handy Cam	4	16.953.700,00
41	3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	88.220.000,00
42	3060101036	Microphone/Wireless MIC	3	13.000.000,00
43	3060101037	Microphone/Boom Stand	1	340.000,00
44	3060101040	Power Supply Microphone	1	38.439.280,00
45	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	130.900.000,00
46	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	3	5.148.000,00
47	3060101081	Celling Mount Bracket	6	21.900.000,00
48	3060101088	Voice Recorder	30	38.741.511,00
49	3060102013	Video Tape Recorder Portable	1	65.360.000,00
50	3060102014	Video Tape Recorder Stationer	1	7.700.000,00
51	3060102015	Video Mixer	1	6.500.000,00
52	3060102033	Camera Wall Box	1	13.200.000,00
53	3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	1.900.000,00
54	3060102045	Tripod Camera	2	4.860.000,00
55	3060102061	Lensa Kamera	6	53.234.933,00
56	3060102072	Camera Adaptor	1	1.705.000,00
57	3060102077	Horizontal Motorized Film Rewinder	1	12.500.000,00
58	3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2	21.200.000,00
59	3060102107	Layar Film/Projector	1	3.110.000,00
60	3060102118	Head Set	8	8.987.980,00
61	3060102120	Lighting Head Body	5	22.250.000,00
62	3060102128	Camera Digital	14	333.302.610,00
63	3060102129	Tas Kamera	1	870.000,00
64	3060102130	Lampu Blitz Kamera	5	14.690.000,00
65	3060102135	LCD Monitor	5	22.807.140,00
66	3060102145	Connectors	3	6.600.000,00
67	3060102158	Monopod	1	568.072,00
68	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	2	6.710.000,00
69	3060201001	Telephone (PABX)	1	45.485.000,00
70	3060201006	Handy Talky (HT)	4	39.474.000,00
71	3060201010	Facsimile	1	4.900.000,00

No	Kode	Nama Barang	Unit	Jumlah (Rp)
72	3060201015	Telepon Lapangan	10	69.615.000,00
73	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	17	176.606.000,00
74	3060205003	Unit Tranceiver UHF Stationary	4	42.800.000,00
75	3060209007	Digital Recording System	1	6.680.000,00
76	3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	7	96.382.440,00
77	3060323016	Audio Monitor	2	9.000.000,00
78	3060334009	Signal Velvoger Grounding	1	16.445.000,00
79	3060347004	Charger	2	970.000,00
80	3070102112	Scaller	1	13.200.000,00
81	3070120010	Kursi Gynecologi	1	99.000.000,00
82	3100101004	Internet	1	95.940.000,00
83	3100102001	P.C Unit	36	415.830.170,00
84	3100102002	Lap Top	78	1.346.229.464,00
85	3100102003	Note Book	24	612.494.200,00
86	3100201012	Hard Disk	11	62.544.200,00
87	3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	23.650.000,00
88	3100202017	Speaker Komputer	6	21.120.000,00
89	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	89.658.300,00
90	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	231.873.692,00
91	3100203017	External/ Portable Hardisk	10	23.769.397,00
Total			613	7.795.501.062,00

C.15 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.456.093.564,00 dan Rp14.952.110.290,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 82. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	10.048.529.889,00	7.719.354.690,00
2	Lisensi	365.874.625,00	210.884.975,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00
Jumlah		10.414.404.514,00	7.930.239.665,00
B	Aset Lain-Lain		

No	Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	2.041.689.050,00	7.021.870.625,00
Jumlah		2.041.689.050,00	7.021.870.625,00
Total		12.456.093.564,00	14.952.110.290,00

Tabel 83. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	16.582.935.662,00	(10.048.529.889,00)	6.534.405.773,00
2	Lisensi	1.549.896.500,00	(365.874.625)	1.184.021.875,00
3	Hasil Kajian/ Penelitian	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00
Jumlah		18.275.832.162,00	(10.414.404.514,00)	7.861.427.648,00
B	Aset Lain-Lain			
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	2.458.759.850,00	(2.041.689.050,00)	417.070.800,00
Jumlah		2.458.759.850,00	(2.041.689.050,00)	417.070.800,00
Total		20.734.592.012,00	(12.456.093.564,00)	8.278.498.448,00

C.16 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.192.944.964,00 dan Rp335.081.387,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel 84. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	9.616.614,00	14.082.113,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	359.740.350,00	315.999.274,00

No	Uraian	Jumlah	
		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	823.588.000,00	5.000.000,00
Total		1.192.944.964,00	335.081.387,00

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

No	Kelompok Belanja	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	Kekurangan KGB (gaji pokok) Bulan September-Desember 2022 a.n. Hendra Setiadi	680.800,00
		Kekurangan KGB (gaji pokok) Bulan September-Desember 2022 a.n. Noeroel Fitriani	147.952,00
		Kekurangan KGB Bulan September-Desember 2022 a.n. Rini Wartini	683.760,00
		Kekurangan KGB Bulan September-Desember 2022 a.n. Agung BGB Indratmaja	654.588,00
		Kekurangan KGB Bulan September-Desember 2022 a.n. Indah Rosanti	380.988,00
		Kekurangan KGB Bulan September-Desember 2022 a.n. Ayun Septia	630.300,00
		Kekurangan KGB Bulan Desember 2022 untuk 74 PNS Angkatan IV	6.302.452,00
		Kekurangan KGB Bulan Desember 2022 a.n. Filber Sidabutar	135.774,00
Total Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar			9.616.614,00
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Tagihan Telepon Bawaslu Bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan ditahun 2023	528.707,00
		Tagihan Listrik Menara Thamrin Bulan Desember Tahun 2022 yang dibayarkan ditahun 2023	5.677.903,00
		Tagihan Overtime Listrik Menara Thamrin Bulan Desember 2023	95.267.671,00
		Tagihan Listrik Gedung Bawaslu Bulan Desember 2022 yang dibayarkan di tahun 2023	112.833.244,00
		Tagihan Air Bawaslu Bulan Desember 2023	19.525.325,00
		Belanja barang Panwaslu Luar Negeri Tahun 2015	125.907.500,00

No	Kelompok Belanja	Deskripsi	Jumlah (Rp)
Total Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar			359.740.350,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Honor Gakkumdu yang belum diserahkan ke penerima berdasarkan hasil reviu Inspektorat Wilayah II	798.975.000,00
		LS Bendahara perjalanan dinas Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu yang belum diserahkan ke pelaksana	17.826.000,00
		LS Bendahara perjalanan dinas Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu yang belum diserahkan ke penerima	6.787.000,00
Total Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya			823.588.000,00
Total			1.192.944.964,00

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.731.750.167 ,00 dan Rp150.810.278.116,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp182.924.695,00,00 dan kewajiban sebesar Rp1.192.944.964,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan**

Jumlah Pendapatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.030.000,00 dan Rp9.276.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34.030.000,00	9.276.000,00	0,00
Total	34.030.000,00	9.276.000,00	0,00

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.030.000, merupakan pendapatan atas sewa rumah negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum:

- a. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok A lt.23 No. 23.08 dan 23.09 a.n. Gunawan Suswantoro;
- b. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok A lt. 25 No. 25.08 dan 25.09 a.n. La Bayoni;
- c. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.29 No. 29.03 dan 29.05 a.n. Ichsan Fuady;
- d. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.28 No.28.09 a.n. Hengky Pramono;
- e. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.30 No.30.08 a.n Jufri Syahrudin;
- f. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok A lt.25 No.25.05 a.n. Yusti Erlina;
- g. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok A lt.27 No.27.05 a.n. Rini Wartini;
- h. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.22 No.22.05 a.n. Arya Mega N;
- i. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.23 No.23.08 a.n. Harimurti Wicaksono;
- j. golongan I tipe B yang beralamat di Apartemen Puri Casablanca Blok B lt.12 No.12.05 a.n.Pakerti Luhur.

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (LRA)	Rp	34.803.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp	34.803.000,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima atas Sewa Rumah Negara Gol. I Tipe B Blok A Lt. 25 No. 25.08 dan 25.09 Jl. Casablanca Kav 7 Bulan November 2021 a.n. La Bayoni	Rp	(773.000,00)
Total Mutasi Kurang	Rp	(773.000,00)
Total Pendapatan per 31 Desember 2022	Rp	34.030.000,00

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.035.679.419,00 dan Rp38.410.718.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	17.985.912.059,00	22.146.621.848	(18,79)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2.146.763.800,00	2.293.447.900	(6,40)
Beban Lembur	368.232.000,00	416.118.000	(11,51)
Beban Pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan)	13.534.771.560,00	13.554.530.635	(0,15)
Total	34.035.679.419,00	38.410.718.383	(11,39)

Penurunan Beban Pegawai dikarenakan terjadinya mutasi pembayaran CPNS yang sebelumnya di Satker Bawaslu menjadi pembayaran ke Satker masing-masing.

Terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pegawai pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Pegawai (LRA)	Rp	34.040.144.918,00
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp	9.616.614,00
Total Mutasi Tambah	Rp	34.049.761.532,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas pembayaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	(4.067.713,00)
Jurnal Balik atas pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	(10.014.400,00)
Total Mutasi Kurang	Rp	(14.082.113,00)
Total Beban Pegawai per 31 Desember 2022	Rp	34.035.679.419,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.709.779.228,00 dan Rp2.960.046.112,00.

Tabel 88. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	3.092.475.371,00	2.144.410.574,00	44,21
Beban Persediaan Lainnya	617.303.857,00	815.635.538,00	(24,32)
Total	3.709.779.228,00	2.960.046.112,00	25,33

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Persediaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:			
Saldo Awal:			
1 Barang Konsumsi	Rp	64.308.510,00	
2 Persediaan Lainnya	Rp	91.941.380,00	
Belanja Barang Persediaan (LRA)	Rp	3.894.147.266,00	
Reklasifikasi antar Beban menjadi Beban Persediaan	Rp	1.620.000,00	
Total Mutasi Tambah	Rp	4.052.017.156,00	
Mutasi Kurang:			
Sisa Persediaan per 31 Desember 2022:			
1 Barang Konsumsi	Rp	(65.350.776,00)	
2 Persediaan Lainnya	Rp	(276.887.152,00)	
Total Mutasi Kurang	Rp	(342.237.928,00)	
Total Beban Persediaan per 31 Desember 2022	Rp	3.709.779.228,00	

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp112.589.969.155,00 dan Rp60.791.755.508,00.

Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Barang Operasional	17.812.646.510,00	15.539.749.294,00	14,63
Beban Barang Non Operasional	32.752.730.595,00	12.602.922.053,00	159,88
Beban Langganan Daya dan Jasa	7.360.384.849,00	5.807.168.433,00	26,75
Beban Jasa Konsultan	2.040.353.250,00	575.150.000,00	254,75

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Sewa	19.151.202.121,00	11.431.691.179,00	67,53
Beban Jasa Profesi	11.877.977.199,00	7.486.365.000,00	58,66
Beban Jasa Lainnya	21.283.451.347,00	6.315.213.431,00	237,02
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19	296.254.157,00	1.024.734.586,00	(71,09)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14.969.127,00	8.761.532,00	70,85
Total	112.589.969.155,00	60.791.755.508,00	85,21

Kenaikan Beban Barang dan Jasa disebabkan sudah mulai berjalan normalnya kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan tatap muka yang pada tahun 2021 dibatasi sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19 dan lebih banyak dilakukan secara daring. Beban barang dan jasa yang menggunakan akun penanganan Pandemi COVID-19 adalah akun Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 yang digunakan untuk Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan *rapid/swab test* yang menggunakan pihak ketiga.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan jumlah Beban Barang Jasa per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Barang Operasional (LRA)	Rp	17.812.646.510,00
Belanja Barang Non Operasional (LRA)	Rp	32.754.350.595,00
Belanja Jasa (LRA)	Rp	61.537.328.514,00
Beban Barang dan Jasa yang Masih Harus Dibayar	Rp	233.832.850,00
Jurnal Balik Pengakuan Beban Sewa atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2021	Rp	428.553.333,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp	14.969.127,00
Total Mutasi Tambah	Rp	112.781.680.929,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu, terdiri atas:	Rp	(190.091.774,00)
Reklasifikasi Beban Bahan ke Beban Persediaan	Rp	(1.620.000,00)
Total Mutasi Kurang	Rp	(191.711.774,00)
Total Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022	Rp	112.589.969.155,00

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.740.607.070,00 dan Rp6.057.623.952,00.

Tabel 90. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.650.705.226,00	3.216.370.831,00	(48,68)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	6.910.496,00	6.443.018,00	7,26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.082.991.348,00	2.830.735.571,00	8,91
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	521.532,00	(100,00)
Beban Persediaan suku cadang	-	3.553.000,00	(100,00)
Total	4.740.607.070,00	6.057.623.952,00	(21,74)

Penurunan Beban Pemeliharaan dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dimana pemeliharaan lebih besar porsinya di pemeliharaan peralatan dan mesin untuk peralatan dan perlengkapan kantor. Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:			
Belanja Pemeliharaan (LRA)	Rp	4.927.919.570,00	
Total Mutasi Tambah	Rp	4.927.919.570,00	
Mutasi Kurang:			
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin menjadi Peralatan dan Mesin berupa Gordyn	Rp	(187.312.500,00)	
Total Mutasi Kurang	Rp	(187.312.500,00)	
Total Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022	Rp	4.740.607.070,00	

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp210.654.148.127,00 dan Rp92.538.971.265,00.

Tabel 91. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	67.038.632.937,00	35.402.780.188,00	89,36
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.666.976.802,00	769.695.507,00	116,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.129.548.063,00	14.185.829.136,00	373,22

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74.355.025.260,00	42.040.499.270,00	76,87
Total Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.190.183.062,00	92.398.804.101,00	127,48
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	463.965.065,00	140.167.164,00	231,01
Total Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	463.965.065,00	140.167.164,00	231,01
Total	210.654.148.127,00	92.538.971.265,00	127,64

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas diakibatkan karena tahapan pemilu 2024 sudah dimulai dari tahun 2022. Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Mutasi Tambah:			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (LRA)	Rp	210.655.816.031,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (LRA)	Rp	463.965.065,00	
Total Mutasi Tambah	Rp	211.119.781.096,00	
Mutasi Kurang:			
Koreksi Beban atas Kelebihan LS Bendahara Inpektorat Utama	Rp	(354.003.655,00)	
Koreksi Beban atas Kelebihan LS Bendahara Biro Penanganan Pelanggaran	Rp	(66.741.070,00)	
Koreksi Beban atas Kelebihan LS Bendahara Biro SDM dan Umum	Rp	(44.888.244,00)	
Total Mutasi Kurang	Rp	(465.632.969,00)	
Total Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022	Rp	210.654.148.127,00	

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.294.691.141,00 dan Rp13.552.254.633,00.

Tabel 92. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.565.963.683,00	10.601.037.113,00	(0,33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.194.587.142,00	1.041.640.437,00	14,68
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.773.125,00	15.773.125,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	32.686.500,00	(100,00)

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0,00	32.206.742,00	(100,00)
Total Penyusutan	11.776.323.950,00	11.723.343.917,00	0,45
Beban Amortisasi Software	2.329.175.199,00	1.530.075.950,00	52,23
Beban Amortisasi Lisensi	154.989.650,00	90.216.350,00	71,80
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	34.202.342,00	208.618.416,00	(83,61)
Total Amortisasi	2.518.367.191,00	1.828.910.716,00	37,70
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.294.691.141,00	13.552.254.633,00	5,48

Penjelasan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan perolehannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perolehan	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	10.565.963.683,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	1.194.587.142,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	15.773.125,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran (BMN yang dihentikan)	34.202.342,00
5	Beban Amortisasi Software	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	2.329.175.199,00
6	Beban Amortisasi Lisensi	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	154.989.650,00
Total			14.294.691.141,00

Terdapat selisih antara jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Tahun 2022	Rp	75.661.775.606,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Tahun 2021	Rp	(73.314.275.026,00)
Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Rp	2.347.500.580,00
Beban Penyusutan/Amortisasi LO		
Beban Penyusutan/Amortisasi LO	Rp	(14.294.691.141,00)
Total Beban Penyusutan/Amortisasi	Rp	(14.294.691.141,00)
Selisih Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022	Rp	(11.947.190.561,00)

Selisih antara jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.947.190.561,00 merupakan:

1. Koreksi nilai pencatatan nilai berkurang sebesar Rp974,00
2. Penghapusan pelepasan aset sebesar Rp7.397.640.286,00
3. Transfer keluar sebesar Rp6.217.470.873,00
4. BMN yang dihentikan sebesar Rp358.793.367,00
5. Transfer masuk sebesar minus Rp2.026.714.939,00

D. 8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.965.278,00 dan Rp926.291,00.

Tabel 93. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	926.291,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	15.965.278,00	0,00	0,00
Total Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.965.278,00	926.291,00	1.623,57

D. 9 Kegiatan Non Operasional

Rincian defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp234.777.842,00 dan minus Rp354.248.443,00.

Tabel 94. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	290.056.549,00	31.508.000,00	820,58
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	4.888.888,00	(100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	290.056.549,00	36.396.888,00	696,93

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(397.860.776,00)	(566.230.000,00)	(29,74)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(397.860.776,00)	(566.230.000,00)	(29,74)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13.312.005,00	52.525.530,00	(74,66)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	34.400.064,00	73.879.644,00	(53,44)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	49.179.495,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	294.870.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	342.582.069,00	175.584.669,00	95,11
Total Surplus Kegiatan Non Operasional	234.777.842,00	(354.248.443,00)	(166,27)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp234.777.842,00,00 diperoleh dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp290.056.549,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 (LRA)	Rp	290.056.549,00
Total Mutasi Tambah	Rp	290.056.549,00
Mutasi Kurang:		
Total Mutasi Kurang	Rp	-
Total Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022	Rp	290.056.549,00

- b. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.312.005,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022 (LRA)	Rp	13.312.005,00
Total Mutasi Tambah	Rp	13.312.005,00
Mutasi Kurang:		
Total Mutasi Kurang	Rp	-
Total Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022	Rp	13.312.005,00

- c. Penerimaan kembali belanja barang TAYL per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.400.064,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022 (LRA)	Rp	167.276.565,00
Total Mutasi Tambah	Rp	167.276.565,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal balik atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	(132.876.501,00)
Total Mutasi Kurang	Rp	(132.876.501,00)
Total Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2022	Rp	34.400.064,00

- d. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp294.870.000,00 merupakan aset yang perolehannya berasal dari pemberian (*reward*) Bank tempat penampungan rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, berupa 1 (satu) unit mobil ambulans.

D. 10 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D. 11 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp379.772,031,576,00 dan Rp214.657.268.587,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp150.810.278.116,00 dan Rp158.184.267.793,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp379.772.031.576,00 dan Rp214.657.268.587,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**E.3.1 Koreksi atas Reklasifikasi**

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp35.337.500,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar minus Rp2.376.374,00 dan Rp2.244.557.331,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Satker Bawaslu sebesar Rp2.376.374,00 berasal koreksi nilai penyusutan atas pencatatan koreksi nilai berkurang Gedung dan Bangunan berupa Apartemen Puri Casablanca atas setoran pengembalian belanja sebagai tindak lanjut temuan BPK yaitu kekurangan volume pada 7 (tujuh) paket pengerjaan belanja modal tahun 2019 sebesar Rp974,00 dan koreksi nilai penyusutan atas reklasifikasi pencatatan Peralatan dan Mesin pada Aplikasi SAKTI Modul Aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95. Rincian Koreksi Penyusutan atas Reklasifikasi Pencatatan Peralatan dan Mesin Instansi Pusat per 31 Desember 2022

No	Nama Barang		Jumlah (Rp)
	Semula	Menjadi	
1	Wireless	P.C Unit	133.200,00
2	Terminal	P.C Unit	133.200,00
3	Kabel	P.C Unit	1.332.000,00
4	Adaptor PA-FA	Camera Digital	388.500,00
5	Adaptor PA-FA	Camera Digital	388.500,00
Total			2.375.400,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp410.691.127.253,00 dan Rp205.003.384.079,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 96. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	388.327.553.720,00	211.394.987.408,00
Diterima dari Entitas Lain	(514.451.803,00)	(1.197.143.142,00)
Transfer Keluar	(831.476.740,00)	(6.537.834.465,00)
Transfer Masuk	8.553.959.949,00	287.850.000,00
Pengesahan Hibah Langsung	15.155.542.127,00	665.524.278,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	390.000.000,00
Total	410.691.127.253,00	205.003.384.079,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar minus Rp514.451.803,00 merupakan pendapatan PNBP tahun 2022, terdiri dari:

Tabel 97. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per 31 Desember 2022

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(290.056.549,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(34.803.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(9.000.000,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(13.312.005,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(167.276.565,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(3.684,00)
Total	(514.451.803,00)

Sedangkan DKEL sebesar Rp388.327.553.720,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel 98. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2022

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	34.260.831.539,00
Belanja Barang	335.530.818.370,00
Belanja Modal	22.241.235.251,00
Pengembalian Belanja Pegawai	(220.686.621,00)
Pengembalian Belanja Barang	(3.484.644.819,00)
Total	388.327.553.720,00

2. Transfer Keluar pada Satker Bawaslu berupa penyerahan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp831.476.740,00 dari Satker Bawaslu yang diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Satker Set. Bawaslu Provinsi Banten dengan rincian dibawah ini:

Tabel 99. Rincian Transfer Keluar pada Satker Bawaslu per 31 Desember 2022

No	Nama Satker Pengirim	Nama Satker Penerima	Akun	Jumlah (Rp)
1	Bawaslu	DKPP	Peralatan dan Mesin	(6.826.951.867,00)
2	Bawaslu	DKPP	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.002.700.873,00
3	Bawaslu	DKPP	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(366.019.113,00)
4	Bawaslu	DKPP	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	358.793.367,00
5	Bawaslu	Set. Bawaslu Provinsi Banten	Peralatan dan Mesin	(213.930.000,00)
6	Bawaslu	Set. Bawaslu Provinsi Banten	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	213.930.000,00
Total				(831.476.740,00)

3. Transfer Masuk Tanah serta Gedung dan Bangunan pada Satker Bawaslu berupa penyerahan Tanah serta Gedung dan Bangunan dari Kementerian/Lembaga Negara lain kepada Satker Bawaslu dengan nilai Rp8.553.959.949,00 dengan rincian dibawah ini:

Tabel 100. Rincian Transfer Masuk Tanah serta Gedung dan Bangunan pada Satker Bawaslu per 31 Desember 2022

No	Nama Satker Pengirim	Nama Satker Penerima	Uraian Barang	Jumlah (Rp)
1	KPP Pratama Palu	Bawaslu	Tanah KPP Pratama Kota Palu	4.177.707.000,00
2	KPP Pratama Palu	Bawaslu	Gedung dan Bangunan KPP Pratama Kota Palu	155.590.000,00
3	KPP Pratama Palu	Bawaslu	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan KPP Pratama Kota Palu	(62.236.000,00)
4	KPP Pratama Palu	Bawaslu	Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen	23.044.000,00
5	KPP Pratama Palu	Bawaslu	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen	(9.217.600,00)
6	KPP Pratama Tasikmalaya	Bawaslu	Tanah Bawaslu Kab. Tasikmalaya	1.583.857.000,00
7	KPP Pratama Tasikmalaya	Bawaslu	Gedung dan Bangunan KPP Pratama Kab. Tasikmalaya	255.930.000,00
8	KPP Pratama Tasikmalaya	Bawaslu	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan KPP Pratama Kab. Tasikmalaya	(31.991.250,00)
9	BPS Provinsi D. I. Yogyakarta	Bawaslu	Tanah Bangunan Rumah Negara Bawaslu Provinsi D. I Yogyakarta	1.544.900.000,00
10	BPS Provinsi D. I. Yogyakarta	Bawaslu	Rumah Negara Gol. I Tipe A Permanen	1.033.861.000,00
11	BPS Provinsi D. I. Yogyakarta	Bawaslu	Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Gol. I Tipe A Permanen	(117.484.201,00)
Total				8.553.959.949,00

4. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.155.542.127,00 merupakan pengesahan atas hibah langsung berupa Uang, Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Peralatan dan Mesin, rincian atas Pengesahan Hibah Langsung Satker Bawaslu dapat dilihat pada **Lampiran I**.

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp30.921.472.051,00 dan minus Rp7.373.989.677,00.

Tabel 101. Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2022

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(379.772.031.576,00)	(214.657.268.587,00)
Koreksi atas Reklasifikasi	0,00	35.337.500,00
Koreksi Nilai Aset Non revaluasi	2.376.374,00	2.244.557.331,00
Transaksi Antar Entitas	410.691.127.253,00	205.003.384.079,00
Total	30.921.472.051,00	(7.373.989.677,00)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp181.731.750.167,00 dan Rp150.810.278.116,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp150.810.278.116,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp30.921.472.051,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan:

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:
 - a. Unit Eselon I berjumlah 4 (Empat) sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Inspektorat Utama;
 - 3) Deputi Bidang Administrasi; dan
 - 4) Deputi Bidang Dukungan Teknis.
 - b. Unit Eselon II berjumlah 12 (dua belas) sebagai berikut:
 - 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - 2) Biro Keuangan dan BMN;
 - 3) Biro SDM dan Umum;
 - 4) Biro Hukum dan Humas;
 - 5) Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu;
 - 6) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu;
 - 7) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - 8) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - 9) Pusat Data dan Informasi;
 - 10) Inspektorat Wilayah I;
 - 11) Inspektorat Wilayah II; dan
 - 12) Inspektorat Wilayah III.
2. Sekretariat Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan 2 (dua) kriteria, yaitu:
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi;
 - b. Bagian Pengawasan Pemilu;

- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

3. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu;
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
- d. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Rekening Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 17 (tujuh belas), yang terdiri dari:

- a. Rekening Pemerintah Lainnya berupa rekening induk yang terdiri dari 5 (lima) rekening induk eselon 1 (satu) satker pusat;
- b. Rekening Virtual Pengeluaran sejumlah 1 (satu) rekening satker pusat;

- c. Rekening Virtual Pengeluaran Pembantu sejumlah 10 (sepuluh) rekening BPP pada satker pusat;

NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	SURAT IZIN	
			NOMOR	TANGGAL
1030007719764	RKK BAWASLU OPS	MANDIRI	S-1496/WPB.12/KP.06/2020	08 Juni 2020
23001004082306	RKK BAWASLU OPS	BRI	S-1495/WPB.12/KP.06/2020	08 Juni 2020
969549335	RKK BAWASLU OPS	BNI	S-1494/WPB.12/KP.06/2020	08 Juni 2020
1057775838	RKK BAWASLU OPS	BSI LEGACY BSM	S-1761/WPB.12/KP.06/2021	18 Agustus 2021
0016201300009479	RKK BAWASLU OPS	BTN	S-444/KPN.1206/2022	09 Februari 2022
9890715001001000	BPG175.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	BNI	S-2549/WPB.12/KP.06/2020	01 Oktober 2020
9890715001001006	BPG 175 BIRO FP3 BAWASLU	BNI	S-833/WPB.12/KP.06/2021	18 Mei 2021
9890715001001004	BPG 175 PUSLITBANG DIKLAT BAWASLU	BNI	S-833/WPB.12/KP.06/2021	18 Mei 2021
9890715001001003	BPP 175 PUSDATIN BAWASLU	BNI	S-833/WPB.12/KP.06/2021	18 Mei 2021
9890715001001007	BPP 175 ROCAN DAN ORGANISASI BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001008	BPP 175 ROKEU DAN BMN BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001009	BPP 175 ROKUM DAN HUMAS BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001010	BPP 175 BIRO SDM DAN UMUM BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001011	BPP 175 BIRO FPP BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001012	BPP 175 BIRO FPSPP BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022
9890715001001013	BPP 175 INSPEKTORAT UTAMA BAWASLU	BNI	S-77/WPB.12/KP.06/2022	10 Januari 2022

2. Pejabat Perbendaharaan

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 404/KU.01.00/K1/11/2022 Tentang Perubahan Kesepuluh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 338/KU.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Kesembilan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 429/KU.00/K1/11/2022 Tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tabel 102. Daftar Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu RI dan Pejabat Pembuat Komitmen per 31 Desember 2022

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Kedudukan
1	Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si.	404/ KU.01.00/K1/ 11/2022	3 November 2022	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Farikha Yunita, S.E.	0024/KU.01.0 0/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3	Pakerti Luhur, Ak., MM.	0024/KU.01.0 0/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan dan BMN
4	Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja, M.H.	0024/KU.01.0 0/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5	Drs. Hengky Pramono, M. Si.	0024/KU.01.0 0/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Kedudukan
				Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
6	Drs. Asmin Safari Lubis	0024/KU.01.00/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
7	Drs. Harimurti Wicaksono	0024/KU.01.00/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
8	Yusti Erlina, S.H.	0024/KU.01.00/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
9	Triyono, S.P., M.Si.	0024/KU.01.00/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Perencanaan dan Organisasi
10	Ibrahim Malik Tanjung, S.H., M.Si.	617/KU.01.00/SJ/06/2022	22 Juni 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan
11	Ir. Lita Gustina, M.Si	0024/KU.01.00/SJ/01/2022	5 Januari 2022	Pejabat Pembuat

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Kedudukan
				Komitmen Pusat Data dan Informasi
12	Filber Sidabutar, S.AP., M.AP.	1122/KU.01.00/SJ/10/2022	31 Oktober 2022	Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Utama
13	Nuni Puji Lestari, S.E.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2021	Bendahara Pengeluaran
14	Tunggal Wijie Sasmito, A.Md.Ak	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Keuangan dan BMN, dan Inspektorat Utama
15	M. Darmawan Rifai, S.Ak.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan Umum
16	Hanifa Ayun Kusumastuti, A.Md. Ak.	645/KU.01/SJ/07/2022	1 Juli 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan Pusat Data dan

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Kedudukan
				Informasi
17	Sri Mariati Hutabarat, S.Si.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
18	Muhammad Qodri Imaduddin, S.IP	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
19	Andreas Argatya Haryanto Putra, A.Md	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
20	Desi Pipian Pujakusumo, S.Tr.Ak.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu
21	Tifani Windasari Sumirat, S.H.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
22	Vince Agustina Nainggolan, S.E.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat Pertama

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Kedudukan
23	Ade Chandra, S.IP.	3228/KU.01.00/SJ/12/2021	28 Desember 2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

3. Pengelolaan Aset BMN

- a. Terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1 (satu) unit kendaraan roda dua (motor) yang pelunasannya belum selesai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 007/SKTJM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp 10.728.939,00 dengan sisa TGR sebesar Rp7.728.939,00 yang telah jatuh tempo tanggal 30 Desember 2021 a.n Entis S.
- b. Terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas hilangnya 2 (dua) unit kendaraan roda dua (motor) yang masih dalam proses penetapan TGR.
- c. Sekretaris Jenderal Bawaslu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0540/PL.07/SJ/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 guna melakukan pencarian BMN belum ditemukan dari hasil penelusuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.466.603.486,00 dengan hasil per 25 Juni 2022 yaitu BMN telah ditemukan secara keseluruhan pada hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh tim penelusuran Barang Milik Negara (BMN) yang belum ditemukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) BMN sebanyak 82 (delapan puluh dua) unit telah ditemukan dalam kondisi baik senilai Rp1.284.934.242,00 telah ditemukan dalam kondisi baik;
 - 2) Sesuai dengan kaidah kriteria pencatatan aset tetap, telah dilakukan koreksi barang berupa kamera atas nilai *battery charger* (peralatan studio audio) sesungguhnya merupakan baterai yang merupakan satu bagian dari kamera sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan secara terpisah, baterai tersebut akan dihapus dari neraca sebanyak 5 (lima) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp6.094.000,00;
 - 3) BMN sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp1.302.659.732,00 sudah ditindaklanjuti dengan

pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang sesuai dengan risalah lelang Nomor 715/25/2022 tanggal 19 Desember 2022;

- 4) Terdapat 1 (satu) buku milik DKPP akan tetapi masih menjadi aset pada Bawaslu yang tidak dapat digunakan kembali dikarenakan isi dari buku tersebut sudah tidak relevan dengan Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang sesuai dengan risalah lelang Nomor 715/25/2022 tanggal 19 Desember 2022;
 - 5) Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan atau penghapusannya kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang oleh Kuasa Pengguna Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2022 adalah 68 (enam puluh delapan) unit. Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sejumlah Rp4.300.635.005,00 dan BMN Ekstrakomptabel sejumlah Rp11.828.845,00;
 - 6) Satker Badan Pengawas Pemilu juga telah melaporkan BMN yang hilang pada tahun 2022 (bukan hasil inventarisasi) yaitu berupa sepeda motor dengan nilai sebesar Rp37.611.000,00 (atas nam Adang dan Siswanto) dan Rp69.977.000,00 pada Sekretariat Jenderal Bawaslu melalui Nodin Biro Keuangan dan BMN kepada Inspektur Wilayah I Nomor 305/PL.03.03/KB/06/2022;
 - 7) Untuk kegiatan operasional satker Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, gedung yang digunakan untuk kantor berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah, sewa, dan penggunaan sementara K/L lain. Adapun status gedung hak milik sendiri terdapat pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk gedung yang digunakan sebagai kantor Bawaslu Pusat merupakan gedung milik Sekretariat Negara yang beralamat di JL.M.H. Thamrin No 14. Selain itu Bawaslu melakukan sewa gedung kantor di Gedung Menara Thamrin pada 19 (sembilan belas), 24 (dua puluh empat), dan 25 (dua puluh lima) serta terdapat gedung milik Bawaslu yang digunakan sementara oleh Sekretariat DKPP Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di gedung *Treasury Learning Centre* (TLC) yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta Pusat.
4. Tagihan atas Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Beston pada Tahun 2019

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima surat dari LOCUS LAW FIRM dengan Nomor 042/P/LL/04/21 tanggal 29 April 2021 perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Tagihan Sebesar Rp1.676.899.450,00. Penagihan tersebut terkait dengan 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari s.d. Mei 2019 yang sampai dengan Desember 2021 belum dibayar. Berdasarkan informasi dari personil pengelola keuangan yang bertugas pada periode tersebut tagihan atas kegiatan yang ditagihkan akan dibayarkan melalui hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya atas surat tagihan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021 pihak Hotel Beston menyampaikan surat dengan nomor 088/P/LL/08/21, perihal Permintaan Kekurangan Dokumen dan Revisi Pengajuan Tagihan menjadi Rp907.404.906,00. Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menelusuri dan mengumpulkan dokumen pendukung atas kegiatan-kegiatan tersebut, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, masih terdapat dokumen yang belum diperoleh. Sehingga pada tanggal 7 Januari 2022 pihak Hotel Beston melalui kuasa hukumnya LOCUS LAW FIRM mengirimkan somasi kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas penagihan yang belum dibayarkan. Terhadap somasi tersebut telah disampaikan jawaban sesuai dengan surat nomor 003/HK.08/SS/01/2022 perihal Jawaban Surat Somasi.

F.3 Tindak Lanjut BPK

Tindak Lanjut dari Hasil Pemeriksaan BPK, dari Tahun 2010 s.d. 2022 terdapat temuan pemeriksaan sejumlah 201 (dua ratus satu) dengan nilai sebesar Rp79.759.712.447,83 pada Bawaslu. Sedangkan untuk temuan yang direkomendasikan sejumlah 500 dengan nilai sebesar Rp42.860.917.820,31. Dari temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan status sudah sesuai dengan rekomendasi berjumlah 410 (empat ratus sepuluh) dengan nilai sebesar Rp23.626.216.078,67; sedangkan status belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) dengan nilai sebesar Rp19.234.701.741,64. Rekapitulasi Tahunan Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara lengkap disajikan pada **Lampiran II**.

F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian

intern yang memadai. Bawaslu telah mengimplementasikan PIPK tersebut dengan telah menentukan akun signifikan yaitu:

1. Tanah;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
3. Peralatan dan Mesin.

Selanjutnya, Bawaslu telah membuat pedoman Penerapan PIPK sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Penilaian PIPK Tahun 2022 Tingkat UAKPA diperoleh hasil Efektif sebagaimana terlampir pada **Lampiran III**. Penilaian PIPK tersebut dilakukan secara sampling 11 (sebelas) satker dari 84 (delapan puluh empat) satker yang ada di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sampel sebagai berikut:

1. Set. Jenderal Bawaslu;
2. Set. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. Set. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
4. Set. Bawaslu Provinsi Lampung;
5. Set. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Set. Bawaslu Provinsi Jambi;
7. Set. Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
8. Set. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Set. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
10. Set. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

F.5 Capaian Output Prioritas Nasional (PN)

Selama Periode Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp167.292.857.950,00 dari anggaran sebesar Rp195.864.138.000,00

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan prioritas nasional beserta capaian output Bawaslu disajikan pada **Lampiran IV**.

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILU (500100)
TAHUN 2022 *AUDITED*

LAMPIRAN I
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2022 *AUDITED*
PER 31 DESEMBER 2022

**Rincian Pengesahan Hibah Langsung
per 31 Desember 2022**

No	Keterangan	NPHD	Tanggal	Jumlah (Rp)
	Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Maros	NPHD Nomor 956/83/BKAD dan 1361.1/PL.03.02/SJ/08/2022	23 Agustus 2022	200.800.000,00
	Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Maros	NPHD Nomor 956/83/BKAD dan 1361.1/PL.03.02/SJ/08/2022	23 Agustus 2022	400.000.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan I untuk Kantor Bawaslu Kota Bima	NPHD Nomor 180/3/PH/II/2022 dan 0592.1/PL.03.02/SJ/02/2022	18 Februari 2022	455.700.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan III untuk Rumah Dinas Pejabat Bawaslu Kabupaten Pohuwato	NPHD Nomor 900/BKD/NPHD/363/VI/2022 dan 1254.1/PL.03.02/SJ/06/2022	06 Juni 2022	304.493.690,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan III untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	NPHD Nomor 28 Tahun 2022 dan 1274.1/PL.03.02/SJ/06/2022	20 Juni 2022	445.188.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan I untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Tebo	NPHD Nomor 028/004/NPHD/BAKEUDA-VI/2022 dan 0651.1/PL.03.02/SJ/03/2022	08 Maret 2022	18.372.913,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	NPHD Nomor 030/1036/NPHD/PBMD/BPKAD/2022 dan Nomor 1395.02.1/PL.03.02/SJ/09/2022	06 September 2022	592.800.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	NPHD Nomor 900/2366/BA/B.a.VII.02/2022 dan 1758.1/PL.03.02/K1/12/2022	16 Desember 2022	114.300.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	NPHD Nomor 900/2366/BA/B.a.VII.02/2022 dan 1758.1/PL.03.02/K1/12/2022	16 Desember 2022	79.200.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	NPHD Nomor 030/1036/NPHD/PBMD/BPKAD/2022 dan Nomor 1395.02.1/PL.03.02/SJ/09/2022	06 September 2022	2.299.627.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan I untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Tebo	NPHD Nomor 028/004/NPHD/BAKEUDA-VI/2022 dan 0651.1/PL.03.02/SJ/03/2022	08 Maret 2022	198.788.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan I untuk Kantor Bawaslu Kota Bima	NPHD Nomor 180/3/PH/II/2022 dan 0592.1/PL.03.02/SJ/02/2022	18 Februari 2022	482.212.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Minahasa Selatan	NPHD Nomor 872/22/BMS-BKAD dan 1744.1/PL.03.02/K1/12/2022	08 Desember 2022	23.674.584,00
1	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Provinsi Bali	NPHD Nomor B.13.032/7461/P.BMD/BPKAD dan 1712.1/PL.03.02/K1/11/2022	23 November 2022	2.783.200.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin	NPHD Nomor 005/NPHD/BPKAD-V/2022 dan 1451.1/PL.03.02/SJ/09/2022	26 September 2022	390.625.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Banggai Laut	NPHD Nomor 660/326/LH-PTNH/2022 dan 1761.1/PL.03.02/K1/12/2022	19 Desember 2022	581.200.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Provinsi Bali	NPHD Nomor B.13.032/7461/P.BMD/BPKAD dan 1712.1/PL.03.02/K1/11/2022	23 November 2022	1.251.349.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Banggai Laut	NPHD Nomor 660/326/LH-PTNH/2022 dan 1761.1/PL.03.02/K1/12/2022	19 Desember 2022	50.350.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin	NPHD Nomor 005/NPHD/BPKAD-V/2022 dan 1451.1/PL.03.02/SJ/09/2022	26 September 2022	2.443.116.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan I untuk Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	NPHD Nomor 600/0826/PUPR-PERKIM/GUB dan 0656.1/PL.03.02/SJ/03/2022	15 Maret 2022	243.973.332,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan III untuk Rumah Dinas Pejabat Bawaslu Kabupaten Pohuwato	NPHD Nomor 900/BKD/NPHD/363/VI/2022 dan 1254.1/PL.03.02/SJ/06/2022	06 Juni 2022	2.761.175,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan III untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	NPHD Nomor 28 Tahun 2022 dan 1274.1/PL.03.02/SJ/06/2022	20 Juni 2022	298.000.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Lebak	NPHD Nomor 032/Perj.06-BKAD/IV/2022 dan 1065.1/PL.03.02/SJ/04/2022	11 April 2022	27.000.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Buton	NPHD Nomor NPHD-032/2073/BMD/VIII/2022 dan 1351.1/PL.03.02/SJ/08/2022	12 Agustus 2022	47.988.800,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Melawi	NPHD Nomor 12 Tahun 2022 dan 1519.1/PL.03.02/SJ/10/2022	17 Oktober 2022	51.187.500,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat	NPHD Nomor 965/122/BPKAD-ASET/VIII/2022 dan 1378.1/PL.03.02/SJ/08/2022	29 Agustus 2022	48.425.059,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Batanghari	NPHD Nomor 030/5574/BMD/2022 dan 1395.01.1/PL.03.02/SJ/09/2022	06 September 2022	564.907.000,00
	Pengesahan Hibah dalam Bentuk Barang Triwulan IV untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Buton	NPHD Nomor NPHD-032/2073/BMD/VIII/2022 dan 1351.1/PL.03.02/SJ/08/2022	12 Agustus 2022	756.303.074,00
	Total			15.155.542.127,00

LAMPIRAN II
TINDAK LANJUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2009 S.D 2022

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17
Tahun 2009																		
1	Pencairan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bawaslu Tahun Anggaran 2008 Tidak Sesuai Ketentuan Dana tahun 2008 yang belum di pertanggung jawabkan pada Panwaslu 1)Kab. Lampung Selatan Rp194.781.421,00; 2)Kota Tangerang Rp381.710.000,00; 3)Kab. Kupang Rp380.920.200,00.			15.054.221.014.00			Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar:	Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:										
				a Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekretariat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena menggunakan langsung pengambilan dana Uang Persediaan dari beberapa Panwaslu untuk kepentingan operasional Bawaslu dan terlambat menyampaikan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Uang Persediaan Bawaslu Tahun Anggaran 2008;	1		a Surat Teguran dari Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 004/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1								Selesai		
				b Memberikan teguran tertulis kepada Ketua Panwaslu terkait sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana senilai Rp957.411.621,00;	1		b Surat Teguran dari Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Kupang berdasarkan Nota Dinas Nomor 004/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1								Selesai		
				c Memerintahkan Kepala Sekretariat untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran Tahun Anggaran 2008 pada Bawaslu senilai Rp370.158.000,00 dengan menyetorkannya ke Kas Negara;	1	370.158.000,00	c 1) Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 004/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan 2) SSBP tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp370.158.000,00.	1	370.158.000,00							Selesai	370.158.000,00	
				d Memerintahkan Ketua Panwaslu terkait untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran Tahun Anggaran 2008 pada Panwaslu senilai Rp957.411.621,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara;	1	957.411.621,00	d PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1	957.411.621,00			Belum ada penyetoran		
				e Menyusun, menyempurnakan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan	1		e Telah disusun SOP berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota	1								Selesai		

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				f Membentuk satuan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan Panwaslu serta berkoordinasi dengan BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pelaksanaan pemeriksaan eksternal atas pengelolaan anggaran jajaran Bawaslu dan Panwaslu	1		f Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 004/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1									Selesai	
2	Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan pada Panwaslu Kabupaten/Kota Dilakukan Secara Tidak Tertib dan Tidak Sesuai Ketentuan a. Pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan dan dilakukan secara tidak tertib pada Panwaslu 1) Kota Palembang; 2) Kab. Kediri; 3) Kab. Lamongan; 4) Kab. Malang; 5) Kab. Sambas; 6) Kab. Bengkayang; 7) Kab. Pariaman; 8) Kab. Pesisir Selatan; 9) Kota Padang; 10) Kab. Banyuwangi; 11) Kab. Jember; 12) Kab. Sanggau; 13) Kota Makassar; 14) Kab. n Gowa; dan 15) Kab. Buleleng b. Selisih kurang atau lebih fisik kas pada Panwaslu 1) Kota Palembang Rp44.086.957,00; 2) Kab. Gowa Rp90.187.549,00; 3) Kota Makassar Rp26.772.673,00; 4) Kab. Wonorejo Rp76.053.153,00; 5) Kab. Belu Rp108.514.920,00; 6) Prov. Lampung Rp58.141.700,00; 7) Kab. Simalungun Rp3.888.106,00; 8) Kab. Gianyar Rp97.300.758,00	1	504.945.816,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar : a Menginstruksikan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekretariat Panwaslu atas pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan yang tidak tertib dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku; b Menginstruksikan Ketua Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak lengkap/tertib dan menertibkan pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan di lingkungan satuan kerjanya;	1		Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan : a Instruksi Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Nota Dinas Nomor 005/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan b Penjelasan Ketua Bawaslu terkait status Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota keberadaannya bersifat <i>Ad Hoc</i> dan pada tanggal 30 Oktober 2009 telah dibubarkan berdasarkan Surat Nomor 627/BAWASLU/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Permasalahan dalam pelaksanaan Pra Pemantauan Tindak Lanjut	1							Selesai			
				c Memproses indikasi Kerugian Negara melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang berlaku; dan	1	504.945.816,00	c <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL Semester II 2016</u> - <u>PTL Semester I&II 2017</u> -		15.500.000,00	1	489.445.816,00						Belum seluruhnya disetor	15.500.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17	18
1							PTL Semester I 2018 - Kab Wonogiri Rp1.000.000,00 tgl 23/3/17 dgn NTPN 6960A44LMD180111 - Kab Wonogiri Rp1.000.000,00 tgl 25/7/17 dgn NTPN E77B61F90EJV181 - Kab Wonogiri Rp500.000,00 tgl 22/9/17 dgn NTPN E324C0G53ABBC45H - Kab Wonogiri Rp500.000,00 tgl 17/11/17 dgn NTPN AC983089LK12701 PTL Semester II 2018 - <u>PTL Semester I 2019</u> - Kab Wonogiri Rp1.000.000,00 tgl 13/12/18 dgn NTPN 928F92QIANFFOK71 - Kab Wonogiri Rp500.000,00 tgl 2/5/19 dgn NTPN D60B979V0M2NB3H PTL Semester II 2019 - Panwas Gianyar setoran sebesar Rp3.000.000,00 tgl 22 Juni 2017 NTPN no.998DC3EIG08TQAF2 - Panwas Gianyar setoran sebesar Rp3.000.000,00 tgl 29 Sep 2017 nomor B6EC42V0IPV1NOGI - Wonogiri setoran Rp500.000,00 tgl 12 Juli 2019 NTPN D6C54089PU3HEISH setoran Rp500.000,00 tgl 31 Okt 2019 NTPN FC5C248VU0MSQKMG <u>PTL Semester I 2020</u> - <u>PTL Semester II 2020</u> - <u>PTL Semester II Tahun 2021:</u> Wonogiri setoran : 1. Rp500.000 tgl 25 Oktober 2016 NTPN 885F4678P9C8N6P1 2. Rp500.000 tgl 19 Februari 2018 NTPN 7413E8MAO6516V61 3. Rp500.000 tgl 24 April 2018 NTPN 920D28E84PSO1F4A												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							4. Rp500.000 tgl 25 Juli 2018 NTB 000003213127 5. Rp500.000 tgl 17 September 2018 NTPN 033B52MQUPPV4HJ1 6. Rp500.000 tgl 15 Februari 2019 NTPN 652B756QC626BDC1 7. Rp500.000 tgl 11 November 2021 NTPN F21186U8E34D5KL3 8. Rp500.000 tgl 15 Desember 2021 NTPN 8A3283CIEDU56E23											
				d Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan di lingkungan Bawaslu dan Panwaslu	1		d Telah disusun SOP Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota	1									Selesai	
3	Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bawaslu dan Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.	1	7.814.988.673,37	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:											
	a. Kelebihan pembayaran atas kemahalan harga, duplikasi pembayaran dan kekurangan pekerjaan minimal sebesar Rp1.350.428.206,82 pada 1)Bawaslu Rp487.388.000,00; 2)Panwaslu Kota Medan Rp10.542.450,00; 3)Prov. Sumsel Rp107.040.000,00; 4)Kota Palembang Rp93.560.000,00; 5)Prov. Lampung Rp75.600.000,00;			a Menginstruksikan Ketua Bawaslu dan Ketua Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, serta kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan atas kelebihan	1		a 1) Instruksi Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Kab/Kota berdasarkan Nota Dinas Nomor 006/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan	1									Selesai	

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6)Kab. Lampung Barat Rp85.000.000,00; 7)Kab. Lampung Utara Rp120.750.000,00; 8)Kab. Brebes Rp34.000.000,00; 9)Kota Kupang Rp10.222.000,00; 10)Kab. Timor Tengah Utara Rp15.875.000,00; 11)Kab. Banyuwangi Rp18.750.825,00; 12)Prov. NTT Rp26.906.250,00; 13)Prov. Kalbar Rp200.034.500,00; 14)Kab. Sanggau Rp34.000.000,00; 15)Prov. Sulsel Rp9.000.000,00; 16)Kota Banjarmasin Rp6.759.681,82; dan 17)Kab. Kupang Rp15.000.000,00			pembayaran, duplikasi pembiayaan, kekurangan pekerjaan, pemborosan Keuangan Negara, ketidakefektifan dan ketidaktertiban Pengelolaan Barang dan Jasa di lingkungannya masing-masing;			2) Surat Teguran Kepala Sekretariat Bawaslu kepada Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Nota Dinas Nomor 067, 068, 069/ND/Set/II/2011 tentang Teguran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan											
	b. Pemborosan Keuangan Negara pada pengadaan barang dan jasa minimal sebesar Rp468.650.795,00 pada 1)Bawaslu Rp403.650.000,00; 2)Panwaslu Kota Makassar Rp29.500.000,00; 3)Kab. Pinrang Rp22.655.267,00; dan 4)Kab. Bone Rp13.745.528,00 c. Pengadaan barang dan jasa minimal sebesar Rp6.075.618.343,10 tidak bermanfaat pada 1)Bawaslu Rp5.966.209.171,55; 2)Panwaslu Kab. Kotabaru Rp3.500.000,00; dan 3)Kab. Gowa Rp25.300.000,00			b Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu dan supaya memproses indikasi Kerugian Negara karena kelebihan pembayaran dari kemahalan, duplikasi pembiayaan dan kekurangan pekerjaan minimal senilai Rp1.350.428.206,82 melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rincian sebagai berikut : 1)Kemahalan harga senilai Rp1.213.320.206,82; 2)Duplikasi senilai Rp48.850.000,00; dan 3)Kekurangan pekerjaan senilai Rp88.258.000,00	1	1.350.428.206,82	b 1) Surat Teguran Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Kab/Kota berdasarkan Nota Dinas Nomor 006/ND/Ketua Bawaslu/VI/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 2) SSBP tanggal 16 Juni 2011 senilai Rp48.850.000,00; 3) SSBP tanggal 16 Juni 2011 senilai Rp212.180.000,00; 4) SSBP tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp138.100.000,00; dan 5) SSBP tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp88.258.000,00 PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Kab. Banyuwangi menyatakan Ybs. telah meninggal dunia. PTL semester II 2016 - PTL Semester I dan II 2017 - PTL Semester I dan II 2018 - PTL Semester I dan II 2019 - PTL Semester I dan II 2020: - PTL Semester I 2021: -		487.388.000,00	1	863.040.206,82						Belum seluruhnya disorot	487.388.000,00

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				c Melakukan revisi atas struktur organisasi dan indeks honorarium Tim Asistensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu serta Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu dan Standar Biaya Umum dari Menteri Keuangan;	1		c Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 006/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1									Selesai	
				d Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu untuk segera menggunakan barang-barang hasil pengadaan yang belum digunakan sampai sekarang; dan	1		d Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 006/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1									Selesai	
				e Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk membuat pedoman teknis pengadaan yang dapat dijadikan oleh pelaksana di tingkat Panwaslu sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengelolaan Barang dan Jasa di daerah	1		e PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I II 2017 - PTL Semester I II 2018 - PTL Semester I II 2019 - PTL Semester I II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1					Belum ditindaklanjuti	
4	Kegiatan Perjalanan Dinas Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak sesuai ketentuan yang berlaku	1	1.024.839.600,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:											

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	a.Kelebihan pembayaran atas kelebihan indeks biaya dan duplikasi perjalanan minimal sebesar Rp985.882.200,00 pada 1)Panwaslu Kab. Simalungun Rp155.248.000,00; 2)Prov. Banten Rp103.050.000,00; 3)Kab. Pandeglang Rp19.470.500,00; 4)Kab. Tangerang Rp18.620.000,00; 5)Kab. Buleleng Rp28.100.000,00; 6)Kab. Tabanan Rp23.940.000,00; 7)Prov. NTT Rp38.750.000,00; 8)Prov. Kalbar Rp166.329.600,00; 9)Kab. Sanggau Rp9.250.000,00; 10)Kab. Sambas Rp2.150.000,00; 11)Prov. Lampung Rp61.200.000,00; 12)Prov. Sulsel Rp52.579.800,00; 13)Kab. Bone Rp27.581.000,00; 14)Prov. Bali Rp14.510.000,00; 15)Prov. Sulsel Rp4.560.000,00; 16)Kab. Langkat Rp18.700.000,00; 17)Kab. Deli Serdang Rp3.390.000,00; 18)Prov. Sumut Rp13.000.000,00; 19)Prov. Sumsel Rp23.420.000,00; 20)Kab. Oku Timur Rp96.554.000,00; 21)Kab. Banyuwani Rp92.879.300,00; dan 22)Kab. Timor Tengah Selatan Rp12.600.000,00 b.Biaya perjalanan dinas yang tidak perlu dilakukan minimal sebesar Rp38.957.400,00 pada Panwaslu 1)Sumatera Barat Rp22.407.400,00; 2)Kab. Agam Rp7.200.000,00; dan 3)Kab. Bone Rp9.350.000,00			1	985.882.200,00	a Menginstruksikan Ketua Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekretariat Panwaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas kelebihan pembayaran dan pemborosan Keuangan Negara pada kegiatan perjalanan dinas di lingkungannya masing-masing; b Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu untuk memproses indikasi Kerugian Negara dari kelebihan pembayaran minimal senilai Rp985.882.200,00 melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan	1	93.940.000,00	1	891.942.200,00					Selesai	93.940.000,00		
							a Instruksi Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan Nota Dinas Nomor 007/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan b PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 Telah disetor SSBP sebesar 1) Kab. Tabanan, Rp23.940.000,00 dengan NTPN DF7492DLHHSP4U2 2) Kab. Timor Tengah Selatan, Rp12.600.000,00 dengan NTPN 0915080910151207. 3) Kab. Buleleng, Rp28.100.000,00 dengan NTPN 897EB8FLNFJ3UA62 4) Provinsi Bali, Rp9.510.000,00 dengan NTPN E072B6GKHGKBSSFI 5) Kab. Oku Timur, Rp11.400.000,00 dengan NTPN 649B26KR9HCCRTPG 6) Kab. Deli Serdang, Rp3.390.000,00 dengan NTPN 0805000105121307 PTL Semester II 2016 Telah disetor SSBP oleh Sekretaris Bawaslu Bai sebesar Rp 5.000.000,00 dengan NTPN 834AA8SD129U2SBI PTL Semester I II 2017 - PTL Semester I II 2018 - PTL Semester I II 2019 - PTL Semester I II 2020 - PTL Semester I 2021: -										Belum Seluruhnya Disetor	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17
				c Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas yang dapat dijadikan oleh pelaksana di tingkat Panwaslu sebagai pedoman dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas di daerah	1		c Telah disusun SOP terkait perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota	1								Selesai		
5	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bawaslu dan Jajaran Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak tertib	1		Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:											
				a Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu agar segera menyelesaikan proses inventarisasi Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); dan	1		a. Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 008/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1									Selesai	
				b Melakukan koordinasi dengan Dirjen Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan untuk menentukan langkah-langkah dalam mengamankan Barang Milik Negara yang berada di lingkungan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota ketika Panwaslu Propinsi, Kabupaten dan Kota tersebut akan dibubarkan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2009	1		b Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 008/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan koordinasi dengan Dirjen Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan tanggal 09 Desember 2011	1									Selesai	
6	Pembayaran honorarium dan kegiatan operasional pengawasan Pemilu pada Bawaslu dan Panwaslu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.	1	5.776.043.404,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar:			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:											
	a. Pembayaran honorarium dan kegiatan operasional pengawasan Pemilu pada Bawaslu dan Panwaslu tidak tertib pada 1)Bawaslu Rp2.235.575.000,00; 2)Panwaslu Kab. Sanggau 3)Rp764.135.121,00; 4)Kab. Sintang Rp93.500.000,00; 5)Kab. Belu Rp1.393.140.000,00; 6)Kab. Gowa Rp29.665.000,00;			a Memberikan teguran tertulis Kepala Sekretariat Bawaslu dan Ketua Panwaslu terkait atas ketidaktertiban pertanggungjawaban dan pemborosan Keuangan Negara dalam pembayaran honor dan dana operasional Pengawasan Pemilu;	1		a Surat Teguran Ketua Bawaslu kepada Ketua Panwaslu berdasarkan Nota Dinas Nomor 009/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Keuangan	1									Selesai	

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17
1	7)Kota Pontianak Rp37.200.000,00; 8)Kota Kupang Rp42.100.000,00; 9)Kab. Kupang Rp72.347.000,00; 10)Kab. Timor Tengah Utara Rp123.800.000,00; 11)Kota Makassar Rp169.753.783,00; 12)Kab. Belu Rp62.400.000,00; dan 13)Kab. Timor Tengah Selatan Rp12.000.000,00 b.Pembayaran honor dan belanja operasional melebihi ketentuan pada Panwaslu 1)Kota Medan Rp8.500.000,00; 2)Prov. Lampung Rp5.300.000,00; 3)Kab. Lampung Selatan Rp99.000.000,00; 4)Kab. Pesawaran Rp108.000.000,00; 5)Prov. NTT Rp5.050.000,00; 6)Kab. Kupang Rp1.600.000,00; 7)Prov. Kalbar Rp28.985.000,00; 8)Kab. Pinrang Rp94.000.000,00; 9)Prov. Kalbar Rp8.670.000,00; 10)Kab. Bone Rp111.500.000,00; 11)Kab. Gowa Rp74.200.000,00; dan 12)Kota Makassar Rp67.925.000,00 c. Pembayaran yang tidak perlu atau dapat dihindari pada Panwaslu 1)Kab. Serang Rp7.845.000,00; 2)Kota Serang Rp3.700.000,00; 3)Kab. Pandeglang Rp10.445.000,00; dan 4)Prov. Sulsel Rp5.707.500,00	1	612.730.000,00	b Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu untuk memproses indikasi Kerugian Negara senilai Rp612.730.000,00 dari kelebihan pembayaran honorarium dan biaya operasional pengawasan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan	1		b PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I II 2017 - PTL Semester I III 2018 - PTL Semester I III 2019 - PTL Semester I III 2020 - PTL Semester I 2021: -	1				1	612.730.000,00			Belum ada penyetoran		
			c Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu untuk menyusun, menyempurnakan, dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Keuangan yang mengatur Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Honorarium dan Dana Operasional Pengawasan Pemilu sebagai pedoman bagi pelaksana di Bawaslu Pusat, Panwaslu Daerah dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.	1		c Telah disusun SOP berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota	1										Selesai	
7	Penerimaan Negara kurang dipungut dan/atau disetor ke Kas Negara senilai Rp161.475.176,00	1	161.475.176,00	Atas temuan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar:			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<p>a. Pajak Penghasilan PPh pasal 21 atas honorarium Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) belum dipungut dan/atau disetor ke Kas Negara senilai Rp 144.883.500,00 pada Panwaslu</p> <p>1)Kab. Klaten Rp32.556.000,00; 2)Kab. Bengkayang Rp30.567.500,00; 3)Kota Pontianak Rp9.790.000,00; 4)Kab. Sanggau Rp25.280.000,00; dan 5)Kab. Sintang Rp46.690.000,00</p> <p>b. Pendapatan jasa giro atas penyimpanan Uang Persediaan belum disetorkan ke Kas Negara minimal senilai Rp 16.591.676,00 pada Panwaslu</p> <p>1)Kab. Simalungun Rp815.158,00; 2)Kota Kupang Rp365.969,00; 3)Kab. Kupang Rp12.374.523,00; 4)Kab. Timor Tengah Selatan Rp2.318.466,00; 5)Kab. Timor Tengah Utara Rp286.599,00; dan 6)Kab. Belu Rp430.961,00</p>			<p>a Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk menegur Bendahara Panwaslu terkait yang telah lalai tidak memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pendapatan Jasa Giro Perbankan ke Kas Negara;</p> <p>b Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk memerintahkan Bendahara Panwaslu terkait untuk memungut menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pendapatan Jasa Giro Perbankan ke Kas Negara; dan</p>	1	161.475.176,00	<p>a Surat Teguran Kepala Sekretariat Bawaslu kepada Bendahara Pengeluaran berdasarkan Nota Dinas Nomor 074/ND/Set/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>b Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat berdasarkan Nota Dinas Nomor 010/ND/Ketua Bawaslu/VII/2011 tentang Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Telah disetor SSBP dari Kab. Timor Tengah Selatan sebesar Rp2.318.466,00 dengan NTPN 0915080910151207</p> <p>PTL Semester II 2016: - PTL Semester I&II 2017 - PTL Semester I 2018 - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 17/3/17 dgn NTPN 664B21K5HL3U4SUG - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 14/2/17 dgn NTPN 9E51841BK5F7J9AG - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 11/12/17 dgn NTPN AB0A76KBONPV6PDG - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 15/11/17 dgn NTPN A6E2D5S0OEOD47VTG - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 19/9/17 dgn NTPN 80EE60MB7IV95IRG - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 10/8/17 dgn NTPN 148A98PVIRO5CDO - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 25/7/17 dgn NTPN 9B39B6P9OBR82IA6 - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 5/5/17 dgn NTPN BD2641SMIK55NESG - Kab Klaten Rp1.000.000,00 tgl 26/5/17 dgn NTPN 293147IR37H57BV0</p> <p>PTL Semester II 2018 -</p>	1	20.096.466,00	1	141.378.710,00							Selesai	20.096.466,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Sem I 2019 - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 04/01/19 NTPN 85B251N9E7N3LJG - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 14/02/19 NTPN 93E3566UNJ634QQG - Kab Klaten Rp500.000,00 tgl 26/04/19 NTPN 5AE358HOSQ1KORT0 PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 -Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara 1. Kab. Klaten Rp500.000,00 tanggal 10/8/2018 NTPN 5D65401ORRL848L0 2. Kab. Klaten Rp500.000,00 tanggal 26/4/2018 NTPN E59EF6ROJLJFQGL0 3. Kab. Klaten Rp1.000.000,00 13/12/2018 NTPN B41D158S37BAJD6G 4. Kab. Klaten Rp500.000,00 13/2/2018 NTPN 62F7617DEFEQCEIG 5. Kab. Klaten Rp500.000,00 23/7/2018 NTPN 42F3036N12HEL61G 6. Kab. Klaten Rp500.000,00 7/3/2018 NTPN 0404249GKLQNTQHO 7. Kab. Klaten Rp500.000,00 8/5/2018 NTPN DF9D210FU7R924E0 8. Kab. Klaten Rp500.000,00 12/9/2018 NTPN FA2EC6F8VEF5QMO0 9. Kab. Klaten Rp500.000,00 19/6/2019 NTPN 77B0F4D576RG4RLG aaaaaa 10. Kab. Klaten Rp500.000,00 8/7/2019 NTPN 6098B7MHAAA4UUA0 11. Kab. Klaten Rp500.000,00 6/9/2019 NTPN A169C7ALTASSPANK 12. Kab. Klaten Rp500.000,00 28/10/2019 NTPN E488F1JNEGVNJKL3 13. Kab. Klaten Rp500.000,00 30/1/2020 NTPN B96F48N3DE26FPOP 14. Kab. Klaten Rp278.000,00 19/3/2020 NTPN 1FF930N9UV299R5G PTL Semester II 2020 -										

**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2010
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU TAHUN 2008 DAN 2009**

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1							<p>PTL Semester II 2021 : Telah disetor oleh panwas Kab Klaten ke kas negara sebesar : 1. Rp500.000 tgl 23/11/2021 NTPN AD9360N9V94AO190 2. Rp1.000.000 tgl 21/12/2021 NTPN 43EC08N3DOCJ0MNV</p>										
				c Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu untuk menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Keuangan dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian atas Intensifikasi Pendapatan pada seluruh satuan kerja Bawaslu baik di pusat maupun di daerah.	1		c Telah disusun SOP terkait Penatausahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota.	1								Selesai	
	Jumlah	7	30.336.513.683,37		26	4.943.031.019,82		18	987.082.466,00	4	2.385.806.932,82	3	1.570.141.621,00	1	-		987.082.466,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2013
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
Tahun 2012																	
A. Pengendalian																	
1	Bendahara Pengeluaran Belum Melaksanakan Penatausahaan Kas dengan Tertib	1	-	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu menginstruksikan :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:										
				a Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas-tugas Bendahara Pengeluaran; dan	1	-	a Instruksi Ketua Bawaslu kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Nota Dinas Nomor 003/ND/KU/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Teguran atas Teguran atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012;	1									Selesai
				b Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyelenggarakan pelatihan Pengelolaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	1	-	b Telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi bagi Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Keuangan Bawaslu berdasarkan: 1) Undanguan Sekretaris Jenderal Nomor 273, 277/Und/Set/Bawaslu/IV/2014 tanggal 24 April 2014; dan 2) Surat Tugas Nomor 0556/SPT/Set/V/2014 tanggal 02 Mei 2014	1									Selesai
2	Pengendalian Intern Persediaan Belum Memadai	1	-	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu agar :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:										
				Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Persediaan serta meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian atas Pencatatan dan Pelaporan Persediaan	1	-	Telah disusun SOP Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia	1									Selesai
3	Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai	1	-	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Kepala Sekretariat Bawaslu agar:			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:										
				a Menginstruksikan Kepala Bagian Umum untuk segera melakukan Inventarisasi atas Barang Milik Negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran (BA) 999.08; dan	1	-	a Telah dilakukan Inventarisasi Barang Milik Negara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris Milik Negara Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor -/Biro H2PI/Setjen/Bawaslu/II/2014;	1									Selesai

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2013
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1				b Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara	1	-	b Telah disusun SOP Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia	1								Selesai	
B Kepatuhan																	
1	Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Penayangan Running Text di Media Elektronik Televisi Nasional senilai Rp593.904.556,00	1	593.904.556,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kelalaian dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1	-	Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan: Surat teguran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nota Dinas Nomor 431/ND/SET/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Sanksi Administrasi	1								Selesai	
2	Kekurangan Pengenaan Pajak atas Sewa Ruang Kantor dan Sewa Apartemen senilai Rp159.549.276,00	1	159.549.276,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan agar : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menginformasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat bahwa terdapat kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat 2 pada PT Sarinah senilai Rp95.232.000,00 dan kekurangan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh pada sewa apartemen senilai Rp64.317.276,00	1	159.549.276,00	Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan: PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat Sekjen kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor B-0059/Bawaslu/SJ/PW.06.02/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI tahun 2012 tentang penyetoran pajak sewa ruangan kantor dan sewa apartemen yang belum dipungut. 2. bukti penerimaan surat yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu No. 0101001465/021/may/2016 tanggal 13 Mei 2016	1	159.549.276,00							Selesai	159.549.276,00
3	Pelaksanaan Pengadaan Barang Berupa Dua Unit Lift Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Merugikan Keuangan Negara	1	132.044.959,00	Atas permasalahan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan	1	-	Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan: Surat Teguran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nota Dinas Nomor 136/ND/ST/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Sanksi Administrasi	1								Selesai	
4	Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Lainnya Berupa Pembuatan Video Media Sosialisasi Pengawasan Penulu Tidak Sesuai Ketentuan	1	75.000.000,00	Atas temuan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar :			Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan:										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2013
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1				Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Video Media Sosialisasi Pengawasan Pemilu	1	-	PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 PTL Semester I 2016 Surat Sekjen Nomor 331.A/Bawaslu/X/2013 tgl 23 Okt 2013 tentang sanksi disiplin kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Surat Sekjen Nomor 331.A/Bawaslu/X/2013 tgl 23 Okt 2013 tentang sanksi disiplin kepada Pejabat Pembuat Komitmen	1								Selesai	
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap	1	25.003.145,00	Atas temuan tersebut BPK RI menyarankan Ketua Bawaslu agar : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji Tagihan	1	-	Bawaslu menindaklanjuti rekomendasi dengan menyampaikan: PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat Sekjen Nomor 331.A/Bawaslu/X/2013 tgl 23 Okt 2013 tentang sanksi disiplin kepada Pejabat Penguji Tagihan. Surat Sekjen Nomor 331.A/Bawaslu/X/2013 tgl 23 Okt 2013 tentang sanksi disiplin kepada Bendahara Pengeluaran Surat Sekjen Nomor 331.A/Bawaslu/X/2013 tgl 23 Okt 2013 tentang sanksi disiplin kepada Pejabat Pembuat Komitmen	1								Selesai	
Jumlah		8	985.501.936,00		10	159.549.276,00		10	159.549.276,00	0	-	0	-	0	-		159.549.276,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18
A. Pengendalian																	
1	Sistem Pengendalian Intern Bawaslu Belum Memadai	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu : a Menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kriteria dan batasan risiko untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;	1	-	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan a Telah ditetapkan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Tahun 2014-2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1296-KEP Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013, namun hanya sebatas Rencana Kerja Penilaian Efektifitas dan Risiko untuk RTP pada Kegiatan Pengendalian <u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL Semester II 2016 - PTL Semester I dan II 2017 : - PTL Semester I dan II 2018: - PTL Semester I dan II 2019: - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 -</u> <u>PTL Semester I 2021</u> - Telah ditindaklanjuti dengan menyusun Pedoman Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Bawaslu No. 0826/Bawaslu/SJ/KU.02/XII/2018 dan telah direvisi dengan Pedoman No. 0363/Bawaslu/SJ/HK.01/00/XI/2019 dan telah diimplementasikan (Pedoman dan hasil penilaian PIPK terlampir)	1	-							Selesai	
				b Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI);	1	-	b Telah dilakukan <i>join audit</i> (audit bersama) pada sepuluh Bawaslu Provinsi selama 12 hari berdasarkan Surat Tugas Nomor 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1352, 1353 dan 1354/ST/Set/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014	1	-							Selesai	
				c Menyelenggarakan pelatihan bagi	1	-	c Telah diselenggarakan :	1	-							Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)				
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				personil Bagian Pengawasan Internal dan personil Pengelola Keuangan dan Barang serta personil Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); dan			<p>1) Pembahasan permasalahan Penyedia Barang dan Jasa aktifitas penanganan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 449/Und/Set/Bawaslu /VII/2014 tanggal 03 Juli 2014;</p> <p>2) Pelatihan Perencanaan Strategis dan Anggaran berdasarkan Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 697/Set/Bawaslu/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;</p> <p>3) <i>In house training</i> Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 530/Bawaslu /Set/XI/2014 tanggal 13 November 2014;</p> <p>4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Audit Internal Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan:</p> <p>a) Surat Tugas Nomor 0500/ST/Set/IV/2014 tanggal 16 April 2014;</p> <p>b) Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 805/Und/Set/Bawaslu /XI/2014 tanggal 13 November 2014; dan</p> <p>c) Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 768/Und/Set/Bawaslu /XI/2014 tanggal 06 November 2014</p> <p>5) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengawasan tentang Audit Pengadaan Barang berdasarkan Surat Tugas Nomor 1060/ST/Set/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014</p>											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)			
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18
1				d Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu supaya lebih optimal dalam mereviu Laporan Keuangan dan menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Bawaslu	1	-	d <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> Surat Sekjen Nomor 462.i/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 Sept 2014 perihal Sanksi Disiplin kepada Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu	1								Selesai	
2	Penatausahaan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib	1	-	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar: a Memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas ketidakpatuhan dalam melaksanakan tugasnya;	1	-	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan a <u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> Surat Sekjen Nomor 462.H/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 Sept 2014 perihal Sanksi Disiplin kepada Bendahara Pengeluaran Surat Sekjen Nomor 462.E/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 Sept 2014 perihal Sanksi Disiplin kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Surat Sekjen Nomor 462.E/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 Sept 2014 perihal Sanksi Disiplin kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu Surat Sekjen Nomor 462.G/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 Sept 2014 perihal Sanksi Disiplin kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Perencanaan dan Anggaran	1								Selesai	
				b Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas-tugas Bendahara Pengeluaran (BP); dan	1	-	b <u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL Semester II 2016</u> - <u>PTL Semester I 2017</u>	1								Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1																	
							Dalam rangka mengawasan dan pengendalian tugas BP. Sekjen Bawaslu Mengeluarkan Surat Perintah untuk pemeriksaan Kas Tunai yang dilaksanakan oleh BP. Surat erintah dikeluarkan secara rutin pada saat dilaksanakan pemeriksaan kas tunai. Data Surat Perintah yang diperoleh saat ini adalah : (1) Surat Perintah Nomor 1019/SJ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan (2) Surat Perintah Nomor 0536/SJ/II/2016 tanggal 13 Maret 2017.										
				c	Menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan kepada semua Bendahara Pengeluaran (BP)	1	-	c	Telah diselenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Perbendaharaan Bawaslu Pusat dan Provinsi bagi Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran (BP) dan Pengelola Keuangan Bawaslu berdasarkan Undangn Sekretaris Jenderal Nomor 273 dan 277/Und/Set/Bawaslu/IV/2014 tanggal 24 April 2014	1							Selesai
3	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar :			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan										Selesai
				a	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Pencatatan dan Pelaporan Persediaan kepada petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Persediaan; dan	1	-	a	Telah diselenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Penataan Barang Milik Negara (BMN) bagi Pengelola BMN di Bawaslu Provinsi berdasarkan Undangn Sekretaris Jenderal Nomor 329/Und/Set/Bawaslu/V/2014 tanggal 14 Mei 2014	1							Selesai

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)	17
1				b Melakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Persediaan	1	-	b Pembinaan : 1) Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagai narasumber kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 857/UND/SJ/BAWASLU/XI/2014 tanggal 26 November 2014; Monitoring : 2) Rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-undang Sekretaris Jenderal Nomor 523/Und/Bawaslu/Set/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013	1									Selesai	
4	Belum Dilakukan Labelisasi pada Aset Tetap Bawaslu	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar : Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk segera melakukan inventarisasi dan labelisasi Barang Milik Negara di seluruh satuan kerja Bawaslu	1	-	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan Telah dilakukan labelisasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Daftar Inventaris Barang Ruangan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL Semester II 2016 -</u> <u>PTL Semester I II 2017 -</u> <u>PTL Semester I II 2018 -</u> <u>PTL Semester I II 2019 -</u> <u>PTL Semester I II 2020 -</u> <u>PTL Semester I 2021: -</u>			1							Belum ada bukti inventarisasi dan labelisasi BMN untuk satker Panwaslu Kabupaten/Kota	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)			
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18
5	Pengungkapan dan Pelaporan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu Belum Tertib	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar : a Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi menginventarisir penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan Bawaslu b Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengelolaan Hibah serta menginstruksikan Bawaslu Provinsi untuk menaati SOP Pengelolaan Hibah tersebut	1	-	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan a Instruksi Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk menyampaikan Laporan Inventarisasi Hibah Uang dalam rangka Pilkada di Lingkungan Bawaslu Provinsi berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 551/Bawaslu/St/XI/2014 tanggal 27 November 2014 b Telah disusun dan ditetapkan SOP terkait Pengelolaan Hibah berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor SOP/28/SET/X/2014 tentang Pengelolaan Hibah Uang Dalam Rangka Pilkada	1								Selesai	
B Kepatuhan																	
1	Pertanggungjawaban Belanja Tidak Tertib	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar : a Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTPSM dan Bendahara Pengeluaran atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja	1	-	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan a <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> 1. Surat No. 462.B/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Gunawan Suswantoro selaku KPA 2. Surat No. 462.C/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Ir. Derawan Adhi Santoso selaku Pejabat Pebuat Komiten,	1								Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18
1							3. Surat No. 462.A/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdri. Ernawati Perangin-angin, SE selaku PPIPSPM 4. Surat No. 462.D/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdri. Triza Novia, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran										
				b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penertiban terhadap pertanggungjawaban belanja yang telah ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pusat ke Bendahara Pengeluaran di 33 Provinsi	1	-	b. Dari total SPJ yang belum diverifikasi senilai Rp163.930.291.932,00 karena belum disampaikan ke Bawaslu Pusat diketahui : 1) Per November 2014, SPJ senilai Rp159.877.756.479,00 sudah diverifikasi oleh Bagian Keuangan Bawaslu; dan 2) SPJ senilai Rp4.052.535.453,00 belum diverifikasi oleh Bagian Keuangan Bawaslu yaitu : a) Provinsi Kaltim senilai Rp152.677.140,00; b) Provinsi Sult senilai Rp109.750.000,00; dan c) Provinsi Papua Barat senilai Rp3.790.108.313,00 PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I dan II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021 -			1					Belum semua bukti pertanggungjawaban belanja dilakukan verifikasi		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1				c Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyetorkan ke Kas Negara atas belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	-	c <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> - PTL Semester I dan II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1				Belum ada tindak lanjut	
2	Pelaksanaan Pekerjaan Langganan Jaringan Interkoneksi Tidak Sesuai dengan Ketentuan	1	939.000.170,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar: a Menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas kelalaiannya dalam mengawasi pelaksanaan dan pembayaran biaya langganan jaringan interkoneksi	1	-	a <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> 1. Surat No. 462.C/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Ir. Derawan Adhi Santoso selaku Pejabat Pbuat Komiten,	1								Selesai	
				b Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menarik kembali kelebihan pembayaran atas sewa bandwidth senilai Rp939.000.170,00 kepada PT Telkom dan menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	939.000.170,00	b Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 01 Juli 2014 senilai Rp939.000.170,00	1	939.000.170,00							Selesai	939.000.170,00
3	Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	1	84.208.670,26	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)							
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18				
1				a	1	Memberikan sanksi administratif kepada Bendahara Pengeluaran, PPTPSPM dan Pejabat Pembuat Komitmen atas kelalaiannya melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; dan	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat No. 462.C/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Ir. Derawan Adhi Santoso selaku Pejabat Pebuat Komiten, 2. Surat No. 462.A/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Ernawati Perangin-angin, SE selaku PPTPSPM 3. Surat No. 462.D/Bawaslu/IX/2014 tanggal 15 September 2014 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Triza Novia, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran	1						Selesai					
				b	1	Melakukan pembayaran uang SPDP langsung ke rekening para pegawai (<i>non cash transaction</i>), sehingga para pegawai dapat membeli tiket langsung ke maskapai tanpa dikoordinir oleh seorang pegawai tertentu.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - - PTL Semester I&II 2017 - - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: - PTL Semester I 2021: - Telah ditindaklanjuti dengan pembayaran seluruh komponen biaya kepada pegawai secara langsung melalui Cash Managemet System (Bukit Pembayaran diklat dan transport perjalanan dinas melalui CMS terlampir)	1						Selesai					
Jumlah	8	1.023.208.840,26			19		939.000.170,00		16	939.000.170,00	2		-	1		-	0		-		939.000.170,00

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Keuangan																	
1	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Bawaslu Belum Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Memberikan masukan yang jelas dan lengkap sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komisioner Bawaslu dalam menentukan arah	1		PTL Semester I 2015 - - PTL Semester II 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021 - Telah ditindaklanjuti dengan membuat Pokok-pokok Kebijakan Penganggaran setiap tahun yang digunakan sebagai acuan dalam membuat RKA KL yaitu SE Sekjen No. 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 Pokok-pokok kebijakan penyusunan RKA KL TA 2020 di Lingkungan Bawaslu dan SE Sekjen No. 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/x/2020 Tentang Pokok - Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran T.A 2021 (Dokumen terlampir)	1								Selesai		
				2 Menentukan perencanaan secara cermat, serta memberikan sanksi yang tegas bagi Kepala Biro yang tidak menyampaikan usulan RKA-K/L; dan	1		PTL Semester I 2015 - - PTL Semester II 2016 - - PTL Semester I & II 2017 PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021	1								Selesai		
							Telah ditindaklanjuti dengan mewajibkan setiap unit kerja di Lingkungan Sekjen Bawaslu RI untuk menyampaikan usulan kegiatan RKA K/L. - Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah di Lingkungan Bawaslu Nomor 022-PR.01.02/KB/05/2021 tentang Permintaan Usulan Kegiatan Pada Setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024 (terlampir) - Usulan Kegiatan Kegiatan Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Usulan Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di wilayah Inspektur Wilayah II Bawaslu RI terlampir											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3 Mengoptimalkan kinerja pengawasan internal.	1		PTL Semester I dan II 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I dan II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021 - Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI telah menindaklanjuti dengan melakukan Reviu RKA KL setiap unit kerja pada penyusunan anggaran maupun revisi anggaran. (Terlampir contoh Catatan Hasil Reviu Revisi Anggaran pada Panwaslu Kota Yogyakarta Tahun 2017)	1									Selesai	
2	Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Kas Pada Bawaslu Belum Memadai	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan Kepala Biro Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memberikan batas waktu pertanggungjawaban, memperjelas status rekening Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ditutup/belum dipertanggungjawabkan, BP dan BPP Provinsi agar lebih tegas dalam pendistribusian dana UP dan TUP terkait pertanggungjawaban yang belum lengkap, lebih tertib dan cermat melakukan pembukuan, pungutan dan penyetoran pajak, melakukan rekonsiliasi BP dan BPP, serta KPA melakukan penutupan kas dan meneliti kesesuaian fisik kas;	1		Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - Surat No. 070ND/SET/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu tentang Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK TA 2014 PTL Semester II 2016 - - PTL Semester I dan II 2017 - - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>Telah ditindaklanjuti dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Keputusan Sekjen Nomor 1096-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu yang diubah menjadi Keputusan Sekjen Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Sekjen Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu - Menyusun Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota 											
				2	1		<p>Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para Kepala Sekretariat dan BP sehingga kinerja dan pemahaman SDM yang tersedia dapat lebih optimal; dan</p> <p>PTL Semester I 2015</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2016</p> <p>1. Surat undangan No. 524/Und/Bawaslu/SJ/VI/2015, tanggal 14 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi, tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 27-29 Juli 2015;</p> <p>2. Surat undangan No. 549/Und/Bawaslu/SJ/VI/2015, tanggal 24 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 2-4 Agustus 2015; dan</p> <p>3. Surat undangan No. 546/Und/Bawaslu/SJ/VI/2015, tanggal 24 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 30 Juli-1 Agustus 2015.</p>	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							4. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia Gelombang II (30 Juli-1 Agustus 2015 di Mercure Convention Center Ancol, DKI Jakarta). 5. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia Gelombang I (27-29 Juli 2015 di Hotel Aryaduta, Jakarta) 6. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia Gelombang III (2-4 Agustus 2015 di Hotel Mercure Convention Centre Jakarta											
				3	1		3 Menginstruksikan Kepala Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif bagi Bawaslu Provinsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penatausahaan keuangan. 1 Surat No. 070ND/SET/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu tentang Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK TA 2014			1							Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi	
							PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I 2017 1 Surat No. 070ND/SET/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu tentang Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK TA 2014 PTL Semester II 2017 PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021 - Telah ditindaklanjuti dengan melakukan Sosialisasi SPIP dan Titik Rawan Temuan Pemeriksaan kepada 34 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kab/Kota serta Pemeriksaan Fisik Kas dilakukan oleh APIP pada setiap penugasan yang bersifat assurance (Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan BA Pemeriksaan Fisik Kas oleh APIP Terlampir)											
3	Pengendalian Intern dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Diseleenggarakan oleh Bawaslu Belum Efektif			1 Menginstruksikan Pengawas Internal Bawaslu lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan, dan penguatan personel pengawasan internal dengan memberikan pendidikan dan pelatihan;	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat No. 075ND/SET/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana tentang Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK TA 2014 PTL Semester II 2016 - PTL Semester I 2017 Nota Dinas Nomor 075ND/SET/IV/2015 dari Sekretaris Staf di Pengawas Internal telah mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, dan telah diperoleh sertifikat diklat atas nama Pirogok, Ak	1									Selesai	
				2 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan agar lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kondisi lingkungan kerja.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat Sekjen Nomor 480.A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 13 Sept 15 perihal Sanksi Disiplin kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Surat Sekjen Nomor 480.A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 13 Sept 15 perihal Sanksi Disiplin kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Surat Sekjen Nomor 480.A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 13 Sept 15 perihal Sanksi Disiplin kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	1									Selesai	
B Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa																		
1	Kelebihan Pembayaran Atas Pengadaan ID Card dan Kaos Dalam Rangka Acara Penyelenggaraan Launching Nasional Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Sebesar Rp284.956.250,00 a. CV. Duta Selera Nusantara Rp116.800.000,00 b. CV. Aneka Usaha Jaya senilai Rp154.375.000,00 c. PT. Akindo Purna Pratama senilai	1	284.956.250,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan											
				1 Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp284.956.250,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pengadaan ID Card sebesar Rp271.175.000,00 dan Kaos Sebesar Rp13.781.250,00,00	1	284.956.250,00	PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Telah Disetor Rp154.375.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 16C228GESESLOGS2 dan sebesar Rp116.800.000,00 tanggal 11/12/2015 dengan NTPN SDB448LIA57VM2TI Telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 7 Des 2015 dgn NTPN 2FE5A85Q6P2O9GRI sebesar Rp 13.781.250,00	1	284.956.250,00								Selesai	284.956.250,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan(Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	Rp13.781.250,00			2 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia dan PPK	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan 2. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno sebagai PPK	1								Selesai	
2	Pengadaan Peralatan Kantor Berupa AC Casette dan AC Split, serta Komputer PC dan Printer Tidak Sesuai Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Minimal Sebesar Rp86.044.750,00 a. CV Andepad Sinarjaya senilai Rp40.824.887,00 dan CV. Ganesta Adi Perkasa senilai Rp40.318.864,00 b. CV. Azka Cipta Karya senilai Rp4.901.000,00	1	86.044.750,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.143.750,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp4.901.000,00 ke Kas Negara, selanjutnya menyerahkan bukti setor kepada BPK 2 Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Pengadaan dan PPK atas penyimpangan yang terjadi	1	86.044.750,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 1 Bukti penyetoran atas denda keterlambatan senilai Rp4.901.000,00, sesuai dengan NTPN: 0806081503040814, tanggal 11 Oktober 2014; dan 2 Bukti penyetoran atas kelebihan pembayaran senilai Rp81.143.750,00, sesuai dengan NTPN: 534548IPUN84C9E2, tanggal 28 April 2015.	1	86.044.750,00							Selesai	86.044.750,00
3	Pengadaan Pencetakan dan Distribusi Buku Panduan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tidak Sesuai Ketentuan	1	152.739.998,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp151.144.092,00 dan denda keterlambatan Rp1.595.906,00; dan menyerahkan bukti setor kepada BPK	1	152.739.998,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 Telah Disetor Rp151.144.092,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 90E048GEQEMGH152 dan sebesar Rp1.595.906,00 tanggal 07/12/2015 dengan NTPN 213D285QCJB754R1	1	152.739.998,00							Selesai	152.739.998,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan(Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Pengadaan dan PPK atas penyimpangan yang terjadi	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan 2. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno sebagai PPK	1									Selesai	
4	Pengadaan Operasional Ketatausahaan Berupa Pembuatan Aplikasi Keuangan dan Aplikasi Persuratan pada Biro TP3 Tidak Dapat Dimanfaatkan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp273.236.322,00 dan Kurang Pungut PPN sebesar Rp1.644.727,00	1	274.881.049,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp273.236.322,00 atas Aplikasi Keuangan sebesar Rp97.400.000,00 dan atas pengadaan Aplikasi SIAP fiktif sebesar Rp175.836.322,00; serta memungut dan menyetorkan PPN sebesar Rp1.644.727,00	1	274.881.049,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 Bukti setor sebesar Rp97.400.000,00, sesuai dengan nomor NTPN 0512040114101010 tanggal 24 Februari 2015 PTL Semester I 2016 Bukti setor sebesar Rp175.836.222,00 tanggal 7/12/2015 NTPN 3B2D685PE1EP43R1 dan sebesar Rp1.644.727,00 tanggal 23/12/2015 NTPN 0422324TNGRCHM31	1	274.881.049,00								Selesai	274.881.049,00
				2 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan dan PPK atas penyimpangan yang terjadi.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan 2. Surat No. 130/Bawaslu/SI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno sebagai PPK	1									Selesai	
5	Pelaksanaan Penyewaan Rumah Tinggal Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp606.583.236,0	1	606.583.236,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas sewa rumah dinas sebesar Rp181.583.600,00, biaya sewa fiktif sebesar Rp323.028.000,00, serta memungut pajak sebesar Rp101.971.636,00 (Rp113.301.818,00 – Rp11.330.182,00) dan menyerahkan bukti setor kepada BPK	1	606.583.236,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 Bukti setor atas Pengembalian kelebihan dan kekurangan biaya sewa Rumah Dinas/Apartemen sebesar Rp606.583.236,00 dengan bukti NTPN 150809415050601 tanggal 20 November 2014	1	606.583.236,00								Selesai	606.583.236,00

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Ir. Dermawan Adhi Santoso, MM sebagai PPK 2. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Iris Pramono, ST sebagai PPHP. 3. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan	1									Selesai	
6	Biaya Non Personel Sebesar Rp704.620.000,00 pada Pekerjaan Pengadaan Digitalisasi Pembersihan dan Standardisasi Data Tidak Layak Dibayarka	1	704.620.000,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1 Menginstruksikan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran pengadaan digitalisasi pembersihan standarisasi data sebesar Rp704.620.000,00 ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor kepada BPK.	1	704.620.000,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 1 Pengembalian Pekerjaan Digitalisasi Pembersihan Dan Standarisasi Data Pileg 2014 Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sebesar Rp30.000.000,00. (No. NTPN 0804081310110302) tanggal 6 November 2014; 2 Data Pileg Tahun 2009 Wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp30.000.000,00 (No NTPN 1102140301091004) tanggal 6 November 2014; 3 Data Pileg Tahun 2014 wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp30.000.000,00 (No NTPN 0702071215080815) tanggal 6 November 2014; 4 Data Kependudukan wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp30.000.000,00 (No NTPN 0412091314080903), tanggal 6 November 2014; 5 Data Pileg Tahun 2009 wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp70.000.000,00 (No NTPN 0904111206090401), tanggal 4 November 2014; 6 Data Kependudukan wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp70.000.000,00 (NO NTPN 0701101300141206), tanggal 4 November 2014; 7 Data Pileg Tahun 2014 wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp70.000.000,00 (No NTPN 1314130107050302), tanggal 4 November 2014;	1	30.000.000,00							Selesai	30.000.000,00	
																		70.000.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan(Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							8 Data Pileg Tahun 2014 wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebesar Rp. 70.000.000,00 (No NTPN 1204110615021005), tanggal 4 November 2014;		70.000.000,00								70.000.000,00
							9 Data Pileg Tahun 2014 wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebesar Rp. 12.700.000,00 (No NTPN 1307141215100502), tanggal 2 April 2015;		12.700.000,00								12.700.000,00
							10 Data Pileg tahun 2009 wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp. 19.560.000,00 (No NTPN 1501041312070104), tanggal 2 April 2015;		19.560.000,00								19.560.000,00
							11 Data Pileg tahun 2014 wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp. 12.700.000,00 (No NTPN 0806151506081507), tanggal 2 April 2015;		12.700.000,00								12.700.000,00
							12 Data Kependudukan Wilayah Sumatera dan Jawa sebesar Rp. 19.560.000,00 (No NTPN 0101100906021210), tanggal 2 April 2015;		19.560.000,00								19.560.000,00
							13 Data Kependudukan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebesar Rp. 120.050.000,00 (No NTPN 1007051305021309), tanggal 2 April 2015; dan		120.050.000,00								120.050.000,00
							14 Data Kepemiluan tahun 2009 wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku sebesar Rp. 120.050.000,00 (No NTPN 1108101107100507), tanggal 2 April 2015.		120.050.000,00								120.050.000,00
				2 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Panitia Pengadaan.	1		PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawastu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Jajang Abdullah sebagai PPK 2. Surat No. 130/Bawastu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan	1								Selesai	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Kelebihan Pembayaran Atas Pengadaan Sewa Gedung, Screen dan Bus Dalam Rangka Acara Penyelenggaraan <i>Launching</i> Nasional Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Sebesar Rp345.010.000,00	1	345.010.000,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan											
				1 Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp345.010.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pengadaan Sewa Gedung dan Sewa Screen sebesar Rp246.610.000,00 dan Sewa Bus sebesar Rp98.410.000,00;	1	345.010.000,00	<u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> Telah disetor sebesar Rp211.610.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 422AC8GEU7OQ7652. Sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 7/12/2015 dengan NTPN 0382E85Q2DCD4PRI, dan sebesar Rp98.400.000,00 tanggal 7/12/15 dengan NTPN 6A1DD85PK4HQ18R1	1	345.010.000,00								Selesai	345.010.000,00
				2 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan dan PPK yang telah mengakibatkan kerugian negara	1		<u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> 1. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno sebagai PPK 2. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan(Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Pelaksanaan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Media Elektronik pada Biro TP3 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp588.929.662,00	1	588.929.662,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu melalui Sekjen agar 1. Memerintahkan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) sebesar Rp588.929.662,00	1	588.929.662,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 1). Rp49.545.455,00 tanggal 7/12/2015 dengan NTPN 0891A85LQG312URI; 2). Rp7.454.545,00 tanggal 7/12/2015 dengan NTPN 927C085LVEDON7RI; 3). Rp94.000.000,00 tanggal 7/12/2015 dengan NTPN 7C61985M4M2C39RI; 4). Rp135.909.435,00 tanggal 7/12/15 dengan NTPN C633E85MKM9KV8RI; 5). Rp179.000.000,00 tanggal 7/12/15 dengan NTPN 6C91B85ME9D41K2RI; dan 8). Rp123.020.227,00 tanggal 7/12/15 dengan NTPN B01F785LRCH2FHRL	1	588.929.662,00							Selesai	588.929.662,00
				2. Memberikan sanksi kepada Panitia Pengadaan, PPK dan PPHP sesuai ketentuan yang berlaku	1		PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 1. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno sebagai PPK 2. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Iris Pramono, ST sebagai PPHP. 3. Surat No. 130/Bawaslu/SJ/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang teguran lisan kepada sdr. Drs. Ari Susanto sebagai Pejabat Pengadaan	1								Selesai	
9	Terdapat Duplikasi Anggaran Terkait Operasional Kendaraan Sewa di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Minimal Sebesar Rp58.979.000,00	1	58.979.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu 1. Menegur dan menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menarik kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp7.044.240,00 dari Panwaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang belum menyetor dan menyampaikan bukti setor kepada BPK	1	7.044.240,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan PTL Semester I 2015 PTL Semester II 2016 PTL Semester I&II 2017 PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -						1	7.044.240,00		Belum ada Tindak Lanjut	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
10	Pengadaan Sewa Kendaraan Roda Empat tahun 2013 dan 2014 di Bawastu Provinsi Jawa Timur Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, dan terdapat pungutan sebesar Rp47.610.000,00	1	47.610.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu untuk 1 Menegur KPA agar lebih meningkatkan pengawasan atas pengadaan barang/jasa; dan	1		Bawastu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan <u>PTL Semester I 2015</u> <u>PTL Semester I 2016</u> <u>PTL Semester I&II 2017</u> - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1				Belum ada Tindak Lanjut	
				2 Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawastu Jawa Timur untuk memberikan sanksi dan menginstruksikan kepada Sdr. H selaku pejabat pengadaan barang/jasa untuk menyetorkan sebesar Rp47.610.000,00 ke Kas Negara	1	47.610.000,00	<u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> <u>PTL Semester II 2016</u> Surat No 144/Bawastu/SJ/TU.03/2016 tanggal 29 Februari <u>PTL Semester I&II 2017</u> - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -			1	47.610.000,00					Pemberian sanksi dan setoran ke kas negara belum ada	
							PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -										
C Perlaknaan Anggaran Perjalanan Dinas																	
1	Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berupa Tiket Pesawat pada Kantor Pusat Bawastu Tidak Sesuai Ketentuan	1	1.468.108.407,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu melalui Sekjen Bawastu agar memerintahkan 1 Kepala Biro Administrasi Bawastu menyetorkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Kas Negara sebesar Rp55.471.101,00 dan Sekretariat Bawastu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar ... Rp56.356.000,00 (Rp81.493.210,00-Rp25.137.210,00) dan menyampaikan bukti setor kepada BPK	1	111.827.101,00	Bawastu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> <u>PTL Semester II 2016</u> - <u>PTL Semester I 2017</u> - 1 Bukti setor sebesar Rp1.300.000,00 tanggal 29/12/2016 dengan NTPN 6733343C4G39SVUP 1.300.000,00 2 Bukti setor sebesar Rp55.471.101,00 tanggal 17/01/2017 dengan NTPN 16BD24FNNG82JKQI 55.471.101,00 <u>PTL Semester II 2017</u> -			1	55.056.000,00					Belum seluruhnya disetor ke kas negara	1.300.000,00 55.471.101,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -											
				2 Kuasa Pengguna Anggaran agar menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I&II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021	1								Selesai		
							-Telah ditindaklanjuti dengan peningkatan pengendalian oleh KPA di Bawaslu Provinsi (Nota Dinas instruksi kepada pengelola keuangan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas oleh KPA setiap bulan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terlampir)											
				3 Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Bawaslu dan BPP Provinsi agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas; dan	1		PTL Semester I 2015 PTL Semester II 2016 PTL Semester I 2016 PTL Semester I&II 2017 PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021	1										
							- Telah ditindak lanjut dengan mewajibkan setiap Bawaslu Provinsi untuk melakukan verifikasi terhadap semua pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu dan telah diimplementasikan oleh setiap Bawaslu Provinsi dengan melakukan verifikasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, bukti verifikasi pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan terlampir.											

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4 Para pelaksana perjalanan dinas agar lebih tertib dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I&II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL SEM I 2019 - PTL SEM II 2019 - PTL SEM I 2020 - PTL SEM II 2020 -	1									Selesai	
							PTL SEM I 2021 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. mengatur bahwa pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas paling lambat 2 hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas, apabila tidak dipenuhi maka ybs tidak dapat dibayarkan untuk perjalanan dinas berikutnya sampai melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebelumnya sesuai dengan Kep Sekjen Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01/00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Bawaslu (Pedoman terlampir)											

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Pembayaran Uang Harian Paket Fullday Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Medan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6.615.000,00	1	6.615.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu melalui Sekjen Bawaslu agar memerintahkan			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan											
				1 Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Medan segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.615.000,00 selanjutnya bukti setor disampaikan kepada BPK; dan	1	6.615.000,00	PTL Semester I 2015 PTL Semester I 2016 - Telah disetor ke kas negara sebesar Rp6.615.000 dgn NTPN 141203020404707 tgl 20 Okt 2014	1	6.615.000,00							Selesai	6.615.000,00	
				2 Bendahara Pengetuaran Pembantu agar lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I & II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL SEM I 2019 - PTL SEM II 2019 - PTL SEM I 2020 - PTL SEM II 2020 - PTL SEM I 2021 - Telah ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pembukuan oleh Bendahara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kota Medan pada aplikasi SAS (BKU dan Buku-Buku Pembantu terlampir)	1										
D Honorarium																		

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembayaran Honor atas kegiatan Pokja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp359.042.500,00	1	359.042.500,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu melalui Sekjen Bawastu agar			Bawastu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan										
				1 Menginstruksikan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam SK Pokja atas <i>output</i> pokja yang belum ada atau belum sesuai dengan tujuan SK Pokja, agar menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp359.042.500,00 dan menyampaikan bukti setor ke BPK	1	359.042.500,00	PTL Semester I 2015 1 Bukti setor ke kas negara sebesar Rp37.825.000,00 sesuai dengan nomor NTPN C7F1D84F0B86ODA2 tanggal 20 April 2015; 2 Bukti setor ke kas negara sebesar Rp47.500.000,00 sesuai dengan nomor NTPN CC2658AS1M34GCR tanggal 22 April 2015; 3 Bukti setor ke kas negara sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan nomor NTPN B406B800CF2UGN2P tanggal 21 April 2015; dan 4 Bukti setor ke kas negara sebesar Rp42.165.000,00, sesuai dengan nomor NTPN FF6608DNCDB097C2 tanggal 24 April 2015. PTL Semester I 2016 1. Sebesar Rp41.310.000,00 tanggal 26/11/15 dengan NTPN FDOCA720SLNK3OR2; 2. Sebesar Rp34.042.500,00 tanggal 26/11/15 dengan NTPN E172172NO00H61R2; 3. Sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 26/11/2015 dengan NTPN 8340E72NITO2ADR2; dan 4. Sebesar Rp56.700.000,00 tanggal 1/12/15 dengan NTPN AAA4F7J5HG75M18L	1	37.825.000,00							Selesai	37.825.000,00
									181.552.500,00								181.552.500,00
2	Jumlah PPL Tidak Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu			Bawastu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan										
				1 Menetapkan peraturan mengenai penentuan jumlah PPL sehingga kewajiban PPL sesuai dengan Undang Undang dapat dipenuhi dengan baik dan tidak terjadi perbedaan penafsiran antar Panwaslu Kabupaten/Kota dan antar Bawastu Provinsi tentang batasan jumlah PPL	1		PTL Semester I 2015 PTL Semester II 2016 - PTL Semester I&II 2017 - PTL Semester I 2018	1								Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan(Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>Telah ditindaklanjuti, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 92 angka 4 menyatakan bahwa jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa disetiap kelurahan/desa sebanyak 1 orang</p> <p>PTL SEM I 2021</p> <p>Telah ditindaklanjuti, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 92 angka 4 menyatakan bahwa jumlah anggota panwaslu kelurahan/desa disetiap kelurahan/desa sebanyak 1 orang (UU No 7 Tahun 2017 dan SK PPL pada penyelenggaraan Pilkada di Kab Belitung Timur terlampir)</p>											
				2 Melalui Sekjen Bawaslu agar menginstruksikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan agar mempedomani Peraturan Bawaslu tentang penentuan jumlah PPL di setiap Kabupaten/Kota	1		<p>PTL Semester I 2015</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2016</p> <p>Surat Sekjen Nomor 517.A/Bawaslu/XI/2014 tanggal 4 Nov 2014 kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulsel tentang Penentuan Jumlah PPL</p>	1									Selesai	
E	Pengelolaan Kas																	
1	Kekurangan Penerimaan Negara Atas Pajak yang Telah Dipungut dan Belum Disetor ke Kas Negara minimal Rp1.055.572.953,00	1	1.055.572.953,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu melalui Sekjen Bawaslu agar:				Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan										
				1 Meningkatkan kompetensi BP dan BPP sehingga lebih memahami ketentuan perpajakan Bendahara	1		<p>PTL Semester I 2015</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2016</p> <p>PTL Semester II 2016</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I&II 2017</p> <p>-</p> <p>PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 -</p> <p>PTL Semester I 2019 -</p> <p>PTL Semester II 2019 -</p> <p>PTL Semester I 2020 -</p> <p>PTL Semester II 2020 -</p> <p>PTL SEM I 2021</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan diklat Bendahara Bagi BP dan BPP di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota serta menyusun Buku Saku Pajak bagi bendahara di Lingkungan Bawaslu (Dokumen Pelaksanaan diklat bendahara dan Buku saku pajak terlampir)</p>	1										
	a. Bawaslu Pusat senilai Rp986.507.988,00			2 Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Bawaslu segera menyetorkan pajak sebesar	1	987.974.504,00	PTL Semester I 2015			1	825.447.729,00						Belum seluruhnya disetorkan ke kas negara	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	b. Bawaslu Jabar senilai Rp69.065.018,00			Rp986.507.988,00 dan menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyetorkan pajak sebesar Rp1.466.516,00, serta menyampaikan bukti setor ke BPK			I H2PI nilai temuan Rp72.784.929,00 telah lunas seluruhnya dibayar dengan rincian sbb:										
							1 Bukti setor SSP No NTPN senilai 70.094.668,00;		70.094.668,00								70.094.668,00
							2 Bukti setor SSP NO NTPN 0409000609100001 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							3 Bukti setor SSP NO NTPN 0608060708110715 senilai Rp250.000,00; -		250.000,00								250.000,00
							4 Bukti setor SSP NO NTPN 1205070401111114 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							5 Bukti setor SSP NO NTPN 0105101314021202 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							6 Bukti setor SSP NO NTPN 1102070603041206 senilai Rp250.000,00; -		250.000,00								250.000,00
							7 Bukti setor SSP NO NTPN 0508131501110305 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							8 Bukti setor SSP NO NTPN 0703031415001412 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							9 Bukti setor SSP NO NTPN 0911010313060913 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							10 Bukti setor SSP NO NTPN 0007040612060107 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							11 Bukti setor SSP NO NTPN 0407030207041413 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							12 Bukti setor SSP NO NTPN 0514061213040515 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							13 Bukti setor SSP NO NTPN 1104060507040205 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							14 Bukti setor SSP NO NTPN 0409090207140310 senilai Rp250.000,00;		250.000,00								250.000,00
							15 Bukti setor SSP NO NTPN 0010030106011214 senilai Rp250.000,00.		250.000,00								250.000,00
							II DKPP dengan nilai temuan Rp2.074.091,00 telah lunas dibayar sebesar Rp2.074.091,00 dengan rincian sbb:										
							1 Bukti setor SSP NO NTPN 0600140411051014 senilai Rp437.600,00;		437.500,00								437.500,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							2 Bukti setor SSP NO NTPN 11030712140100111 senilai Rp1.031.818,00;		1.031.818,00								1.031.818,00
							3 Bukti setor SSP NO NTPN 0706090503000603 senilai Rp154.773,00;		154.773,00								154.773,00
							4 Bukti setor SSP NO NTPN 1313110006071115 senilai Rp450.000,00;		450.000,00								450.000,00
							III Biro Administrasi nilai temuan Rp85.390.644,00 menunggu rekapan BKU Bendahara										
							1 Bukti Setor SSP senilai Rp83.887.500,00		83.887.500,00								83.887.500,00
							IV Biro TP3 nilai temuan Rp345.658.271,00										
							Belum ada setoran										
							V Pengawas Pemilu Luar Negeri nilai temuan Rp480.600.000,00										
							Belum ada setoran										
							PTL Semester II 2016										
							PTL Semester I 2017										
							1 Bukti setor sebesar Rp1.504.000,00 tanggal 17/01/2017 dengan NTPN 207968PLKS0TPDQO		1.504.000,00								1.504.000,00
							PTL Semester II 2017										
							PTL Semester I 2018										
							Setoran ke kas daerah senilai Rp1.466.516,00		1.466.516,00								1.466.516,00
							PTL Semester I 2015										
							PTL Semester I 2016										
							PTL Semester II 2016										
							1 Surat Nomor 0142/Bawaslu/92/TU.03/11/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal permohonan narasumber dan tenaga pendamping teknis peraturan, pelaporan dan pengisian aplikasi perpajakan (E-Billing)										
							2 Surat Perintah Nomor 0284B/SJ/II/2016 beserta lampiran peserta rapat dalam rangka rapat pembinaan pengelolaan keuangan Bawaslu tanggal 1 Maret 2016 di ruang rapat lantai 4 gedung Bawaslu RI										
							3 Notulensi rapat pembinaan pengelolaan keuangan dengan materi pertanggungjawaban UP dan TUP dengan Narasumber KPPN jakarta VI										
							3 Meningkatkan pengendalian atas kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu	1									Selesai

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah										
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1							4 Notulensi rapat pembinaan pengelolaan keuangan dengan materi Peraturan dan pelaporan perpajakan dan teknis pengisian aplikasi perpajakan dengan narasumber account representatif KPP Menteng III											
2	Terdapat Selisih Kurang Saldo Kas pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur Minimal Sebesar Rp1.002.150.365,00	1	1.002.150.365,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu untuk 1. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan, menarik dan menyetorkan kembali kerugian negara sebesar Rp968.793.365,00 (pengembalian TUP belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp102.595.365,00 + selisih antara Saldo BKU dan Kas sebesar Rp234.555.000,00 + pembukuan ganda sebesar Rp665.000.000,00 - selisih pembukuan Rp33.357.000,00)	1	968.793.365,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL semester II 2016</u> - <u>PTL Semester I&II 2017</u> - <u>PTL SEM I 2018 & SEM II 2018</u> - <u>PTL Semester I 2019</u> - <u>PTL Semester II 2019</u> - <u>PTL Semester I 2020</u> - <u>PTL Semester II 2020</u> - <u>PTL Semester I 2021</u> -					1	968.793.365,00				Belum ada Tindak Lanjut	
3	Penerimaan Jasa Giro Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Minimal Sebesar Rp118.124.301,00 Belum Disetorkan ke Kas Negara a. Bawaslu Jateng senilai Rp58.688.544,00 b. Bawaslu Jatim senilai Rp36.415.402,00 c. Bawaslu Jabar senilai Rp23.020.345,00	1	118.124.301,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu melalui Sekjen Bawaslu agar: 1. Menginstruksikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menyetorkan sisa jasa giro yang masih berada di rekening koran BP/BPP sebesar Rp35.477.031,00 dan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	35.477.031,00	Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan <u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> - <u>PTL semester II 2016</u> - <u>PTL Semester I&II 2017</u> - <u>PTL SEM I 2018 & SEM II 2018</u> - <u>PTL Semester I 2019</u> - <u>PTL Semester II 2019</u> - <u>PTL Semester I 2020</u> - <u>PTL Semester II 2020</u> - <u>PTL Semester I 2021</u> -					1	35.477.031,00				Belum ada Tindak Lanjut	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Atas LHP yang Diterbitkan Tahun 2014
 Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2013 dan 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa			Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
										Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL SEM I 2018 - PTL SEM II 2018 - PTL SEM I 2019 - PTL SEM II 2019 - PTL SEM I 2020 - PTL SEM II 2020 - PTL SEM I 2021 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat undangan No. 524/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi, tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 27-29 Juli 2015; 2. Surat undangan No. 549/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 2-4 Agustus 2015; dan 3. Surat undangan No. 546/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu, Ketua Panwaslu, BPP Panwaslu, Pengelola Dana Hibah Bawaslu Provinsi tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 30 Juli-1 Agustus 2015.	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2014
 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PELAKSANAAN ANGGARAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2013 DAN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Kas Daerah/Perusahaan (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							4. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi Seluruh Indonesia Gelombang II (30 Juli-1 Agustus 2015 di Mercure Convention Center Ancol, DKI Jakarta. 5. Penyelenggaraan diklat Bendahara Bagi BP dan BPP di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota serta menyusun Buku Saku Pajak bagi bendahara di Lingkungan Bawaslu (Dokumen Pelaksanaan diklat terlampir)											
				3	1		Menginstruksikan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif bagi Bawaslu Provinsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penatusahan keuangan PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 - PTL Semester II 2016 - PTL Semester I 2017 1 Surat No. 070ND/SET/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Sekretariat Bawaslu tentang Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu BPK TA 2014	1									Selesai	
				4	1		Menginstruksikan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif bagi Bawaslu Provinsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penatusahan keuangan PTL Semester I 2015 - PTL Semester II 2016 - PTL SEM I 2017 - PTL SEM II 2017 - PTL SEM I 2018 & SEM II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021 - Telah ditindaklanjuti dengan melakukan Sosialisasi SPIP dan Titik Rawan Temuan Pemeriksaan kepada 34 Bawaslu Provinsi dan 514 Bawaslu Kab/Kota (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terlampir)	1									Selesai	
	JUMLAH	20	7.159.967.471		44	5.568.148.686,00		36	3.628.720.321,00	4	928.113.729,00	4	1.011.314.636,00	-	-	-	3.628.720.321,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Dilaksanakan juga dengan Alasan yang Sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPI																	
1	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1 Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara; dan	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada 1. Sdr. Amru, S.Sos., M.Si selaku KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2. Sdr. Trimuda Ancas, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur 3. Sdr. Ahmad Firdaus Nasution, A.Md selaku KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 4. Sdr. Iwan Tero, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	1	-							Selesai	
				2 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi BP dan BPP Kantor Pusat Bawaslu, serta BP Bawaslu Provinsi.	1		PTL Semester I 2015 1 Surat undangan No. 524/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 27-29 Juli 2015; 2 Surat undangan No. 524/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 27-29 Juli 2015; dan 3 Surat undangan No. 524/Und/Bawaslu/SJ/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, tentang pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota, pelaksanaan tanggal 27-29 Juli 2015. PTL Semester I 2016 - Telah diserahkan laporan kegiatan pelaksanaan Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah kabupaten/kota	1								Selesai	
2	Realisasi Kegiatan Tidak Sesuai dengan Klasifikasi Anggaran	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Belanja			Memerintahkan semua satker memperhatikan jenis belanja dan klasifikasi barang yang dibutuhkan dalam untuk membuat perencanaan dan penyusunan anggaran.	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat Sekjen Nomor 307.A/Bawaslu/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Klasifikasi Anggaran Belanja	1								Selesai	
Kepatuhan																	
3	Pengadaan dan Pengiriman Alat Tulis Kantor untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri Berindikasi Fiktif Sebesar Rp3.001.600.000,00	1	3.001.600.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:			Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan										
				1 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi atas kebenaran bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran;	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada Sdr. Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si. Selaku PPK untuk kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri	1								Selesai	
				2 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; dan	1		PTL Semester I 2015 - PTL Semester I 2016 Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin kepada 1. Sdri. Triza Novia, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) 2. Sdr. Aan Djam'an selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) 3. Sdr. Setya Adi Nugraha selaku Pengelola Keuangan pada Bagian SDM dan TU Pimpinan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) 4. Sdr. Raul selaku Kasubag Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)	1								Selesai	
				3 Memerintahkan PPK segera menyetor ke Kas Negara atas penggunaan TUP untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar	1	3.001.600.000,00	PTL Semester I 2015 1 Bukti setor sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 11/08/2015 NTPN 0EF865BB049L9KLI; dan		2.828.070.760,00	1	173.529.240,00					Belum seluruhnya disetorkan ke kas negara	2.828.070.760,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Rp3.001.600.000, selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK			<p>2 Bukti setor sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 4/9/2015 NTPN 4A62774UDBOTEJS2.</p> <p>PTL Semester I 2016 Bukti setor sebesar Rp225.000.000,00 tanggal 22/1/2016 NTPN 35B5C6T0D9MBFMD2</p> <p>PTL Semester II 2016 -</p> <p>PTL Semester I 2017 - Bukti setor sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 8/3/2016 NTPN 2F2F16EFEG1R8SQ2</p> <p>PTL Semester II 2017 - Bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 13/11/2017 NTPN 38B1A2TIVQOMGCCI - Bukti setor sebesar Rp401.272.560,00 tanggal 30/12/2016 NTPN 8F74940U69O8SVN2</p> <p>PTL Semester I 2018 - Bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 tanggal 5/07/2018, NTPN 7A2CA6CN1OTTE18I</p> <p>PTL Semester II 2018 - Bukti setor sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 6/9/2018 NTPN AFF4F0SHF24EDH52 - Bukti setor sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 22/10/2018 NTPN C047615AO08NBKV2 - Bukti setor sebesar Rp91.300.000,00 tanggal 31/12/2018 NTPN 8AD322GMOQ73ASV1 - Bukti setor sebesar Rp135.498.200,00 tanggal 31/12/2018 NTPN 6616226VBUT700AI</p> <p>PTL Semester I 2019 PTL Semester II 2019 - Bukti setor sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 16/12/2019 NTPN E50A248VU0SJPJL8</p> <p>PTL Semester II Tahun 2020 1. Bukti setor sebesar Rp5.000.000,00 NTPN 22ADA6U8DPF7TQQB tanggal 28/07/2020 2. Bukti setor Rp440.000.000,00 NTPN 0CCCE6USDPTK3PBR tanggal 11/12/2019</p> <p>PTL Semester I 2021: -</p>											
4	Pekerjaan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp1.118.003.712.00	1	1.118.003.912.00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:														

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1	1		<p><u>PTL Semester I 2015</u></p> <p>-</p> <p><u>PTL Semester I 2016</u></p> <p>1. Surat No. 0480/A/Bawastu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawastu tentang sanksi disiplin berupa teguran lisan kepada</p> <p>a. Sdr. Drs. Bernard D. Sutrisno, M.Si selaku PPK pekerjaan penayangan Iklan Masyarakat (ILM)</p> <p>b. Sdr. Iris Pramono, ST selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan penayangan Iklan Masyarakat (ILM)</p> <p>c. Sdr. Iwandi Dullah selaku Anggota/staf pendukung Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan penayangan Iklan Masyarakat (ILM)</p> <p>d. Sdr. Entis Supratman selaku Anggota/staf pendukung Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan penayangan Iklan Masyarakat (ILM)</p> <p>e. Sdr. Triza Novia selaku Bendahara Pengeluaran</p> <p>2. Surat No. 479/A/Bawastu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawastu tentang sanksi disiplin, kepada Ernawati Perangin-angin, SE selaku PPSPM</p>	1									Selesai	
				2	1	1.118.003.912,00	<p><u>PTL Semester I 2015</u></p> <p>-</p> <p><u>PTL Semester I 2016</u></p> <p>Bukti setor sebesar Rp1042.565.957,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Rp96.561.727,00 tanggal 10/12/15 NTPN 643C18GLUK8N6H52;</p> <p>2. Rp175.500.000,00 tanggal 18/12/15 NTPN 1E4301H4S6LCTE92;</p> <p>3. Rp155.400.000,00 tanggal 18/12/15 NTPN 17BE71H584GBCF92;</p> <p>4. Rp48.807.955,00 tanggal 18/12/15 NTPN 0B0601H5BAOJ292;</p> <p>5. Rp48.807.955,00 tanggal 23/12/15 NTPN ASDE524SGGSBVD3L;</p> <p>6. Rp81.258.727,00 tanggal 23/12/15 NTPN E7EDA24TEG4LGF3L;</p>	1	1.118.003.912,00							Selesai	1.118.003.912,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>7. Rp77.912.227,00 tanggal 23/12/15 NTPN 369E1245QMR2VB3I;</p> <p>8. Rp3.035.036,00 tanggal 30/12/15 NTPN 1E7543073TTLBF2;</p> <p>9. Rp66.040.000,00 tanggal 30/12/15 NTPN 46F07306H0I2BFF2;</p> <p>10. Rp73.820.455,00 tanggal 30/12/15 NTPN C65AD306S2EUIJ5F2;</p> <p>11. Rp22.059.818,00 tanggal 10/12/15 NTPN CD9638GO03NUDA52;</p> <p>12. Rp7.936.091,00 tanggal 10/12/15 NTPN 1D17E8GNQS3H1852;</p> <p>13. Rp55.431.091,00 tanggal 10/12/15 NTPN D95A7BGMM6KJCQ52;</p> <p>14. Rp136.250.691,00 tanggal 10/12/2015 NTPN 3BCCBBGLPLUAIIB52;</p> <p>15. Rp5.736.193,00 tanggal 10/12/2015 NTPN 4766BBGLGL7JH152;</p> <p>16. Rp36.720.491,00 tanggal 15/12/2015 NTPN 706DF104ARSTDNV1;</p> <p>17. Rp95.455,00 tanggal 18/1/2016 NTPN 594AC6BROBQ2RRB2; dan</p> <p>18. Rp26.630.000,00 tanggal 13/11/2015 NTPN 90D153GOARSSOTSP.</p>											
5	Pembayaran Uang Saku Fullboard dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor Kegiatan PPLN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp68.200.000,00	1	68.200.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:	1		<p><u>PTL Semester I 2015</u></p> <p>-</p> <p><u>PTL Semester I 2016</u></p> <p>Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada</p> <p>1. Sdr. Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si. Selaku PPK untuk kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri</p> <p>2. Sdri. Triza Novia, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN)</p> <p>3. Sdr. Aan Djam'an selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN)</p>	1								Selesai		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				2	1	68.200.000,00	<p>PTL Semester I 2015</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2016</p> <p>Bukti setor sebesar Rp20.940.000,00 tanggal 22/1/2016 NTPN C095FGT6T8CSED2.</p> <p>PTL Semester II 2016</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2017</p> <p>1. Bukti setor sebesar Rp360.000,00 tanggal 20 Februari 2017 NTPN 917F02A9EANGL3M2 360.000,00</p> <p>2. Bukti setor sebesar Rp240.000,00 tanggal 20 Februari 2017 NTPN 8DES5F2AA6DDJ5M2 240.000,00</p> <p>3. Bukti setor sebesar Rp450.000,00 tanggal 20 Februari 2017 NTPN F0E3E2A9RN4IR1M2 450.000,00</p> <p>PTL Semester II 2017</p> <p>Bukti setor sebesar Rp30.490.000,00 tanggal 16/10/2017 NTPN 3AA8E48C23UIA842 30.490.000,00</p> <p>PTL Semester I 2018 -</p> <p>PTL Semester II 2018 -</p> <p>PTL Semester I 2019 -</p> <p>PTL Semester II 2019 -</p> <p>PTL Semester I 2020 -</p> <p>PTL Semester II 2020 -</p> <p>PTL Semester I 2021 -</p>		20.940.000,00	1	15.720.000,00							Belum seluruhnya disetor	52.480.000,00
6	Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Sebesar Rp780.139.039,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan Kontrak	1	780.139.039,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:												Selesai			
				1	1		<p>PTL Semester I 2015</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2016</p> <p>Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin kepada</p> <p>1. Ir. Drmawan Adhi Santoso, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Konsultan</p> <p>2. Sdr. Waller Lumban Gaol selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang</p>	1											
				2	1	780.139.039,00	<p>PTL Semester I 2015</p> <p>1. Bukti setor sebesar Rp4.259.151,00 tanggal 2/7/2015 NTPN 1CC9F2JU5TA1V078; dan</p>	1	780.139.039,00		-						Selesai	780.139.039,00	
							2. Bukti setor sebesar Rp3.900.000,00 tanggal 30/7/2015 NTPN 2CF4166L0SVP216.												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Dilandaskan Juri dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							<p>PTL Semester I 2016</p> <p>Bukti setor sebesar Rp666.729.888,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp43.470.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN BDEF88GLC9H8CA52; 2. Rp38.155.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 891F58GL3REIQL52; 3. Rp4.390.000,00 tanggal 11/12/2015 dengan NTPN 6E6638MG6768VFTL; 4. Rp38.542.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 9E82B8GINAH14452; 5. Rp38.640.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN BAE0F8GJ5IDJPF52; 6. Rp39.258.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN FCE3E8GIO90F552; 7. Rp45.730.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN B154F8GKUCU7UC52; 8. Rp38.580.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN A3DBE8GIG17SPL52; 9. Rp38.710.000,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN 20E668GII68MSQ52; 10. Rp72.487.500,00 tanggal 10/12/2015 dengan NTPN EC5B68GJDF7VP52; 11. Rp90.006.295,00 tanggal 30/12/2015 dengan NTPN 738E7307LM0VVTF2; 12. Rp89.053.877,00 tanggal 18/12/2015 dengan NTPN 447B91H4ANSOA192; dan 13. Rp89.707.216,00 tanggal 18/12/2015 dengan NTPN 3B9021H414H7PP92. <p>PTL Semester II 2016</p> <p>Rp10.000.000,00 tanggal 10/8/2016 NTPN 7328D8CKIIN77U52</p> <p>PTL Semester I 2017</p> <p>- Bukti setor sebesar Rp95.250.000,00 tanggal 18/01/2017 NTPN D2EBE4S2HOM83PI2</p>										
7	Pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip dan Barang Kantor Bawaslu Sebesar Rp124.726.086,55 Tidak	1	124.726.086,55	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sesuai dengan Ketentuan Kontrak			1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi atas kebenaran bukti pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran, dan kepada Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, dan	1		<u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> Surat No. 0480A/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dari Sekretaris Jenderal Bawaslu tentang sanksi disiplin, kepada 1. Sdr. Dirja A. Kadir, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan Barang Kantor Bawaslu RI 2. Sdr. M. Soleh selaku Pnggota Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan Barang Kantor Bawaslu RI 3. Sdr. Dian Lasmana selaku Pnggota Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan Barang Kantor Bawaslu RI 4. Sdr. Iris Pramono, ST selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan Barang Kantor Bawaslu RI 5. Sdr. Waller Lumban Gaol selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang	1								Selesai	
				2. Memerintahkan PPK segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pembangunan gedung arsip dan barang Kantor Bawaslu sebesar Rp124.726.086,55, selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	124.726.086,55	<u>PTL Semester I 2015</u> - <u>PTL Semester I 2016</u> Bukti setor sebesar Rp124.726.087,00 tanggal 27/11/2015 NTPN B69ED76LQ2KE68JL	1	124.726.086,55							Selesai	124.768.087,00
8	Realisasi Belanja Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sebesar Rp2.118.598.300,35			Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja yang tidak didukung bukti atau menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.118.598.300,35 selanjutnya bukti setor disampaikan ke BPK.	1		<p>PTL Semester I 2015 -</p> <p>PTL Semester I 2016 - Telah dilakukan verifikasi oleh Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI terhadap PPK PPLN Tahun 2014 sebesar Rp1.364.095.420,00 sesuai BA Hasil Verifikasi tanggal 19 Januari 2016</p> <p>PTL semester II 2016 -</p> <p>PTL Semester I 2017 -</p> <p>PTL Semester II 2017 -</p> <p>Telah ditindaklanjuti sesuai dengan surat Sekjen No 0155/Bawaslu/SJ/PW-05/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. Nilai yang telah direalisasi senilai Rp540.611.084,70</p> <p>PTL Semester II 2018 - Telah dilakukan Verifikasi oleh Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI Terhadap PPK PLN Tahun 2018 sebesar Rp540.611.084,70 sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pertanggungjawaban yang tidak lengkap PPK PPLN Tahun 2014 Nomor 0155/bawaslu/SJ/pw.09/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018</p> <p>PTL Semester I 2019 -</p> <p>PTL Semester II 2019 -</p> <p>PTL Semester I 2020</p>								Belum sesuai dan dalam proses Tindak Lanjut. Masih terdapat realisasi belanja yang belum dipertanggungjawabkan. Nilai temuan yang belum dipertanggungjawabkan sesuai temuan adalah sebesar Rp2.118.598.300,35. Sampai dengan semester II 2020 nilai yang telah diverifikasi adalah sebesar Rp2.083.960.126,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum diverifikasi sebesar Rp34.734.573,00.		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2015
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							- telah dilakukan Verifikasi oleh Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI Terhadap PPK PPLN Tahun 2014 sebesar Rp179.253.622,00 sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pertanggungjawaban yang tidak lengkap PPK PPLN Tahun 2014 Nomor 002.a/LHR/PI/H2PI/2020 tanggal 28 Februari 2020. PTL Semester II 2020 : - PTL Semester I 2021 : -											
	Jumlah	8	5.092.669.037,55		15	5.092.669.037,55		12	4.903.419.797,55	3	189.249.240,00	-	-	-	-		4.903.461.798,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satker Bawastu RI Belum Tertib	1		<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawastu untuk:</p> <p>1. Mengoptimalkan pengawasan atas penatausahaan kas; dan</p>	1		<p>PTL Semester I 2016 --</p> <p>PTL Semester I 2017</p> <p>a. Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 0078/Bawastu/SJ/PW.06.02/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang berisi instruksi kepada Kepala Bagian Keuangan, PPK, dan PPSPM untuk mengoptimalkan pengawasan atas penatausahaan kas dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara Pengeluaran.</p> <p>b. Selain itu Bawastu juga telah menyusun SOP No 0108/Bawastu/SJ/09.03/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengajuan dan Pertanggungjawaban TUP di Lingkungan Bawastu.</p> <p>c. Dalam rangka mengawasi dan pengendalian tugas BP, Sekjen Bawastu Mengeluarkan Surat Perintah untuk pemeriksaan Kas Tunai yang dilaksanakan oleh BP. Surat perintah dikeluarkan secara rutin pada saat dilaksanakan pemeriksaan kas tunai. Data Surat Perintah yang diperoleh saat ini adalah : (1) Surat Perintah Nomor 1019/SJ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan (2) sURAT pERINTAH nOMOR 0536/sj/iii/2016 TANGGAL 13 maret 2017.</p>	1								Selesai	
				<p>2. Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK pada Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, Biro Administrasi, Bagian Teknis Pengawasan Pemilu, Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Sosialisasi, Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, Bagian Hukum, dan Biro Administrasi DKPP yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.</p>	1		<p>PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawastu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437 Sdr. Adisti Primastuti selaku Bendahara Pengeluaran Bawastu RI. 2.0437.1. Sdr. Yusti Erlina selaku PPK Bagian TLP. 3. 0437.2. Sdr. Maria Amelia Simaga selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian TLP. 4. 0437.3. Sdr. Drs. Harimurti Wicaksono selaku PPK Bagian TP2. 5. 0437.4. Sdr. Atik Arfan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian TP2. 6. 0437.5.Sdr. Agung B.G.I.Atmaja selaku PPK Bagian Penyelesaian Sengketa.</p>	1								Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1							7. 0437.6. Sdr. Muhammad Zarwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penyelesaian Sengketa. 8. 0437.7. Sdr. Johnly Pedro Maretek selaku PPK Bagian Sosialisasi. 9. 0437.8. Sdr. Aji Nugroho selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Sosialisasi. 10. 0437.9. Sdr. Dermawan Adhi Santoso selaku PPK pada Biro Administrasi 11. 0437.10. Adita Nugroho Pamungkas selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Administrasi 12. 0437.11. Sdr. Ferdinand Eskol T.S selaku PPK pada Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran 13. 0437.12. Sdr. Andika Asykar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran 14. 0437.13. Sdr. Tagor Fredy selaku PPK pada Bagian Hukum 15. 0437.14. Sdr. Cahyo F. Tadhery selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum 16. 0437.15. Sdr. Ahmad Khumaidi selaku PPK pada Biro Administrasi DKPP 17. 0437.16. Sdr. Titis Adityo Nugroho selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Administrasi DKPP										
2	Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan Kas Lainnya dan Setara Kas Tidak Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													
				1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan	1		PTL Semester I 2016 -- PTL Semester I 2017 a Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 0078/Bawaslu/SJ/PW.06.02/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang berisi instruksi kepada Kepala Bagian Keuangan, PPK, dan PPSPM untuk mengoptimalkan pengawasan atas penatausahaan kas dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara Pengeluaran. b Selain itu Bawaslu juga telah menyusun SOP No 0108/Bawaslu/SJ/09.03/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengajuan dan Pertanggungjawaban TUP di Lingkungan Bawaslu. PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018	1							Selesai		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Bawaslu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Nomor 0014/K.Bawaslu/Pv.06.02/1/2018, tanggal 15 Januari 2018. Iainya menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk meningkatkan pengendalian dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan, Barang Milik Negara, pengawasan selaku Kuasa pengguna Barang</p>											
			<p>2 Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Administrasi, Bagian Humas dan Antar Lembaga, dan Bagian Penyelesaian Sengketa di Satker Bawaslu RI serta KPA pada 25 Bawaslu Provinsi sesuai Lampiran 3, yang tidak menaati ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.</p>	1			<p>PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437.5 - 0437.6/Bawaslu/SJ/KP.0803/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0437.5 Sdr. Agung B.G.B.I Atmaja selaku PPK Bagian Penyelesaian Sengketa. 0437.6 Sdr. Muhammad Zarwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penyelesaian Sengketa. 0437.18. Sdr. Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. 0437.19. Sdr. Eliazar Baru selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. 0437.20. Sdr. Amru selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Jawa Timur 0437.21. Sdr. Anderson selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Riau 0437.22. Sdr. Dasnil selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 0437.23. Sdr. Ahmad Luthfi selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Jambi 0437.24. Sdr. E. Dwi Mulyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Lampung 0437.25. Sdr. Mujiono selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta 0437.26. Sdr. I Bagus Putu Adinatha selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Bali 0437.27. Sdr. Lalu Rizizvan Arista selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi NTB 0437.28. Sdr. Ignasius Jani selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi NTT 0437.29. Sdr. Fahrui selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 0437.30. Sdr. Joko Sutrisno selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah 0437.31. Sdr. Maksun Nafarin selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 0437.32. Sdr. Junaidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 0437.33. Sdr. AM. Santiaji P. selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara 0437.34. Sdr. Sudirman Rahim. selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 	1							Selesai			

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							20 0437.35. Sdr. Rapiudin, selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara 21 0437.36. Sdr. Idrus selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat 22 0437.37. Sdr. Ananythy Sovianita selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi 23 0437.38. Sdr. Herry Z. Wawuntu selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara												
							24 0437.39 Sdr. Ron Simantaaw selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Maluku 25 0437.40 Sdr. Irwan M. Saleh selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Maluku Utara 26 0437.41 Sdr. Jumrah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Papua 27 0437.42 Sdr. Muhamad Idrus selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi Papua Barat												
3	Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara Belum Sesuai dengan Ketentuan Terkait Pengelolaan	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:															
				1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian selaku Kuasa Pengguna Barang; dan	1		PTL Semester I 2016 -- PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 1 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Bawaslu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Nomor 0014/K.Bawaslu/Pw.06.02/1/2018, tanggal 15 Januari 2018. Iainya menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk meningkatkan pengendalian dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan, Barang Milik Negara, pengawasan selaku Kuasa pengguna Barang	1									Selesai		
				2 Memberikan sanksi kepada Petugas SIMAK BMN, Kasubag Administrasi dan Kuasa Pengguna Barang Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Sumatera Barat yang tidak menaati ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.	1		PTL Semester I 2016 1 0437.18 Sdr. Iwan Tero selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. 2 0437.43 Sdr. Rusli Pandapotan SR selaku Kasubbag Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. 3 0437.77 Sdr. Mhd Rahmad Saleh P selaku Petugas Operator SIMAK BMN di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.	1									Selesai		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Seuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							4 0437.19 Sdr. Eliazar Barus selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.											
							5 0437.55 Sdr. S. Rachman selaku Kasubbag Administrasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat											
							6 0437.56 Sdr. Andina Nur Aisah selaku Petugas Operator SIMAK BMN di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah											
							7 0437.45 Sdr. Santoso selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur											
							8 0437.46 Sdr. Triza Novia selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur											
							9 0437.47 Sdr. Tri Heru Kuncoro selaku Kasubbag Administrasi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur											
							10 0437.48 Sdr. Tri Heru Kuncoro selaku Petugas Operator SIMAK BMN di Bawaslu Provinsi Jawa Timur											
							11 0437.49 Sdr. Hardizon Bahar selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat											
							12 0437.50 Sdr. M. Rendy selaku Kasubbag Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat											
							13 0437.51 Sdr. Taufik Firdaus selaku Petugas Operator SIMAK BMN di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat											
							14 0437.52 Sdr. Kartini Tjandra selaku Kuasa Pengguna Barang di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah											
							15 0437.53 Sdr. Setyo Pramudi selaku Kasubbag Administrasi di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah											
							16 0437.54 Sdr. Habil Farid selaku Petugas Operator SIMAK BMN di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah											
4	Realisasi Belanja Barang Melalui Mekanisme GU/TUP Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk:														
				1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan	1		PTL Semester I 2016 -- PTL Semester I 2017 a Telah ditindaklanjuti dengan SOP No 0108/Bawaslu/SJ/09.03/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengajuan dan Pertanggungjawaban TUP di Lingkungan Bawaslu.	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							b Selain itu Bawastu juga telah menyusun SOP No 0108/Bawastu/SJ/09.03/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengajian dan Pertanggungjawaban TUP di Lingkungan Bawastu.											
				2 Memberikan sanksi kepada PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Biro/Bagian dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Bawastu RI yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawastu/SJ/KP.0803/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1 0437.1 Sdr. Yusti Erlina selaku PPK Bagian TLP. 2 0437.2 Sdr. Maria Amelia Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian TLP. 3 0437.3 Sdr. Drs. Harimurti Wicaksono selaku PPK Bagian TP2.	1									Selesai	
							4 0437.4 Sdr. Atik Arfan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian TP2. 5 0437.5 Sdr. Agung B.G.I.Atmaja selaku PPK Bagian Penyelesaian Sengketa. 6 0437.6 Sdr. Muhammad Zarwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Penyelesaian Sengketa. 7 0437.7 Sdr. Johnly Pedro Marentek selaku PPK Bagian Sosialisasi. 8 0437.8 Sdr. Aji Nugroho selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Sosialisasi. 9 0437.9 Sdr. Dermawan Adhi Santoso selaku PPK Biro Administrasi 10 0437.10 Sdr. Aditya Nugroho Pamungkas selaku BPP Biro Administrasi 11 0437.11 Sdr. Ferdinand Eskol Tiar Strait selaku PPK Bagian ATP dan Potensi Pelanggaran 12 0437.12 Andika Asykar selaku BPP pada Bagian ATP dan Potensi Pelanggaran 13 0437.13 Sdr. Tagor Fredy selaku PPK Bagian Hukum 14 0437.14 Sdr. Cahyo F Thadery selaku BPP Bagian Hukum 15 0437.15 Ahmad Khumaidi selaku PPK Biro Administrasi DKPP 16 0437.16 Sdr. Titis Adityo Nugroho selaku BPP Biro DKPP 17 0437.17 Sdr. Hengky Pramono selaku PPK Bagian Humas, dan Hubal 18 0437.58 Pakerti Luhur selaku PPK Pengawasan Internal 19 0437.59 Sdr. Ina Septiana Devi selaku BPP 20 0437.57 Sdr. Ernawati Perangin-angin selaku PPSPM											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Selesai		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Keputusan																		
1	Realisasi Belanja Melalui SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran pada Satker Bawaslu Belum Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku KPA untuk:	1													
				1 Melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara Pengeluaran;	1		<p>PTL Semester I 2016 --</p> <p>PTL Semester I 2017 Bawaslu telah menyusun draft SOP tentang Pengajuan dan pertanggungjawaban SPM LS di lingkungan Bawaslu tapi SOP ini belum ditetapkan</p> <p>PTL Semester II 2017 Draft SOP tentang Pengajuan dan pertanggungjawaban SPM LS di lingkungan Bawaslu tapi SOP ini sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu no 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu RI</p> <p>PTL Semester I 2018 1 Surat Ketua Bawaslu yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Nomor 0014/K.Bawaslu/Pw.06.02/1/2018, tanggal 15 Januari 2018. Iainya menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk meningkatkan pengendalian dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan, Barang Milik Negara, pengawasan selaku Kuasa pengguna Barang</p> <p>2 SOP tentang Pengajuan dan pertanggungjawaban SPM LS di lingkungan Bawaslu, ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu no 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu RI</p>	1									Selesai	
				2 Menetapkan prosedur pertanggungjawaban belanja melalui SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran;	1		<p>PTL Semester I 2016 --</p> <p>PTL Semester I 2017 --</p>	1										Selesai

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1																	
							PTL Semester II 2017										
							Draft SOP tentang Pengajuan dan pertanggungjawaban SPM LS di lingkungan Bawaslu tapi SOP ini sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu no 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Bawaslu RI										
							PTL Semester I 2018 - SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban LS Bendahara di Lingkungan Bawaslu Tahun 2017 no 0131/Bawaslu/SJ/OT.03/VI/2017										
				3	Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran, PPSPM, PPK dan PPTK atas kelalaian dalam melaksanakan tugasnya	1	PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437 Sdr. Adisti Primastuti selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu RI. 2. 0437.1 Sdr. Yusti Erlina selaku PPK Bagian TLP. 3. 0437.17 Sdr. Hengky Pramono selaku PPK bagian Humas dan humas 4. 0437.60 Sdr. Dirja Abdul Kadir selaku PPTK bagian Umum 5. 0437.57 Sdr. Ernawati Perangin-angin selaku PPSPM	1							Selesai		
2	Pengadaan Jasa Lainnya berupa Peningkatan Publikasi DKPP melalui Media Elektronik dan Media Cetak Dilaksanakan Secara Proforma dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp822,57 Juta	1	822.578.966,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PPTK Biro Administrasi DKPP serta Pejabat Pengadaan Bawaslu yang tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.	1	PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.69 Sdr. Ari Susanto selaku Pejabat Pengadaan 2. 0437.61 Sdr. Yusuf selaku PPTK pada bagian Administrasi Umum 3. 0437.15 Sdr. Ahmad Khumaidi selaku PPK biro Administrasi DKPP	1								Selesai	822.578.966,00	
3	Pembayaran Honorarium Tim Pokja Sebesar Rp156,57 Juta Tidak Sesuai Ketentuan	1	131.105.000,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1 Tidak membayarkan tunggakan honorarium tim pokja sebesar Rp25.467.500,00 pada tahun 2016; dan	1	PTL Semester I 2016 --	1								Selesai	131.105.000,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Semester I 2017										
							Bukti setor sebesar Rp22.492.500,00 tanggal 31/10/2016 NTPN D50375H4423G61BI; dan bukti setor Rp2.975.000,00 tanggal 31/10/2016 NTPN AECEB85H2BSL008BI, dengan keterangan Pengembalian Belanja Honor Tim Pokja (Tunggakan Tahun 2015).										
				2	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawasu/SI/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.1 Sdr. Yusti Erlina selaku PPK Bagian TLP. 2. 0437.3 Sdr. Drs. Harimurti Wicaksono selaku PPK bagian Teknis Pengawasan Pemilu 3. 0437.9 Sdr. Ir. Dermawan Adhi Santoso selaku PPK biro Administrasi 4. 0437.11 Sdr. Ferdinand Eskol T. S selaku PPK pada Anaisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran 5. 0437.13 Sdr. Tagor Fredy selaku PPK pada Bagian Hukum 6.0437.17 Sdr. Hengky Pramono selaku PPK bagian Humas dan humas 7. 0437.58 Sdr. Pakerti Luhur selaku PPK bagian Pengawasan Internal 8. 0437.57 Sdr. Ernawati Perangin-angin selaku PPSPM 9. 0437.62 Sdr. Roy M. Stagian selaku PPTK pada Bagian SDM dan TU pimpinan	1								Selesai	
4	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Layanan Perpanjangan/Renewal Lisensi Dan Extended Warranty Sophos Sebesar Rp37,50 Juta Tidak Sesuai Ketentuan Pada Kontrak dan Denda Keterlambatan yang Tidak Dikenakan Sebesar Rp45,55 Juta	1	83.057.710,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawasu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawasu agar memberikan sanksi kepada PPK, PPTK, dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawasu/SI/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.70 Waller Lumban Gaol selaku Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan. 2. 0437.71 Sdr. M. Sholeh selaku Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan. 3. 0437.72 Sdr. Dian Lesmana selaku Tim Pemeriksa hasil Pekerjaan. 4. 0437.9 Sdr. Ir. Dermawan Adhi Santoso selaku PPK biro Administrasi 5. 0437.63 Sdr. Sapni Syahrir selaku PPTK bagian Perencanaan	1								Selesai	37.500.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Selesai		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
5	Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp36,55 Juta	1	36.553.100,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar Sekretaris Jenderal Bawaslu memberikan sanksi kepada masing-masing pegawai yang melakukan perjalanan dinas, serta kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan yang berlaku.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437 - 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.43 Sdr. Rusli Pandapotan SR selaku PPK Bawaslu Prov. Sumut 2. 0437.64 Sdr. Ahmad Firdaus Nasution selaku BP Bawaslu Prov. Sumut 3. 0437.65 Sdr. Widya Kesumawati selaku PPSPM Bawaslu Prov. Sumut.	1							Selesai		
6	Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp37,75 Juta atas Kegiatan Bimbingan Teknis, Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	1	37.757.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Bawaslu dan Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPSPM pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437 - 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.53 Sdr. Setyo Pamudi selaku PPSPM Bawaslu Prov. Jateng 2. 0437.78 Sdr. Sriyadi selaku BP Bawaslu Prov. Jateng 3. 0437.52 Sdr. Kartini Tjandra selaku PPK Bawaslu Prov. Jateng	1							Selesai	37.757.000,00	
7	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Internet Service Provider Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp34,74 Juta	1	34.745.806,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada PPK Biro Administrasi dan PPTK pada Bagian Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.9 Sdr. Ir. Dermawan Adhi Santoso selaku PPK biro Administrasi 2. 0437.63 Sdr. Sapni Syahrir selaku PPTK pada bagian Perencanaan	1							Selesai	34.745.806,00	
8	Pekerjaan Belanja Modal pada Satker Bawaslu RI Tidak Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPSPM yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja modal pada Bawaslu.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.69 Sdr. Ari Susanto selaku Pejabat Pengadaan 2. 0437.70 Sdr. Waller Lumban Gaol selaku Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan. 3. 0437.60 Sdr. Dirja Abdul Kadir selaku PPTK bagian Umum 4.0437.57 Sdr. Ernawati Perangin-angin selaku PPSPM	1							Selesai		
							PTL Semester I 2016 -- PTL Semester I 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 0079/Bawaslu/SJ/PW.06.02/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang berisi instruksi kepada Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Semester II 2017: - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -										
9	Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Bawaslu Tidak Sesuai Volume Kontrak sebesar Rp114,80 Juta	1	114.801.881,02	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													
				1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal; dan	1		PTL Semester I 2016 -- PTL Semester I 2017 a Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 0079/Bawaslu/SJ/PW.06.02/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang berisi instruksi kepada Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan belanja modal pada satker Bawaslu RI. b Selain itu, sudah dilaksanakan tindak lanjut berupa audit PPK Belanja Modal untuk meningkatkan pengawasan atas pekerjaan Belanja Modal satker Sekretariat Jenderal Bawaslu dan diterbitkan Laporan Hasil Audit Nomor 0005/LHA/PL/H2P/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.	1								Selesai	
				2 Memberikan sanksi kepada PPK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.	1		PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada: 1. 0437.60 Sdr. Dirja Abdul Kadir selaku PPTK bagian Umum 2. 0437.73 Sdr. Iris Pramono selaku selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.	1								Selesai	114.801.881,02
10	Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1																		
				1	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran; serta	1											Selesai	
				2	Kepala Sekretariat Panwaslih pada Kabupaten Natuna (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Banggai (Provinsi Sulawesi Tengah), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Provinsi Sulawesi Utara), Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Provinsi Sulawesi Utara), Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni selaku PPK.	1											Selesai	
11	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Bawaslu Provinsi dan Panwaslih	1			BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar Sekretaris Jenderal Bawaslu:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten/Kota Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp10,51 Miliar			1 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSM dan KPA pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Maluku Utara yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan	1		<p>PTL Semester I 2016 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0437/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0437.20 Sdr. Amru selaku KPA Bawaslu Prov.Jatim 0437.80 Sdr. Adintya Sentana Maulana selaku PPSM Bawaslu Prov. Jatim 0437.28 Sdr.Ignasius Jani selaku KPA Bawaslu Prov. NTT 0437.74 Sdr. Elis Suryani selaku PPSM Bawaslu Prov. NTT 0437.32 Sdr. Junaidi selaku KPA Bawaslu Prov. Kalimantan Timur 0437.76 Sdr.Senjaya Ibrata selaku PPSM Bawaslu Prov. Kalimantan Timur 0437.40 Sdr. Irwan M Saleh selaku KPA Bawaslu Prov. Maluku Utara 0437.75 Sdr. Muhammad Rusli Ismail selaku PPSM Bawaslu Prov. Maluku Utara 	1								Selesai	
				2 Memerintahkan Pengawas Internal Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan atas bukti dokumen pertanggungjawaban	1		<p>PTL Semester I 2016 Sedang dalam proses pemeriksaan dengan Surat Tugas 0918/ST/SJ/VI/2016, 0907/ST/SJ/VI/2016 dan 0943/ST/J/VI/2016 untuk Jawa Timur, 0906/ST/SJ/VI/2016 untuk Kalimantan Timur</p> <p>PTL Semester II 2016 Pengawas Internal Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas bukti dokumen pertanggungjawaban pada beberapa Panwaslih Kabupaten/Kota, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> No 0040 B/LHK/PI/B.H2PI/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Laporan Hasil TL BPK Thn 2015 pada Panwas Kab. Berau, Kalimantan Timur No 0043/LHK/PI/B.H2PI/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil TL BPK Thn 2015 pada Panwas Kab.Samarinda, Kalimantan Timur No 0056/LHK/PI/B.H2PI/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil TL BPK Thn 2015 pada Panwas Kab. Situbondo dan Sidoarjo <p>PTL Semester I 2017 - PTL Semester I 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -</p>								Belum sesuai rekomendasi, karena belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan atas verifikasi bukti pertanggungjawaban senilai Rp10.513.002.827,00		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah	15	1.260.599.463,02		26	-		24	-	2	-	-	-	-	-		1.178.488.653,02

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah							
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
SPI																					
1	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belum Tertib	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK yang lalai dalam melaksanakan tugasnya	1		<p>PTL Semester I 2017</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2017</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604/Bawaslu/SI/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada:</p> <p>1. 0604.33 Sdr. Ir. Dermawawan Adhi Santoso,MM sebagai PPK pada Biro Administrasi Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>2. 0604.32 Sdr. Aditya Nugroho Pamungkas sebagai BPP pada Biro Administrasi Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>3. 0604.31 Sdr. Drs. Harimurti Wicaksono sebagai PPK pada Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>4. 0604.30 Sdr. Arik Arfan sebagai BPP pada Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>5. 0604.29 Sdr. Hengky Pramono, M.Si sebagai PPK pada Bagian Penyelesaian Sengketa Pemilu Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>6. 0604.28 Sdr. Muhammad Reza Sopyan sebagai BPP pada Bagian Penyelesaian Sengketa Pemilu Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>7. 0604.27 Sdr. Drs. Dirja Abdul Kadir sebagai PPK pada Bagian Penyelesaian Sengketa Pemilu Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>8. 0604.26 Sdr. Aji Nugroho sebagai BPP pada Bagian Sosialisasi Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>9. 0604.25 Sdr. Yusiti Erlina, SH sebagai PPK pada Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>10. 0604.24 Sdr. Astri Dwi Rahayu sebagai BPP pada Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>11. 0604.23 Sdr. Ferdinand Eskol T.S, MH sebagai PPK pada Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>12. 0604.22 Sdr. Andika Asykar sebagai BPP pada Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>13. 0604.21 Sdr. Ahmad Khumaidi, SH, MH sebagai PPK pada Biro Administrasi DKPP Sekretariat Bawaslu RI;</p> <p>14. 0604.20 Sdr. Mey Siskha Siregar sebagai BPP pada Biro Administrasi DKPP Sekretariat Bawaslu RI;</p>	1												Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1																			
				2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam melakukan pengawasan dan penatausahaan kas kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK	1	-	PTL Semester I 2017 - Surat Kementerian Kementerian Keuangan untuk Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor S-167/PP.3/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Kerjasama Program Diklat PTL Semester II 2017 - Surat Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor 0426/Bawaslu/SJ/KP.06.05/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Hasil Kelulusan Diklat Bendahara Pengeluaran kerjasama dengan BPPK Kemenkeu pada seluruh Satker Bawaslu RI	1	-									Selesai	
2	Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan Kas Lainnya dan Setara Kas Belum Tertib	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Melakukan perbaikan atas sistem agar memperlakukan transfer dana pengembalian saldo kas BPP sebagai pengurang saldo Buku Pembantu Kas di BPP dan mencatat pencairan dana untuk Panwaslu Kecamatan sebagai pengeluaran BPP Bawaslu Provinsi Banten	1	-	PTL Semester I 2017: - PTL Semester II 2017: - PTL Semester I 2018: - PTL Semester II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 Telah ditindaklanjuti dengan melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAS dan mencatat pencairan dana ke Panwaslam se Provinsi Bawaslu Banten sebagai pengurang pada saldo BPP (Dokumen contoh BKU Panwaslam terlampir)	1	-									Belum ada Tindak Lanjut berupa pencatatan dalam BKU BPP Bawaslu Provinsi Banten atas transaksi pengembalian saldo Kas dan transfer pencairan dana ke Panwaslu Kecamatan (terkait penatausahaan dana Hibah Pilkada)	
				2. Memberi teguran tertulis kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK dan KPA Bawaslu di 5 provinsi dan Panwaslu di 26 kabupaten dan 7 kota terkait sesuai ketentuan yang berlaku	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan).	1	-									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL Semester I 2018 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada: 1. 0604.66 Sdr. Agus Widarso selaku BPP di Kab Tebo 2. 0604.67 Sdr. Syafrjadi, SE selaku PPK di Kab Buol 3. 0604.50 Sdr. Natalia Okrofa, SH selaku BPP di Kab Teluk Bintuni 4. 0604.64 Sdr. Suparman Ahaba, SH selaku PPK di Kab Buol 5. 0604.62 Sdr. Ikkal A. Patahe, SE selaku BPP di Kab Buol 6. 0604.63 Sdr. Roswani AR Naukoko. SE selaku PPK di Kab Banggai Kepulauan 7. 0604.61 Sdr. Irma Paurus, S.Pd selaku BPP di Kab Banggai Kepulauan 8. 0604.55 Sdr. Juli Subhendrik Naibaho selaku BPP di Kota											
			3. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK dan KPA Bawaslu dalam pengelolaan dana hibah	1		-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - Surat Sekretaris Jenderal kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Banten Nomor 0561/Bawaslu/SJ/KU.01.08/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018. - Bahan Paparan Bimtek dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Balikpapan tanggal 4 November 2017. - Surat Undangan Sekretaris Jenderal Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Nomor 0940/Bawaslu/SJ/KP.06.05/IX/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.			1							Belum sesuai rekomendasi, karena belum ada bukti berupa laporan kegiatan Bimtek atau Sosialisasi tersebut serta belum semua Saterker Bawaslu RI yang akan melakukan Pilkada Serentak 2018, melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu untuk Bawaslu Prov. Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalbar, Sulsel, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>PTL Semester I 2018</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat Nomor 1056/K.Bawaslu/KP.06.05/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.</p> <p>- Surat undangan Sekretaris Jenderal kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0574/Bawaslu/SJ/KU.01.00/XI/2017 tanggal 1 November 2017</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor B-0377/K.Bawaslu/PW.07/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, NTT, Maluku Utara, Sulawesi Selatan Nomor B-0332/K.Bawaslu/PW.07/XI/2017 tanggal 14 November 2017</p> <p>PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -</p>											
3	Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib	1		- BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk:														

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam pengelolaan dana hibah kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota	1	-	<p>PTL Semester I 2017</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2017</p> <p>- Surat Sekretaris Jenderal kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Banten Nomor 0561/Bawaslu/SJ/KU.01.08/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.</p> <p>- Bahan Paparan Bimtek dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Balikpapan tanggal 4 November 2017.</p> <p>- Surat Undangan Sekretaris Jenderal Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Nomor 0940/Bawaslu/SJ/KP.06.05/IX/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.</p> <p>PTL Semester I 2018</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat Nomor 1056/K.Bawaslu/KP.06.05/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.</p> <p>- Surat undangan Sekretaris Jenderal kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0574/Bawaslu/SJ/KU.01.00/XI/2017 tanggal 1 November 2017</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor B-0377/K.Bawaslu/PW.07/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017</p> <p>- Surat undangan Ketua Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, NTT, Maluku Utara, Sulawesi Selatan Nomor B-0332/K.Bawaslu/PW.07/XI/2017 tanggal 14 November 2017</p> <p>PTL Semester II 2018: -</p> <p>PTL Semester I 2019: -</p> <p>PTL Semester II 2019: -</p> <p>PTL Semester I 2020: -</p> <p>PTL Semester II 2020: -</p> <p>PTL Semester I 2021: -</p>		1								Belum sesuai rekomendasi, karena belum ada bukti berupa laporan kegiatan Bimtek atau Sosialisasi tersebut serta belum semua Satker Bawaslu RI yang akan melakukan Pilkada Serentak 2018, melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu untuk Bawaslu Prov. Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalbar, Sulsel, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penatausahaan Aset Tetap pada Bawaslu Belum Tertib	1		<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan kepada Sekjen Bawaslu untuk:</p> <p>1. Memberi sanksi kepada Petugas SIMAK BMN Saiker terkait yang lalai dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	1	-	<p>PTL Semester I 2017</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2017</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin, kepada:</p> <p>1. 0604.11 Sdr. Ambar Rosidah Qonita selaku petugas SIMAK BMN Bawaslu RI</p> <p>2. 0604.10 Sdr. Ilwandi Dullah selaku petugas SIMAK BMN Bawaslu RI</p> <p>3. 0604.9 Sdr. Rodrigus Simulingga selaku petugas SIMAK BMN Prov Bangka Belitung</p> <p>4. 0604.8 Sdr. Dadang Sanusi selaku petugas SIMAK BMN Prov Papua Barat</p> <p>PTL Semester II 2018 :</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada :</p> <p>1. 1063. Sdr. Ahmad Jafar selaku petugas SIMAK BMN Prov Banten</p> <p>2. 1063.1. Sdr. Asep Sutanto selaku petugas SIMAK BMN Prov Jawa Barat</p>	1	-							sesuai	
				<p>2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan BMN kepada para pengelola BMN</p>	1	-	<p>PTL Semester I 2017</p> <p>- Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi nomor 0140/Bawaslu/SJ/PL.07/V/2016 tanggal 26 Mei 2017 tentang Undangan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN</p> <p>PTL Semester II 2017: -</p> <p>PTL Semester I 2018: -</p> <p>PTL Semester II 2018: -</p> <p>PTL Semester I 2019: -</p> <p>PTL Semester II 2019: -</p> <p>PTL Semester I 2020: -</p> <p>PTL Semester II 2020: -</p> <p>PTL Semester I 2021: -</p>			1	-					Belum Sesuai dengan Rekomendasi, karena belum ada laporan kegiatan Bimtek maupun sosialisasi pengelolaan BMN	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Barang Milik Negara (BMN) pada Satker Bawaslu Pusat Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp93,96 Juta	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan kepada Sekjen Bawaslu untuk: 1. Memberi sanksi kepada Petugas SIMAK BMN yang lalai dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604/Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada: 1. 0604.11 Sdr. Ambar Rosidah Qonita selaku petugas SIMAK BMN Bawaslu RI 2. 0604.10 Sdr. Ilwandi Dullah selaku petugas SIMAK BMN Bawaslu RI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1	-	PTL Semester II 2017 - Surat Tugas dari Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan nomor 1352/SJ/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk melakukan monitoring penataan BMN dan rekonsiliasi BMN dalam rangka penyusunan LKPP TA 2017 PTL Semester I 2018 - Telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Bawaslu no 0014/K.Bawaslu/PW.06.02/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang menginstruksikan kepada Sekjen Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	sesuai	-
6	Belanja Barang sebesar Rp1,31 Miliar Digunakan untuk Pengadaan Aset Tetap dan Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk Pengadaan Barang Persediaan sebesar Rp123,59 Juta	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Memerintahkan Kepala Bagian Penganggaran dan PPK mengikuti norma Bagan Akun Standar dalam menyusun dan melaksanakan anggaran	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - Telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekjen Nomor 0005/Bawaslu/SJ/PW.06.02/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 yang menginstruksikan kepada Kepala Bagian Perencanaan dan PPK di Lingkungan Bawaslu untuk mengikuti norma Bagan Akun Standar dalam menyusun dan melaksanakan anggaran PTL Semester II 2018 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)		
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kepada Kepala Bagian Penganggaran dan PPK	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021 Telah ditindaklanjuti dengan melakukan: - penguatan kapasitas perencanaan dan anggaran untuk Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi tahun bulan Juli tahun 2017 - Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Perencanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Bawaslu RI Dan Bawaslu Provinsi bulan November 2017 - Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2018 bulan Februari 2018 - Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran bulan Agustus 2018 - Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Agustus 2018 - Rapat Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kapasitas Bidang Perencanaan bulan November 2019 - Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Februari 2020 (Dokumen pelaksanaan kegiatan terlampir)											Belum ada tindak lanjut berupa bukti sosialisasi dan pelatihan penyusunan dan pelaksanaan anggaran	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Kepatuhan																		
7	Penyetoran Sisa Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.27 Miliar	1	1.279.602.570,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar: 1. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Panwaslu Kota Samarinda Menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1					Belum ada Tindak Lanjut berupa Surat Sanksi dari Ketua Bawaslu	
				2. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekretariat Panwaslu selaku PPK pada Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, dan Panwaslu Kota Samarinda	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada: 1. 0604.60 Sdr. Anderson, S.IP, M.Si selaku PPK pada Kab Bengkalis 2. 0604.57 Sdr. Nur Lahamudin, SH selaku PPK di Kota Samarinda	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	1	-	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1				Belum ada Tindak Lanjut berupa surat sanksi dari Sekjen Bawaslu	
				4. Memerintahkan kepada BPP pada Panwaslu Kabupaten Bengkalis untuk menyetorkan ke Kas Daerah uang sebesar Rp719.158.061,00	1	719.158.061,00	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.500.000,00 tgl 14/8/2017 PTL Semester I 2018 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.500.000,00 tgl 14/6/2017 PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: - PTL Semester II Tahun 2021: Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kab Bengkalis sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian: 1. Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tgl 27/6/2017 2. Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 27/9/17 3. Bukti setor sebesar Rp5.000.000 tgl 7/11/17 4. Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tgl 3/1/18 5. Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tgl 16/8/2017 6. Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tgl 11/7/2017		20.500.000,00	1	698.658.061,00	0				Belum semua disetorkan ke Kasda	20.500.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5. Memerintahkan kepada BPP pada Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk menyetorkan ke Kas Daerah uang sebesar Rp111.975.000,00	1	111.975.000,00	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp81.000.000,00 tgl 27/11/2017 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp30.975.000,00 tgl 4/12/2017	1	111.975.000,00	-						Selesai	111.975.000,00
				6. Memerintahkan kepada BPP pada Panwaslu Kota Samarinda untuk menyetorkan ke Kas Daerah uang sebesar Rp448.469.509,00	1	448.469.509,00	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.000.000,00 pada tgl 12 April 2018. - Rp1.000.000,00 pada tgl 23 Maret 2018 - Rp1.000.000,00 pada tgl 8 Maret 2018 PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.600.000,00 pada tanggal 9 Mei 2018 - Rp2.000.000,00 pada tanggal 9 Juli 2018 - Rp1.000.000 pada tanggal 18 Desember 2018 PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021 - Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sbb: 1. Tgl 18 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,00 2. Tgl 2 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000,00 3. Tgl 10 Desember 2019 sebesar Rp3.000.000,00 4. Tgl 20 Desember 2019 sebesar Rp2.000.000,00 5. Tgl 25 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00		32.100.000,00	1	416.369.509,00					Belum seluruhnya disetor ke kas daerah	32.100.000,00
							PTL Semester II Tahun 2021 : - Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp6.500.000,00 dengan rincian sbb: 1. 10 September 2021 sebesar Rp2.500.000,00 2. 25 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000,00 3. 23 November 2021 sebesar Rp2.500.000,00										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Terdapat Sisa Kas Bulan September Tahun 2016 dan Utang Pajak yang Belum Disetorkan oleh Mantan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													
				1. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten sebagai atasan langsung pegawai di lingkungan Panwaslu Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan	1		PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - Telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal No 0011/Bawaslu/SJ/PW.06/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten agar meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pembinaan pada Panwaslu Kota Tangerang Selatan	1	-								Selesai
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan BPP Panwaslu Kota Tangerang Selatan Periode bulan Juli s.d. Bulan September tahun 2016	1		PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada: 1. 0604.36 Sdr Husen, S.Sos selaku BPP Kota Tangerang Selatan 2. 0604.35 Sdr Muhammad Lutfi selaku Kepala Sekretariat Kota Tangerang Selatan	1	-								Selesai
9.	Realisasi Belanja Hibah Pilkada Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp298,08 Juta	1	209.836.801,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk:													
				1. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Sorong, Panwaslu Kabupaten Kaimana, Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten Fakfak yang kurang cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran	1		PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada: 1. 0604.37 Sdr Jefri F.Kambu selaku BPP Kab.Sorong 2. 0604.41 Sdr Wahyuni Lakutani, A.Md, S.Sos selaku BPP Kab.Kaimana 3. 0604.40 Sdr Syahrin Niulain, S.Sos selaku BPP Kab.Fakfak PTL Semester II 2018 : Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada : 1. 1063.18 Sdr. H. Ade Wawan selaku BP Prov. Banten 2. 1063.5 Sdr. Gerrida Mandowen selaku BPP Prov. Papua	1	-								Selesai

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
								Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPSPM pada Bawastu Provinsi Papua Barat dan Bawastu Provinsi Banten, serta PPK pada Panwaslu Kabupaten Sorong, Panwaslu Kabupaten Kaimana dan Panwaslu Kabupaten Fakfak yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja hibah Pilkada	1		PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawastu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada: 1. 0604.7 Sdr. Serdion Rahawarin selaku PPSPM Prov Papua Barat. 2. 0604.19 Sdr Muhammad Idrus selaku PPK Prov Papua Barat 3. 0604.34 Sdr Sukron Mulyadi selaku PPSPM Prov Banten 4. 0604.17 Sdr Didi Hadiyahna, SE,MM selaku PPK Prov Banten PTL Semester I 2018 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 0604 /Bawastu/SJ/KP.08.03/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (teguran lisan), kepada: 1. 0604.41 Sdr Wahyuni Lakutani, A.Md, S.Sos selaku BPP di Kab Kaimana 2. 0604.37 Sdr Jefri F.Kambu selaku BPP di Kab.Sorong 3. 0604.51 Sdr Syahrin Niulain, S.Sos selaku BPP di Kab.Fakfak PTL Semester II 2018 : Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063/Bawastu/SJ/KP.08.03/XU/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada : 1. 1063.6. Sdr. Vicky Junaedi Maruwela selaku PPK di Panwaslu Kab. Kaimana 2. 1063.7. Sdr. Hiryaden L. Heremba selaku PPK di panwaslu Kab. Fakfak PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -									Belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada surat sanksi kepada PPK Panwaslu Kab. Sorong.	
				3. Memerintahkan bagian pengawasan internal Bawastu untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban Panwaslu Kabupaten Kaimana sebesar Rp82.248.060,00 dan Panwaslu Kabupaten Fakfak sebesar Rp6.000.000,00 serta menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban	1	88.248.060,00	PTL Semester I 2017 - PTL Semester II 2017 - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021: -					1	88.248.060,00			Belum ada Tindak Lanjut berupa laporan hasil verifikasi	
	Jumlah	9	1.489.439.371,00		23	1.367.850.630,00		13	164.575.000,00	6	1.115.027.570,00	4	88.248.060,00	-	-	-	164.575.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPI																	
1	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Bawaslu Pusat, 3 (Tiga) Satker Bawaslu Provinsi dan 34 Parwaslu Kabupaten/Kota Belum Tertib	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Menginstruksikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana untuk melakukan monitoring atas penutupan kas di seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu setiap akhir bulan dan melakukan reviu atas jumlah kas tunai yang melebihi batas maksimal Rp50.000.000,00.	1	-	PTL Semester I 2018 : - PTL Semester II 2018 : - PTL Semester I 2019 : - PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I 2020 : - PTL Semester II 2020 : - PTL Semester I 2021 : -										
2	Tanah dan Gedung Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Bawaslu	1		BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan hibah tanah dan gedung yang diperoleh Bawaslu serta melakukan register atas penerimaan hibahnya; dan	1	-	PTL Semester I 2018 - Surat dari Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Lampung kepada Sekjen Bawaslu RI Nomor 035/LA.PL.07/VII/2018 Tanggal 5 Juli 2018 perihal penyampaian proses registrasi hibah tanah bawaslu lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mengajukan permohonan registrasi kepada Kanwil DJPB Lampung namun surat tersebut tidak diterima dengan alasan PMK 99/PMK.05/2017 mengatur tentang registrasi hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri yang diterima sebelum tahun 2017 PTL Semester I 2019: Sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 202/LA.KU.03/XI/2018 Tanggal 6 November 2018 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, telah ditetapkan nomor register atas hibah tanah tersebut sesuai surat Kanwil DJPB Provinsi Lampung Nomor: S-1133/WPB.08/BD.0204/2018 Tanggal 15 November 2018 dengan nomor register 2RTBEGBA. Selanjutnya, Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan pengesahan hibah tanah TAYL ke KPPN dengan mengajukan MPHL BJS dengan nomor: 00444 tanggal 26 November 2018 dan telah terbit persetujuan MPHLBJS dengan nomor: 2018017686264001 dengan nilai Rp2.380.363.000,00 PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2021 : -								Belum sesuai - Bawaslu Prov Papua atas hibah tanah dan bangunan belum ada tindak lanjut		

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2. Memerintahkan Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat dan BPN terkait dengan pengurusan sertifikat tanah	1	-	<p>PTL SEM I 2018 : -</p> <p>PTL SEM II 2018 : Telah ditindaklanjuti dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh BPN Kota Palembang dengan dokumen Daftar Isian 302 (DI 302) dan Daftar Isian 305 (DI 305) dan Surat permohonan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel tanggal 6 November 2018.</p> <p>PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 -</p> <p>PTL SEM I 2021 : 1. Telah ditindaklanjuti pada Bawaslu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Nomor 04.01.05.10.4.00045 2. Telah ditindaklanjuti pada Bawaslu Provinsi Lampung dengan sertifikat Pertanahan Nasional Nomor 08.02.06.01.4.00023</p>	1				0					Selesai	
3	Penatausahaan Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud pada Bawaslu Belum Terlib	1	-	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekjen Bawaslu untuk: 1. Menetapkan status penggunaan BMN dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;	1	-	<p>PTL Semester I 2018 -</p> <p>PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat dari Ketua kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang dengan Nomor 0157/K.Bawaslu/PW.06.02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang menginstruksikan untuk menetapkan status penggunaan BMN dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN</p>	1									Selesai	
				2. Menginstruksikan Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Kepala Bagian Umum agar: a. Menarik kembali aset yang dikuasai oleh mantan pejabat Bawaslu terkait sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan aset di lingkungan Bawaslu; dan	1	-	<p>PTL Semester I 2018 -</p>			1							Belum sesuai, belum ada bukti aset yang diterima dari mantan pejabat Bawaslu	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)		
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							<p>PTL SEM II 2018:</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat dari Ketua kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang dengan Nomor 0157/K.Bawaslu.PW.06.02/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang menginstruksikan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menarik kembali aset yang dikuasai oleh mantan pejabat Bawaslu terkait sesuai ketentuan yang berlaku - Melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan aset di lingkungan Bawaslu <p>PTL Semester I 2018: - PTL Semester II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -</p>												
				3. Menginstruksikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kondisi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dan melakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya jika ditemukan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi rusak/usang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.	1	-	<p>PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -</p>					1	-						
4	Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindaklanjuti Proses Penyelesaiannya Sebesar Rp383,67 Juta	1	168.059.550,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan kepada Sekjen Bawaslu untuk:			<p>PTL Semester I 2018: - PTL SEM II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -</p>					1	168.059.550,00						
				1. Melakukan investigasi atas aset-aset yang hilang dan jika terbukti karena adanya unsur kelalaian, segera diproses melalui mekanisme TGR;	1	168.059.550,00													
				2. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara; dan	1	-	<p>PTL Semester I 2018 :</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim sekretariat Penyelesaian Kerugian Negara no 0008/Bawaslu/SJ/PW.06.01/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Bawaslu</p>	1	-										

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi dan Umum agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Bawaslu.	1	-	PTL Semester I 2018: - PTL SEM II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: Telah ditindaklanjuti dengan: -Surat Sekretaris Jenderal No.0375/Bawaslu/SJ/PL.08/IX/2020 tgl 30 September 2020 tentang Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu - Surat Sekretaris Jenderal No.0464/Bawaslu/SJ/PL.08/XI/2020 tgl 20 November 2020 tentang Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Bawaslu - Surat Keterangan Kepala Biro Administrasi selaku KPBB No. 0236/Bawaslu/B.Adm/PL.05/VII/2020 mengenai hasil cek fisik BMN dalam kondisi rusak berat -Surat Keterangan Kepala Biro Administrasi selaku KPBB No. 0347/Bawaslu/B.Adm/PL.05/IX/2020 mengenai hasil cek fisik BMN dalam kondisi rusak berat	1								Selesai	
Kepatuhan																	
5	Pemberian Honorarium Kepala PNS Pemerintah Provinsi DKI pada Kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan Minimal Sebesar Rp1,52 Miliar	1	1.526.100.900,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan kepada Sekjen Bawaslu untuk: 1. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemprov DKI untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; dan	1	-	PTL Semester I 2018 - Telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal No 0152/Bawaslu/SJ/PW.06.02/VII/2018 tgl 16 Juli 2018 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah - Surat Sekretaris Jenderal No 0153/Bawaslu/SJ/PW.06.02/VII/2018 tgl 16 Juli 2018 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah PTL Semester I 2018: - PTL Semester II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -			1	-					Belum ada surat dari BKD dan BPKD	
				2. Memerintahkan para PNS Provinsi DKI terkait untuk menyetor honor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.526.100.900,00 yang terdiri atas pembayaran honor sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panwaskot dan Panwascam sebesar	1	1.526.100.900,00	PTL Semester I 2018 - Telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal No 0130/Bawaslu/SJ/PW.06.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hasil temuan BPK			1	937.448.400,00					Belum sesuai, belum seluruhnya disetorkan	588.652.500,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)		
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Rp565.888.400,00; honor sebagai PNS DKI yang diperbantukan pada Bawaslu DKI sebesar Rp126.810.000,00, honor pokja kepada PNS Pemprov DKI sebesar Rp602.410.000,00 dan honor narasumber dan moderator minimal sebesar Rp230.992.500,00 selanjutnya bukti disampaikan ke BPK.			<p>PTL SEM II 2018:</p> <p>Telah disetor ke kas daerah sebesar : Pembayaran honor sebagai Kepala Sekretariat dan BPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasek Jkt Barat Rp4.200.000 tgl 31/7/18 2. BPP Jkt Barat Rp1.491.500 tgl 30/7/18 3. PUMK Cengkareng Rp3.562.500 tgl 17/9/18 4. Kasek Kalideres Rp1.235.000 tgl 7/9/18 5a. PUMK Kalideres Rp712.500 tgl 6/9/18 5b. PUMK Kalideres Rp2.850.000 tgl 13/9/18 6. Kasek Kebon Jeruk Rp1.235.000 tgl 10/9/18 7. PUMK Kebon Jeruk Rp712.500 tgl 10/9/18 8a. Kasek Kembangan Rp4.275.000 tgl 17/9/18 8b. Kasek Kembangan Rp1.900.000 tgl 26/9/18 9a. PUMK Kembangan Rp2.850.000 tgl 17/9/18 9b. PUMK Kembangan Rp712.500 tgl 5/9/18 10. Kasek Palmerah Rp6.175.000 tgl 17/9/18 11. PUMK Palmerah Rp3.562.500 tgl 17/9/18 12. PUMK Taman Sari Rp562.500 tgl 18/9/18 13. Kasek Tambora Rp2.000.000 tgl 5/9/18 14. PUMK Tambora Rp1.425.000 15a. Kasek Jkt Pusat Rp4.200.000 tgl 30/7/18 15b. Kasek Jkt Pusat Rp10.000.000 tgl 25/9/18 16. BPP Jkt Pusat Rp1.491.500 tgl 30/7/18 17. Kasek Jkt Selatan Rp10.590.000 tgl 30/7/18 18a. BPP Jkt Selatan Rp1.500.000 tgl 30/7/18 18b. BPP Jkt Selatan Rp7.500.000 tgl 6/9/18 19. Kasek Cilandak Rp1.500.000 tgl 14/9/18 20. PUMK Cilandak Rp1.000.000 tgl 14/9/18 21. Kasek Jagakarsa Rp1.500.000 tgl 14/9/18 22. PUMK Jagakarsa Rp2.500.000 tgl 14/9/18 23. PUMK Kebayoran Baru Rp1.000.000 tgl 14/9/18 24. Kasek Kebayoran Lama Rp1.500.000 tgl 10/9/18 25. PUMK Kebayoran Lama Rp1.000.000 tgl 14/9/18 26. PUMK Mampang Rp1.000.000 tgl 14/9/18 27. Kasek Ps.Minggu Rp1.500.000 tgl 14/9/18 28. PUMK Ps.Minggu Rp1.000.000 tgl 14/9/18 29. Kasek Pesanggrahan Rp1.500.000 tgl 14/9/18 30. PUMK Pesanggrahan Rp1.000.000 tgl 14/9/18 31. Kasek Stbudi Rp1.500.000 tgl 17/9/18 32. PUMK Stbudi Rp1.000.000 tgl 14/9/18 33. Kasek Tebet Rp1.500.000 tgl 14/9/18 34. PUMK Tebet Rp5.177.500 tgl 14/9/18 35. Kasek Jkt Timur Rp4.200.000 tgl 3/9/18 36. BPP Jkt Timur Rp1.491.500 tgl 30/7/18 37. PUMK Makasar Rp712.500 tgl 20/9/18 38. Kasek Jkt Utara Rp4.200.000 tgl 30/7/18 39. Kasek Cilincing Rp6.175.000 tgl 10/9/18 40a. Kasek Kelapa Gading Rp2.000.000 40b. Kasek Kelapa Gading Rp4.175.000 tgl 20/9/18 41. Kasek Koja Rp2.000.000 tgl 12/9/18 42. PUMK Koja Rp3.562.500 tgl 12/9/18 43. Kasek Pademangan Rp2.000.000 tgl 12/9/18 44. PUMK Pademangan Rp3.562.500 tgl 21/9/18 45. Kasek Penjarangan Rp6.175.000 tgl 10/9/18 46. PUMK Penjarangan Rp3.562.000 tgl 10/9/18 47. PUMK Tj Phok Rp3.562.500 tgl 14/9/18 48. Kasek Kep.Ser Rp4.200.000 tgl 30/7/18 49. Kasek Kep.Ser Utara Rp8.200.000 tgl 21/9/18 50. Kasek Ciracas Rp1.000.000 tgl 21/9/18 	268.001.500,00									

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)					
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							51a. Kasek Cengkareng Rp1.000.000 tgl 25/9/18 51b. Kasek Cengkareng Rp2.500.000 tgl 26/9/18 52. Kasek Kramat Jati Rp1.235.000 tgl 25/9/18 53. Kasek Ps_Rebo Rp1.235.000 tgl 25/9/18 54. Kasek Kep.Ser Selatan Rp3.562.500 tgl 25/9/18 55. Kasek Cipayang Rp1.000.000 tgl 25/9/18 56. Kasek Cakung Rp1.000.000 tgl 25/9/18 57. PUMK Duren Sawit Rp712.500 tgl 25/9/18 58. PUMK Matraman Rp712.500 tgl 25/9/18 59. PUMK Ciracas Rp712.500 tgl 25/9/18 60. PUMK Kramat Jati Rp712.500 tgl 25/9/18 61. Kasek Matraman Rp1.235.000 tgl 25/9/18 62. Kasek Sawah Besar Rp6.175.000 tgl 26/9/18 63. Kasek Menteng Rp6.175.000 tgl 26/9/18 64. Kasek Cempaka Putih Rp6.175.000 tgl 26/9/18 65. Kasek Gambir Rp6.175.000 tgl 26/9/18 66. Kasek Pulogadung Rp1.235.000 tgl 27/9/18 67. PUMK Tanah Abang Rp2.050.000 tgl 27/9/18 68. PUMK Sawah Besar Rp2.050.000 tgl 27/9/18 69. PUMK Senen Rp2.050.000 tgl 27/9/18 70. PUMK Johar Baru Rp2.050.000 tgl 27/9/18 71. PUMK Jatinegara Rp712.500 tgl 25/9/18 72. Kasek Ps. Minggu Rp4.675.000 tgl 26/10/18 73. PUMK Stubi Rp2.562.500 tgl 26/10/18 74. Kasek Cilandak Rp4.675.000 tgl 26/10/18 75. PUMK Cilandak Rp2.562.500 tgl 26/10/18 76. Kasek Kb Baru Rp6.175.000 tgl 26/10/18 77. PUMK Kb Baru Rp2.562.500 tgl 26/10/18 78. Kasek Kb Lama Rp4.675.000 tgl 26/10/18 79. PUMK Kb Lama Rp2.562.500 tgl 26/10/18 80. Kasek Jagakarsa Rp4.675.000 tgl 26/10/18 81. Kasek Tebet Rp4.675.000 tgl 26/10/18 82. PUMK Mampang Rp2.562.500 tgl 26/10/18 83. Kasek Pesanggrahan Rp4.675.000 tgl 26/10/18 84. PUMK Pesanggrahan Rp2.562.500 tgl 26/10/18 85. Kasek Stubi Rp4.675.000 tgl 26/10/18 86. PUMK Ps. Minggu Rp2.562.500 tgl 26/10/18													
							- Pembayaran Honor Pokja kepada PNS Pemprov DKI : 1. a.n EP sebesar Rp1.330.000 tgl 30/7/18 2. a.n Msk sebesar Rp1.330.000 tgl 30/7/18 3. a.n Mwt sebesar Rp16.915.000 tgl 30/7/18 4. a.n R sebesar Rp5.320.000 tgl 30/7/18 5. a.n SW sebesar Rp5.320.000 tgl 30/7/18 6. a.n DHW sebesar Rp20.090.000 tgl 28/9/18 7. a.n SDK sebesar Rp13.865.000 tgl 25/9/18 8. a.n PP sebesar Rp427.500 tgl 25/9/18 9. a.n AK sebesar Rp1.900.000 tgl 26/10/18 10. a.n DA sebesar Rp1.425.000 tgl 26/10/18 11. a.n LH sebesar Rp2.042.500 tgl 26/10/18 12. a.n JM sebesar Rp1.757.500 tgl 26/10/18 13. a.n DA sebesar Rp2.137.500 tgl 26/10/18 14. a.n YT sebesar Rp1.187.500 tgl 26/10/18 15. a.n NP sebesar Rp1.282.500 tgl 26/10/18 16. a.n RA sebesar Rp1.900.000 tgl 26/10/18 17. a.n Ndy sebesar Rp1.425.000 tgl 26/10/18 18. a.n HS sebesar Rp660.000 tgl 26/10/18 19. a.n Kmw sebesar Rp570.000 tgl 26/10/18 20. a.n MH sebesar Rp1.425.000 tgl 26/10/18	85.825.000,00												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		Jml			Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							21. a.n TM sebesar Rp760.000 tgl 26/10/18 22. a.n Shn sebesar Rp855.000 tgl 26/10/18 23. a.n RH sebesar Rp1.900.000 tgl 26/10/18 Pembayaran Honor sebagai PNS yang diperbantukan : 1. PUMK se Jkt Barat sebesar Rp14.040.000 tgl 30/7/18 2. PUMK se Jkt Pusat sebesar Rp14.040.000 tgl 30/7/18 3. PUMK se Jkt Selatan sebesar Rp17.550.000 tgl 30/7/18 4. PUMK se Jkt Timur sebesar Rp17.550.000 tgl 30/7/18 5. PUMK se Jkt Utara sebesar Rp10.530.000 tgl 30/7/18 6. PUMK se Kep Seribu sebesar Rp3.510.000 tgl 30/7/18 PTL Semester I 2019 Telah disetor ke kas daerah sebesar : - Pembayaran honor sebagai Kepala Sekretariat dan BPP sebesar Rp54.718.500,00: 1. Kasek Makasar Rp6.175.000 tgl 12/12/18 2. Kasek Duren Sawit Rp6.792.500 tgl 8/2/19 3. PUMK Duren Sawit Rp1.282.500 tgl 8/2/19 4. Kasek Pademangan Rp1.425.000 tgl 8/2/19 5. Kasek Kep Seribu Rp6.000.000 tgl 31/1/19 6. Kasek Jakt Rp14.906.000 tgl 21/01/2019 7. Kasek Pancoran Rp6.115.000 tgl 28/01/19 8. Kasek Pasar Rebo Rp3.705.000 tgl 20/01/19 9. Kasek Koja Rp4.175.000 tgl 31/01/19 10. Kasek Kep Seribu Rp3.582.500 tgl 19/02/19 11. BPP Kec clincing Rp500.000 tgl 19/02/19 - Honor Narasumber dan Moderator sebesar Rp2.835.000,00 1. A.n EPZL sebesar Rp665.000 tgl 08/02/19 2. a.n M sebesar Rp685.000 tgl 19/02/19 3. a.n. M sebesar Rp1.485.000 tgl 6/3/19	77.220.000,00										
							- Pembayaran Honor Pokja kepada PNS Pemprov DKI sebesar Rp100.052.500,00: 1. a.n Ks sebesar Rp3.040.000 tgl 12/12/18 2. a.n HD sebesar Rp1.140.000 tgl 11/02/19 3. a.n RM sebesar Rp4.987.500 tgl 31/01/19 4. a.n HS sebesar Rp855.000 tgl 31/01/19 5. a.n Y sebesar Rp9.975.000 tgl 28/01/19 6. a.n S sebesar Rp12.000.000 tgl 1/3/19 7. a.n M sebesar Rp25.000.000 tgl 01/03/19 8. a.n M sebesar Rp24.700.000 tgl 6/3/19 9. a.n S sebesar Rp3.190.000 tgl 6/3/19 10. a.n M sebesar Rp8.515.000 tgl 6/3/19 11. a.n D sebesar Rp6.650.000 tgl 28/1/19 PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -	100.052.500,00										
6	Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1,02 Miliar atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Tidak Ada Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp192,99 Juta Pada Bawastu Provinsi	1	1.024.004.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu agar menginstruksikan Sekjen Bawastu untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPSPM pada Bawastu Provinsi DKI Jakarta karena lalai dalam melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya;	1	-	PTL Semester I 2018	1		0	-					Selesai		

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	DKI Jakarta						<p>PTL SEM II 2018:</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063 Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada:</p> <p>1. 1063.2. Sdr. Maskur selaku PPK pada Bawaslu Provinsi DKI</p> <p>2. 1063.3. Sdr. Murwatiningrum selaku PPSPM pada BAWASLU Provinsi DKI</p>											
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran tahun 2017 pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena lalai dalam melakukan pengujian atas pembayaran;	1	-	PTL Semester I 2021: -					1						
				3. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;	1	-	<p>PTL Semester I 2018: -</p> <p>PTL SEM II 2018: -</p> <p>PTL Semester I 2019: -</p> <p>PTL Semester II 2019: -</p> <p>PTL Semester I 2020: -</p> <p>PTL Semester II 2020: -</p> <p>PTL Semester I 2021: -</p>					1						
				4. Memerintahkan PNS DKI untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti kepada BPK sebesar Rp1.024.004.000,00 dengan rincian: a. Kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain, honor yang diperoleh ganda/dobel sebesar Rp109.565.000,00 yang terdiri dari: 1) Kegiatan yang dilaksanakan di bulan Januari 2017 Rp4.000.000,00; 2) Kegiatan yang dilaksanakan di bulan April 2017 Rp16.000.000,00; 3) Kegiatan silaturahmi dengan Panwaslu Kab/Kota, Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS Rp3.450.000,00; 4) Kegiatan Verifikasi Laporan Keuangan Dalam Rangka Pilgub DKI Rp5.100.000,00;	1	1.024.004.000,00	<p>PTL Semester I 2018 :</p> <p>Telah disetor di ke kas negara sebesar :</p> <p>A. Kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain, honor yang diperoleh ganda/dobel</p> <p>- Kegiatan A.1) setoran sebesar Rp42.000.000,00 (2 buah bukti setor), dengan rincian:</p> <p>1. Rp19.500.000,00 tgl 22/4/18 NTPN 8670B8IAVGL1H6</p> <p>2. Rp22.500.000,00 tgl 20/4/18 NTPN 362568HV18CAKN06</p> <p>- Kegiatan A.2) setoran sebesar Rp16.000.000,00 (4 buah bukti setor), dengan rincian:</p> <p>3. Rp6.900.000,00 tgl 20/4/18 NTPN A593E8HV0LO95506</p> <p>4. Rp1.800.000,00 tgl 20/4/18 NTPN FB6FB8HUUTS4MF06</p> <p>5. Rp6.300.000,00 tgl 20/4/18 NTPN 23F208HUVPO6TQ06</p> <p>6. Rp1.000.000,00 tgl 20/4/18 NTPN 50E768HUUIU2F406</p>	1	938.306.500,00	0	-						Selesai	1.962.310.500,00

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5) Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Anggaran Rp3.450.000,00; 6) Kegiatan Rapat Pengendalian Penyerapan Anggaran Dana Hibah Rp10.900.000,00; 7) Kegiatan Raker Penyusunan Program Anggaran Putaran II Rp9.850.000,00; 8) Kegiatan Sosialisasi Kewenangan Baru Bawaslau UU No. 10 Tahun 2016 Rp300.000,00;			A. Kegiatan A.3) setoran sebesar Rp3.450.000,00 (1 buah bukti setor), dengan rincian: 7. Rp3.450.000,00 tgl 20/4/18 NTPN B9F5A8HUT6007P06 B. Pembayaran honor panitia dan uang saku tidak sesuai ketentuan setoran sebesar Rp16.237.500,00 (2 buah bukti setor), dengan rincian: 8. Rp4.987.500,00 tgl 19/4/18 NTPN 8EC5789F3PHVJG7M 9. Rp11.250.000,00 tgl 19/4/18 NTPN 3706A89MME02E7M											
				9) Kegiatan Rakor dengan Stakeholder pada 9 Februari 2017 Rp5.950.000,00; 10) Kegiatan Rakor dengan Stakeholder Rp6.615.000,00; dan 11) Kegiatan Rakor dengan Stakeholder pada 9 Februari 2017 Rp5.950.000,00; b. Pembayaran honor panitia dan uang saku tidak sesuai ketentuan Rp16.237.500,00; c. Pembayaran Belanja Jasa Profesi dan Rapat dalam Kantor tidak sesuai ketentuan Rp629.335.000,00 d. Pembayaran kegiatan silaturahmi tidak sesuai ketentuan Rp4.185.000,00; e. Pembayaran Kegiatan Verifikasi Laporan Keuangan tidak sesuai ketentuan Rp5.700.000,00 f. Terdapat duplikasi pembayaran sebagai BPP Panwaslu Kepulauan Seribu Rp3.249.000,00 g. Pembayaran Kegiatan Penyusunan Jurnal Hasil pengawasan bulan Maret 2017 tidak sesuai ketentuan Rp6.312.500,00 h. Kelebihan pembayaran atas Biaya Kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Rp51.965.000,00;			C. Pembayaran Belanja Jasa Profesi dan Rapat dalam Kantor tidak sesuai ketentuan Setoran sebesar Rp616.450.000,00 (63 buah bukti setor) 10. Rp15.565.000,00 tgl 22/5/18 dengan NTPN C97106G2NLGQ0936 11. Rp1.710.000,00 tgl 22/5/18 dengan NTPN 39C5B6G20LP01B6 12. Rp4.090.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN 278796G4M7RQH836 13. Rp11.175.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN 882166G33A10FH36 14. Rp6.585.000,00 22/5/18 dgn NTPN 985A96G00M9AK436 15. Rp1.995.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN F85426G3M7D8PA36 16. Rp5.920.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN 885396G038M37N36 17. Rp855.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN CB0536G2FG0SUD36 18. Rp4.270.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN A89686G1KEK0Q036 19. Rp665.000,00 tgl 22/5/18 dgn NTPN DA5AE6G117UFP636 20. Rp22.350.000,00 tgl 22/5/18, NTPN 489086G47VGM3V36 21. Rp13.370.000,00 tgl dgn NTPN 7E45773HRHV6956 22. Rp7.140.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 26FD673HQVTTMNS6 23. Rp4.390.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 6036F73HQ3VRFCS6 24. Rp765.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 2805273HOC3NOM56 25. Rp2.375.000,00 tgl 26/5/18, NTPN F67A473134MIGJ56 26. Rp3.060.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 74AE57311VEFH56 27. Rp7.450.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 05EF67311M4EPM56 28. Rp6.955.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 5338E73IOGSBQ156 29. Rp2.195.000,00 tgl 26/5/18, NTPN 624427HVUSAB056											

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)						
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan									
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				i. Pembayaran Honorarium Narasumber/Moderator dan Uang Saku Rapat di Kantor yang bersumber dari APBN Rp189.955.000,00; dan j. Pembayaran Kegiatan Rakor Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Rp7.500.000,00.			30. Rp12.225.000,00 F8A6873HUP07BSS6 tgl 26/5/18, NTPN 31. Rp1.700.000,00 892E573HU6CSSA56 tgl 26/5/18, NTPN 32. Rp5.100.000,00 1D53273HTIO4CO56 tgl 26/5/18, NTPN 33. Rp6.600.000,00 299A073HSEG1DK56 tgl 26/5/18, NTPN 34. Rp850.000,00 950B941U0BJ98T6 tgl 2/7/18, NTPN 35. Rp7.500.000,00 F4EBB423KHJBGT6 tgl 2/7/18, NTPN 36. Rp7.500.000,00 3BE2B421A1TOQDT6 tgl 2/7/18, NTPN 37. Rp15.000.000,00 E5CDB26NL5220EMM tgl 9/6/18, NTPN 38. Rp4.500.000,00 5385941VPM9RV5T6 tgl 2/7/18, NTPN 39. Rp9.000.000,00 B2D0626ND5THOMM tgl 9/6/18, NTPN 40. Rp4.500.000,00 D65F641R80A953T6 tgl 2/7/18, NTPN 41. Rp900.000,00 0004441TBD1K20T6 tgl 2/7/18, NTPN 42. Rp87.600.000,00 363B541P4BMR7GT6 tgl 2/7/18, NTPN 43. Rp5.700.000,00 51BD226NUSOP1LMM tgl 9/6/18, NTPN 44. Rp850.000,00 pd tgl 9/6/18 NTPN 896DC26NN6876TMM 45. Rp1.710.000,00 CCE0942310G3PGT6 tgl 2/7/18 NTPN 46. Rp7.500.000,00 F280126NQCMPCCGMM tgl 9/6/18 NTPN 47. Rp1.360.000,00 0A34341UHQCM54T6 tgl 2/7/28 NTPN 48. Rp665.000,00 12848425BQ02P9T6 tgl 2/7/18 NTPN 49. Rp850.000,00 C74C326OE601TKMM tgl 9/6/18 NTPN 50. Rp5.765.000,00 F8174426T98143T6 tgl 2/7/18 NTPN 51. Rp22.500.000,00 2D9B426NHUJPOQMM tgl 9/6/18 NTPN 52. Rp2.560.000,00 BA93541SPU87F4T6 tgl 2/7/18 NTPN 53. Rp7.500.000,00 6CF6420BNN1JT6 tgl 2/7/18 NTPN 54. Rp7.500.000,00 2D3AD424RGEPSHT6 tgl 2/7/28 NTPN 55. Rp7.500.000,00 A60CB420RNUITIT6 tgl 2/7/18 NTPN 56. Rp27.000.000,00 1E2DD26NVB050PMM tgl 9/6/18 NTPN 57. Rp680.000,00 C4C01426BQEKHT6 tgl 2/7/18 NTPN																

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							58. Rp3.420.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 2591F424BG7G9IT6 59. Rp30.000.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 3AFDB841S16K89NT6 60. Rp7.500.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 598B741QDM64OET6 61. Rp13.500.000,00 tgl 2/7/18 NTPN E3B3941PNRMDORT6 62. Rp4.650.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 4C56941VB4KM3T6 63. Rp20.620.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 55C35428PH2QUQT6 64. Rp6.000.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 13AC0422JTD2BBT6 65. Rp30.000.000,00 tgl 7/6/18 NTPN 6AD87008N136R25M 66. Rp4.500.000,00 tgl 6/6/18 NTPN 055C40LB5S18VD6 67. Rp12.950.000,00 tgl 7/6/18 NTPN DF555007DLVRQISM 68. Rp6.385.000,00 tgl 22/5/18 NTPN 0E4756G3EL8LF036 69. Rp6.000.000,00 tgl 2/7/18 NTPN EF1BD421LKQL23T6 70. Rp71.550.000,00 tgl 9/6/18 NTPN 5B10226NS4UR6MM 71. Rp9.600.000,00 tgl 19/4/18 NTPN 954C989E9SLTC27M 72. Rp4.280.000,00 tgl 2/7/18 NTPN 920104225L1TU2T6 G. Pembayaran Kegiatan Penyusunan Jurnal Hasil pengawasan bulan Maret 2017 tidak sesuai ketentuan Setoran sebesar Rp3.249.000,00 (1 buah bukti setor), dengan rincian: 73. Rp3.249.000,00 tgl 19/4/18 NTPN 3D0FF89DUHF0CJ7M I. Pembayaran Honorarium Narasumber/Moderator dan Uang Saku Rapat di Kantor yang bersumber dari APBN Setoran sebesar Rp50.965.000,00 (5 buah bukti setor), dengan rincian: 74. Rp665.000,00 tgl 20/4/18 NTPN 79ECF8HV3ISGIV06 75. Rp12.100.000,00 tgl 22/4/18 NTPN 09C8C8JA814MTJH6 76. Rp3.600.000,00 tgl 22/4/18 NTPN 9AC498JA88QM5QH6 77. Rp2.200.000,00 tgl 20/4/18 NTPN 203AB8HV51EK9S06 78. Rp32.400.000,00 tgl 19/4/18 NTPN 3939289DL7E8JJ7M J. Pembayaran Kegiatan Rakor Sekretariat Bawastu Provinsi dan Panwastu Setoran sebesar Rp189.955.000,00 (2 buah bukti setor), dengan rincian: 79. Rp36.055.000,00 tgl 16/5/18 NTPN BC3D65LN0ASC3LG6 80. Rp153.900.000,00 tgl 16/5/18 NTPN 06E3D5L06O7E6PG6										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)			
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan						
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							PTL SEM II 2018: Telah disetor ke kas negara sebesar A. Kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain, honor yang diperoleh ganda/dobel - Kegiatan A.4) setoran sebesar Rp5.100.000 tgl 13/9/18 NTPN 5E1B246GUUMJKOGI - Kegiatan A.5) setoran sebesar Rp3.450.000 tgl 13/9/18 NTPN 8F28B46L6606ERGI - Kegiatan A.6) setoran sebesar Rp10.900.000 tgl 13/9/18 NTPN 55C1446KV0GQJOGI - Kegiatan A.7) setoran sebesar Rp9.850.000 tgl 13/9/18 NTPN CC87F46KJ2LS4NGI - Kegiatan A.8) setoran sebesar Rp300.000 tgl 13/9/18 NTPN 6D5E746K3UCLG3GI - Kegiatan A.9) setoran sebesar Rp5.950.000 tgl 13/9/18 NTPN 38A1946IAT03QVGI - Kegiatan A.10) setoran sebesar Rp6.615.000 tgl 13/9/18 NTPN 117FE46I09D60TGI - Kegiatan A.11) setoran sebesar Rp5.950.000 tgl 13/9/18 NTPN DBBB846LVBHQJGI C. Pembayaran Belanja Jasa Profesi dan Rapat dalam Kantor tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp12.885.000 tgl 13/9/18 NTPN 9EDFB46J5LQ86RGI D. Pembayaran Kegiatan Silaturahmi tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp4.185.000 tgl 13/9 NTPN D53F646I0N19QKGI E. Pembayaran Kegiatan Verifikasi laporan Keuangan tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp5.700.000 tgl 13/9/18 NTPN D41A46HBF5JHGI	48.115.000,00												
							C. Pembayaran Belanja Jasa Profesi dan Rapat dalam Kantor tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp12.885.000 tgl 13/9/18 NTPN 9EDFB46J5LQ86RGI D. Pembayaran Kegiatan Silaturahmi tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp4.185.000 tgl 13/9 NTPN D53F646I0N19QKGI E. Pembayaran Kegiatan Verifikasi laporan Keuangan tidak sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp5.700.000 tgl 13/9/18 NTPN D41A46HBF5JHGI	22.770.000,00												
							G. Pembayaran Kegiatan Penyusunan Jurnal hasil Pengawasan bln Maret tdk sesuai ketentuan - Setoran sebesar Rp6.312.500 tgl 13/9/18 NTPN 365EE46NL57MJOGI H. Kelebihan Pembayaran atas Rapat Evaluasi Pengawasan Putung - Setoran sebesar Rp1.000.000 tgl 13/9/18 NTPN 0ECD146N3VOANTGI J. Pembayaran Kegiatan Rakor Sekretariat Bawasu Provinsi dan panwaslu - Setoran sebesar Rp7.500.000 tgl 13/9/18 NTPN 5F9A746M125HI5GI PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 -	14.812.500,00												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5. Memerintahkan Kepala Bagian PI Bawahu untuk melakukan verifikasi atas kegiatan yang tidak ada pertanggungjawaban dan menyampaikan hasil verifikasi kepada BPK sebesar Rp192.993.000,00. Apabila pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan menyerahkan copy bukti kepada BPK	1	-	PTL Semester I 2018: - PTL SEM II 2018: Telah disetor ke kas negara sebesar : 1. Rp4.560.000 tgl 29/9/18 NTPN E8B755NG99IOG0MM 2. Rp900.000 tgl 29/9/18 NTPN F1C955NG41UB3UMM 3. Rp2.660.000 tgl 29/9/18 NTPN 1B88CSNG8MUN0EMM 4A. Rp30.907.000 tgl 29/9/18 NTPN DDFD95NG6V2HOMM 4B. Rp15.116.000 tgl 3/10/18 NTPN 407596CGN6TRIABM 5. Rp4.100.000 tgl 29/9/18 NTPN ADB0ESNG6CEH26MM 6. Rp6.000.000 tgl 29/9/18 NTPN 6B2925NG6LOHPVMM 7. Rp7.200.000 tgl 29/9/18 NTPN 9D35DSNG5GGEQRMM 8. Rp3.900.000 tgl 29/9/18 NTPN CBB135NG4TSD89MM 9. Rp3.500.000 tgl 29/9/18 NTPN 02EC75NG4B8BRNMM 10. Rp900.000 tgl 29/9/18 NTPN E10725NG08S1EPMM	1								Selesai	192.993.000,00
							11. Rp9.373.000 tgl 29/9/18 NTPN 273935NG2005TFMM 12. Rp2.000.000 tgl 29/9/18 NTPN D1C1BSNG1E44DTMM 13. Rp21.000.000 tgl 29/9/18 NTPN B3FB95NG21C7D1MM 14. Rp15.000.000 tgl 3/10/18 NTPN CSF756CGKSDL32BM 15. Rp2.100.000 tgl 29/9/18 NTPN C72545NG3FA9KCMM 16. Rp1.900.000 tgl 29/9/18 NTPN 292175NG7R0KP3MM 17. Rp9.000.000 tgl 29/9/18 NTPN 9B2805NG5PQFIKMM PTL Semester I 2019 : Telah disetor ke kas negara sebesar Rp52.877.000,00: 1. Rp31.300.000,00 tgl 31/12/18 NTPN 8DA200EHS6BK64TM 2. Rp2.340.000,00 tgl 31/12/18 NTPN 852C30ISV5S5NHTM 3. Rp3.587.000,00 tgl 9/1/19 NTPN DF0192NFFS3A3K4M 4. Rp15.650.000,00 tgl 31/12/18 NTPN F57AA0EID2GV9ETM										

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan (TP3) sebesar Rp1,00 Miliar Belum Sesuai Ketentuan	1	1.004.272.050,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar: 1. Memerintahkan PPK dan para pegawai Biro TP3 untuk menyeter kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti kepada BPK sebesar Rp189.815.000,00 (Rp1.004.272.050,00- Rp814.457.050,00);	1	189.815.000,00	PTL Semester I 2018 - Telah diseter di ke kas negara sebesar 1. Rp560.000,00 tgl 12/7/18 NTPN CEAE68J73ROOGPAO 2. Rp21.140.000,00 tgl 14/5/18 NTPN 1A30019A0PHIBE12 3. Rp23.220.000,00 tgl 14/5/18 NTPN 3CD1C198DIDFHU12 4. Rp18.435.000,00 tgl 14/5/18 NTPN 35436190PV81H112 5. Rp33.510.000,00 tgl 14/5/18 NTPN 1558C18Q14SNS012 6. Rp92.950.000,00 tgl 14/5/18 NTPN DD1B31BQH274R212	1	189.815.000,00							Selesai. Rp814.457.050,00 telah diseter saat pemeriksaan tidak termasuk dalam nilai rekomendasi.	1.004.272.050,00
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro TP3 tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan;	1	-	PTL Semester I 2018: -	1	-							Selesai	
							PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063.21 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada Sdr. Drs. Bernad D Sutrisno selaku Kepala Biro TP3										
				3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada Biro TP3 (Bagian TP2, Penyelesaian Sengketa, Sosialisasi dan TLP) dan PPSPM pada Bawaslu pusat karena lalai dalam melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya;	1	-	PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada: 1. 1063.19. Sdr. Pakerti Luhur selaku PPSPM pada Bawaslu Pusat 2. 1063.22. Sdr. Hotma Maya Marbun selaku PPK Bagian Penyelesaian Sengketa 3. 1063.23. Sdr. Feizal Rachman selaku PPK Bagian Sosialisasi 4. 1063.24. Sdr. Drs. Harimurti Wicaksoni selaku PPK Bagian Teknis Pengawasan Pemilu 5. 1063.25. Sdr. Yusti Erlina selaku PPK Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran	1	-							Selesai	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bagian TP2, Penyelesaian Sengketa, Sosialisasi dan TLP) karena lalai dalam melakukan pengujian atas pembayaran;	1	-	PTL Semester I 2018 - PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada: 1. 1063.28. Sdr. M. Reza Sofyan selaku BPP Bagian Penyelesaian Sengketa 2. 1063.27. Sdr. Atik Arfan selaku BPP Bagian Teknis Pengawasan Pemilu 3. 1063.28. Sdr. Astri Dwi Rahayu selaku BPP Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran 4. 1063.29. Sdr. Aji Nugroho selaku BPP Bagian Sosialisasi	1	-								Selesai	
				5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan Bagian TP2 yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang dikelolanya; dan	1	-	PTL Semester I 2018 - PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063.30 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada Sdr.Sukardin selaku pengelola keuangan bagian TP2	1	-								Selesai	
				6. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola kegiatan Bagian Penyelesaian Sengketa yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atas kegiatan yang dikelolanya.	1	-	PTL Semester I 2018: - PTL Semester II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -					1	-					
8	Terdapat Laptop Sebesar Rp99,00 Juta yang dikuasai oleh Anggota	1	286.260.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:														

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bawaslu yang Telah Nonaktif dan Sebesar Rp187,26 Juta Tidak Diketahui Keberadaannya			1. Menarik kembali aset yang dikuasai oleh mantan pejabat Bawaslu terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2. Melakukan penertiban penatausahaan dan pengamanan aset di lingkungan Bawaslu	1 1	99.000.000,00 187.260.000,00	PTL Semester I 2018: - PTL Semester II 2018: - PTL Semester I 2019: - PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: - PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -					1 1	99.000.000,00 187.260.000,00				
9.	Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Belum Tertib	1	452.388.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk: 1. Memerintahkan Panwaslu Kabupaten Jayapura, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya dan Panwaslu Kabupaten Maybrat untuk segera melakukan pengesahan pengembalian dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 melalui SP4HL ke KPPN 2. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Mataram, Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, Panwaslu Kabupaten Bima, Panwaslu Kabupaten Dompu, Panwaslu Kabupaten Sumbawa dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp452.388.000,00 ke kas daerah;	1 1	- 452.388.000,00	PTL Semester I 2018 - PTL Semester II 2018 - PTL Semester I 2019 - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL SEM I 2021 - Telah ditindaklanjuti dengan melakukan SP4HL ke KPPN oleh Kab. Puncak Jaya dengan Pengesahan No.00252 tanggal 31 Desember 2017, Kab. Jayapura dengan Pengesahan No. 00249 tanggal 31 Desember 2017, dan Kab. Maybrat dengan Pengesahan No. SP2D 160650500290006 tanggal 18 Desember 2018 (Dokumen SP4HL terlampir) PTL Semester I 2018 - PTL SEM II 2018: Telah disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi NTB pada tgl 18/7/18 sebesar Rp452.388.000,00 PTL SEM I 2019: -	1 1	- 452.388.000,00							Selesai Selesai	 452.388.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Ketua Panwaslu Kota Mataram, PPK dana hibah Bawaslu Provinsi NTB, PPK Panwaslu Kota Bima dan Panwaslu Kabupaten Lombok Barat, Bendahara Pengeluaran dana hibah Bawaslu Provinsi NTB, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Bima dan Panwaslu Kabupaten Lombok Barat atas peminjaman dana hibah Bawaslu Provinsi NTB;	1		<p>PTL Semester I 2018</p> <p>-</p> <p>PTL SEM II 2018:</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada:</p> <p>1. 1063.8. Sdr. Drs. Ruslan selaku Ketua pada Panwaslu Kota Mataram</p> <p>2. 1063.9. Sdr. Nasarudin selaku PPK Dana Hibah pada Bawaslu Provinsi NTB</p> <p>3. 1063.10. Sdr. Subhan selaku PPK pada Panwaslu Kota Bima</p> <p>4. 1063.11. Sdr. Lalu Rastipa Utama selaku PPK pada Panwaslu Kab. Lombok Barat</p> <p>5. 1063.12. Sdr. Agnes Juliet Bokings selaku BP Dana Hibah pada Bawaslu provinsi NTB</p> <p>6. 1063.13. Sdr. Agus Awaludin selaku BPP pada Panwaslu Kota Bima</p> <p>7. 1063.14. Sdr. Ngudi Prayogo selaku BPP pada Panwaslu Kab. Lombok Barat</p>	1	-							Selesai	
				4. Memerintahkan Panwaslu Kabupaten/Kota terkait untuk tidak membayarkan koreksi tunggakan pada 14 Panwaslu Kabupaten/Kota total sebesar Rp2.083.110.000,00. Apabila telah dibayarkan pada tahun 2018 agar segera mengembalikan pembayaran tunggakan tersebut ke kas Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing dan menyerahkan bukti nya ke BPK dan apabila belum dibayarkan agar membuat surat pernyataan dari masing-masing Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan diverifikasi oleh Bagian PI dan	1		<p>PTL Semester I 2018</p> <p>-</p> <p>PTL SEM II 2018:</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2019</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Panwaslu dari:</p> <p>Panwaslu Prov Maluku Sebesar Rp21.400.000 tgl 13 September 2018</p> <p>PTL Semester II 2019</p> <p>-</p> <p>PTL Semester I 2020</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2020</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2021</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan :</p> <p>1. Menyetorkan ke Kas Hibah RPL BPP Panwas Kab. Padang Lawas Tahun 2018 dengan No. rekening 23401030000817 pada tanggal 25 Mei 2018 senilai Rp86.240.000,00 dan telah dicatat dalam BKU Hibah pada tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp86.240.000.</p> <p>Nilai tersebut telah sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan reviu pertanggungjawaban panwaslu kab. Padang Lawas bulan Maret 2018 bahwa Koreksi pertanggungjawaban tunggaka Padang Lawas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp86.240.000. Nilai Temuan sebesar Rp93.500.000, merupakan biaya sewa kantor kabupaten Padang Lawas dan Panwascam yang memang menjadi belanja tahun 2018 sehingga tidak dicatatkan sebagai tunggakan pada LK Bawaslu tahun 2017. Nilai koreksi Panwaslu Kab. Padang Lawas Rp179.740.000,00.</p>			1						Belum sesuai karena Belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.739.258.667,00 (Rp2.083.110.000,00 - Rp21.400.000,00 - Rp179.740.000,00 - Rp142.711.333,00) di 12 Kab./Kota yaitu Panwaslu Kab. Empat Lawang, Lubuk Linggau, Kubu Raya, Mempawah, Kab. Ende, Kep. Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat,	127.018.000,00
																Kab. Mamberamo Tengah, Panwaslu Kota Malang, dan Kota Ambon.	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>2. Menyetorkan ke Kas Hibah RPL BPP Panwas Kota Padang Sidempuan Tahun 2018 dengan No. rekening 23001030058814 pada tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp19.378.000,00 dan telah dicatat dalam BKU Hibah pada tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp19.378.000,00 sebagai pengembalian saldo kas tunai.</p> <p>Nilai tersebut telah sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan revidu pertanggungjawaban panwaslu Kota Padang Sidempuan bulan Maret 2018 bahwa Koreksi pertanggungjawaban tunggakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp19.378.000,00. Nilai koreksi Panwaslu Kota Padang Sidempuan sebesar Rp142.711.333,00.</p>											
							<p>Nilai temuan sebesar Rp123.333.333 merupakan sewa kantor Kabupaten dan kecamatan yang memang menjadi belanja tahun 2018 sehingga tidak dicatatkan sebagai tunggakan dalam LK Bawaslu Tahun 2017</p>											
				5. Memerintahkan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk tidak membayarkan tunggakan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp34.380.000,00 dan apabila telah dibayarkan pada tahun 2018 agar segera mengembalikan pembayaran tunggakan tersebut ke kas Panwaslu dan menyerahkan buktinya ke BPK	1		<p>PTL Semester I 2018 -</p> <p>PTL SEM II 2018: - PTL Semester I 2019: Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Panwaslu dari: Panwaslu Kab Maluku Tenggara Barat sebesar Rp34.380.000,00 pd tgl 13 Sept 2018</p>	1									Selesai	
10	Penggunaan Pribadi atas Sisa Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 Belum Dikembalikan ke Kas Daerah	1		1. Memberikan sanksi kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bengkalis, BPP Panwaslu Kabupaten Bengkalis dan BPP Kota Samarinda sesuai ketentuan; dan	1		<p>PTL Semester I 2018 -</p> <p>PTL SEM II 2018: Telah ditindaklanjuti dengan Surat No 1063 /Bawaslu/SJ/KP.08.03/XI/2018 tanggal 20 November 2018 dari Sekretaris Jenderal tentang sanksi disiplin (Teguran Lisan), kepada: 1. 1063.15. Sdr. Dani Sofyan selaku Kepala Sekretariat pada Panwaslu Kab. Bengkalis 2. 1063.16. Sdr. Rahyuna Indra selaku BPP pada Panwaslu Kab. Bengkalis 3. 1063.17. Sdr. Meity Landemeyke Torar selaku BPP pada Panwaslu Kota Samarinda</p>	1				0					Selesai	

Matriks Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan (Rp)	
	Uraian	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Memerintahkan Kepala Bagian Internal dan Tata Laksana untuk melakukan pengawasan pengembalian ke kas daerah atas sisa dana hibah sebesar Rp1.164.627.570,00 yang terdiri atas Panwaslu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp716.158.061,00 dan Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp448.469.509,00	1	-	PTL Semester I 2018 - Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp3.000.000,00 dengan rincian: - Bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 pada tgl 12 April 2018. - Bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 pada tgl 23 Maret 2018 - Bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 pada tgl 8 Maret 2018			1	-					Temuan tersebut merupakan temuan yang sama dengan temuan LK Tahun 2016. Dalam LK 2016 sebagian sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penyetoran, namun sampai semester II Tahun 2021 belum selesai	-
							PTL Semester I 2019 Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp5.600.000,00: - Rp2.600.000,00 pada tgl 9 Mei 2018 - Rp2.000.000,00 pada tgl 9 Juli 2018 - Rp1.000.000,00 pada tgl 18 Desember 2018 (sama dengan LK2016 TP7.6) - PTL Semester II 2019 - PTL Semester I 2020 - PTL Semester II 2020 - PTL Semester I 2021 Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sbb: 1. Tgl 18 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,00 2. Tgl 2 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000,00 3. Tgl 10 Desember 2019 sebesar Rp3.000.000,00 4. Tgl 20 Desember 2019 sebesar Rp2.000.000,00 5. Tgl 25 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00 PTL Semester II Tahun 2021 Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kab Bengkalis sebesar Rp17.500.000,00 dengan rincian: - Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 27/6/2017 - Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 27/9/17 - Bukti setor sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 7/11/17 - Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 3/1/18 - Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 16/8/2017 - Bukti setor sebesar Rp2.500.000 tanggal 11/7/2017 Telah disetor ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda sebesar Rp6.500.000,00 dengan rincian sbb: 1. 10 September 2021 sebesar Rp2.500.000,00 2. 25 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000,00 3. 23 November 2021 sebesar Rp2.500.000,00 Sampai dengan Semester II Tahun 2021 telah disetor sebesar Rp49.600.000,00 dari Rp1.164.627.570,00										
Jumlah	10	4.461.084.500,00			31	3.646.627.450		17	2.254.859.500,00	6	937.448.400,00	8	454.319.550,00	-	-	-	4.327.634.050,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1. SP1 Penatausahaan dan Pelaporan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Belum Tertib			1			- BPK Merekomendasikan kepada ketua bawasu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP Panwaslu LN serta memerintahkan BPP agar berkoordinasi dengan 34 PUM Panwaslu LN terkait sisa dana dan pajak yang belum disetor atas transaksi PUM Panwaslu LN.	1											
							- PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I Tahun 2020: - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1193/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Aditya Nugroho Pamungkas selaku BPP Panwaslu LN PTL Semester II 2020: Telah ditindaklanjuti dengan undangan nomor 0288/Bawaslu/SJ/TU.03/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kegiatan rekonsiliasi data antara BPP Panwaslu LN dan PUM Panwaslu LN yang dilaksanakan tanggal 18-21 Juli 2019 di Golden Tulip Jineng Resort, Bali.	1											Selesai
							BPK Merekomendasikan kepada ketua bawasu untuk Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan verifikasi atas pengelolaan kas (penyuluran, pengembalian kas dan pajak) pada BPP dan PUM Panwaslu LN dan melaporkan hasilnya kepada BPK.	1											Berdasarkan laporan tindak lanjut masih belum terdapat bukti dukung penyajian belanja atas kerugian selisih kurs TA 2018 sebesar Rp54.051.986,00
							- PTL Semester II 2020: Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Tindak Lanjut Penatausahaan dan Pelaporan Kas Oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengawas Pemilu Luar Negeri Belum Tertib LAP Nomor 023/Bawaslu/B.ADM/KEU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 PTL Semester I 2021 : -	1											Selesai
							BPK Merekomendasikan kepada ketua bawasu untuk Memerintahkan BPP Panwaslu LN untuk menagihkan dan menyetorkan pajak yang belum disetor oleh PUMK Panwaslu LN berdasarkan hasil verifikasi.	1											
							- PTL Semester II 2020: Telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran pajak yang belum disetor oleh PUMK Panwaslu LN berdasarkan hasil verif dari LAP Nomor 023/Bawaslu/B.ADM/KEU/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 Rp153.221.607,00 NTPN F13EB742C66JBH1G tanggal 11 November 2020	1											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Terdapat Barang Milik Negara yang Hilang dan Belum Ditindaklanjuti Proses Penyelesaiannya	1		BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Menetapkan aturan tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang hilang.	1		PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I 2020 : - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -										
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Segera melaksanakan verifikasi dan memproses informasi kerugian negara sesuai ketentuan.	1		PTL Semester II Tahun 2019: - Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan Laporan Hasil Kerja Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor 066/LHK/Bawastu/PI/PW.06.02/XII/2019 dan Permohonan Persetujuan Penetapan Kerugian Negara dengan lampiran tambahan 1. Surat Keterangan Lunas Nomor 001.A/SKL/XII/2019 a.n. Azry Yusuf sebagaimana tercantum dalam SKTJM Nomor 001.A./SKTJM/XII/2019 senilai Rp3.285.715.00 dengan NTPN 4D8DF0N9UMJBTKAQ tanggal 27/12/2019 2. Surat Keterangan Lunas Nomor 001/SKL/XII/2019 a.n. Rismayadi sebagaimana tercantum dalam SKTJM Nomor 001/SKTJM/XII/2019 senilai Rp625.000.00 dengan NTPN B890F2G4UB04NINU tanggal 27/12/2019 3. Surat Keterangan Lunas Nomor 002/SKL/XII/2019 a.n. Hartini sebagaimana tercantum dalam SKTJM Nomor 002/SKTJM/XII/2019 senilai Rp8.465.000.00 dengan NTPN 87B7155DDRF1H5K6 tanggal 18/12/2019 4. Surat Keterangan Lunas Nomor 003/SKL/XII/2019 a.n. Didi Hadiyatna sebagaimana tercantum dalam SKTJM Nomor 003/SKTJM/XII/2019 senilai Rp9.857.144,00 tanggal 18/12/2019 5. Surat Keterangan Lunas Nomor 004/SKL/XII/2019 a.n. Feizal Rachman sebagaimana tercantum dalam SKTJM Nomor 004/SKTJM/XII/2019 senilai Rp7.850.000,00 dengan NTPN B60FE0N9UMJ4L658 tanggal 20/12/2019. PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -Telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ptl. Kepala Sekretariat Bawastu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran No 069/SN/PL.08/VII/2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Bawastu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai perolehan Rp12.500.000,00 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No 0050/PL.08/K1/02/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Bawastu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00								Belum seluruhnya, yaitu satker pusat, papua barat, sumatera barat dan sulawesi selatan		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. Kepatuhan																	
1	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pada Bawaslu Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp127,64Juta	1	127.644.836,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memerintahkan PPK dan para pegawai Biro Administrasi untuk menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK senilai 19.250.000,00 (Rp1.700.000,00 + Rp1.400.000,00 + Rp2.400.000,00 + Rp1.950.000,00 + Rp700.000,00 + Rp1.100.000,00).	1	19.250.000,00	<p>PTL Semester II 2019</p> <p>telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 11.700.000 (bagian perencanaan) NTPN 7555A1GPBPFMV40I tgl 29/05/2019 2.400.000 (bagian perencanaan) NTPN 67A221GOGMBHRFOI tgl 29/05/2019 1.400.000 (bagian perencanaan) NTPN 2B2301GO30KETO0I tgl 29/05/2019 1.100.000 (bagian DKPP) NTPN 90F1F0T7CEV2002 tgl 28/05/2019 <p>PTL Semester I 2020</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2020:</p> <p>Telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp700.000,00 NTPN 5BF3E7QLTK119HVM tanggal 27/07/2020 Rp1.950.000,00 NTPN 32E9C55DE4AE2ERJ tanggal 27/07/2020 	1	19.250.000		0,00		0,00		Selesai	19.250.000,00	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur untuk menyetor kelebihan pembayaran serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK dengan rincian sebagai berikut :	1	13.879.600,00	<p>PTL Semester II 2019</p> <p>telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke kas negara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prov. Jatim Rp1,510,000.00 NTPN 9B53946PRNSLCOO9 tgl 28/05/2019 <p>PTL Semester I 2020</p> <p>-</p> <p>PTL Semester II 2020:</p> <p>Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp12.369.600,00 NTPN 555D406J9NUONLU0 tanggal 16/7/2019</p>	1	13.879.600,00		-		0,00		Selesai	13.879.600,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro TP3, Kepala Biro H2PI dan Kepala Biro Administrasi yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan.	1		- PTL sem II Tahun 2019 : - - PTL sem I Tahun 2020 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1194/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Ferdinand Eskol Sirait selaku Kepala Biro H2PI - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1195/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Ahmad Khumaedi selaku Kepala Biro TP3 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1196/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Dermawan Adhi Santoso selaku Kepala Biro Administrasi	1									17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Biro TP3 dan Biro H2PI, Biro Administrasi Bawaslu RI dan Biro Administrasi DKPP) yang tidak melakukan monitoring untuk meyakinkan nilai belanja SPM LS telah didukung oleh dokumen pertanggungjawaban	1		- PTL sem II Tahun 2019 : - - PTL sem I Tahun 2020 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1197/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Bernadus Setya AJI selaku Bendahara Pengeluaran - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1198/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Nurul Hasanah selaku BPP Biro TP3 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1199/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Falcao Silaban selaku BPP Biro H2PI - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1200/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Atik Rahmawati selaku BPP Biro DKPP - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1201/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Indah Rosanti selaku BPP Biro Administrasi	1								17	18	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kabupaten Pematang, Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Bawaslu Kabupaten Batubara, Bawaslu Kabupaten Langkat dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang selaku PPK yang kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian.	1		<p>PTL sem II 2019 : -</p> <p>PTL sem I Tahun 2020</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1202/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Kartini Chandra selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa tengah</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1203/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Iwan Tero selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Utara</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1204/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Sudirman Rahim selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan</p>	1								Telah diberikan surat teguran kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Jawa Tengah, Prov Sumut, Prov Sulsel, Kab Pekalongan, Kab Banyuwangi, Kab Pematang, Kab Batubara, Kab Langkat, Kab Deli Serdang, dan Kab Sarolangun	94.515.236,00
							<p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1205/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pematang</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1206/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1207/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pematang</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1208/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sarolangun</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1209/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Kabupaten Batubara</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1210/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat</p>										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan apapun				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							- Telah ditindak lanjut dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1211/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang											
2	Pemberian Honorarium Narasumber/ Moderator, Panitia Kegiatan dan Uang Saku Kegiatan Rapat Tidak Sesuai Ketentuan	1	541.993.500,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pali untuk melakukan penyetoran senilai Rp3.420.000,00 atas kelebihan pembayaran honor narasumber/moderator yang melebihi jam pelaksanaan, kelebihan pembayaran honor panitia senilai Rp3.000.000,00 dan pembayaran honor panitia kegiatan ganda senilai Rp3.000.000,00 serta kelebihan pembayaran uang saku rapat biasa senilai Rp20.298.000,00	1	29.718.000,00	PTL sem II 2019 : - PTL sem I 2020: - PTL Semester II 2020: Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara: 1. Bawaslu Kabupaten Pali Rp13.723.000,00 dengan NTPN ASE0B00QSKVGFEL0 tanggal 30/07/2019 PTL Semester I 2021 : Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp15.995.000,00 tanggal 18/11/2020 dengan NTPN 4ADD548VUA315DGU	1	29.718.000,00								Selesai	29.718.000,00
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu DKI untuk melakukan penyetoran senilai Rp14.805.000,00 atas kelebihan pembayaran Honorarium narasumber/moderator pada kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) yang tidak sesuai ketentuan.	1	14.805.000,00	PTL Semester II Tahun 2019 telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Negara oleh Bawaslu DKI sebesar Rp 14,805,000.00 NTPN 8238D40ER0KTLG3M	1	14.805.000,00		0,00		0,00				Telah dilakukan penyetoran seluruhnya sebesar Rp14.805.000,00	14.805.000,00
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan menyetor kelebihan pembayaran honorarium operasional senilai Rp9.499.000,00.	1	9.499.000,00	PTL Semester II Tahun 2019 telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke Kas Negara oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebesar Rp9,499,000.00 NTPN E92428R8BDEOIGI tgl 05/07/2019	1	9.499.000,00		0,00		0,00				Telah dilakukan penyetoran seluruhnya sebesar Rp9.499.000,00	9.499.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kabupaten Pekalongan, Kabupaten PALL, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batubara dan Bawaslu Provinsi DKI lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan yang dikelolanya dan lalai dalam melakukan verifikasi pembayaran.	1		<p>PTL sem II 2019 :-</p> <p>PTL sem I Tahun 2020</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1205/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan surat nomor 1212/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BPP Bawaslu Kab. Pekalongan</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1213/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten PALL</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1215/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koorsek Bws kab. Jombang dan surat nomor 1214/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BPP Bws. Kab. Jombang</p>	1								Selesai	487.971.500,00
							<p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1208/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sarolangun</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1204/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1216/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koorsek Bws Kota Makassar dan surat nomor 1217/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BPP Bws. Kota Makassar</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1218/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koorsek Bws kab. Pasuruan dan surat nomor 1219/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BPP Bws. Kab. Pasuruan</p>										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							<p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1209/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Koorssek Bws Kab. Batubara surat nomor 1220/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BPP Kab. Batubara</p> <p>- Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1221/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada Kepala Sekretariat Bws Prov. DKI Jakarta dan surat nomor 1222/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada BP Bws. Prov DKI Jakarta</p> <p>PTL Semester II 2020: -</p> <p>PTL Semester I 2021 : Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0494.O/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Rahmi Syaulia dan 0495.I/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Meilan (BPP Kab Palu) - 0495.J/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Rusniati (BP Provinsi Sulawesi Selatan) - 0495.F/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 juni 2021 kepada Sdr Dodi Supiyadi (BPP kab Sarolangun)</p>												
3	Terdapat Pajak Penghasilan (PPh) Senilai Rp218,39 juta dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Senilai Rp152,47 juta Telah Dipungut dan Belum Disetor serta PPN Senilai Rp6,63 juta Tidak Dikenakan	1	370.872.362,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat dan BPP Bawaslu Kabupaten Banyuwasin dan Sarolangun karena tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak.	1		<p>- PTL sem II 2019 : - PTL sem I 2020 : -</p> <p>PTL Semester II 2020: 1. Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan kepada Korsek Bawaslu Kab Sarolangun dengan surat nomor 1208/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 2. Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan kepada Korsek Bawaslu Kab Banyuwasin dengan surat nomor 1206/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019</p> <p>PTL Semester I 2021: Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0495.F/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 juni 2021 kepada Sdr Dodi Supiyadi (BPP kab Sarolangun)</p>	1								Selesai	370.872.362,00		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Kabupaten Bawastu Banyuwangi dan Kepala Sekretariat Sarolangun memberikan pendidikan dan pelatihan pajak kepada masing-masing BPP.	1	-	PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I 2020 : - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: -										
4	Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Barang Pada Satker Bawastu Pusat Senilai Rp398,17 Juta dan Ketidakhematian atas Realisasi Belanja Barang Senilai Rp34,00 Juta.	1	398.176.034,92	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan PPK Biro Administrasi untuk menarik kelebihan pembayaran atas Pengadaan Layanan Internet Service Provider (ISP) dan Virtual Private Network (VPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk senilai Rp105.875.892,86 (Rp10.000.000,00 + Rp95.875.892,86) dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.	1	105.875.892,86	PTL Semester II Tahun 2019 telah ditindaklanjuti berupa penyetoran Ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp95.875.893,00 NTPN 1ACDD76KQL5NBGVI tgl 03 Juli 2019 2. Rp10.000.000,00 NTPN 4166A4BVUODGDVQR	1	105.875.892,86		0,00		0,00			Telah dilakukan penyetoran seluruhnya sebesar Rp105.875.893,00	105.875.892,86
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan PPK Biro H2PI untuk menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan item pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Seminar Internasional dan Fasilitasi Kegiatan Electoral Studies Programme pada Maju Makmur Indah senilai Rp235.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK.	1	235.000.000,00	PTL Semester II Tahun 2019 Telah ditindaklanjuti berupa penyetoran Ke Kas Negara oleh CV Maju Makmur sebesar Rp100.000.000,00 NTPN 65AEC55 tgl 8 November 2019 PTL Semester I Tahun 2020: - PTL Semester II 2020: Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara oleh CV Maju Makmur sebesar Rp135.000.000,00 NTPN 6B8993CIEFKSGUB7 tanggal 14 Desember 2020	1	235.000.000,00		-		0,00			Selesai	235.000.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK di lingkungan Biro Administrasi Bawaslu RI lalai dalam membuat perjanjian kerja, memonitor pelaksanaan kontrak dan tidak menyusun HPS dengan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1		- PTL Semester II 2019 : - - PTL Semester I Tahun 2020 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1223/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Bashory selaku PPK di Biro Administrasi - PTL Semester II Tahun 2020 : - - PTL Semester I 2021 : -			1						1	21.768.142,06
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Pokja pengadaan pada ULP Bawaslu RI tidak cermat dalam menyusun dokumen pengadaan.	1		- PTL sem II 2019 : - - PTL sem I 2020 : - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1188/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Waliaji, 1189/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Dading, 1190/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Selvy, 1191/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr Arif Budiman, 1192/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Zarwan	1								1	35.532.000,00
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK H2PI kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1		- PTL Semester II 2019 : - - PTL Semester I Tahun 2020 - Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 1194/Bawaslu/SJ/KP.08.03/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada sdr. Ferdinand Eskol Tiar sirait selaku PPK H2PI - PTL Semester II Tahun 2020: - - PTL Semester I 2021 : -			1						1	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan KPA Bawastu Kabupaten Deli Serdang kurang cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.	1	-	<p>PTL Semester II Tahun 2020; -</p> <p>PTL Semester I 2021 : Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0493.0/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 juni 2021 kepada Sdr Iwan Tero sebagai KPA Deli Serdang - 0494.K/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Bob Indrawan sebagai PPK Kab Deli Serdang</p>	1								Selesai	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada DKPP Bawastu RI lalai dalam melaksanakan tugasnya terkait pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Belanja Sewa Kendaraan yang dikelolanya dan Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan lalai dalam melaksanakan tugasnya atas kegiatan Belanja Sewa Kendaraan yang dikelolanya.	1	-	<p>PTL Semester II Tahun 2019 ; -</p> <p>PTL Semester I 2020; -</p> <p>PTL Semester II 2020; -</p> <p>PTL Semester I 2021 : Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 0494.F/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Akhmad Khumaidi sebagai PPK Biro Adm DKPP</p>	1								Selesai	
5	Pertanggungjawaban Belanja Pada Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) senilai Rp353.96 Juta Tidak Lengkap.	1	-	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Bagian Pengendali Internal (PI) untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban Panwaslu LN senilai Rp353.957.722,53 dan menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban	1	-	<p>PTL Semester II Tahun 2019</p> <p>Telah dilakukan verifikasi oleh PI dan untuk sebagian dikembalikan ke kas negara</p> <p>1. Panwaslu Kota Kinabalu a.n. Imanuddin Rp3,825,897.00 NTPN 2EDC47T0MIFKRP71 tgl 27 Mei 2019</p> <p>2. Panwaslu LN Johor Baru Rp3.029.459 NTPN D2DC706D338AG3G08</p> <p>3. Panwaslu LN Jeddah Rp1.050.000,00 NTPN 55EC83KAMM2MNVHI tanggal 11/06/2019</p> <p>4. Panwaslu LN Doha Rp1.590.000,00 NTPN 260723K9DKTDUQHI tanggal 11/06/2019</p>			1						Laporan Hasil verifikasi bukti pertanggungjawaban oleh PI belum diperoleh, terdapat penyetoran sebesar Rp38.207.589,00	38.207.589,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							5. Panwaslu Jeddah a.n. Rudyatmanto Rp8.933.291,00 NTPN C4E217QLTANLH0TI tanggal 30/07/2019 6. Panwaslu LN Jeddah a.n. Sujud Rp9.036.000,00 NTPN 2A11A3CIE5U98IR6 tanggal 16/08/2019 7. Panwaslu LN Jeddah a.n. Syamsul Rp4.415.291,00 NTPN A1B903CIE61GMFOV tanggal 24/09/2019 8. Panwaslu LN Kuching Rp2.869.904 NTPN 84CED7T080QFMN7I 9. Panwaslu LN Osaka Rp1.050.000,00, NTPN 9E2057SVHACLNP7I 10. Panwaslu LN Tawau Rp700.000,00 NTPN 3EA7B7SUEM3T9Q7I tanggal 27/05/2019 11. Panwaslu LN Melbourne Rp1.117.747,00 NTPN 7D1347SV4GJLID7I 12. Panwaslu LN Muscat Rp590.000,00 NTPN 32CDA7SU3K7I247I PTL Semester I Tahun 2020: - PTL Semester II Tahun 2020: - PTL Semester I Tahun 2021: -											
				BPK Merekomendasikan kepada ketua baswaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panwaslu LN yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas belanja bahan dan belanja perjalanan dinas luar negeri.	1	-	PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - <u>PTL Semester I 2021:</u> Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 0495.H/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Triza Novia sebagai PPK Panwas LN	1									Selesai	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua baswaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu LN yang tidak melakukan verifikasi yang memadai atas transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Panwas luar negeri dan tidak tertib dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.	1	-	PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - <u>PTL Semester I 2021:</u> Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor 0494.F/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Aditya Nugroho Pamungkas sebagai BPP Panwas LN	1									Selesai	
6	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Pertemuan, Renovasi Gedung dan Pemeliharaan Videotron Senilai Rp104,43 Juta	1	104.437.748,25	BPK Merekomendasikan kepada ketua baswaslu untuk Memerintahkan PPK atas pekerjaan pembangunan ruang pertemuan Baswaslu tahun 2018 (pembangunan masjid) untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan ruang pertemuan serta menyetorkan ke Kas Negara dan menyerahkan copy bukti setor kepada BPK senilai Rp42.356.362,90.	1	42.356.362,90	PTL Semester II 2019: - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - <u>PTL Semester I 2021:</u> Telah ditindaklanjuti berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada PPK Biro Administrasi Nomor 0493DHK.04/00/K1.06/2021 untuk menarik kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan ruang pertemuan	1	42.356.362,90								Selesai	42.356.362,90

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>PTL Semester II 2021: Telah disetor ke kas negara sebesar Rp42.356.363,00 pada tgl 16/8/2021 NTPN D5BBB8N3D00HP8LH</p>											
				<p>BPK Merekomendasikan kepada ketua Bawaslu untuk Memerintahkan PPK atas pekerjaan pemeliharaan inventaris kantor berupa videotron pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu untuk menarik kelebihan pembayaran atas pemeliharaan inventaris kantor berupa videotron, serta menyertakan ke Kas Negara dan menyerahkan copy bukti setor kepada BPK senilai Rp46.285.950,00.</p>	1	46.285.950,00	<p>PTL Semester II 2019 :- PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: Telah ditindaklanjuti berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada PPK Biro Administrasi Nomor 0493DHK.04/00/K1/06/2021 untuk menarik kelebihan pembayaran atas pemeliharaan inventaris kantor berupa videotron PTL Semester II Tahun 2021: Telah disetor ke kas negara sebesar Rp42.285.950,00 pada tgl 28/7/2021 NTPN 1CCB348VUJ21BVOK</p>		42.285.950,00	1	4.000.000,00							58.081.385,35
				<p>BPK Merekomendasikan kepada ketua Bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK atas pekerjaan pembangunan ruang pertemuan Bawaslu tahun 2018 (pembangunan masjid), Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPK atas pekerjaan pembangunan gedung dan renovasi gedung pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, PPK atas pemeliharaan inventaris kantor berupa videotron pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu, yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan belanja yang menjadi tanggung jawabnya</p>	1	-	<p>PTL Semester II 2019 :- PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 :- PTL Semester II Tahun 2021 : - Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin berupa teguran tertulis dengan nomor surat 0494.B/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Sudirman Rahim (KPA Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan) atas pekerjaan pembangunan gedung dan renovasi gedung - Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin berupa tegusan tertulis dengan nomor surat 0495.D/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Bashory (PPK Biro Administrasi) atas kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawabnya</p>	1										
				<p>BPK Merekomendasikan kepada ketua Bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pembangunan ruang pertemuan Bawaslu tahun 2018 (pembangunan masjid), PPHP atas pekerjaan pembangunan gedung dan renovasi gedung pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, PPHP atas pemeliharaan inventaris kantor berupa videotron pada Bagian Umum Biro Administrasi Bawaslu yang tidak cermat dalam memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	1	-	<p>PTL Semester II 2019 :- PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 : Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin berupa teguran tertulis dengan nomor surat 0495.T/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Fachrul Nawawi (PPHP Prov Sulawesi Selatan)</p>	1									Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu Tidak Sesuai Ketentuan	1	405.423.890,50	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Menarik serta menyetorkan ke Kas Negara kelebihan pembayaran atas belanja tunjangan kinerja yang dibayarkan tidak berdasarkan kondisi riil senilai Rp312.401.861,50 dan tarif pemotongan yang tidak sesuai SK Sekjen senilai Rp93.022.029,00 dan menyerahkan copy bukti setor tersebut kepada BPK	1	405.423.890,50	<p>PTL Semester II Tahun 2019</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan Ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp81.599.446 (Bagian TP2) NTPN Perorang terlampir Rp68.265.395 (Bagian TLP) NTPN 4D9B11JB0JG97NO1 Rp63.762.092 (Bagian PST) NTPN Perorang terlampir Rp17.485.350 (Bagian DKPP) NTPN D5E260TJ94PL8K02 Rp11.040.123 (Bagian PI) NTPN Perorang terlampir. Rp2.969.280,00 (Bagian Perencanaan) NTPN4166A4BVU0DGDVDRQ Rp11.503.795,00 (Bagian Humas) NTPN 429B7135VPGOS3O2 tgl 08/07/2019 Rp73.635.000,00 (Bagian HUKUM) NTPN EB6821JNEGMA6HDV tgl 12/07/2019 Rp900.000,00 (Bagian Hukum) NTPN 2AC2A0N9UM3TPG38 tgl 12/07/2019 <p>PTL Semester I Tahun 2020</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan Ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rp3.111.345,00 (Bagian Keuangan) dengan NTPN 3F6DF48VU0P8U7TAQ tanggal 6 November 2019 Rp23.476.986,00 (Bagian SDM) dengan NTPN B9CSA0N9UUSNSO22 tanggal 31 Januari 2020 dan NTPN 07ABA61QUB2AMGI tanggal 31 Januari 2020 Rp77.016.187,00 (Bagian ATP) dengan NTPN sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Tgl. 28-01-2020 NTPN 80DF30EEJFUA89 Rp10.000.000,00 Tgl. 02-05-2020 NTPN 28D0C0N0JUSLQ8S2 Rp7.769.520,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN 72DE955DE30JQO3N Rp6.032.835,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN 082710N9UUSLPREM Rp1.443.000,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN A773455DE30JQODD Rp6.747.418,00 Tgl. 02-05-2020 NTPN D61CC21JNEFPZ7R4P Rp1.788.000,00 Tgl. 02-05-2020 NTPN F5E48810TUB888RD Rp9.676.754,00 Tgl. 02-04-2020 NTPN 628E02G4UK1EKMINI Rp9.883.880,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN 788E62G4UK1EJRN6 Rp150.000,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN B1CC2C5DE30JOPCJ Rp8.397.360,00 Tgl. 02-05-2020 NTPN E1DC655DE30JRR4J Rp895.500,00 Tgl. 02-04-2020 NTPN 829F7610TUB888RU Rp8.161.500,00 Tgl. 02-04-2020 NTPN 8623861QUB08MRM Rp2.640.000,00 Tgl. 29-01-2020 NTPN 4582E48VU967DQNC Rp1.770.000,00 Tgl. 02-05-2020 NTPN 48FF47QLTJFF2RS4 Rp2.670.000,00 	385.156.724,00	1	20.267.166,50	0							Belum sesuai rekomendasi. Terdapat penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp385.156.724,00 sehingga masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp20.267.166,50	385.156.724,00
																Atas temuan ini, untuk bagian TP2 telah dilakukan penyetoran seluruhnya, yaitu senilai Rp81.599.446 yang telah diinput di TL semester II 2019			

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							<p>PTL Semester II 2020: Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut: -Bagian SDM 1. Rp1.080.000,00 NTPN 66DBE7QLTK194K94 tanggal 16/07/2020 2. Rp 2.110.000,00 NTPN 4E57948VU9NNGK66 tanggal 16/07/2020 3. Rp2.199.150,00 NTPN CFE192G4UKJ2MR4G tanggal 24/07/2020 4. Rp627.840,00 NTPN F6B3D0N9UVE5S9K tanggal 16/07/2020 - Bagian ATP 5. Rp8.554.320,00 NTPN C316055DE3OIOIKV tanggal 28/1/2020 6. Rp3.340.030,00 NTPN 3AB5655DE4G7G43F tanggal 21/9/2020 7. Rp6.041.750,00 NTPN E84133CIEFDQ9DQJ tanggal 2/1/2020</p> <p>PTL Semester I 2021 : -</p>										
				<p>BPK Merekomendasikan kepada ketua baswasu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kepala bagian terkait yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atas kegiatan yang dikelolanya, yaitu pada Bagian Penyelesaian Sengketa (PST), Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran (TLP), Bagian Teknik Pengawasan Pemilu (TP2), Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP), Bagian Umum Biro Administrasi, Bagian Umum DKPP, Bagian SDM pada Biro Administrasi, Bagian Pengawasan Internal pada Biro H2PI, Bagian Administrasi Persidangan pada Biro DKPP, Bagian Administrasi Pengaduan pada Biro DKPP, Bagian Keuangan Biro Administrasi, Bagian Humas Biro H2PI, Bagian Hukum Biro H2PI, dan Bagian Perencanaan pada Biro Administrasi</p>	1		<p>PTL Semester II 2019 :- PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: -</p> <p>PTL Semester I 2021: Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0493.F/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Hengky Pramono (Kabag Humas dan Hubal) - 0493.G/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Agung B.G.B Atmaja (Kabag hukum) - 0493.H/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Asmin Safari Lubis (Kabag PI) - 0493.I/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Hotma Maya Marbun (Kabag SDM) - 0493.J/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Pakerti Luhur (Kabag Keuangan)</p>	1								Selesai	
							<p>- 0493.K/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Dini Yamashita (Kabag Adm Pengaduan DKPP) - 0493.L/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Triyono (Kabag Perencanaan) - 0494.S/HK.01.00/SJ/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Ibrahim Malik Tanjung (Kabag PST) - 0494.T/HK.01.00/SJ/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Yusti Erlina (Kabag TLP) - 0495.A/HK.01.00/SJ/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Harimurti Wicaksono (Kabag TP2)</p>										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							- 0495.B/HK.01.00/SI/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Iham (Kabag ATP) - 0495.C/HK.01.00/SI/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Yusuf (Kabag Adm Umum DKPP) - 0495.E/HK.01.00/SI/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Osbin Samosir (Kabag Adm Persidangan DKPP)											
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Administrasi yang tidak optimal melaksanakan tugasnya dalam mengawasi perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja.	1		- PTL Semester II 2019 :- - PTL Semester I 2020: - - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021: Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0495.D/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Bashory	1									Selesai	
8	Pemberian Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1,46 miliar	1	1.461.548.000,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawastu Provinsi dan Kabupaten untuk menarik dan menyertakan ke Kas Negara Kelebihan Pembayaran Pokja, serta menyerahkan copy bukti setorkemuda BPK dengan rincian yaitu : a. Pokja yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan pada Bawastu Provinsi Jawa Tengah bulan Februari dan Juni 2018 senilai Rp8.840.000,00; b. Pokja pada Kabupaten Sampang senilai Rp9.750.000,00 yang diberikan kepada personel yang tidak berhak karena namanya tidak terdapat dalam SK; c. Pokja pada Kabupaten Bojonegoro tidak didukung dokumen yang lengkap senilai Rp29.640.000,00;	1	1.461.548.000,00	PTL Semester II Tahun 2019 Telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Kabupaten Sarolangun Rp47.880.000,00 NTPN 1AA727JU5KPP7R00 tgl 28/05/2019 2. Kota Makassar Rp20.000.000,00 NTPN 5F1987EJKV4OGULO tgl 19/06/2019 3. Kab. Jeneponto Rp94.445.000,00 NTPN 3686001PPJACJMHG tgl 11/06/2019 4. Provinsi Sulsel (Poin E) Rp5.525.000,00 NTPN CODIK6PUG7G2TKQP tgl 05/04/2019 5. Prov Jatim poin F Rp15.270.000,00 NTPN 9B53946PRNSLCOO9 tgl 28/05/2019		1.412.138.000,00	1	49.410.000,00			0,00			telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.412.138.000,00 masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp49.410.000,00	1.412.138.000,00
				d. Kelebihan Pembayaran Pokja Kabupaten Pasuruan akibat dari pembayaran yang tidak sesuai dengan masa tugas atau melebihi masa SK senilai Rp10.500.000,00; e. Pokja pada Bawastu Provinsi Sulawesi Selatan yang susunan timnya tidak sesuai ketentuan senilai Rp5.525.000,00; dan			6. Kab. Bojonegoro (Poin C dan F) Rp61.560.000,00 NTPN B669A84UTV287CG tgl 05/07/2019 7. Kabupaten Jombang (Poin F) total sebesar Rp177.572.500 (NTPN BB35A6RSQNIANS42 NTPN DECS879BUPS6UOSI NTPN 151E11SRGUNQM5I NTPN 139B51SRV72V3EII NTPN 00051789L2OPM37I NTPN 13D80393E319CBI NTPN F1B9839904ICDII NTPNB73063D016CPOH1NTPN CD01959NCB3DQGIG, NTPN 6F5A6681V30CQ5KG)											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				f. Pokja-pokja yang personil timnya hanya berisikan pihak internal Bawaslu, yaitu pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuasin, Pematang, Pekalongan, PALI, Bojonegoro, Pasuruan, Sampang, Jombang, Sarolangun, Jeneponto, dan Kota Makassar senilai Rp.1.397.293.000,00.			8. Kabupaten Pasuruan (Poin F) Rp315.750.000,00 NTPN E92428IR8BDEOIGI tgl 05/07/2019 9. Kabupaten Pasuruan (Poin D) Rp10.500.000,00 NTPN E92428IR8BDEOIGI tgl 05/07/2019 10. Kabupaten Jombang Rp150.000,00 NTPN 5F1167QLTAN17TQQ tgl 12/07/2019 11. Kabupaten Sampang Rp108.900.000,00 NTPN A6A9448VUOSSHJKK tanggal 27/12/2019 12. Kabupaten Sampang Rp9.750.000,00 NTPN A6A9448VUOSSHJKK tanggal 27/12/2019 13. Provinsi Sulawesi Selatan Rp8.070.000,00 NTPN CADCF2G4UBNQ3DS0 PTL Semester I Tahun 2020 -Telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Kota Makassar Rp20.000.000,00 dengan NTPN CC4C50N9UUSGJVHI TANGGAL 24 Januari 2020 2. Kabupaten Pematang Rp21.735.500,00 penyetoran ke kas daerah sebesar dengan nomor Ref: SWD/2019-03-11/033770 tanggal 11 Maret 2019 3. Kabupaten Pekalongan Rp5.685.000,00 penyetoran sebagian ke kas daerah sebesar dengan nomor Ref: SWD/2019-03-11/033769 tanggal 11/03/2019 4. Kabupaten Jeneponto Rp43.185.000,00 dan Rp19.035.000,00 dengan NTPN C787982PRH4E72OG tanggal 29 Mei 2019 dan 0CAA2G4UB96QS6U tanggal 26 Juli 2019													
							PTL Semester II 2020: Telah dilakukan penyetoran ke kas negara untuk - Prov Sulawesi Selatan dengan rincian: 1. Rp5.072.500,00 NTPN 3D77561QTLIKU981 tanggal 23/7/2019 2. Rp27.890.000,00 NTPN 4BC8E5DDR8RDBMH tanggal 16/10/2019 3. Rp2.230.000,00 NTPN C45665DDRF9US83 tanggal 27/12/2019 - Kabupaten PALI dengan rincian: 4. Rp9.675.000,00 NTPN A5E0B00QSKVGFEL0 tanggal 30/7/2019 5. Rp20.000.000,00 NTPN 213FD8N3D5OHR4T9 tanggal 16/12/2019													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							<p>6. Rp30.000.000,00 NTPN B02B348VU0STI2MU tanggal 31/12/2019</p> <p>7. Rp50.000.000,00 NTPN 2297A2G4UK1EKRAE tanggal 30/1/2020</p> <p>8. Rp10.000.000,00 NTPN E62782G4UBF9IO12 tgl 01/10/2019</p> <p>9. Rp6.000.000,00 NTPN 382E955DE3TQRAI7 tanggal 05/03/2020</p> <p>10. Rp6.000.000,00 NTPN E34758N3DEG9VBMB tanggal 04/06/2020</p> <p>11. Rp8.542.500,00 NTPN A9EF87QLTK44GNQ6 tanggal 14/08/2020</p> <p>- Kabupaten Banyuasin dengan rincian :</p> <p>12. Rp18.380.400,00 NTPN 555D406J9NUONLU0 tanggal 16/7/2019</p> <p>13. Rp91.607.100,00 NTPN 84D1970LTK6UVJ12 tanggal 8/09/2020</p> <p>-Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>14. Rp3.000.000,00 NTPN 03D1B1JNEQ36FB91 tanggal 5/08/2020</p> <p>15. Rp3.000.000,00 NTPN DE79E6U8DPHGSKS1 tanggal 5/08/2020</p> <p>PTL Semester I Tahun 2021 : -</p> <p>PTL Semester II Tahun 2021 :</p> <p>1. Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah untuk Prov Jawa tengah sebesar Rp8.840.000,00 dengan nomor Reff: SWD/2019-03-11/033765 tanggal 11/03/2019</p> <p>2. Telah disetor ke kas negara untuk Kota Makassar dengan rincian</p> <p>- Rp4.575.000 NTPN B38756UBE29OEDFH Tanggal 8 Februari 2021</p> <p>- Rp14.625.000 NTPN C748B1JNF3D7B721 Tanggal 6/8/21</p> <p>- Rp10.687.500 NTPN 778278N3DOAOQAK5</p> <p>- Rp5.000.000 NTPN B080248VUJE2PTIK</p>												
							<p>3. Bawaslu Kabupaten Pekalongan melampirkan bukti pertanggungjawaban honorarium Pokja yang belum lengkap dan telah disampaikan kepada Tim Pemeriksa pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Hasil konsultasi dengan BPK belum menerima Tindak Lanjut tersebut karena perubahan SK tersebut dirubah setelah BPK melaksanakan Audit.</p>												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawasu untuk Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawasu Kabupaten Banyuwani, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten PALL, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan Kabupaten Jeneponto yang lalai dalam menaati ketentuan yang berlaku dalam membuat SK Tim Pokja dan melaksanakan pembayaran.	1		- PTL Semester II 2019 : - - PTL Semester I 2020: - - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 : Telah ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0493.M/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Triyono (Kasek Provinsi Jawa Timur) - 0493.P/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Febrianti Indriana (Kasek Kab Jombang)	1								Selesai	
							- 0493.R/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr M. Amsarizal Yunus (Kasek Kota Makassar) - 0493.T/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Hery Poncosilo (BPP Kab Kombang) - 0494.A/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Sudirman Rahim (Kasek Provinsi Sulawesi Selatan) - 0494.C/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Budi Santoso (Kasek Kab Pemalang)										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							- 0494.D/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Eko Budi Santoso (BPP Kab Bojonegoro) - 0494.G/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Mohammad Abdurachmad Tullah (BPP Kab Sampang) - 0494.H/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Titok Susetyono (BPP Kab Pasuruan) - 0494.I/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Reny Tri Jayanti (BP Provinsi Jawa Timur) - 0494.J/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Mustajirin (BPP Kab Pekalongan) - 0494.L/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Andre Ade Putra (Kasek Kab Sarolangun) - 0494.N/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Nurjaya Said (BPP Kota Makassar) - 0494.O/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Rahmi Syaalia (BPP Kab Pali) - 0494.P/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Edi Gatot Sukendro (Kasek Kab Bojonegoro) - 0494.R/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Ahmad Zubaedi (BPP Kab Pematang) - 0495.F/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Dodi Supriyadi (BPP Kab Sarolangun) - 0495.I/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Meilan (BPP Kab Pali) - 0495.K/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Wasis (Kasek Kab Pekalongan)												
							- 0495.L/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr ST Meriam (Kasek Kab Jeneponto) - 0495.M/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Alvan Wahyudi (Kasek Kab Pasuruan) - 0495.N/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Herman Fikri (Kasek Kab Banyuwangi) - 0495.O/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Bambang Maryono (Kasek Kab Sampang) - 0495.R/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr ANas Putra Albar (BPP Kab Jeneponto)												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp2,79 miliar Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Senilai Rp160,63 juta, serta Pemungutan dan Penyetoran Pajak Belum Tertib	1	160.627.000,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawaslu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pali, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Bone dan Kabupaten Langkat tidak melakukan pengawasan terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai	1		- PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 : Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa Teguran Lisan dengan nomor surat - 0493.N/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 juni 2021 kepada Sdr Iwan Tero (Kasek Provinsi Sumatera Utara) - 0494.P/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Edi Gatot Sukendro (Kasek Kab Bojonegoro) - 0494.Q/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Moh Yudistira Surya Ningrat (Kasek Kab Bangkalan) - 0495.G/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 juni 2021 kepada M. Yunus Abdullah (Kasek kab Langkat) - 0495.M/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Alvan Wahyudi (Kasek Kab Pasuruan)	1									
							- 0495.N/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Herman Fikri (Kasek Kab Banyuwangi) - 0495.O/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Bambang Maryono (Kasek Kab Sampang) - 0495.P/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Mulyadi (Kasek Kab Bone) - 0493.H/HK.01.00/SJ/06/2021 kepada Sdr Triyono (Kasek Provinsi Jawa Timur)										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Bagian PI untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.790.464.031,00 dengan rincian yaitu : a. Bawastu Kabupaten Pasuruan senilai Rp1.348.681.855,00; b. Bawastu Kabupaten Banyuwangi senilai Rp1.123.950.255,00; c. Bawastu Kabupaten PALI senilai Rp4.123.000,00; d. Bawastu Provinsi Jawa Timur senilai Rp36.288.021,00; e. Bawastu Kabupaten Pekalongan senilai Rp6.393.000,00; f. Bawastu Kabupaten Bojonegoro senilai Rp61.314.500,00; g. Bawastu Kabupaten Sampang senilai Rp7.398.000,00;	1		PTL Semester II Tahun 2019 - telah diindikasikan berupa : - penyetoran dari Bawastu Prov Jatim sebesar Rp36.288.021,00 NTPN 9B53946PRNSLCO09 tgl 28/05/2019 -telah dilakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban pada Bawastu Sumatera Utara sebesar Rp6.930.000,00 PTL Semester I Tahun 2020 - Telah dilakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban pada Bawastu Kabupaten Pasuruan senilai Rp1.348.681.855,00	1									Selesai	247.224.521,00
			h. Bawastu Provinsi Sumatera Utara senilai Rp6.930.000,00; i. Bawastu Kabupaten Bone senilai Rp49.760.000,00; j. Bawastu Kabupaten Bangkalan senilai Rp5.474.000,00; dan k. Bawastu Kabupaten Langkat senilai Rp140.151.400,00, Dan menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban.			PTL Semester II 2020 Telah dilakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban pada 1. Bawastu Kab PALI senilai Rp4.123.000,00 sesuai dengan LHV Nomor 008/LHV/Bawastu/PI/PW.06.02/X/2020 tgl 23 Oktober 2020 2. Bawastu Kab Banyuwangi senilai Rp569.107.500,00 sesuai dengan LHV Nomor 008/LHV/Bawastu/PI/PW.06.02/X/2020 tgl 23 Oktober 2020 3. Bawastu Kab Bone senilai Rp38.010.000,00 sesuai dengan LHV Nomor 009.A/LHV/Bawastu/PI/H2PI/VIII/2020 tgl 14 Agustus 2020 dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp11.750.000,00 NTPN D2000610TVB6JUKI tanggal 14/12/2020												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							<p>4. Bawaslu Kab Langkat senilai Rp140.151.400,00 sesuai dengan LHV Nomor 004/LHV/Bawaslu/PI/PW.06.02/III/2020 tgl 13 Maret 2020</p> <p>5. Bawaslu Prov Sumatera Utara senilai Rp6.930.000,00 sesuai dengan LHV Nomor 004/LHV/Bawaslu/PI/PW.06.02/III/2020 tgl 13 Maret 2020</p> <p>PTL Semester I Tahun 2021 : -</p>													
							<p>PTL Sem II Tahun 2021 :</p> <p>1. Bawaslu Kab Pekalongan telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp4.050.000,00 dengan nomor Ref: KJN/2019-05-22/022985, tanggal 22/05/2019; penyetoran ke kas negara sebesar Rp800.000 tanggal 21-05-2019 dengan NTPN: E15B854LLV8S4SKI dan Rp1.543.000,00 dengan NTPN: C68C84OU1GDJVRJI</p> <p>2. Bawaslu Kab Bojonegoro telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp61.314.500,00 pada tanggal 5 Juli 2019 dengan NTPN B669A84UTV2S7CGI</p>													
							<p>3. Bawaslu Kab Bangkalan telah menyetorkan ke kas negara dengan rincian</p> <p>3.1. NTPN: 2775C4HOJFLQ24M2, 8 Mei 2019, Rp250.000,00</p> <p>3.2. NTPN: 1B7F54HNQ5DPD5M2, 8 Mei 2019, Rp250.000,00</p> <p>3.3. NTPN: D63104HMU7B125M2, 8 Mei 2019, Rp500.000,00</p> <p>3.4. NTPN: 3D6704HLMU2DNMM2, 8 Mei 2019, Rp250.000,00</p> <p>3.5. NTPN: 134AC4HL214PN0M2, 8 Mei 2019, Rp540.000,00</p> <p>3.6. NTPN: B28F14HKDST4UHM2, 8 Mei 2019, Rp500.000,00</p> <p>3.7. NTPN: 9452O4HJFTKOD2M2, 8 Mei 2019, Rp250.000,00</p> <p>3.8. NTPN: 7B2434HIQLP251M2, 8 Mei 2019, Rp1.062.000,00</p> <p>3.9. NTPN: EB69B4HI2GP4F6M2, 8 Mei 2019, Rp1.062.000,00</p> <p>3.10. NTPN: 6BBFE4HG5VO4JDM2, 8 Mei 2019, Rp810.000,00</p> <p>4. Bawaslu Kab Sampang telah menyetorkan ke kas negara NTPN: A6A9448VUOSSHJKK, 27 Desember 2019, Rp126.005.000,00</p>													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan apapun		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawastu Kabupaten untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran karena bukti pertanggungjawaban yang tidak memadai serta menyerahkan copy bukti setor kepada BPK dengan rincian yaitu : a. Bawastu Kabupaten Pasuruan senilai Rp124.814.000,00; b. Bawastu Kabupaten Langkat senilai Rp18.635.000,00; c. Bawastu Kabupaten Sampang senilai Rp7.355.000,00; d. Bawastu Kabupaten Pematang senilai Rp3.221.000,00; dan e. Bawastu Kabupaten PALI senilai Rp6.602.000,00.	1	160.627.000,00	PTL Semester II 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Kabupaten Sampang Rp7.355.000,00 NTPN A6A9448VUOSSHJKK tanggal 27/12/2019 2. Kabupaten Pematang Rp3.221.000,00 NTPN EEB5A4OTGT19K2RI tanggal 11 Maret 2019. PTL Semester I Tahun 2020 -Telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut : 1. Kabupaten Pasuruan Rp5.000.000,00 dengan NTPN AS8267QLTJ13963S tanggal 7 Februari 2020	1	50.813.000,00	1	109.814.000,00		0,00				Terdapat penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp50.813.000,00 masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp109.814.000,00	50.813.000,00
							PTL Semester II 2020 Telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan rincian sebagai berikut: 1. Bawastu Kab PALI sebesar Rp6.602.000,00 NTPN ASE0B00QSKVGFEL0 tanggal 30/07/2019 2. Bawastu Kab Langkat sebesar Rp18.635.000,00 NTPN AEF9B0N9UVE5SL00 tgl 16/07/2020 3. Bawastu Kabupaten Pasuruan Rp10.000.000,00 NTPN 543390N9UMJF2FKI tanggal 31/12/2019 PTL Semester I Tahun 2021 : -											
10	Pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas Pada Bawastu Provinsi Papua Tidak Tertib	1	379.225.169,00	BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawastu Provinsi Papua dan Bendahara Pengeluaran dan BPP Kabupaten/Kota yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan kas dan lalai dalam melaksanakan tugasnya	1	-	PTL Semester II 2019 : - PTL Semester I 2020: - PTL Semester II 2020: - PTL Semester I 2021 : Telah ditindak lanjut dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0494.M/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdri Layly M. Irmawati (BP Provinsi Papua) - 0495.S/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada BPP Bawastu Kab/Kota di Provinsi Papua	1								Selesai		

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				BPK Merekomendasikan kepada ketua bawastu untuk Memerintahkan Kepala Sekeretaryat Bawastu Provinsi Papua untuk melakukan penyetoran pajak dan jasa giro ke Kas Negara.	1	379.225.169,00	PTL Semester II Tahun 2020 : Telah dilakukan penyetoran jasa giro ke kas negara dengan rincian : 1. Bawastu Kab Biak Numfor Rp256.476,00 NTPN BD46C4CS8QKJPTTG tanggal 7/05/2019 2. Kab Deiyai Rp45.467,00 NTPN CS8044CS8HAJ24TG tanggal 7/05/2019 3. Kab Dogiyai Rp785.617,00 NTPN EC4AE8KMCVADOFRA tanggal 16/05/2019 4. Kab Peg Bintang Rp2.399.680,00 NTPN 6966B5HRB2U43VG tanggal 31/12/2018 5. Kab Puncak Jaya Rp60.813,00 NTPN 623894CS7UMHITG tanggal 7/05/2019 6. Kab Puncak Rp3.788.486,00 NTPN 064FB6DVU998JQ0 tanggal 16/5/2019	7.372.889,00	1	248.237.506,00							Terdapat penyetoran Ke Kas Negara sebesar Rp130.987.663,00 masih terdapat kekurangan setor sebesar Rp248.237.506,00	130.987.663,00
							7. Kab Supiori Rp36.350,00 NTPN AFB664CS880IABTG tanggal 7/05/2019 Telah dilakukan penyetoran pajak ke kas negara dengan rincian : 8. Kab Nduga Rp10.448.400,00 sebagai berikut: 8.1. Tanggal 16-01-2019 NTPN 06BBC3703QHBL5I2 sebesar Rp1.920.000,00 8.2. Tanggal 16-01-2019 NTPN 46BE73732VURLK12 sebesar Rp1.920.000,00 8.3. Tanggal 16-01-2019 NTPN 75BF136UB2ENNOI2 sebesar Rp4.480.000,00 8.4. Tanggal 16-01-2019 NTPN F75D537BJL2UOR12 sebesar Rp432.000,00 8.5. Tanggal 16-01-2019 NTPN 9011C37AH25RIM12 sebesar Rp432.224,00 8.6. Tanggal 16-01-2019 NTPN 1D61237CIQV3HB12 sebesar Rp434.176,00 8.7. Tanggal 16-01-2019 NTPN 75AAE36SS71031L2 sebesar Rp830.000,00	10.448.400,00										
							9. Setoran pajak Kab Mappi Rp80.131.098,00 sebagai berikut: (hanya diperhitungkan Rp79.446.320,00 di rekomendasi) 9.1. Tgl. 08-05-2019 NTPN 3806C0FED2BEE0M Rp20.454,00 9.2. Tgl. 08-05-2019 NTPN 30A50P0L6SE0Q0M Rp136.363,00 9.3. Tgl. 08-05-2019 NTPN 087770PES0011QM Rp136.363,00 9.4. Tgl. 08-05-2019 NTPN BEEB50P0T194PQM Rp20.454,00 9.5. Tgl. 08-05-2019 NTPN 208180PDSF973VM Rp136.363,00 9.6. Tgl. 08-05-2019 NTPN 9C8600PDSRINCM0 Rp20.545,00 9.7. Tgl. 08-05-2019 NTPN EA4E7P0J7A7PLM0 Rp20.918,00 9.8. Tgl. 08-05-2019 NTPN 1394A0FF8E0HSSM0 Rp268.181,00 9.9. Tgl. 08-05-2019 NTPN C48D70P054K6M0 Rp85.227,00 9.10. Tgl. 08-05-2019 NTPN E62570PCN083EFM0 Rp19.854,00 9.11. Tgl. 08-05-2019 NTPN 3B91E0PCKAFQ3M0 Rp283.890,00 9.12. Tgl. 08-05-2019 NTPN 0A500P0F7LFF0CM0 Rp350.000,00 9.13. Tgl. 10-05-2019 NTPN 3R2DF4FE1HRDK270 Rp21.840,00 9.14. Tgl. 10-05-2019 NTPN A50714FE7C3SFM70 Rp21.840,00 9.15. Tgl. 10-05-2019 NTPN 550914FEARS5DZ70 Rp21.840,00 9.16. Tgl. 10-05-2019 NTPN 3FC3E4FEDFMC3370 Rp21.840,00	79.446.320,00										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							9.17. Tgl. 10-05-2019 NTPN 3A36A4FEGM4KM70 Rp21.840,00 9.18. Tgl. 10-05-2019 NTPN 34FC4FELB505670 Rp21.840,00 9.19. Tgl. 10-05-2019 NTPN FEB824FEPDHA470 Rp21.840,00 9.20. Tgl. 10-05-2019 NTPN FEB0F4FELBRN6D70 Rp21.840,00 9.21. Tgl. 10-05-2019 NTPN 53E0D4F67A928C70 Rp21.840,00 9.22. Tgl. 10-05-2019 NTPN 32FCA4FF7LSEVD70 Rp21.840,00 9.23. Tgl. 10-05-2019 NTPN 1B67B4FFB08PCB70 Rp21.840,00 9.24. Tgl. 10-05-2019 NTPN 3A7BD4FFFOL3P970 Rp21.840,00 9.25. Tgl. 10-05-2019 NTPN AAF34FFJADCM70 Rp21.840,00 9.26. Tgl. 10-05-2019 NTPN 65D44FFMGRKS870 Rp21.480,00 9.27. Tgl. 10-05-2019 NTPN 51CB8C4FDA3IT870 Rp2.840,00 9.28. Tgl. 08-05-2019 NTPN 072E15MNAFAHENM0 Rp350.000,00 9.29. Tgl. 08-05-2019 NTPN 41B785MN3VVBGFMD Rp350.000,00 9.30. Tgl. 08-05-2019 NTPN A43FEMN06T1RAM0 Rp350.000,00 9.31. Tgl. 08-05-2019 NTPN 522C58M4QJLUNFM0 Rp350.000,00 9.32. Tgl. 08-05-2019 NTPN 690DC5MMUJ9AHM0 Rp350.000,00												
							9.33. Tgl. 08-05-2019 NTPN 95A7E5MMQFVLCM0 Rp350.000,00 9.34. Tgl. 08-05-2019 NTPN ADC5E5MMDO7GPM0 Rp350.000,00 9.35. Tgl. 08-05-2019 NTPN 1B6175MM3VGPCHM0 Rp350.000,00 9.36. Tgl. 08-05-2019 NTPN 2492F5M122CHAM0 Rp350.000,00 9.37. Tgl. 08-05-2019 NTPN F4DE81M7B140VJUM0 Rp350.000,00 9.38. Tgl. 08-05-2019 NTPN A94610PL393EDEMO Rp350.000,00 9.39. Tgl. 08-05-2019 NTPN 191780PL50VIS4M0 Rp350.000,00 9.40. Tgl. 08-05-2019 NTPN 794C00PL8GNRPGM0 Rp350.000,00 9.41. Tgl. 08-05-2019 NTPN C25C49PL5C9R9AM0 Rp350.000,00 9.42. Tgl. 08-05-2019 NTPN A15E81M79RTRP4M0 Rp350.000,00 9.43. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7480B5GOG42JH8M0 Rp136.363,00 9.44. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7CB575G0HRUNUM0 Rp27.273,00 9.45. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8196364CT8RJUNJG Rp136.363,00 9.46. Tgl. 11-05-2019 NTPN 451D364EUPQ8VJG Rp27.273,00 9.47. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8710064A9F1TMJVG Rp136.363,00 9.48. Tgl. 11-05-2019 NTPN 707D764IAS33D8VJG Rp27.273,00												
							9.49. Tgl. 11-05-2019 NTPN 78956648QSU6PVG Rp136.363,00 9.50. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5ABE0649DGVMBVJG Rp27.273,00 9.51. Tgl. 11-05-2019 NTPN C801648ENASCVJG Rp136.363,00 9.52. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6A38264C1BSCVJG Rp27.273,00 9.53. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4D12B647LKR7LVJG Rp136.363,00 9.54. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5BA7564888SN7VJG Rp27.273,00 9.55. Tgl. 11-05-2019 NTPN A57C064CB2LPLDVJG Rp136.363,00 9.56. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4F3C064CH7TCCAVJG Rp27.273,00 9.57. Tgl. 11-05-2019 NTPN 80746640JHT7DVG Rp136.363,00 9.58. Tgl. 11-05-2019 NTPN E8E7C64DKVP4LVJG Rp27.273,00 9.59. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7585864CT57HFQVJG Rp136.363,00 9.60. Tgl. 11-05-2019 NTPN DF92264C9K3LUGVJG Rp27.273,00 9.61. Tgl. 11-05-2019 NTPN 225F764C2K43DVG Rp136.363,00 9.62. Tgl. 11-05-2019 NTPN 96E5444K5TQLVJG Rp27.273,00 9.63. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0335D64C0CJUVJG Rp136.363,00 9.64. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6051964C1OL1SDVJG Rp27.273,00												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut					
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
							9.65. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3658F9489112NDVIG Rp136.363,00 9.66. Tgl. 11-05-2019 NTPN E0D3E548N9C748VIG Rp27.273,00 9.67. Tgl. 11-05-2019 NTPN 10C08647838PFTVIG Rp136.363,00 9.68. Tgl. 11-05-2019 NTPN DE45A647EFPFAISVIG Rp27.273,00 9.69. Tgl. 11-05-2019 NTPN 418D3A45S8SR02VIG Rp136.363,00 9.70. Tgl. 11-05-2019 NTPN E17CB849VL63U8VIG Rp27.273,00 9.71. Tgl. 11-05-2019 NTPN 48444646FBKQAGVIG Rp136.363,00 9.72. Tgl. 11-05-2019 NTPN DF528648GDFACVIG Rp27.273,00 9.73. Tgl. 08-05-2019 NTPN 5021E4KA930CDHM0 Rp136.363,00 9.74. Tgl. 08-05-2019 NTPN 657075G5JULJ86JCM0 Rp27.273,00 9.75. Tgl. 11-05-2019 NTPN 760886460PVLSEVIG Rp13.636,00 9.76. Tgl. 11-05-2019 NTPN CCA4A4649N1J2QVIG Rp27.273,00 9.77. Tgl. 11-05-2019 NTPN 9CA05645RRLBHVIG Rp136.363,00 9.78. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0E2E3645SNJADGVIG Rp27.273,00 9.79. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6E2E3645SNJADGVIG Rp136.363,00 9.80. Tgl. 11-05-2019 NTPN F32F645QW69SQVIG Rp27.273,00 9.81. Tgl. 11-05-2019 NTPN B3668649MTARSSVIG Rp136.363,00 9.82. Tgl. 11-05-2019 NTPN D87F8645O2UOSVIG Rp27.273,00 9.83. Tgl. 11-05-2019 NTPN 1F98E645L5E6NEVIG Rp136.363,00 9.84. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0F547645L0C0T0VIG Rp27.273,00 9.85. Tgl. 11-05-2019 NTPN 72785645AMSSM2VIG Rp136.363,00 9.86. Tgl. 11-05-2019 NTPN 42904645BIJUDVIG Rp27.273,00 9.87. Tgl. 11-05-2019 NTPN CDA56452HD7S6VIG Rp136.363,00 9.88. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3583E64530B8A3VIG Rp27.273,00 9.89. Tgl. 11-05-2019 NTPN 23E8F644Q2Q42VIG Rp136.363,00 9.90. Tgl. 11-05-2019 NTPN F05876450E71TUVIG Rp27.273,00 9.91. Tgl. 11-05-2019 NTPN 85F43644HJHTGLVIG Rp136.363,00 9.92. Tgl. 11-05-2019 NTPN 55451644LNK750VIG Rp27.273,00 9.93. Tgl. 11-05-2019 NTPN FC44564497577VIG Rp136.363,00 9.94. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4D030644CM1G4VIG Rp27.273,00 9.95. Tgl. 11-05-2019 NTPN BE03E5442KLCFVIG Rp136.363,00 9.96. Tgl. 11-05-2019 NTPN 609D66444HRANVIG Rp27.273,00														
							9.97. Tgl. 11-05-2019 NTPN 54E30643UNSCF3VIG Rp136.363,00 9.98. Tgl. 11-05-2019 NTPN 708478440FGTPTVIG Rp27.273,00 9.99. Tgl. 11-05-2019 NTPN 68574643Q01ACVIG Rp136.363,00 9.100. Tgl. 11-05-2019 NTPN CE590433D2C5GRVIG Rp27.273,00 9.101. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6866E643KR7J6HVIG Rp136.363,00 9.102. Tgl. 11-05-2019 NTPN 52447643NSNP4PVIG Rp27.273,00 9.103. Tgl. 08-05-2019 NTPN C82305MNNP8J1JMO Rp609.090,00 9.104. Tgl. 08-05-2019 NTPN CEF395MNSIVS6A0 Rp181.818,00 9.105. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7F0488MNBPDVIM0 Rp609.090,00 9.106. Tgl. 08-05-2019 NTPN 8C8A85MNH32CUM0 Rp181.818,00 9.107. Tgl. 10-05-2019 NTPN C51C34FF02TUHD70 Rp1.818.181,00 9.108. Tgl. 10-05-2019 NTPN C38B44FFTGO6N070 Rp363.636,00 9.109. Tgl. 08-05-2019 NTPN B79D08BHAL08B0 Rp181.818,00 9.110. Tgl. 08-05-2019 NTPN 8385489N5FTONCM0 Rp363.636,00 9.111. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6A485250U8P96VIG Rp39.272,00 9.112. Tgl. 08-05-2019 NTPN 43F720PQ6D8TRBMD Rp454.546,00														

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							9.113. Tgl. 08-05-2019 NTPN 0DE280PT3MINQ9M0 Rp90.910,00 9.114. Tgl. 11-05-2019 NTPN DECA464JSBB10ZVG Rp454.546,00 9.115. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8C8DF64JSTV37KVG Rp90.910,00 9.116. Tgl. 11-05-2019 NTPN AAF2964JTGJAN9VG Rp454.546,00 9.117. Tgl. 11-05-2019 NTPN EY0264JUS766ZVG Rp90.910,00 9.118. Tgl. 11-05-2019 NTPN 868D64K159FRTVG Rp454.546,00 9.119. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3860164K2THBFVG Rp90.910,00 9.120. Tgl. 11-05-2019 NTPN F800264JV6F95SVG Rp454.546,00 9.121. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8E4C864K40DB07VG Rp90.910,00 9.122. Tgl. 11-05-2019 NTPN 690764K31HRVVG Rp454.546,00 9.123. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5E5FC24V0408BRVG Rp90.910,00 9.124. Tgl. 11-05-2019 NTPN 41D0424VONC9MDVG Rp454.546,00 9.125. Tgl. 11-05-2019 NTPN 798DC24VLQ82JVG Rp90.910,00 9.126. Tgl. 11-05-2019 NTPN 36DA025011CINVG Rp454.546,00 9.127. Tgl. 11-05-2019 NTPN P95F626JUG6E2ZVG Rp90.910,00 9.128. Tgl. 11-05-2019 NTPN F7A85250K2QFHRVG Rp454.546,00											
							9.129. Tgl. 11-05-2019 NTPN EAB38250KUHP6VG Rp90.910,00 9.130. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4EE5C250LQMKOHVG Rp454.546,00 9.131. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5069250MDALG3VG Rp90.910,00 9.132. Tgl. 11-05-2019 NTPN F19A24250T3HJZVG Rp454.546,00 9.133. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4892250TMS8ZKVG Rp90.910,00 9.134. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5772F250R2B1CJVG Rp454.546,00 9.135. Tgl. 11-05-2019 NTPN E2DC0250R9KV2SSVG Rp90.910,00 9.136. Tgl. 11-05-2019 NTPN tidak jelas Rp454.546,00 9.137. Tgl. 11-05-2019 NTPN tidak jelas Rp90.910,00 9.138. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8C3ED250ONQREBVG Rp454.546,00 9.139. Tgl. 11-05-2019 NTPN 35E32250PAESTTVG Rp909.010,00 9.140. Tgl. 11-05-2019 NTPN C02BA250NIOF7VG Rp454.546,00 9.141. Tgl. 11-05-2019 NTPN D118D250C06PUPVG Rp90.910,00 9.142. Tgl. 08-05-2019 NTPN 5F84D86LKTES88M0 Rp36.364,00 9.143. Tgl. 08-05-2019 NTPN 8C985969FTUIE18M0 Rp20.455,00 9.144. Tgl. 08-05-2019 NTPN 779E85GRTHRAV0M0 Rp454.545,00											
							9.145. Tgl. 08-05-2019 NTPN 43D9488JUBMU0M0 Rp90.909,00 9.146. Tgl. 08-05-2019 NTPN F617E88J70JPTSM0 Rp454.545,00 9.147. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7326F88JSTPR0M0 Rp90.909,00 9.148. Tgl. 08-05-2019 NTPN 6D2C288MKAJMM0 Rp454.945,00 9.149. Tgl. 08-05-2019 NTPN 3EDC288MVER0PM0 Rp90.909,00 9.150. Tgl. 08-05-2019 NTPN 854D588MGQM66TM0 Rp272.727,00 9.151. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7041088MRSBDCM0 Rp54.545,00 9.152. Tgl. 08-05-2019 NTPN 6DC3E88MFF73J5M0 Rp227.273,00 9.153. Tgl. 08-05-2019 NTPN 5EA4488MJ780CRM0 Rp45.455,00 9.154. Tgl. 08-05-2019 NTPN CB0D688N2FPPM0 Rp1.400.000,00 9.155. Tgl. 08-05-2019 NTPN A68B288NH40GRM0 Rp1.400.000,00 9.156. Tgl. 08-05-2019 NTPN B47B488NSOVMDSM0 Rp136.364,00 9.157. Tgl. 08-05-2019 NTPN 2859488NUG9R8M0 Rp27.273,00 9.158. Tgl. 08-05-2019 NTPN 355688029JH4MM0 Rp90.909,00 9.159. Tgl. 08-05-2019 NTPN 24A36492L6G24M0 Rp18.182,00 9.160. Tgl. 08-05-2019 NTPN 2937800PV4TJ6KM0 Rp181.818,00											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan apa/sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							9.161. Tgl. 08-05-2019 NTPN 3F36300QSPNLAJM Rp36.364,00 9.162. Tgl. 08-05-2019 NTPN AB9D700Q3PTV34M Rp181.818,00 9.163. Tgl. 08-05-2019 NTPN OCA3900QSR443JM Rp36.364,00 9.164. Tgl. 08-05-2019 NTPN 6709888N0Q9895JM Rp90.909,00 9.165. Tgl. 08-05-2019 NTPN C784848N0QZCFK6M Rp18.182,00 9.166. Tgl. 08-05-2019 NTPN C4E4900QH8B192M Rp109.200,00 9.167. Tgl. 08-05-2019 NTPN 4D97000Q820HLLM Rp49.636,00 9.168. Tgl. 08-05-2019 NTPN 8A8C000Q7J0809M Rp127.272,00 9.169. Tgl. 08-05-2019 NTPN 78E8900Q808BNDM Rp19.090,00 9.170. Tgl. 08-05-2019 NTPN C9F1800Q9KJ0J0M Rp272.727,00 9.171. Tgl. 08-05-2019 NTPN 5B10000QA4063M Rp40.909,00 9.172. Tgl. 08-05-2019 NTPN 58E8600QEKGJ1M Rp136.364,00 9.173. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7D1D600QGAQY1NM Rp20.455,00 9.174. Tgl. 08-05-2019 NTPN 99C8800QCHALCIM Rp272.727,00 9.175. Tgl. 08-05-2019 NTPN 603A000QDJKMS4M Rp40.909,00 9.176. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7A88800QNJ7HK8M Rp136.364,00													
							9.177. Tgl. 08-05-2019 NTPN B358200QS87TG0M Rp20.455,00 9.178. Tgl. 08-05-2019 NTPN D8E170PKVGI409M Rp1.818.181,00 9.179. Tgl. 08-05-2019 NTPN A76F00PL1H79U0JM Rp363.636,00 9.180. Tgl. 11-05-2019 NTPN 085359J2N4VU2V Rp43.680,00 9.181. Tgl. 11-05-2019 NTPN 436C24JIEP3B8V Rp43.680,00 9.182. Tgl. 11-05-2019 NTPN 837154JFBNR4V Rp43.680,00 9.183. Tgl. 11-05-2019 NTPN F3A84JIFUBKAMV Rp43.680,00 9.184. Tgl. 11-05-2019 NTPN 98A4E4JIGVVLQ8V Rp43.680,00 9.185. Tgl. 11-05-2019 NTPN 00A54J034949V Rp43.680,00 9.186. Tgl. 11-05-2019 NTPN H5A14JLJUMON4V Rp43.680,00 9.187. Tgl. 11-05-2019 NTPN 9D3688HCVHMH0FV Rp43.680,00 9.188. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6D4E88H045NG1V Rp43.680,00 9.189. Tgl. 11-05-2019 NTPN BBA546H0103PNCV Rp43.680,00 9.190. Tgl. 11-05-2019 NTPN B36368HSL4J5V Rp43.680,00 9.191. Tgl. 11-05-2019 NTPN F7FC28H052Q4AAV Rp43.680,00 9.192. Tgl. 11-05-2019 NTPN EA00D6H4F52K0V Rp43.680,00													
							9.193. Tgl. 11-05-2019 NTPN AB46E6H03T8196V Rp43.680,00 9.194. Tgl. 08-05-2019 NTPN 9E17788NAE87JLM Rp43.680,00 9.195. Tgl. 11-05-2019 NTPN 38ACEZ7FG8D7KRV Rp350.000,00 9.196. Tgl. 11-05-2019 NTPN 11D4327FGRU06V Rp350.000,00 9.197. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4B4AE27FHDLV0V Rp350.000,00 9.198. Tgl. 11-05-2019 NTPN E56F827FIDA1FAV Rp350.000,00 9.199. Tgl. 11-05-2019 NTPN 76C0327F8UZUSV Rp350.000,00 9.200. Tgl. 11-05-2019 NTPN 040C227FJ54HE8V Rp350.000,00 9.201. Tgl. 11-05-2019 NTPN 348F827FJ0650V Rp350.000,00 9.202. Tgl. 11-05-2019 NTPN 852827FKAQ7DIV Rp350.000,00 9.203. Tgl. 11-05-2019 NTPN B82827FLPCB4FV Rp350.000,00 9.204. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3F6F527FMCDK1V Rp350.000,00 9.205. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2991627FMJKE20V Rp350.000,00 9.206. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6E2027FNDG4V Rp350.000,00 9.207. Tgl. 08-05-2019 NTPN A118C88DATT9HM Rp350.000,00 9.208. Tgl. 08-05-2019 NTPN 64118SMOKSJB8NM Rp350.000,00													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							9.209. Tgl. 08-05-2019 NTPN BF6AE5GRATPRD0M Rp136.364.00 9.210. Tgl. 08-05-2019 NTPN 68E0F5GRCV0UJFM0 Rp27.273.00 9.211. Tgl. 11-05-2019 NTPN E7CFF4JGOKR748VG Rp136.364.00 9.212. Tgl. 11-05-2019 NTPN 887C74JGPPFBJQZVG Rp27.273.00 9.213. Tgl. 11-05-2019 NTPN 625154JGQDARSVG Rp136.364.00 9.214. Tgl. 11-05-2019 NTPN BF6484JGOM1CANVG Rp27.273.00 9.215. Tgl. 11-05-2019 NTPN 593AF4JGRHVEZVG Rp136.364.00 9.216. Tgl. 11-05-2019 NTPN 593AF4JGRHVEZVG Rp136.364.00 9.217. Tgl. 11-05-2019 NTPN 150044JG9G1K1VG Rp27.273.00 9.218. Tgl. 11-05-2019 NTPN 1C82A2JGJODMLNVG Rp136.364.00 9.219. Tgl. 11-05-2019 NTPN E54F14JGVLMPVVG Rp27.273.00 9.220. Tgl. 11-05-2019 NTPN B1BE54JH3441SCVG Rp27.273.00 9.221. Tgl. 11-05-2019 NTPN 388284JH4BA0BVG Rp136.364.00 9.222. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7C7984JH909CMVVG Rp27.273.00 9.223. Tgl. 11-05-2019 NTPN 9E5AC4JHLERGLVVG Rp136.364.00 9.224. Tgl. 11-05-2019 NTPN F7A104JHMAPITUVG Rp27.273.00										
							9.225. Tgl. 11-05-2019 NTPN F6AD4JHNM394VG Rp136.364.00 9.226. Tgl. 11-05-2019 NTPN 403644JHTSU688VG Rp27.273.00 9.227. Tgl. 11-05-2019 NTPN DCCAB4JH2697CVG Rp136.364.00 9.228. Tgl. 11-05-2019 NTPN 353344JHJ2AMLVG Rp27.273.00 9.229. Tgl. 11-05-2019 NTPN EA69CAJH7EC6GVG Rp136.364.00 9.230. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0395A4JH02DMZVG Rp27.273.00 9.231. Tgl. 11-05-2019 NTPN AFCC84JH1CMF5KVG Rp136.364.00 9.232. Tgl. 11-05-2019 NTPN 181834JH1105VG Rp27.273.00 9.233. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5D2CA4JH9F3VOVG Rp136.364.00 9.234. Tgl. 11-05-2019 NTPN A699CAJH435F2VG Rp27.273.00 9.235. Tgl. 11-05-2019 NTPN 73A514JH888E6VG Rp136.364.00 9.236. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3ACC34JHBRVTOVG Rp27.273.00 9.237. Tgl. 11-05-2019 NTPN B88144JHJRECEVG Rp136.364.00 9.238. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0B4CA4JH5F5VOVG Rp27.273.00 9.239. Tgl. 08-05-2019 NTPN C012A8RL9HD1SEMD Rp136.364.00 9.240. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7E98D8RLKSLKIMO Rp27.273.00										
							9.241. Tgl. 11-05-2019 NTPN ECA184JG6PC225VG Rp136.364.00 9.242. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2ADCA4JH0K0HNVG Rp27.273.00 9.243. Tgl. 11-05-2019 NTPN 677514JGFK4G31VG Rp136.364.00 9.244. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8694A4JG59H1VG Rp27.273.00 9.245. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0484A4JGEE5D3TVG Rp136.364.00 9.246. Tgl. 11-05-2019 NTPN 00CFD4JG1GEJFVG Rp27.273.00 9.247. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4FAAF4JG9R4M4PVG Rp136.364.00 9.248. Tgl. 11-05-2019 NTPN 35EAF4JG9898BVG Rp27.273.00 9.249. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3088A4JG8E4U4VVG Rp136.364.00 9.250. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3E8664JG8R26DSVG Rp27.273.00 9.251. Tgl. 11-05-2019 NTPN 073EB4JG361V6VG Rp136.364.00 9.252. Tgl. 11-05-2019 NTPN 500104JGALQ3E0VG Rp27.273.00 9.253. Tgl. 11-05-2019 NTPN 47185Z7GRAP80VVG Rp136.364.00 9.254. Tgl. 11-05-2019 NTPN 445F22GRDQZQVG Rp27.273.00 9.255. Tgl. 11-05-2019 NTPN 478E527G09H14VG Rp136.364.00 9.256. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0A35727G0099GMVG Rp27.273.00										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							9257. Tgl: 11-05-2019 NTPN EBFDA27GODLSIEVG Rp136.364,00 9258. Tgl: 11-05-2019 NTPN 9C2B027GP09520VG Rp27.273,00 9259. Tgl: 11-05-2019 NTPN 1B23827GML0V30VG Rp136.364,00 9260. Tgl: 11-05-2019 NTPN F09FF27GNHNH30VG Rp27.273,00 9261. Tgl: 11-05-2019 NTPN 1120127FT287N0VG Rp136.364,00 9262. Tgl: 11-05-2019 NTPN E3AD427FTU4VUBVG Rp27.273,00 9263. Tgl: 11-05-2019 NTPN 0ADAA27FOVQJAZVG Rp136.364,00 9264. Tgl: 11-05-2019 NTPN C4C3727FPIKPKVG Rp27.273,00 9265. Tgl: 11-05-2019 NTPN 40C2E27FRKQJ3VG Rp136.364,00 9266. Tgl: 11-05-2019 NTPN A794227S88RPLVG Rp27.273,00 9267. Tgl: 11-05-2019 NTPN C6D5027FQ52M96VG Rp136.364,00 9268. Tgl: 11-05-2019 NTPN 0205227FQMNNOVG Rp27.273,00 9269. Tgl: 11-05-2019 NTPN 56A7964HF3F990VG Rp350.000,00 9270. Tgl: 11-05-2019 NTPN AD97864HJL80VG Rp350.000,00 9271. Tgl: 11-05-2019 NTPN 1405664HETNNVG Rp350.000,00 9272. Tgl: 11-05-2019 NTPN 2968464JASOUTVG Rp350.000,00										
							9273. Tgl: 11-05-2019 NTPN 4F87264KONSLQVG Rp350.000,00 9274. Tgl: 11-05-2019 NTPN 0BCAA64IMGK140VG Rp350.000,00 9275. Tgl: 11-05-2019 NTPN 8C26064JUNZLVG Rp350.000,00 9276. Tgl: 11-05-2019 NTPN E049164AJPKD0VG Rp350.000,00 9277. Tgl: 11-05-2019 NTPN 4D0FD64JHO68VG Rp350.000,00 9278. Tgl: 11-05-2019 NTPN 3127964JKICURVG Rp350.000,00 9279. Tgl: 11-05-2019 NTPN 7B14C64JMH2ISEVG Rp350.000,00 9280. Tgl: 11-05-2019 NTPN 928A64J0BUNBAVG Rp350.000,00 9281. Tgl: 11-05-2019 NTPN 8095264JPE6QAVG Rp350.000,00 9282. Tgl: 11-05-2019 NTPN 325AC64JQ44SHLVG Rp350.000,00 9283. Tgl: 08-05-2019 NTPN 2C2CC5GPNKKU0M0 Rp350.000,00 9284. Tgl: 08-05-2019 NTPN 813AB0P14JRA6M0 Rp136.364,00 9285. Tgl: 08-05-2019 NTPN 8A109P1J2C8M7M0 Rp27.273,00 9286. Tgl: 10-05-2019 NTPN 05E3D4040V0670 Rp136.364,00 9287. Tgl: 10-05-2019 NTPN 0C11CAG4LL564270 Rp27.273,00 9288. Tgl: 10-05-2019 NTPN CFC8F4G45U7UFK70 Rp136.364,00										
							9289. Tgl: 10-05-2019 NTPN 372354G47VE3M370 Rp27.273,00 9290. Tgl: 10-05-2019 NTPN 59F A84G40V7HR870 Rp27.273,00 9291. Tgl: 10-05-2019 NTPN F19B44G3HR8BN70 Rp136.364,00 9292. Tgl: 10-05-2019 NTPN E088F4FP9JDS870 Rp136.364,00 9293. Tgl: 10-05-2019 NTPN A53494FF70E0EP70 Rp27.273,00 9294. Tgl: 10-05-2019 NTPN FFBF94FFC0003270 Rp136.364,00 9295. Tgl: 10-05-2019 NTPN F9EBD4F0CAEFQ70 Rp27.273,00 9296. Tgl: 10-05-2019 NTPN DC07A4F36RJF870 Rp136.364,00 9297. Tgl: 10-05-2019 NTPN 8100D4F3S9Q7270 Rp27.273,00 9298. Tgl: 10-05-2019 NTPN 81A304F5HF4E7C70 Rp136.364,00 9299. Tgl: 10-05-2019 NTPN 1F3A54F5LH00KA70 Rp27.273,00 9300. Tgl: 10-05-2019 NTPN 081624F5SR2F0670 Rp136.364,00 9301. Tgl: 10-05-2019 NTPN 99534F5SURHGDA70 Rp27.273,00 9302. Tgl: 10-05-2019 NTPN 11F4E4F161MB870 Rp136.364,00 9303. Tgl: 10-05-2019 NTPN 5A73C4FT3PRT L70 Rp27.273,00 9304. Tgl: 10-05-2019 NTPN A4D944FTLHVAC870 Rp136.364,00										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut						
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							9.305. Tgl: 10-05-2019 NTPN 60A774F1PTLLGV70 Rp27.273,00 9.306. Tgl: 10-05-2019 NTPN 47DAF4FU01854C70 Rp136.364,00 9.307. Tgl: 10-05-2019 NTPN A7AD44FU64QKNP70 Rp27.273,00 9.308. Tgl: 10-05-2019 NTPN CFB044FUJCHNSZV70 Rp136.364,00 9.309. Tgl: 10-05-2019 NTPN C91044FUJDS0870 Rp27.273,00 9.310. Tgl: 10-05-2019 NTPN 082E84FUTDS6970 Rp136.364,00 9.311. Tgl: 10-05-2019 NTPN B85E4FV3HEVPM70 Rp27.273,00 9.312. Tgl: 10-05-2019 NTPN 1DF3E4FVNDPQ170 Rp136.364,00 9.313. Tgl: 10-05-2019 NTPN 3A4D34FVJHMBLL70 Rp27.273,00 9.314. Tgl: 11-05-2019 NTPN B55E2250VNBPM70 Rp136.364,00 9.315. Tgl: 11-05-2019 NTPN 58D2B250VNBDS9V Rp27.273,00 9.316. Tgl: 11-05-2019 NTPN 72CC525109VEQLV Rp136.364,00 9.317. Tgl: 11-05-2019 NTPN C0BF25115TH00V Rp27.273,00 9.318. Tgl: 11-05-2019 NTPN B99D025110HFV70 Rp136.364,00 9.319. Tgl: 11-05-2019 NTPN C06E02512B5JAVG Rp27.273,00 9.320. Tgl: 11-05-2019 NTPN 3E37F2512TPELV70 Rp136.364,00													
							9.321. Tgl: 11-05-2019 NTPN 7AC302513GDMUBV Rp27.273,00 9.322. Tgl: 11-05-2019 NTPN 728E22514310DQV Rp136.364,00 9.323. Tgl: 11-05-2019 NTPN E1A502514LLPTCV Rp27.273,00 9.324. Tgl: 11-05-2019 NTPN B55E22515BRRCV Rp136.364,00 9.325. Tgl: 11-05-2019 NTPN A29E325150TSSGV Rp27.273,00 9.326. Tgl: 11-05-2019 NTPN 36D5E2516DHUC2V Rp136.364,00 9.327. Tgl: 11-05-2019 NTPN 7FD97251709VRKV Rp27.273,00 9.328. Tgl: 11-05-2019 NTPN EC2C22518E2QOV Rp136.364,00 9.329. Tgl: 11-05-2019 NTPN D4817251802AAV Rp27.273,00 9.330. Tgl: 11-05-2019 NTPN 548022519AMSPV Rp136.364,00 9.331. Tgl: 11-05-2019 NTPN EB247251A6K817V Rp27.273,00 9.332. Tgl: 11-05-2019 NTPN 04579251DVMHMCV Rp136.364,00 9.333. Tgl: 11-05-2019 NTPN 82101631LHQNPV Rp27.273,00 9.334. Tgl: 11-05-2019 NTPN 0A4E9251M3K37BV Rp136.364,00 9.335. Tgl: 11-05-2019 NTPN 38F19E31MMMTV Rp27.273,00 9.336. Tgl: 11-05-2019 NTPN F81B8631NBSV7V Rp136.364,00													
							9.337. Tgl: 11-05-2019 NTPN C750F631NRHM1V Rp27.273,00 9.338. Tgl: 11-05-2019 NTPN 4A2FB631OE25JUV Rp136.364,00 9.339. Tgl: 11-05-2019 NTPN B7FD1631Q6196V Rp27.273,00 9.340. Tgl: 11-05-2019 NTPN C8E25631RKA8V Rp136.364,00 9.341. Tgl: 11-05-2019 NTPN E86E3631SGCHV Rp27.273,00 9.342. Tgl: 08-05-2019 NTPN 38E1B0PK00A05M Rp136.364,00 9.343. Tgl: 08-05-2019 NTPN D3E8E0PKM60CV Rp27.273,00 9.344. Tgl: 08-05-2019 NTPN FFD600PF2J0Z6M Rp1.590.000,00 9.345. Tgl: 08-05-2019 NTPN A48540PE20ECSM Rp136.363,00 9.346. Tgl: 08-05-2019 NTPN 510C8PEU81NGHMM Rp20.454,00 9.347. Tgl: 08-05-2019 NTPN 4616700Q293DDM Rp136.364,00 9.348. Tgl: 08-05-2019 NTPN 821BA0QQJ7H6FHM Rp20.455,00 9.349. Tgl: 08-05-2019 NTPN 70D6D4K2R1L2JMM Rp1.400.000,00 9.350. Tgl: 08-05-2019 NTPN 211544K5185ANMM Rp27.273,00 9.351. Tgl: 08-05-2019 NTPN C9A484KSR72G2M Rp45.455,00 9.352. Tgl: 08-05-2019 NTPN 514044K4IQBEMM Rp27.272,00													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut						
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							9.353. Tgl. 08-05-2019 NTPN 4DF474K4020700M Rp64.545,00 9.354. Tgl. 08-05-2019 NTPN 55F614K4741F7M Rp454.545,00 9.355. Tgl. 08-05-2019 NTPN E874C4K4BQRJUM Rp90.909,00 9.356. Tgl. 08-05-2019 NTPN 74D64K3271UB7M Rp650.000,00 9.357. Tgl. 08-05-2019 NTPN 60C544K2LMUKM Rp90.909,00 9.358. Tgl. 08-05-2019 NTPN 74BDD4K2P0V8P1M Rp18.182,00 9.359. Tgl. 08-05-2019 NTPN D22CA4K2BGK4C3M Rp136.364,00 9.360. Tgl. 08-05-2019 NTPN 2FFDF4K2G5G8P1M Rp27.273,00 9.361. Tgl. 08-05-2019 NTPN BC43C4K2G5D7C0M Rp90.909,00 9.362. Tgl. 08-05-2019 NTPN 225F4K2ZL3J3M Rp18.182,00 9.363. Tgl. 08-05-2019 NTPN 04704K10B40H6M Rp181.818,00 9.364. Tgl. 08-05-2019 NTPN 84C034K1UDH2U4M Rp36.364,00 9.365. Tgl. 08-05-2019 NTPN E30C586G0B24N1M Rp181.818,00 9.366. Tgl. 08-05-2019 NTPN 301C786G0Q5FRM Rp36.364,00 9.367. Tgl. 08-05-2019 NTPN 507D68F0HFGCPM Rp27.272,00 9.368. Tgl. 08-05-2019 NTPN A01458FQ59M1M Rp19.090,00													
							9.369. Tgl. 08-05-2019 NTPN 17A3C1K6JMLL3M Rp27.300,00 9.370. Tgl. 08-05-2019 NTPN 132751K5S4IPEQM Rp136.364,00 9.371. Tgl. 08-05-2019 NTPN 6C2911K6ACT1S3M Rp20.455,00 9.372. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7E2911K5LMB3M Rp126.000,00 9.373. Tgl. 08-05-2019 NTPN 65415K5CDLHAKM Rp167.600,00 9.374. Tgl. 08-05-2019 NTPN 089801T0MR90C4M Rp181.818,00 9.375. Tgl. 08-05-2019 NTPN 87E201T0U540Q0M Rp27.272,00 9.376. Tgl. 08-05-2019 NTPN 689701T0REV6GRM Rp445.454,00 9.377. Tgl. 08-05-2019 NTPN C3581T0SL4H7CMB Rp109.090,00 9.378. Tgl. 08-05-2019 NTPN 48C054K9Q490EM Rp545.454,00 9.379. Tgl. 08-05-2019 NTPN C5F04K9Q0378F1M Rp109.090,00 9.380. Tgl. 08-05-2019 NTPN 9C5624K9V0334VM Rp1.400.000,00 9.381. Tgl. 10-05-2019 NTPN 1D8614FKSM177B7 Rp21.840,00 9.382. Tgl. 10-05-2019 NTPN C0894F1KRM1670 Rp21.840,00 9.383. Tgl. 10-05-2019 NTPN A05A44FKM9QCS570 Rp21.840,00 9.384. Tgl. 08-05-2019 NTPN C59384K3ABQJ53M Rp21.840,00													
							9.385. Tgl. 10-05-2019 NTPN 671B64FJ00644D70 Rp21.840,00 9.386. Tgl. 10-05-2019 NTPN ED3634FLGPAG0870 Rp21.840,00 9.387. Tgl. 10-05-2019 NTPN 61A294FLCA4A3D70 Rp21.840,00 9.388. Tgl. 10-05-2019 NTPN 43B2F4FLB8M770 Rp21.840,00 9.389. Tgl. 10-05-2019 NTPN 684FE4FL0P37K970 Rp21.840,00 9.390. Tgl. 10-05-2019 NTPN 2D99C4FKCDSJL70 Rp21.840,00 9.391. Tgl. 10-05-2019 NTPN 434344FJ8948870 Rp21.840,00 9.392. Tgl. 10-05-2019 NTPN 86534FD1V1E70 Rp21.840,00 9.393. Tgl. 10-05-2019 NTPN C38504FDQJ0K70 Rp21.840,00 9.394. Tgl. 10-05-2019 NTPN E4D484FHUVDTF70 Rp21.840,00 9.395. Tgl. 10-05-2019 NTPN 960354FKH6G07570 Rp21.840,00 9.396. Tgl. 08-05-2019 NTPN E597D1T0Z6MMVM Rp16.364,00 9.397. Tgl. 08-05-2019 NTPN E41C24K6FTSQ268M Rp109.091,00 9.398. Tgl. 08-05-2019 NTPN 9F4444K6B94K3M Rp109.091,00 9.399. Tgl. 08-05-2019 NTPN 28FC14K6E0S1HKM Rp16.364,00 9.400. Tgl. 11-05-2019 NTPN E4D2463VRFJT90VG Rp109.091,00													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							9401. Tgl. 11-05-2019 NTPN 187AD69VSBHVH3VG Rp16.364,00 9402. Tgl. 11-05-2019 NTPN DD94C63VU3E3VPVG Rp109.091,00 9403. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3181763VVBMBUTVG Rp16.364,00 9404. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2A9F3640DUJUVJVG Rp109.091,00 9405. Tgl. 11-05-2019 NTPN 1EF3464D1BCT1SVVG Rp16.364,00 9406. Tgl. 11-05-2019 NTPN B881A640FBOOFVVG Rp109.091,00 9407. Tgl. 11-05-2019 NTPN BF589640LLO6ZVG Rp16.364,00 9408. Tgl. 11-05-2019 NTPN 1D0BA640S88BLVG Rp109.091,00 9409. Tgl. 11-05-2019 NTPN DF898640PES9RTVG Rp16.364,00 9410. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6D6C564AR60E2TVG Rp109.091,00 9411. Tgl. 11-05-2019 NTPN 5FFA6640RPFVVG Rp16.364,00 9412. Tgl. 11-05-2019 NTPN D0393641E43JUMVVG Rp109.091,00 9413. Tgl. 11-05-2019 NTPN 00755641GNUS9NVG Rp16.364,00 9414. Tgl. 11-05-2019 NTPN A39Z2640SUKJCVG Rp109.091,00 9415. Tgl. 11-05-2019 NTPN 26358640THK6KJVG Rp16.364,00 9416. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6151E641IPAA68VVG Rp109.091,00										
							9417. Tgl. 11-05-2019 NTPN F5885641JUCDFAVG Rp16.364,00 9418. Tgl. 11-05-2019 NTPN B12A56431881D6VVG Rp109.091,00 9419. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7ECB8643334SRVVG Rp16.364,00 9420. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7CA586421AAFLVVG Rp109.091,00 9421. Tgl. 11-05-2019 NTPN 48DE9642TRFOFQVVG Rp16.364,00 9422. Tgl. 11-05-2019 NTPN 438A9641NEAMQMVVG Rp109.091,00 9423. Tgl. 11-05-2019 NTPN 97F18641QTSVAZVVG Rp16.364,00 9424. Tgl. 11-05-2019 NTPN E2785641KQAFMLVG Rp109.091,00 9425. Tgl. 11-05-2019 NTPN 164D5641ML8HJ0VVG Rp16.364,00 9426. Tgl. 08-05-2019 NTPN D98D488LFLUNCMM0 Rp350.000,00 9427. Tgl. 08-05-2019 NTPN D68D488LFLUNCMM0 Rp350.000,00 9428. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6D44763VD780SFVVG Rp350.000,00 9429. Tgl. 11-05-2019 NTPN B889A63VB62JMOVVG Rp350.000,00 9430. Tgl. 11-05-2019 NTPN A27F463VBBJ08VVG Rp350.000,00 9431. Tgl. 11-05-2019 NTPN F9A1A63VTR13FVVG Rp350.000,00 9432. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7860763V049NEAVG Rp350.000,00										
							9433. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3F30463UULLJNDVVG Rp350.000,00 9434. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4655963US1PDI1CVG Rp350.000,00 9435. Tgl. 11-05-2019 NTPN 6834963UQU7CZTVVG Rp350.000,00 9436. Tgl. 11-05-2019 NTPN C782963UQ1440VVG Rp350.000,00 9437. Tgl. 11-05-2019 NTPN 9E37E63UM7GUSOVG Rp350.000,00 9438. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2407863UJT007GVG Rp350.000,00 9439. Tgl. 11-05-2019 NTPN D399963UINOLBCVVG Rp350.000,00 9440. Tgl. 11-05-2019 NTPN BECE763UJ98HVVVG Rp350.000,00 9441. Tgl. 11-05-2019 NTPN 78F9163UJFKDKDVG Rp350.000,00 9442. Tgl. 08-05-2019 NTPN 38C8F1JVK6CQ3M0 Rp140.810,00 9443. Tgl. 08-05-2019 NTPN 94F21JVPANTHCM0 Rp28.182,00 9444. Tgl. 11-05-2019 NTPN A3E0964076JNLVVG Rp140.849,00 9445. Tgl. 11-05-2019 NTPN 60B3E96HK1CJMMNVG Rp28.170,00 9446. Tgl. 11-05-2019 NTPN 125296404DTCVVG Rp140.849,00 9447. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0CAF36HKAJUSAVG Rp28.170,00 9448. Tgl. 11-05-2019 NTPN C502F63UPTMPBVG Rp140.849,00										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							9449. Tgl. 11-05-2019 NTPN ABBE163U7CH08TVG Rp28.170,00 9450. Tgl. 11-05-2019 NTPN E8E9C63UVVPOFVVG Rp140.849,00 9451. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7715163UBHPR81VVG Rp28.170,00 9452. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4812963UBN1U7VVG Rp140.849,00 9453. Tgl. 11-05-2019 NTPN 9E5C06UJSE9AEVVG Rp140.849,00 9454. Tgl. 11-05-2019 NTPN F372D63UBSK1UZVVG Rp28.170,00 9455. Tgl. 11-05-2019 NTPN 8F9616HUJFF8TVG Rp28.170,00 9456. Tgl. 11-05-2019 NTPN F97886HUJ2UTNVVVG Rp140.849,00 9457. Tgl. 11-05-2019 NTPN 70C16E9HUPQF3QD3VVG Rp28.170,00 9458. Tgl. 11-05-2019 NTPN A0D4C4HUK5L8VVG Rp140.849,00 9459. Tgl. 11-05-2019 NTPN EC6B05HJM1CPN8VVG Rp28.170,00 9460. Tgl. 11-05-2019 NTPN CBC316HJEO74NVVVG Rp140.849,00 9461. Tgl. 11-05-2019 NTPN FE0D06HJFKG9C2VVG Rp28.170,00 9462. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2F7886HUCE2HFVVG Rp140.849,00 9463. Tgl. 11-05-2019 NTPN 48A386HJUDK0Q2VVG Rp28.170,00 9464. Tgl. 11-05-2019 NTPN C33199HJ2BM1OVVVG Rp140.849,00											
							9465. Tgl. 11-05-2019 NTPN SEC416HJ970P0SVVG Rp28.170,00 9466. Tgl. 11-05-2019 NTPN D504E6HJ4UD4CVVG Rp140.849,00 9467. Tgl. 11-05-2019 NTPN DC5496HJ9NR63GVVG Rp28.170,00 9468. Tgl. 11-05-2019 NTPN 1D9596HJ4BKJLVVG Rp140.849,00 9469. Tgl. 11-05-2019 NTPN 74AFE6HJZHD7TVG Rp28.170,00 9470. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3C3109HJN6AUEVVG Rp140.849,00 9471. Tgl. 11-05-2019 NTPN 33F5A6HJ0BEDTVG Rp28.170,00 9472. Tgl. 11-05-2019 NTPN F69A46H11U0WAVVVG Rp140.910,00 9473. Tgl. 11-05-2019 NTPN A81538HJL0T02VVG Rp28.182,00 9474. Tgl. 08-05-2019 NTPN 7892D5M056LNDMD0 Rp140.849,00 9475. Tgl. 08-05-2019 NTPN 1D7B81JTLK1R44MD Rp28.170,00 9476. Tgl. 11-05-2019 NTPN 971E88HJQL1GBUUVVVG Rp140.910,00 9477. Tgl. 11-05-2019 NTPN A18426HJG5CTKQKVVVG Rp28.182,00 9478. Tgl. 11-05-2019 NTPN D11D06HJM14FEVVG Rp140.910,00 9479. Tgl. 11-05-2019 NTPN C04059HJGN97EIVVG Rp28.182,00 9480. Tgl. 11-05-2019 NTPN 4691F6HJG1U0Q9VVG Rp140.910,00											
							9481. Tgl. 11-05-2019 NTPN 240F99HGJ2S1K1VVG Rp28.182,00 9482. Tgl. 11-05-2019 NTPN CF3A26H7NM025VVG Rp140.910,00 9483. Tgl. 11-05-2019 NTPN 7FA485HJG8G206VVG Rp28.182,00 9484. Tgl. 11-05-2019 NTPN 141116H81CKP7VVG Rp140.910,00 9485. Tgl. 11-05-2019 NTPN 58EF46H4HABUOG4VVG Rp28.182,00 9486. Tgl. 11-05-2019 NTPN B585D6HHCMEUEVVG Rp140.910,00 9487. Tgl. 11-05-2019 NTPN 426F16HHEEB2T2VVG Rp28.182,00 9488. Tgl. 11-05-2019 NTPN C48262HHCORRAVVG Rp140.910,00 9489. Tgl. 11-05-2019 NTPN 2CT786HJHNDQNVVVG Rp28.182,00 9490. Tgl. 11-05-2019 NTPN 05E446H4LDRKQNVVVG Rp140.910,00 9491. Tgl. 11-05-2019 NTPN E04979HJN6NP6GVVG Rp28.182,00 9492. Tgl. 11-05-2019 NTPN 47E509H4HOTJL6VVG Rp140.910,00 9493. Tgl. 11-05-2019 NTPN CEAA06HJG2S2KAVVVG Rp28.182,00 9494. Tgl. 11-05-2019 NTPN E534F6HHT088AVVVG Rp140.910,00 9495. Tgl. 11-05-2019 NTPN 544C06H4VAGE0CVVG Rp28.182,00 9496. Tgl. 11-05-2019 NTPN 3CTD66HJMTG6AVVVG Rp140.910,00 9497. Tgl. 11-05-2019 NTPN ED2946HIEEPKLVVG Rp28.182,00 9498. Tgl. 11-05-2019 NTPN BA64C2H8TT49QVVG Rp140.910,00 9499. Tgl. 11-05-2019 NTPN D062C6H9P90CVVG Rp28.182,00 9500. Tgl. 11-05-2019 NTPN 0E7C26H2KLE6VVG Rp140.910,00 9501. Tgl. 11-05-2019 NTPN 386FA6H44RCEVVG Rp28.182,00											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut :			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							10. Setoran pajak Kab Kepulauan Yappen Rp33.720.054,00 sebagai berikut : 10.1. Tgl. 17-01-2019 NTPN 2A5EC3P1U0AJEAI Rp350.000,00 10.2. Tgl. 17-01-2019 NTPN 7E3033PHBCA312AI Rp54.545,00 10.3. Tgl. 17-01-2019 NTPN 14C0C3PH2GK41AI Rp54.545,00 10.4. Tgl. 17-01-2019 NTPN 49E5A3P10K1EMAI Rp350.000,00 10.5. Tgl. 17-01-2019 NTPN 009403PJV6GP22AI Rp54.545,00 10.6. Tgl. 17-01-2019 NTPN E204C3PKHE5E64AI Rp54.545,00 10.7. Tgl. 17-01-2019 NTPN 4D94C3PKC17R8AI Rp54.545,00 10.8. Tgl. 17-01-2019 NTPN AA20B3PMM008RAI Rp350.000,00 10.9. Tgl. 17-01-2019 NTPN 32ACB3PMKF9IPVAI Rp350.000,00 10.10. Tgl. 17-01-2019 NTPN C0FF93PMUJUDGAI Rp350.000,00 10.11. Tgl. 17-01-2019 NTPN 1595A3PN73E2BVAI Rp54.545,00 10.12. Tgl. 17-01-2019 NTPN 30633PN2G6VAVAI Rp54.545,00 10.13. Tgl. 17-01-2019 NTPN B88F3PNRF9MCLAI Rp350.000,00 10.14. Tgl. 17-01-2019 NTPN B55413PNVQV1HCAI Rp350.000,00 10.15. Tgl. 17-01-2019 NTPN CB7193P04BLCMSAI Rp54.545,00 10.16. Tgl. 17-01-2019 NTPN DB1303P0B0000DAI Rp350.000,00	33.720.054,00											
							10.17. Tgl. 22-01-2019 NTPN 99CC15LAINM2FF52 Rp350.000,00 10.18. Tgl. 22-01-2019 NTPN D61365LBS3IQ2RS2 Rp350.000,00 10.19. Tgl. 22-01-2019 NTPN 890455LDDQ6MJ352 Rp54.545,00 10.20. Tgl. 22-01-2019 NTPN 966655LMLJSH52 Rp54.545,00 10.21. Tgl. 22-01-2019 NTPN 122CPSL0LLET52 Rp350.000,00 10.22. Tgl. 17-01-2019 NTPN D42E03PADSUDFHAJ Rp54.545,00 10.23. Tgl. 17-01-2019 NTPN 86CAE3PAKSEVAGAI Rp350.000,00 10.24. Tgl. 17-01-2019 NTPN 28C9F3PB1CTVBSAI Rp54.545,00 10.25. Tgl. 17-01-2019 NTPN 1132D9B8B8IHEAI Rp350.000,00 10.26. Tgl. 17-01-2019 NTPN 44B833PNW10G1AI Rp350.000,00 10.27. Tgl. 17-01-2019 NTPN CD4223PC98RSZTAI Rp54.545,00 10.28. Tgl. 17-01-2019 NTPN 6F74A3PCEGFIEVAI Rp350.000,00 10.29. Tgl. 17-01-2019 NTPN 786A63P0I7RCBAI Rp54.545,00 10.30. Tgl. 17-01-2019 NTPN 0CB33P0UJQ5ZVAI Rp54.545,00 10.31. Tgl. 17-01-2019 NTPN D44273P062F3FAI Rp350.000,00 10.32. Tgl. 17-01-2019 NTPN E880F3PDN8AQGBAI Rp350.000,00												
							10.33. Tgl. 17-01-2019 NTPN 75F2E3PDS98K6AI Rp54.545,00 10.34. Tgl. 17-01-2019 NTPN CD6413PEJFN2J4AI Rp350.000,00 10.35. Tgl. 17-01-2019 NTPN F42503PERKFNDAI Rp54.545,00 10.36. Tgl. 17-01-2019 NTPN 1940C3P3F1JF3AI Rp350.000,00 10.37. Tgl. 17-01-2019 NTPN 8A20C3PFF6VMKCFAI Rp54.545,00 10.38. Tgl. 17-01-2019 NTPN F22563PFGJSK62AI Rp54.545,00 10.39. Tgl. 17-01-2019 NTPN E10FE3PFFJ03UFAI Rp350.000,00 10.40. Tgl. 17-01-2019 NTPN 4A483P099L1EAI Rp350.000,00 10.41. Tgl. 17-01-2019 NTPN 9F93P3D79E68AI Rp350.000,00 10.42. Tgl. 17-01-2019 NTPN D161D3P3DGGEG6AI Rp227.273,00 10.43. Tgl. 17-01-2019 NTPN A4FDC3P3ORLDFLAI Rp227.273,00 10.44. Tgl. 17-01-2019 NTPN A386E3P3VHRUKAI Rp45.455,00 10.45. Tgl. 17-01-2019 NTPN 2868A3P450QJFAI Rp272.727,00 10.46. Tgl. 17-01-2019 NTPN 1CA893P4GE19LJAI Rp54.545,00 10.47. Tgl. 17-01-2019 NTPN E24513P4MQTQ14AI Rp27.300,00 10.48. Tgl. 17-01-2019 NTPN 473D63P4VAGAIAI Rp454.545,00												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan sebagai berikut				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							10.49. Tgl. 17-01-2019 NTPN C1FA93P55V70LDAI Rp136.364,00 10.50. Tgl. 17-01-2019 NTPN 88453P5ED9M7DAI Rp136.364,00 10.51. Tgl. 17-01-2019 NTPN 26272P5L3GTACAI Rp27.300,00 10.52. Tgl. 17-01-2019 NTPN E996F3P5S3UP5AAI Rp27.300,00 10.53. Tgl. 17-01-2019 NTPN 916803P5H4KEMFAI Rp27.300,00 10.54. Tgl. 17-01-2019 NTPN 829073P6B79VPOAI Rp27.300,00 10.55. Tgl. 17-01-2019 NTPN D81323P6I4IC9AI Rp136.364,00 10.56. Tgl. 17-01-2019 NTPN 1669C3P7CDOKGGA I Rp54.545,00 10.57. Tgl. 17-01-2019 NTPN Z35983P7FJESMDAI Rp54.545,00 10.58. Tgl. 17-01-2019 NTPN 020713P7JAS7MAI Rp260.000,00 10.59. Tgl. 17-01-2019 NTPN B76833P7QCIO5AAI Rp54.545,00 10.60. Tgl. 17-01-2019 NTPN 222943P882RRQAI Rp350.000,00 10.61. Tgl. 17-01-2019 NTPN C9E4E3P8K7R2KAI Rp350.000,00 10.62. Tgl. 17-01-2019 NTPN 206053P8NOM387AI Rp54.545,00 10.63. Tgl. 17-01-2019 NTPN 888433P8S4CEJAI Rp350.000,00 10.64. Tgl. 17-01-2019 NTPN D1EC05P90G2PLAI Rp54.545,00											
							10.65. Tgl. 17-01-2019 NTPN A196C3P96117LGA I Rp54.545,00 10.66. Tgl. 17-01-2019 NTPN FB0F13P9ACNIG7AI Rp54.545,00 10.67. Tgl. 17-01-2019 NTPN C20B23P9D9R021AI Rp54.545,00 10.68. Tgl. 14-01-2019 NTPN 95891232TDK10T12 Rp127.273,00 10.69. Tgl. 17-01-2019 NTPN 284A23POTMOLJFAI Rp54.545,00 10.70. Tgl. 17-01-2019 NTPN 6D4330F1HQFQ6AI Rp350.000,00 10.71. Tgl. 17-01-2019 NTPN ECE0D30FD7BQHEAI Rp54.545,00 10.72. Tgl. 17-01-2019 NTPN 38E6A30FHJOMSAI Rp350.000,00 10.73. Tgl. 17-01-2019 NTPN 5081730FM4Q6DAI Rp350.000,00 10.74. Tgl. 17-01-2019 NTPN DE77A3QJDFLBNVAI Rp181.818,00 10.75. Tgl. 17-01-2019 NTPN 359F43QKRA7RGA I Rp36.364,00 10.76. Tgl. 17-01-2019 NTPN 730E23QJCLVBAI Rp3.500.000,00 10.77. Tgl. 17-01-2019 NTPN 70CA53OKZH1AP7AI Rp181.818,00 10.78. Tgl. 17-01-2019 NTPN A14043OKB2227AI Rp1.090.909,00 10.79. Tgl. 17-01-2019 NTPN 46AE83OKJF347AI Rp136.364,00 10.80. Tgl. 17-01-2019 NTPN 9A1923OL7FQ9SEAI Rp27.273,00											
							10.81. Tgl. 17-01-2019 NTPN 8383830LDSMPGKAI Rp45.455,00 10.82. Tgl. 17-01-2019 NTPN 402A13OLBVK8OAI Rp136.364,00 10.83. Tgl. 17-01-2019 NTPN 3051E3OLUGS4JUI Rp272.272,00 10.84. Tgl. 17-01-2019 NTPN EC5783OM61MNFIAI Rp54.545,00 10.85. Tgl. 17-01-2019 NTPN DD3BA3OMJE3PCDAI Rp454.545,00 10.86. Tgl. 17-01-2019 NTPN 2608D3OM55GFLRAI Rp90.909,00 10.87. Tgl. 17-01-2019 NTPN 6C8A73ONBF9M6AI Rp3.500.000,00 10.88. Tgl. 17-01-2019 NTPN 362A30OTLSQCCDAI Rp163.636,00 10.89. Tgl. 17-01-2019 NTPN 57E530ORT1H8QHEAI Rp1.745.455,00 10.90. Tgl. 17-01-2019 NTPN E21E530TKKIDAI Rp90.909,00 10.91. Tgl. 17-01-2019 NTPN A012630TMNTPIAI Rp127.273,00 10.92. Tgl. 17-01-2019 NTPN EC9E330VRBCE5AI Rp181.818,00 10.93. Tgl. 17-01-2019 NTPN F0A403269FCTGAI Rp36.364,00 10.94. Tgl. 17-01-2019 NTPN E22E03P2E81NCAI Rp1.200.000,00 10.95. Tgl. 17-01-2019 NTPN 502673P2NWBGCCAI Rp36.364,00 10.96. Tgl. 17-01-2019 NTPN BA7AC3P2EHK8GAI Rp181.818,00											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2018

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)									
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan apa/sah								
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
							10.97. Tgl. 17-01-2019 NTPN 05B143P3BRE4JMAI Rp136.364,00 10.98. Tgl. 17-01-2019 NTPN 6E11030F6HSEFAI Rp54.545,00 10.99. Tgl. 17-01-2019 NTPN 356E33ONGQGEAAI Rp54.545,00 10.100. Tgl. 17-01-2019 NTPN 2533F30QNRK6GSAI Rp54.545,00 10.101. Tgl. 17-01-2019 NTPN A611A3P7BAKASAI Rp54.545,00 10.102. Tgl. 17-01-2019 NTPN DCD873P8C45SGVAI Rp54.545,00 10.103. Tgl. 17-01-2019 NTPN 905A53PBHUKCJAI Rp54.545,00 10.104. Tgl. 17-01-2019 NTPN FF54F3PARLGD8AI Rp54.545,00 10.105. Tgl. 17-01-2019 NTPN CD02E3PBHRH7DZAI Rp54.545,00 10.106. Tgl. 17-01-2019 NTPN 9463B3P3ITAKJALAI Rp54.545,00 10.107. Tgl. 17-01-2019 NTPN 26D0C3PC4T4PUGAI Rp54.545,00 10.108. Tgl. 17-01-2019 NTPN EC1BF3PDANRQHOAI Rp54.545,00 10.109. Tgl. 17-01-2019 NTPN D6AD83PDG49DCAI Rp54.545,00 10.110. Tgl. 17-01-2019 NTPN 602323PE6V6ZKHAH Rp54.545,00 10.111. Tgl. 17-01-2019 NTPN C1C8B3PEE3TIFRQAI Rp54.545,00 10.112. Tgl. 17-01-2019 NTPN A3D353PFD0ANLAI Rp54.545,00																	
							10.113. Tgl. 17-01-2019 NTPN E88153P9N0CFDCAI Rp54.545,00 10.114. Tgl. 17-01-2019 NTPN 4F8723P0VEF4IAI Rp54.545,00 10.115. Tgl. 17-01-2019 NTPN 23A483PMMNHOFPAI Rp54.545,00 10.116. Tgl. 17-01-2019 NTPN 821983P9LGD0LEAI Rp54.545,00 10.117. Tgl. 17-01-2019 NTPN E15FD3PMT0GHB0AI Rp54.545,00 10.118. Tgl. 17-01-2019 NTPN 2494B3PMELB4MMAI Rp54.545,00 10.119. Tgl. 17-01-2019 NTPN 952093PMQISZDCAI Rp54.545,00 10.120. Tgl. 17-01-2019 NTPN 87BC83PNLLOTHIAI Rp54.545,00 10.121. Tgl. 22-01-2019 NTPN 545568LQSRW0H2AI Rp54.545,00 10.122. Tgl. 17-01-2019 NTPN 8C1363Q5A375FKAI Rp243.000,00 10.123. Tgl. 17-01-2019 NTPN 618CA305IU7ZCFAI Rp216.618,00 10.124. Tgl. 17-01-2019 NTPN F611A3P6TRFBFOAI Rp1.170.000,00 10.125. Tgl. 17-01-2019 NTPN FEA743P86FK7PMAI Rp54.545,00 10.126. Tgl. 17-01-2019 NTPN C82FD3P8H9PERAI Rp54.545,00 10.127. Tgl. 17-01-2019 NTPN 979E33P6G3NUNQAI Rp54.545,00 10.128. Tgl. 17-01-2019 NTPN E35683P8R8K7TAI Rp54.545,00																	
							10.129. Tgl. 22-01-2019 NTPN 818723LKLQ9F352 Rp54.545,00 10.130. Tgl. 22-01-2019 NTPN 5A5568LQFPUBA52 Rp54.545,00 10.131. Tgl. 22-01-2019 NTPN 1DC8A3LSEZYJCG52 Rp207.800,00 10.132. Tgl. 15-01-2019 NTPN 8858631K3DC0RUBAI Rp181.818,00 10.133. Tgl. 15-01-2019 NTPN A61A131UBPM01GPI Rp181.818,00 10.134. Tgl. 15-01-2019 NTPN 63baa31utekpvpi Rp181.818,00 10.135. Tgl. 15-01-2019 NTPN 38A8B3251ANBUOPI Rp181.818,00 10.136. Tgl. 15-01-2019 NTPN 8869B326AUZ1PHPI Rp181.818,00 10.137. Tgl. 15-01-2019 NTPN 5D1873263LMMLPI Rp181.818,00 10.138. Tgl. 15-01-2019 NTPN D5BF327IQDPIQPI Rp181.818,00 10.139. Tgl. 15-01-2019 NTPN 87134328557RNP1 Rp181.818,00 10.140. Tgl. 15-01-2019 NTPN 2DA4B329RS1LJUPI Rp181.818,00 10.141. Tgl. 15-01-2019 NTPN 42DFD32AC0MCRSPI Rp181.818,00 10.142. Tgl. 15-01-2019 NTPN ED4C322AFULBRGPI Rp181.818,00 10.143. Tgl. 15-01-2019 NTPN 2267532DL0SAJUUPI Rp181.818,00 10.144. Tgl. 15-01-2019 NTPN 87CDD32EK2R086PI Rp181.818,00 10.145. Tgl. 15-01-2019 NTPN 2365A32F2KGTDBPI Rp181.818,00 10.146. Tgl. 15-01-2019 NTPN CC2E132FD03075PI Rp181.818,00 10.147. Tgl. 15-01-2019 NTPN CC2E3862G0J5P5NPI Rp181.818,00 10.148. Tgl. 15-01-2019 NTPN 463DF6L0GJBP5252 Rp181.818,00																	
							PTL Semester I 2021: -																	
	Jumlah	12	3.949.948.540,67	Jumlah	40	2.923.493.865,26	Jumlah	28	2.491.765.192,76	10	431.728.672,50	2	-	0	0		3.803.651.978,17							

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.SPI																		
1	Pengelolaan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu Belum Sepenuhnya Memadai	1	149.881.401,00	BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:														
				1. Menginstruksikan Kepala Biro Administrasi memperkuat pengendalian perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja;	1		PTL Semester I Tahun 2021: Telah dilakukan tindak lanjut berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Administrasi Nomor 0493B/HK.04/00/K1/06/2021 untuk memperkuat pengendalian perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja			1							Belum ada sistem perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.	
				2. Menginstruksikan Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan untuk menerapkan sistem pengelolaan daftar hadir yang terintegrasi dengan perhitungan tunjangan kinerja secara elektronik	1		PTL Semester I Tahun 2021: Telah dilakukan tindak lanjut berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Administrasi Nomor 0493E/HK.04/00/K1/06/2021 untuk menerapkan sistem pengelolaan daftar hadir yang terintegrasi dengan perhitungan tunjangan kinerja secara elektronik			1							Belum ada sistem perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.	
				3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Administrasi dan Para Kepala Bagian yang lalai dalam mengawasi perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja	1		PTL Semester I 2021: Telah ditindak lanjut dengan memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dengan surat nomor - 0495.D/HK.01.00/SJ/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 kepada Sdr Bashory			1							Selesai	
				4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengelola daftar hadir pada Bagian PI dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Bagian TP2, dan Bagian Sosialisasi;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -						1					
				5. Memerintahkan pegawai terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran tunjakin tahun 2019 sebesar Rp119.792.166,00 (Rp149.881.401,00 - Rp30.089.235,00) ke kas negara;	1	119.792.166,00	PTL Semester II Tahun 2020: Telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penyetoran ke kas negara: a. Bagian Sosialisasi Rp5.437.651,00 dengan NTPN sebagai berikut 1. Feizal Rachman, tanggal 18-09-2020 NTPN AC1806U8DPKRHRMV sebesar Rp500.000,00 2. Daniel Situmorang, tanggal 16-09-2020 NTPN 892A37QLTK77TRVM sebesar Rp500.000,00 3. Hanif Vidi Yuwono, tanggal 14-09-2020 NTPN 5017148VU9TK91OS sebesar Rp2.000.000,00 4. Nurdiansyah, tanggal 22-09-2020 NTPN BID437QLTK77URCC sebesar Rp500.000,00 5. Aji Nugroho, tanggal 22-09-2020 NTPN E0E5ER8N3DEPKBRM3 sebesar Rp576.023,00	61.593.595,00	1	58.198.571,00							Belum disetor seluruhnya	91.682.830,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							<p>6. Ika Iqomatul Mar'ah, tanggal 14-09-2020 NTPN E25972G4UKOR9PCM sebesar Rp1.118.340,00</p> <p>7. Asep Saepurohman, tanggal 16-09-2020 NTPN B3E8861QTV2F4RJQ sebesar Rp243.288,00</p> <p>b. Bagian TP2 Rp5.500.000,00 dengan tanggal 18-09-2020 NTPN EE95B48VU9TN24F2</p> <p>1. Muharram F. Nugraha sebesar Rp1.000.000,00</p> <p>2. Harimurti Wicaksono sebesar Rp1.000.000,00</p> <p>3. Herusse Yulanda sebesar Rp500.000,00</p> <p>4. R Hari Wibowo sebesar Rp500.000,00</p> <p>5. Tri Indra Purnama sebesar Rp500.000,00</p> <p>6. Filber Sidabutar sebesar Rp1.000.000,00</p> <p>7. Nur Awan Datu sebesar Rp1.000.000,00</p> <p>PTL Semester I Tahun 2021: Telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penyetoran ke kas negara: a. Bagian Sosialisasi Rp4.575.176,00 dengan rincian 1. Feizal Rachman, tanggal 23-06-2021 NTPN FB24B8N3DNQTHF39 sebesar Rp1.000.000,00 2. Daniel Situmorang, tanggal 21-06-2021 NTPN AD3CE48VUQUQDPK4 sebesar Rp500.000,00 3. Nurdiansyah, tanggal 21-06-2021 NTPN B9ACD8N3DNQOEPCF sebesar Rp500.000,00 4. Aji Nugroho, tanggal 21-06-2021 NTPN CDDA96U8E2LVKR9V sebesar Rp1.000.000,00 5. Prasantho Fradhilain, tanggal 21-06-2021 NTPN AC6113CIEOCE0TP sebesar Rp251.136,00 6. Ike Aprilina, tanggal 23-06-2021 NTPN 0930055DEDHSP5J sebesar Rp824.040,00 7. Kelfin Roy D.Boseran, tanggal 21-06-2021 NTPN 9F25C1JNF37L6QDV sebesar Rp500.000,00</p>											
							<p>b. Bagian TP2 Rp29.572.713,00 dengan NTPN</p> <p>1. Muharram F. Nugraha, tanggal 02-04-2021 NTPN 4E9D848VUOCJ0T4 sebesar Rp9.169.550,00</p> <p>2. Harimurti Wicaksono, tanggal 31-05-2021 NTPN 5A6A448VU87578S sebesar Rp1.8.903.163,00</p> <p>3. Tanggal 22-06-2021 NTPN D27DD61QU83N8PD8 sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian Herusse Yulanda Rp500.000,00, R Hari Wibowo Rp500.000,00, Tri Indra Purnama Rp500.000,00</p>											
							<p>PTL Semester II tahun 2021 1. Bagian Sosialisasi Rp16.508.055 tanggal 16 juli 2021 dengan NTPN 9A6F98N3DNNTL512N</p>											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6. Memerintahkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu RI untuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan tunjangan kinerja tahun 2019 secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada BPK	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
2	Pengadaan Buku Saksi Peserta Pemilu Tidak Berdasarkan Kebutuhan Riil	1		BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu untuk: 1. Lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait perencanaan kegiatan Divisi SDM;	1		PTL Semester I 2021: - Telah ditindaklanjuti dengan membuat Pokok-pokok Kebijakan Penganggaran setiap tahun yang digunakan sebagai acuan dalam membuat RKA KL yaitu SE Sekjen No. 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 Pokok-pokok kebijakan penunyan RKA KL TA 2020 di Lingkungan Bawaslu dan SE Sekjen No. 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/x/2020 Tentang Pokok - Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran T.A 2021 (Dokumen terlampir)									Selesai	
				2. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki prosedur pengadaan buku saksi peserta pemilu untuk meminimalisir pemborosan dalam pengadaannya;	1		PTL Semester I Tahun 2021: Telah dilakukan tindak lanjut berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Administrasi Nomor 0493B/HK.04/00/K1/06/2021 untuk memperkuat pengendalian perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja			1						Belum ada sistem perhitungan pembayaran tunjangan kinerja.	
				3. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu menginstruksikan Kepala Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dengan didasarkan atas prinsip hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan	1		PTL Semester I 2021: Telah ditindaklanjuti dengan: - membuat Pokok-pokok Kebijakan Penganggaran setiap tahun yang digunakan sebagai acuan dalam membuat RKA KL yaitu SE Sekjen No. 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 Pokok-pokok kebijakan penunyan RKA KL TA 2020 di Lingkungan Bawaslu dan SE Sekjen No. 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/x/2020 Tentang Pokok - Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran T.A 2021 (Dokumen terlampir) - Menyusun Keputusan Ketua Nomor 0194/K.Bawaslu/PR/03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan revisinya sesuai SE Ketua Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam masa darurat Pandemi Covid 19									Selesai	
2. Kepatuhan																	
1	Penatausahaan Kas Lainnya Setara Kas pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Belum Terlib	1	65.676.449,00	BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung periode tahun 2019 yang lalai dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Lampung yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Rekening Dinas, dan tidak melaksanakan mekanisme pengendalian atas sisa LS perjalanan dinas;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung yang lalai dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				4. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung tahun 2019 dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah periode Januari – Mei 2019 atas kelalaiannya menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawabnya;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				5. Memproses Tuntutan Perbendaharaan kepada BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung tahun 2019 atas uang yang disalahgunakannya sebesar Rp45.375.000,00;	1	45.375.000,00	PTL Semester I Tahun 2021 : -	1	45.375.000,00						Selesai	45.375.000,00	
				6. Memproses Tuntutan Ganti Rugi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah periode Januari – Mei 2019 atas uang pajak yang disalahgunakannya sebesar Rp20.301.449,00	1	20.301.449,00	PTL Semester II Tahun 2021 : Telah dilakukan Penyetoran ke rekening dana hibah RPL 017 PDHL NOREG 2 Nomor Rekening 0098-01003814306 : 1. Sebesar Rp42.875.000 tanggal 30/6/2020 2. Sebesar Rp2.500.000 tanggal 30/6/2020 PTL Sem I Tahun 2020: Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp20.305.092,00 pada tgl 4/9/2020 dengan NTPN 5676500M7DOR03K8 PTL Sem I Tahun 2021: Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp20.305.092,00 pada tgl 4/9/2020 dengan NTPN 5676500M7DOR03K8	1	20.301.449,00						Selesai	20.305.092,00	
2	Terdapat Belanja Barang pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Ketentuan	1	3.106.662.527,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat dan PPK pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten yang lalai dalam melakukan pengawasan pengeluaran belanja dan penuntaihan dokumen pertanggungjawaban;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Koordinator Sekretariat selaku PPK beserta BPP pada Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tangerang yang lalai dalam mengendalikan pelaksanaan belanja yang menjadi tanggung jawabnya.	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1					
				3. Memerintahkan PPK pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tangerang untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp47.453.079,00 dan menyetorkannya ke kas negara;	1	47.453.079,00	PTL Sem I Tahun 2020 : 1. Kabupaten Cianjur senilai Rp6.690.000,00 sudah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN: 042710456541 tanggal 27 April 2020. 2. Kabupaten Sukabumi senilai Rp12.540.000,00, sudah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN: 6F4DE2G4UKA6H4A0 pada tanggal 23 April 2020. PTL Sem II Tahun 2020 : Telah dilakukan penyetoran ke kas negara : 1. Provinsi Jawa Barat senilai Rp4.820.634,00 tgl 14/7/2020 NTPN 0D86D7QLTKI72H0C 2. Provinsi Banten senilai Rp4.587.248,00 tgl 11/8/2020 NTPN 03FF961QTUVAIQBC 3. Kabupaten Tangerang senilai Rp10.260.000,00 tgl 11/8/2020 NTPN BC9A41JNEQ3CIQOB	38.897.882,00	1	8.555.197,00						Belum sesuai rekomendasi karena kelebihan pembayaran belum seluruhnya disetor ke kas negara	38.897.882,00
				4. Memerintahkan PPK dan BP/BPP terkait untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan sebesar Rp3.059.209.448,00 (Rp462.145.514,00 + Rp2.597.063.934,00) dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan kembali ke kas negara;	1	3.059.209.448,00	PTL Semester II Tahun 2020 Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban 1. Bawaslu Prov Jawa Barat senilai Rp42.749.604,00 dan Rp80.015.749,00 sesuai dengan LHR nomor 010/LHR/Bawaslu/PI/PW.06.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 2. Bawaslu Kab Cianjur senilai Rp286.000.000,00 dan Rp2.063.015.041,00 sesuai dengan LHV nomor 010/LHV/Bawaslu/PI/PW.06.02/XI/2020 tanggal 27 November 2020. 3. Telah dilakukan penyetoran oleh Bawaslu Kab, Cianjur sebesar Rp11.350.000 berdasarkan NTPN No. 4290761QU83N82N0	3.059.209.448,00								Selesai	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah						
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							<p>PTL Semester I Tahun 2021</p> <p>Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban</p> <p>1. Bawastu Prov Jawa Barat senilai Rp81.904.744,00 sesuai dengan LHR nomor 067/PW.08.02/IP/06/2021 tanggal 24 Juni 2021</p> <p>2. Bawastu Kab Cianjur senilai Rp214.724.256,00 sesuai dengan LHV nomor 007/LHV/PW.08.02/IP/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp59.916.454,00 pada tanggal 28/05/2021 dengan NTPN 88B817QLTTSMDP9U, sebesar Rp7.250.000 ke Kas Negara NTPN FDCDD7QL, tanggal 22 Juni 2021, sebesar Rp11.350.000,00 pada tanggal 23/6/2021 dengan NTPN 4290761QU83N82N0</p> <p>3. Bawastu kab Bandung senilai Rp82.700.000,00 sesuai dengan LHV nomor 006.A/LHV/Bawastu/PI/PW.06.02/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020</p> <p>Rekap verifikasi Semester I 2021 :</p> <p>1. Belanja bawastu prov jabar Rp325.553.697,00 Verifikasi belanja prov jabar Rp204.670.097,00 Sisa belum verifikasi Bawastu prov jabar Rp120.883.600,00</p> <p>2. Belanja bawastu kab bandung Rp82.700.000,00 Verifikasi belanja kab bandung Rp82.700.000,00 Sisa belum verifikasi Rp0,00</p> <p>3. Belanja bawastu kab Cianjur Rp2.353.605.751,00 Verifikasi dan setoran kab Cianjur Rp2.642.255.751,00 Sisa belum verifikasi Rp0,00</p> <p>4. Sisa belum verifikasi bawastu kab. Cianjur Rp297.350.000,00</p> <p>PTL Semester II tahun 2021 :</p> <p>1. Bawastu Prov Jawa Barat senilai Rp104.197.190,00 sesuai dengan LHR Nomor 262/PW.09/IP/11/2021 tanggal 15 November 2021, dan penyetoran ke kas negara sebesar Rp905.240,00 tanggal 10/11/2021 NTPN D45E92G4U8LLQ70, dan Rp6.676,00 tanggal 12/11/2021 NTPN DF0A27QLTTN29GSE</p> <p>PTL Semester II Tahun 2020</p> <p>Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban</p> <p>1. Bawastu Prov Jawa Barat dengan LHR nomor 010/LHR/Bawastu/PI/PW.06.02/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020</p> <p>2. Bawastu Kab Cianjur dengan LHV nomor 010/LHV/Bawastu/PI/PW.06.02/XI/2020 tanggal 27 November 2020</p>													
			5. Memerintahkan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawastu RI untuk melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan, dan hasilnya disampaikan kepada BPK.																	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							PTL Semester I Tahun 2021 Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban 1. Bawaslu Prov Jawa Barat dengan LHR nomor 067/PW.08.02/IP/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 2. Bawaslu Kab Cianjur dengan LHV nomor 007/LHV/PW.08.02/IP/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 3. Bawaslu Kab Bandung dengan LHV Nomor 006.A/LHV/PI/H2PI/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.											
							PTL Semester II Tahun 2021 : Telah dilakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban Bawaslu Prov Jawa Barat dengan LHR Nomor 262/PW.09/IP/11/2021 tanggal 15 November 2021											
3	Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Tidak Sesuai Ketentuan	1	2.500.000.000,00	BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:														
				1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk memastikan status dana hibah pemilu serentak yang diserahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1						-
				2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Ptl. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua tahun 2019 yang tidak memproses pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai ketentuan;	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1						-
				3. Memerintahkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu RI untuk memeriksa penggunaan dana hibah pemilu serentak pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.	1		PTL Semester I Tahun 2021 : -					1						-

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
4	Kekurangan Volume pada Belanja Barang untuk Pekerjaan Persiapan Sewa Kantor/Gedung Bawaslu Tahun 2019 Sebesar Rp77.190.000,00	1	77.190.000,00	BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Administrasi selaku penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam pengendalian dan pengawasan belanja barang; 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan PPK Biro Administrasi dan Kepala Bagian Umum agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; 3. Menginstruksikan PPK Biro Administrasi agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan cara menyetorkan ke kas negara sebesar Rp77.190.000,00.	1			PTL Semester I Tahun 2021 : -					1							
5	Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp426.695.300,00	1	426.695.300,00	BPK Merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Administrasi selaku penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam pengendalian dan pengawasan belanja modal; 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan PPK Biro Administrasi dan Kepala Bagian Umum agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; 3. Menginstruksikan PPK Biro Administrasi agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan cara menyetorkan ke kas negara sebesar Rp404.379.500,00 (Rp426.695.300,00 - Rp22.315.800,00).	1			PTL Semester I Tahun 2021 : -					1							
					1	404.379.500,00	PTL Semester I Tahun 2021: Telah dilakukan tindak lanjut berupa Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada PPK Biro Administrasi Nomor 0493DHK.04/00/K1/06/2021 untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran	404.375.816,00	1	3.684,00										426.691.616,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2019

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							PTL Sem II Tahun 2021 : Telah disetor ke kas negara sebesar : 1. Rp100.000.000,00 tgl 20/8/2021 NTPN BD7031JNF3DKNVAP 2. Rp169.422.816 tgl 2/9/2021 NTPN 06EFE1JNF3G481E7 3. Rp96.503.000,00 tgl 2/7/2021 NTPN F93BA48VUIV4QF5A 4. Rp38.450.000,00 tgl 2/7/2021 NTPN 7B7E92G4UTQC0DVE										
	Jumlah	7	6.326.105.677,00	Jumlah	29	3.773.700.642,00	Jumlah	7	3.629.753.190,00	7	143.947.452,00	15	-	0	-		622.952.420,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU (LHP Nomor 83/HP/XIV/07/2021)

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi		Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml		Nilai (Rp)	Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml			Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bawaslu Kabupaten Karawang, Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bawaslu Kota Depok Tidak Tertib	1	6.375.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Koordinator Sekretariat selaku PPK pada Bawaslu Kabupaten Karawang, Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bawaslu Kota Depok yang lalai dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya; dan	1	-						1						6.375.000,00	
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya: 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Karawang, Bawaslu Kota Banjarmasin dan Bawaslu Kota Depok yang lalai dalam melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan dan tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.	1	-						1						-	
2	Pembayaran Honorarium Tim Kelompok Kerja pada Bawaslu Tidak Sesuai Ketentuan	1	198.242.500,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu terkait menarik dan meyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran honorarium output kegiatan senilai Rp147.045.000,00 serta selanjutnya menyerahkan copy bukti setor kepada BPK, dengan rincian sebagai berikut: a. Bawaslu Kota Depok atas kelebihan pembayaran honorarium Pokja yang tidak bersifat Koordinatif tanpa melibatkan instansi lain atau lintas Eselon I senilai Rp48.020.000,00; b. Bawaslu Kabupaten Sukabumi atas kelebihan pembayaran honorarium Pokja yang tidak bersifat Koordinatif tanpa melibatkan instansi lain atau lintas Eselon I senilai Rp87.625.000,00;	1	147.045.000,00			-			-	1	147.045.000,00				-	51.197.500,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU (LHP Nomor 83/HP/XIV/07/2021)

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		YDAK Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				c. Bawaslu Kabupaten Banjar atas kelebihan pembayaran honorarium Pokja yang tidak bersifat Koordinatif tanpa melibatkan instansi lain atau lintas Eselon I senilai Rp11.400.000,00.													
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: a. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA. PPK Bawaslu Provinsi dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku PPK yang tidak melakukan pengawasan terhadap pembayaran honorarium pokja; dan b. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melakukan pembayaran honorarium tanpa mengacu pada peraturan yang berlaku.	1	-						1					
3	Kelebihan Pembayaran Paket Meeting atas Kegiatan-Kegiatan Pada Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Senilai Rp230.844.000,00	1	230.844.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Serang untuk segera menyetorkan ke kas negara pembayaran kegiatan paket meeting masing-masing sebesar Rp65.660.000,00; dan	1	65.660.000,00						1	65.660.000,00				165.184.000,00
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: a. Koordinator Sekretariat selaku PPK Bawaslu	1	-						1					

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU (LHP Nomor 83/HP/XIV/07/2021)

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan yang lalai dalam melakukan pengendalian pembayaran belanja barang; dan b. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran belanja barang.													
4	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bawaslu Kota Balikpapan Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap	1		- BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya: 1. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak mentaati ketentuan dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.	1							1					
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal supaya: 2. Menginstruksikan Inspektur Utama Bawaslu untuk melakukan reviu keabsahan bukti pertanggungjawaban belanja Bawaslu Kota Balikpapan senilai Rp933.495.892,00.	1							1					
	Jumlah	4	435.461.500,00	Jumlah	8	212.705.000,00	Jumlah	0	-	0	-	8	212.705.000,00	0	-		222.756.500,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Dana Hibah Kurang Memadai	1		BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar menyempurnakan Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Dana Hibah antara lain dengan memperbaiki kelemahan regulasi yang belum mengatur batas waktu penyampaian dokumen pertanggungjawaban, pengesahan SP2HL, periodisasi revisi DIPA dan mekanisme reviu bukti pertanggungjawaban, serta melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM dan infrastruktur alih media/digitalisasi dokumen pertanggungjawaban	1		PTL Semester II Tahun 2021: -Telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bawaslu Nomor 0374/HK.01.00/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota						1						
2	Realisasi Belanja Barang Senilai Rp4.932.096.481,00 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai	1	1.849.344.998,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu agar a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) KPA pada empat satker yaitu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai; 2) PPSM pada empat satker Bawaslu terkait yang tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran materil dan penatausahaan dokumen bukti pertanggungjawaban secara memadai; 3) PPK pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kota Tomohon, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Muna	1		PTL Sem II Tahun 2021: Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada : 1. KPA Bawaslu Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No2331.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. KPA Bawaslu Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2331.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. KPA Bawaslu prov Papua Barat sesuai dengan surat No 2329.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. KPA Bawaslu prov Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat No 2329.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. PPSM Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2331.KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. PPSM Prov Papua Barat sesuai dengan surat No 2329.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. PPSM prov Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat No 2328.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. PPK Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2331.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 9. PPK Kab Indramayu sesuai dengan surat No 2331.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. PPK Kab Minahasa Utara sesuai dengan surat No 2330.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 11. PPK Kab Minahasa Selatan sesuai dengan surat No 2330.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 12. PPK Kota Minahasa Selatan sesuai dengan surat No 2330.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 13. PPK Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2330.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 14. PPK Kab Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan surat No 2329.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021												0,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah							
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				yang tidak menaati ketentuan dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah; 4) BPP pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kota Tomohon, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bawaslu Kota Tomohon, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Muna yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.			15. PPK Prov Papua Barat sesuai dengan surat No 2329.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 16. PPK Kab Muna sesuai dengan surat No 2328.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 17. BPP Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2331.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 18. BPP Kab Indramayu sesuai dengan surat No 2331.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 19. BPP Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2331.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 20. BPP Kab Minahasa Utara sesuai dengan surat No 2330.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 21. BPP Kab Minahasa Selatan sesuai dengan surat No 2330.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 22. BPP Kota Tomohon sesuai dengan surat No 2330.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 23. BPP Kab Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan surat No 2329.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 24. BPP Prov Papua Barat sesuai dengan surat No 2329.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 25. BPP Kab Muna sesuai dengan surat No 2328.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021														
			BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu agar b.Memerintahkan KPA Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara untuk menyetorkan ke kas negara atas indikasi kerugian negara sebesar Rp1.712.425.412,00	1	1.712.425.412,00	PTL Sem II Tahun 2021 : Telah disetorkan ke kas negara sebesar : 1. Rp200.000.000,00 dengan NTPN A34426U8E2IPMIGF tanggal 11 Mei 2021 2. Rp4.700.000,00 dengan NTPN 2543155DEDPKQ765 tanggal 1 September 2021 3. Rp20.000.000,00 dengan NTPN 2AB787QLTTB1G4FM Tgl 8/7/2021 4. Rp20.000.000,00 dengan NTPN 9151E61QU89Q6BSK Tgl 27/8/2021 5. Rp35.500.000,00 dengan NTPN EB4AOON9V91295QT Tgl 14/10/21 6. Rp818.000,00 dengan NTPN. 6035761QU80MDMJU, tanggal 21/05/2021 7. Rp193.500,00 dengan NTPN. 4BAAD3CIEOIJQLT, tanggal 26/08/2021 8. Rp480.000,00 dengan NTPN. 4B84A0N9V8RRFLSIK, tanggal 27/08/2021 9. Rp2.565.000,00 dengan NTPN. A38AD61QU7TVN62A, tanggal 30/04/2021 10. Rp322.000,00 dengan NTPN. C3RFF65SDPDEAF0H11, tanggal 21/05/2021 11. Rp400,00 dengan NTPN. 635C43CIEOL8OVN9, tanggal 16/09/2021 12. Rp319.000,00 dengan NTPN. D920A6USE2URHM8N, tanggal 16/09/2021 13. Rp67.775.000,00 NTPN 2FC0B7QLTTJPKSB2 tanggal 1 Oktober 2021 14. Rp450.000,00 NTPN 39B6461QU8IG2006 tgl 20/11/2021 15. Rp1.000.000,00 NTPN 9DEDF61QU8I3P20 tgl 20/11/2021		374.767.900,00	1	1.337.657.512,00											511.687.486,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1							16. Rp4.645.000,00 NTPN : 18AEC6U8E34D5GUK tanggal 3 November 2021 17. Rp16.000.000,00 NTPN : 18AEC6U8E34D5GUK tanggal 3 November 2021										
				BPK merekomendasikan Ketua Bawastu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawastu agar c. Memerintahkan BPP dan PPK Bawastu Kabupaten Muna, Sorong Selatan, dan Fak-fak untuk mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp3.219.671.069,00 dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban. Apabila tidak dapat melengkapi bukti pertanggungjawaban, agar menyetorkan ke kas negara;	1		PTL Sem II Tahun 2021 Telah dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban senilai : 1. Bawastu Kab Sorong Selatan Rp29.850.000 sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Nomor 037/PW.08.02/04/2021 tanggal 30 April 2021 2. Bawastu Kab Sorong Selatan Rp87.760.000 sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Nomor 266.C/PW.009.B/11/2021 tanggal 30 November 2021 3. Bawastu Kab Muna Rp978.571.478 sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi No.279/PW.08.02/12/2021 tgl 27/12/2021			1							
				BPK merekomendasikan Ketua Bawastu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawastu agar d. Memerintahkan Itama Bawastu untuk melakukan reviu atas potensi kerugian negara sebesar Rp3.219.671.069,00 atas bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap.	1		PTL Sem II Tahun 2021 ;					1					
3	Pertanggungjawaban Belanja Honor Output Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pemilu Tidak Sesuai Ketentuan	1	2.967.233.500,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada 13 Ketua Bawastu Provinsi yaitu: Bawastu Kabupaten/Kota pada Bawastu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Riau yang tidak cermat mengesahkan surat keputusan sesuai ketentuan	1		PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada Ketua Bawastu : 1. Prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2315.P/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2315.O/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. Prov Kalimantan Timur sesuai dengan surat No 2315.N/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. Prov Riau sesuai dengan surat No 2315.M/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2315.L/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. Prov Bali sesuai dengan surat No 2315.K/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2315.J/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2315.I/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021	1									

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							9. Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2315.H/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. Prov Sulawesi Selatan sesuai dengan surat No 2315.G/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 11. Prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2315.E/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 12. Prov Sumatera Utara sesuai dengan surat No 2315.D/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 13. Prov Jambi sesuai dengan surat No 2315.F/KP.08.03/K1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021												
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu untuk: b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA pada 13 Bawaslu Provinsi terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan pembayaran atas honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja;	1		PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada : 1. KPA Bawaslu Prov Sulawesi Selatan sesuai dengan surat No 2327.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. KPA Bawaslu Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2331.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. KPA Bawaslu Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2331.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. KPA Bawaslu prov Riau sesuai dengan surat No 2328.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. KPA Bawaslu Prov Kalimantan Timur sesuai dengan surat No 2328.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. KPA Bawaslu prov Jambi sesuai dengan surat No 2328.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. KPA Bawaslu prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2328.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. KPA Bawaslu Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2328.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 9. KPA Bawaslu prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2327.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. KPA Bawaslu prov Bali sesuai dengan surat No 2327.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 11. KPA Bawaslu prov Sumatera Utara sesuai dengan surat No 2327.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 12. KPA Bawaslu Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2327.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 13. KPA Bawaslu Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2327.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021	1											
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu untuk: c. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: 1) Memerintahkan KPA memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM, PPK dan BP pada 13 Bawaslu Provinsi terkait yang tidak cermat dalam melakukan	1	1.655.579.000,00	PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada PPSPM : 1. PPSPM Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2331/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. PPSPM Prov Riau sesuai dengan surat No 2311.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. PPSPM Prov Bali sesuai dengan surat No 2311.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4.PPSPM Prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2311.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5 PPSPM Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No	1	1.188.686.500,00	1	466.892.500,00							2.500.341.000,00	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tertera						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				verifikasi kepatuhan atas peraturan terkait ketentuan keikutsertaan pegawai dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan; 2) Memerintahkan KPA Provinsi berikut untuk menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.655.579.000,00			5. PPSM Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2311.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. PPSM Prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2311.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. PPSM Prov Jambi sesuai dengan surat No 2311.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021													
							8. PPSM Prov Kalimantan Timur sesuai dengan surat No 2311.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 Sanksi disiplin kepada PPK : 1. PPK Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2330.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. PPK Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2311.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. PPK Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2311.I/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. PPK Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2311.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. PPK Prov Sumatera Utara sesuai dengan surat No 2311.K/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. PPK Prov Sulawesi Selatan sesuai dengan surat No 2311.L/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. PPK Prov Bali sesuai dengan surat No 2311.M/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. PPK Prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2311.N/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 9. PPK Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2311.O/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. PPK Prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2311.P/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. PPK Prov Bali sesuai dengan surat No 2311.M/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. PPK Prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2311.N/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 9. PPK Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2311.O/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. PPK Prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2311.P/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 11. PPK Prov Jambi sesuai dengan surat No 2311.Q/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 12. PPK Prov Kalimantan Timur sesuai dengan surat No 2311.R/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 13. PPK Prov Riau sesuai dengan surat No 2311.S/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tertera					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							Sanksi disiplin kepada BP : 1. BP Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2311.T/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. BP Prov Jawa Barat sesuai dengan surat No 2312.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. BP Prov Sumatera Utara sesuai dengan surat No 2312.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. BP Prov Sulawesi Selatan sesuai dengan surat No 2312.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. BP Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2312.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. BP Prov Bali sesuai dengan surat No 2312.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 7. BP Prov Maluku Utara sesuai dengan surat No 2312.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 8. BP Prov Sumatera Barat sesuai dengan surat No 2312.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 9. BP Prov Jambi sesuai dengan surat No 2312.I/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 10. BP Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2312.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 11. BP Prov Kalimantan Timur sesuai dengan surat No 2312.K/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 12. BP Prov Riau sesuai dengan surat No 2312.L/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 13. BP Prov Kalimantan Selatan sesuai dengan surat No 2312.Q/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 PTL Sem II Tahun 2021 Telah disetor ke kas negara sebesar : 1) Kab. Tebo, NTPN: F458061QU810MV8E, tanggal 7 Juni 2021, Rp25.840.000 2) Kab. Tanjung Jabung Barat, NTPN: C69346U8E2LH2AT7, tanggal 7 Juni 2021, Rp24.950.000 3) Kab. Tanjung Jabung Timur, NTPN: CE7247QLT84LA2M, tanggal 10 Juni 2021, Rp19.395.000 4) Kab. Sorolangun, NTPN: FCC1A6U8E2LOAA0T, tanggal 15 Juni 2021, Rp15.675.000 5) Kab. Bungo, NTPN: DD0BF2G4UTPU8VPE, tanggal 14 Juni 2021, Rp20.045.000 6) Kab. Merangin, NTPN: 992607QLT816G9K, 24 Juni 2021, Rp29.830.000 Kota. Sungai Penuh: 7) AF4C848VUJ4HM5FE 12 Agust 2021 Rp1,140,000 8) 9B23E6U8E2RMT637 12 Agust 2021 Rp6,120,000 9) 2DD7B55DEDMU36HR 12 Agust 2021 Rp7,125,000												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.							
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
							10) CD46C1JNF3DCFSDP 12 Agust 2021 Rp1.200.000 11) Kab. Kerinci, NTPN: 8C2470N9V8R9DATU, tanggal 20 Agustus 2021, Rp15.385.000 12) Kab. Kerinci, NTPN : D06E855DEDQEDOCJ, tanggal 30 September 2021, Rp2.280.000														
							13) Kab. Kerinci, NTPN : 0CDBF48VUJAA10MC, tanggal 4 Oktober 2021, Rp7.000.000 14) Kab. Kerinci, NTPN : 3C0EC6USE31GABOB, tanggal 4 Oktober 2021, Rp4.200.000 15) Kab. Kerinci, NTPN : 9C2000N9V90PFD12, tanggal 4 Oktober 2021, Rp3.000.000 16) Kab. Kerinci, NTPN : 9F0042G4UU59D6E, tanggal 4 oktober 2021, Rp1.500.000 17) Kab. Kerinci, NTPN : 874B17QLTJISNDLU, tanggal 4 Oktober 2021, Rp1.900.000 18) Kab. Kerinci, NTPN : 8241A2G4UU59ER8, tanggal 4 Oktober 2021, Rp4.000.000 19) Kab. Kerinci, NTPN : 0DD922G4UU59F3M, tanggal 4 Oktober 2021, Rp2.000.000 20) Kab. Kerinci, NTPN : 484FE48VUJAB3FKA, tanggal 4 Oktober 2021, Rp800.000 21) Kab. Kerinci, NTPN : 70ED68N3DO694GSP, tanggal 4 Oktober 2021, Rp800.000 22) Kota. Sungai Penuh, NTPN : 26E648N3DO6M5KND, tanggal 18 Oktober 2021 Rp1.200.000 23) Kota. Sungai Penuh, NTPN : 78E3155DEDT4HK9H, tanggal 18 Oktober 2021 Rp750.000 24) Kab. Kerinci NTPN : 0B10E2G4UU8G7ASE tanggal 3 November 2021. Rp2.700.000 25) Kab. Kerinci NTPN : 414F53CIEOQSK8RF tanggal 3November 2021, Rp4.000.000 26) Kab. Kerinci NTPN : 09BA90N9V93NDAJA tanggal 3 November 2021. Rp1.150.000 27) Kab. Kerinci NTPN : 5714955DEDEVLE8AB tanggal 3 November 2021 Rp2.590.000														

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							28) Kab. Kerinci NTPN : 54CEF48VUJD91AC8 tanggal 3 November 2021 Rp900.000 29) Kab. Kerinci NTPN : B66DE1JNF3M3Q917 tanggal 3 November 2021 Rp2.080.000 30) Kab. Kerinci NTPN : E036B0N9V93ND75K tanggal 3 November 2021 Rp1.000.000													
							31) Kab. Kerinci NTPN : 463473CIE0QSK7T5 tanggal 3 November 2021 Rp10.620.000 32) Kab. Kerinci NTPN : 8A7F81JNF3M3QA1H tanggal 3 November 2021 Rp1.000.000 33) Kab. Kerinci NTPN : 2A81E7QLTTN2A5IU tanggal 11 November 2021 Rp1.200.000 34) Kab. Kerinci NTPN : 3045A7QLTTN2A54I tanggal 11 November 2021 Rp2.000.000 35) Kota Sungai Penuh NTPN : 037241JNF3MABKSR tanggal 12 November 2021 Rp7.500.000 36) Kota Sungai Penuh NTPN DCCB40N9V93RP0NQ tanggal 10 November 2021 Rp1.650.000 37) Kota Sungai Penuh NTPN : D05683CIEOR10OKF tanggal 10 November 2021 Rp1.200.000 38) Kota Sungai Penuh NTPN : 173792G4UU8KJOM0 tanggal 10 November 2021 Rp1.200.000 39) Kerinci NTPN : 155DD0N9V93V2AS2 tanggal 11 November 2021 Rp1.500.000 40) Kerinci NTPN : B9EAC48VUJE2PO62 tanggal 30 November 2021 Rp3.805.000 41) Kerinci NTPN : AA8047QLTTN8RFKO tanggal 18 November 2021 Rp4.000.000 42) Kerinci NTPN : F73B55DEE2Q0E4N tanggal 13 Desember 2021 Rp762.000 43) Kerinci NTPN : 5AB8B3CIE0U6AFIN tanggal 15 Desember 2021 Rp58.000.000 44) Kota Sungai Penuh NTPN : A896D1JNF3PDHABD tanggal 14 Desember 2021 Rp1.680.000 45) Kerinci NTPN : 2FD0F0N9V943DCVQ tanggal 16 November 2021 Rp4.200.000													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							46) Kerinci NTPN : A0F81JNF3MFQD55 tanggal 16 November 2021 Rp500.000 47) Kerinci NTPN : E0C11JNF3MFQD7B tanggal 16 November 2021 Rp500.000 48) Kerinci NTPN : DFOC12G4UU8S7D9S tanggal 16 November 2021 Rp420.000											
							49) Kerinci NTPN : 95C677QLTTNKDPLC tanggal 30 November 2021 Rp1.778.000 50) Kerinci NTPN : DC1E73CIEORMCOT5 tanggal 30 November 2021 Rp1.500.000 51) Kerinci NTPN : 50F6761QU81G1EA6 Tanggal 18 November 2021 Rp2.100.000 52) Kerinci NTPN : FBE398N3DO9L8FQN tanggal 18 November 2021 Rp1.300.000 53) Jawa Barat NTPN : 18AEC6U8E34D5GUK tanggal 3 November 2021 sebesar Rp8.312.500.00 Jawa Timur sebesar Rp18.240.000,00 dengan rincian 54) Rp4.560.000,00 NTPN 9A0D961QU807LTN0 tgl 7/5/2021 55) Rp4.560.000,00 NTPN B87O08N3DNN08SUU5 tgl 7/5/2021 56) Rp4.560.000,00 NTPN: CE10955DEDEA1GGL tgl 21/5/2021 57) Rp4.560.000,00 NTPN 2B01B0U8E2J2ROK0 tgl 21/5/2021 58) Kalimantan Timur Rp7.150.000,00 NTPN : A16232G4UTN3KH03, tgl 20/5/2021 Telah disetor ke kas negara sebesar : 59. Provinsi Kalsel Rp34.020.000,00 NTPN 9BD691JNP347B4R7 tgl 3/5/2021 60. Banjarbaru Rp14.562.500,00 NTPN 85C468N30NN9N97VN tgl 3/5/2021 61. Tapin Rp13.652.500,00 NTPN 9C7D655DEDDG37UL tgl 3/5/2021 62. HSS Rp20.412.500,00 NTPN 0842A1JNF34F6QT tgl 3/5/2021 63. HSU Rp10.355.000,00 NTPN 068D56U8E2IGT7FD tanggal 3/5/2021											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb						
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							64. Balangan Rp1.455.000 NTPN B52D3CIE08V97EL tgl 3/5/2021 65. Tabalong Rp20.710.000,00 NTPN 7102C1JNF347EVVB tgl 3/5/2021 66. Tanah Laut Rp6.365.000,00 NTPN 5AF7055DEDDO37BT tgl 3/5/2021													
							67. Kotabaru Rp5.130.000,00 NTPN B87D17QLTT4TA7F0 tgl 3/5/2021 68. Barito Koala Rp10.070.000,00 NTPN DAF8061QU804G7GA tgl 33/5/2021 69. HST Rp17.250.000,00 NTPN 84A8E6U8E2IGT7V1 tgl 4/5/2021 70. Banjar Rp27.600.000,00 NTPN FP90A1JNF347E469 tgl 3 Mei 2021 71. HSU Rp24.765.000,00 NTPN 169C31JNF346F7KR tgl 3 Mei 2021 72. Tanah Bumbu Rp33.487.500,00 NTPN 73F2D61QU804G7GK tgl 3 Mei 2021 73. Barito koala Rp33.950.000,00 NTPN 04CDE7QLTT4TA7JQ tgl 3 Mei 2021 74. Halmahera Selatan Rp3.705.000,00 NTPN FFD8661OUB3CSKUK Tgl 11/6/2021 75. Halmahera Barat Rp9.100.000,00 NTPN 107F43CIEOC6KMQB tgl 11/6/2021 76. Halmahera Selatan Rp11.200.000,00 NTPN FFD8661OUB3CSKUK Tgl 11/6/2021 77. Halmahera Barat Rp32.125.000,00 NTPN 107F43CIEOC6KMQB tgl 11/6/2021 Provinsi Sulawesi Selatan Rp20.250.000,00 dengan rincian 78) Rp3.420.000 NTPN C3DA71JNF37HT8HP tgl 14/5/2021 79) Rp3.366.000,00 NTPN 630D42G4UTPVES60 Tgl 16/5/2021 80) Rp3.366.000,00 NTPN 37C2055DEDH4LS05 81) Rp10.098.000 327853CIEOCGV4N tanggal 21 juni 2021 Provinsi Sulawesi Utara Rp85.949.500,00 dengan rincian 82) NTPN 2684948VUIP6SHES Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.525.000 83) NTPN 2D4720N9V8FLRHG0 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.950.000													

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							84) NTPN 57A0348VUIP6SID6 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp3.187.000 85) NTPN DC8280N9V8FL9TR2 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp1.900.000 86) NTPN DF33A55DEDPJC3LH Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.700.000											
							87) NTPN 5392C55DEDBJ9HE9 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.700.000 88) NTPN 108941JNF321LHDH Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp8.925.000 89) NTPN E0EF28N3DNL50CP7 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.700.000 90) NTPN AE0586UBE2GC4PBR Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp1.700.000 91) NTPN 390198N3DNL502PP Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.700.000 92) NTPN 1EDB23CIE08U9MHL Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp2.550.000 93) NTPN E261BJNF3210419 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp5.200.000 94) NTPN 280068N3DNL4U09R Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp1.900.000 95) NTPN 838AF2GTOPCB3BTN Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp3.187.500 96) NTPN 28A3C2G4UTPCE3GO Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp2.550.000 97) NTPN B867C7QLTT20B221 Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp3.825.000 98) NTPN 695B55DEDBJBHLJ Tgl 30-Apr-21 Senilai Rp1.700.000 99) NTPN E5AAA6U8E2J91HJT Tgl 28 Mei 2021 Senilai Rp2.550.000 100) NTPN EB5CE6U8E2S6EU35 tgl 26 Agustus 2021 sebesar Rp500.000 101) NTPN 701880n9s8I90su sebesar Rp1.900.000 102) NTPN CB92E7QLTTSMENC4 tgl 2 Juni 2021 senilai Rp5.100.000 103) NTPN C42506U8E31JLHB TGL 7 Oktober 2021 senilai Rp1.200.000,00 104) NTPN B2B181JNF3JELCP1 tgl 14 Oktober 2021 senilai Rp.900.000 105) NTPN 4F9DC1JNF3GTUIS1 tgl 30 September 2021 senilai Rp1.000.000 106) NTPN DD6243CIE06QHMSN 30 April 2021 senilai Rp1.900.000											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							107) NTPN BD88048VU10T4J12 TANGGAL 19/4/2021 senilai Rp6.785.000 108) Kota Bitung NTPN 41ASA61QU83AQB96 tanggal 9 Juni 2021 senilai Rp9.000.000,00 Minahasa Tenggara 109) NTPN 0C6FF2G4UTNF2DHO tgl 2 Juni 2021 senilai Rp19.475.000												
							110) NTPN BA8D61JNF34VUBR TGL 11 Oktober 2021 senilai Rp5.000.000 111) NTPN BFAF8GUSE2UQC2PF TGL 20 September 2021 senilai Rp3.562.500 112) NTPN EC2DC2G4UU5HCUCQ TGL 11 Oktober 2021 senilai Rp5.000.000 113) NTPN DE82F8N3DO3J6337 TGL 20 September 2021 senilai Rp3.562.500 114) NTPN 259600N9V900IUDC tgl 11 oktober 2021 senilai Rp2.850.000 Kabupaten Talaud 115) NTPN 2C22761QU80L8K4O TANGGAL 19/05/2021 RP500.000 116) NTPN 6E4D53CIE09G1KJB TANGGAL 19/05/2021 RP500.000 117) NTPN 8B0A70N9V8HUMAKA TANGGAL 7/5/2021 RP1.750.000 118) NTPN 9DD0E6USE2J1LM13 TANGGAL 19/05/2021 RP500.000 119) NTPN 26DCB1JNF34N7IQN TANGGAL 19/5/2021 RP2.400.000 120) NTPN 52E0561QU80L8KN6 TANGGAL 19/5/2021 RP1.400.000 121) NTPN 57B0F1JNF37RBOQR TANGGAL 25/6/2021 RP6.000.000 122) NTPN 57EEE61QU80L8N7G TANGGAL 19/5/2021 RP500.000 123) NTPN 79A313CIE09G1KDN TANGGAL 19/5/2021 RP1.500.000 124) NTPN 8439D3CIE093TOCT TANGGAL 7/5/2021 RP2.500.000 125) NTPN 533707QLTT8I6RB2 TANGGAL 25/6/2021 RP2.500.000 126) NTPN 5518448VUIRSEK92 TANGGAL 19/5/2021 RP2.250.000 127) NTPN A9D498N3DNNQFLMH TANGGAL 19/5/2021 RP2.900.000 128) NTPN AAB077QLT5E2JPS TANGGAL 19/5/2021 RP500.000 129) NTPN C62F96U8E2J1LN0B TANGGAL 19/5/2021 RP900.000												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							130) NTPN DDD3261QU83PCPN4 TANGGAL 25/6/2021 RP1.000.000 131) NTPN E6AA46UE2J0L05J TANGGAL 19/5/2021 RP2.500.000 132) NTPN E58FB55DEDESRMGV TANGGAL 19/5/2021 RP1.400.000 133) NTPN E57452G4UTQ8PMNS TANGGAL 25/6/2021 RP1.750.000												
							134) NTPN EBBCA0N9V8IAQMNM TANGGAL 19/5/2021 RP1.400.000 135) NTPN F12AS1JNF34N7JAB TANGGAL 19/5/2021 RP2.000.000 Kota Manado 136) NTPN 79E786U8E2GC4P2N tgl 30/4/2021 senilai Rp712.500 137) NTPN 958EA7QLTT20HN8N tgl 30/4/2021 senilai Rp712.500 138. Kab Sitiro NTPN CE14848VUIP6TPUQ tgl 30 April 2021 senilai Rp61.987.500 Kab Bolaang Mongondow Utara 139) NTPN 1C2C355DEDH3KVFH tgl 16 Juni 2021 sebilai Rp2.000.000 140) NTPN A67F22G4UTR tgl 16 Juni 2021 senilai Rp4.275.000 141) NTPN 378478N3DNOSSJPP tgl 2 Juni 2021 senilai Rp11.875.000 142) NTPN 848EB2G4UTSMVN9Q TGL 7 Juli 2021 senilai 8.410.000,00 Kab Bolaang Mongondow Selatan 143) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp712.500,00 144) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp200.000,00 145) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp200.000,00 146) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp200.000,00 147) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp200.000,00 148) NTPN 5C0DA0N9V8U4HB14 senilai Rp200.000,00 149) NTPN 1425B1JNF3GNDU2L tanggal 22 September 2021 senilai Rp1.187.500,00 150. Minahasa NTPN 450D68N3DO6HUS8V tgl 15 Oktober 2021 senilai Rp16.500.000,00 151. Bolaang Mongondow NTPN 7D3030N9V8FK7HRM Tanggal 29 April 2021 sebesar Rp7.125.000,00 152. Minahasa Selatan D2BE48VUIP5R12A tanggal 29 April 2021 senilai Rp5.325.000,00												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							Kota Tomohon 153) NTPN CB9272B4UTMJD18 tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp6.650.000,00 154) NTPN D723B3CIEOJRHET tgl 26/08/2021 senilai Rp6.650.000 155) NTPN 732126U8E2S5FL21 TGL 26/08/2021 SENILAI Rp2.250.000 156) NTPN F27077QLTTEHSL06 tgl 26/08/2021 senilai Rp3.600.000												
							157) NTPN 018942G4UTQ7PF7E tgl 28/06/2021 senilai Rp2.850.000 158) NTPN 712D52G4UTK6ODGA TANGGAL 16/4/2021 RP2.137.500 159. Kota Bitung NTPN 373C63CIEOC5JAHB tanggal 9 Juni 2021 senilai Rp11.400.000 Kab Minahasa Utara 160) NTPN 7268D8N3DNQVLI8D tgl 25 Juni 2021 senilai Rp2.137.500,00 161) NTPN 89ADA61QU83QEJFC tgl 25 Juni 2021 senilai Rp3.562.500,00 162) NTPN 1E5FC7QLT8J8HU2 tgl 25 Juni 2021 senilai Rp2.137.500,00 163) NTPN D54347QLT8J8HHS tgl 25 Juni 2021 senilai Rp712.500,00 164) NTPN 920F348VILUV1KH90 tgl 25 Juni 2021 senilai Rp712.500,00 165) NTPN 3D3248VUJA80RPO tgl 1 Oktober 2021 senilai Rp3.087.000 Kota Kotamobagu 166) NTPN 42C196QU7IMRIE tanggal 20 April 2021 sebesar Rp1.425.000,00 167) NTPN: 4DB5D1INF31O4KED tanggal 20 April 2021 sebesar Rp750.000,00 168) NTPN BF9398N3DO3QL17P tanggal 23 September 2021 sebesar Rp4.892.500,00 Kota Manado 169) NTPN 9EBB910NF321M55V tgl 30/4/2021 senilai Rp6.650.000 170) NTPN F26582G4JTK3HH3 tgl 30/4/2021 senilai Rp4.275.000 171) NTPN D75832G4UTKE3PI2 tgl 30/4/2021 senilai Rp1.425.000 172) NTPN 6EB1D48VUIP6UP7E tgl 30/4/2021 senilai Rp1.425.000 173) NTPN C12F56U8E2GCSR BV tgl 30/4/2021 senilai Rp1.100.000 174) NTPN FD15648VUIP6U50G tgl 30/4/2021 senilai Rp1.100.000												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb.			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							175) NTPN A107461QUGUC47TA 11/01/2021 senilai Rp4.750.000 176) NTPN 58C9F6U8EBGOH82L 12/01/2021 senilai Rp3.325.000										
							Kabupaten Sangihe 177) NTPN 0F10E1JNF3711DNU TGL 16/6/2021 Rp1.425.000 178) NTPN 1F6F86U8E2LSF59R TGL 16/6/2021 Rp20.187.500 179) NTPN 6E7810N9V8L5K8N0 TGL 16/5/2021 Rp1.500.000 180) NTPN 58DDE6U8E2LSFA47 TGL 16/6/2021 Rp3.562.500 181) NTPN 5030B48VUIUN867O TGL 16/6/2021 Rp10.687.500 182) NTPN 0772755DEDH3L6GH TGL 16/6/2021 Rp13.537.500 183) NTPN 85801JNF3711DFR TGL 16/6/2021 Rp4.987.500 184) NTPN 89051JNF371176T TGL 16/6/2021 Rp4.987.500 185) NTPN 1825448VUIUN8AMI TGL 16/6/2021 Rp3.562.500 186) NTPN 4725148VUIUN89QE TGL 16/6/2021 Rp2.562.500 187) NTPN 9022155DEDH3LAU3 TGL 16/6/2021 Rp4.987.500 188) NTPN A768555DEDH3L6ND TGL 16/6/2021 Rp14.250.000 189) NTPN AASC52G4UTPUE728 TGL 16/6/2021 Rp712.500 190) NTPN AA0330N9V8L5K7OC TGL 16/6/2021 Rp3.562.500 191) NTPN C0BD3JNF3711D6P TGL 16/6/2021 Rp1.425.000 192) NTPN DA0EC7QLT88S9KK TGL 16/6/2021 Rp4.987.500 193) NTPN F6092JNF3711CU1 TGL 16/6/2021 Rp4.987.500 194) NTPN FD6C17QLT88S7TK TGL 16/6/2021 Rp4.275.000 195) NTPN FE35B2G4UTPUE8UI TGL 16/6/2021 Rp1.000.000										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	1	219.581.676,00	<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) KPA satker Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah,</p> <p>Bawaslu Pusat dan Sulawesi Utara yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pembayaran biaya perjalanan dinas serta tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terkait pembayaran biaya perjalanan dinas;</p> <p>2) BP dan BPP pada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagal, Mojokerto, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Tuban, Lamongan, Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung,</p> <p>Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Biro TP3 terkait yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas;</p> <p>3) PPK pada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagal, Mojokerto, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Tuban, Lamongan, Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung,</p>	1	-	<p>PTL Sem II Tahun 2021</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada :</p> <p>1. KPA Bawaslu Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2331.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>2. KPA Bawaslu prov Sumatera Utara sesuai dengan surat No 2327.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>3. KPA Bawaslu Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2327.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>4. KPA Bawaslu Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2327.F/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>Sanksi kepada BPP:</p> <p>1. BPP Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2331.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>2. BPP Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2331.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>3. BPP Kab Minahasa Selatan sesuai dengan surat No 2330.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>4. BP Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2312.E/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>5. BP Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2312.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>6. BP Kota Bitung sesuai dengan surat No 2312.M/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>7. BP Kab Serdang Bedagal sesuai dengan surat No 2312.N/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>8. BP Kab Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan surat No 2312.O/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>9. BP Kab Mojokerto sesuai dengan surat No 2312.P/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>10. BP Kab Ponorogo sesuai dengan surat No 2312.R/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>11. BP Kota Kediri sesuai dengan surat No 2312.S/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>12. BP Kab Tuban sesuai dengan surat No 2312.T/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p> <p>13. BP Kab Situbondo sesuai dengan surat No 2313.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021</p>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg terdapat					
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Biro TP3 yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran biaya perjalanan dinas, serta tidak menaati ketentuan-ketentuan terkait biaya perjalanan dinas;			14. BP Kab Lamongan sesuai dengan surat No 2313.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 15. BP Kota Surabaya sesuai dengan surat No 2313.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 16. BP Kota Pasuruan sesuai dengan surat No 2313.D/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 17. BPP Kota Bitung sesuai dengan surat No 2313.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021												
				4) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.			18. BPP Kab Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan surat No 2313.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 19. BPP Kab Serdang bedagai sesuai dengan surat No 2313.I/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 20. BPP Kab Mojokerto sesuai dengan surat No 2313.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 21. BPP Kab Ponorogo sesuai dengan surat No 2313.K/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 22. BPP Kota Kediri sesuai dengan surat No 2313.L/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 23. BPP Kab Situbondo sesuai dengan surat No 2313.M/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 24. BPP Kab Tuban sesuai dengan surat No 2313.N/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 25. BPP Kab Lamongan sesuai dengan surat No 2313.O/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 26. BPP Kota Pasuruan sesuai dengan surat No 2313.P/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 27. BPP Kota Surabaya sesuai dengan surat No 2313.Q/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 Sanksi kepada PPK : 1. PPK Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2331.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. PPK Kab Minahasa Selatan sesuai dengan surat No 2330.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. PPK Prov Sulawesi Utara sesuai dengan surat No 2330.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. PPK Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan surat No 2311.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Memerintahkan KPA Bawaslu Pusat, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah untuk menginstruksikan PPK menyetorkan ke kas negara sebesar Rp174.646.676,00	1	174.646.676,00	PTL Sem II Tahun 2021 Telah disetorkan ke Kas Negara sebesar : 1. Minahasa Selatan Rp12.910.000 dengan NTPN C103561QU7TVOHMF tgl 30/4/2021 2. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp85.496.676,00 dengan rincian : 1. Rp1.800.000 NTPN 645B96U8E2GB2TH1 2. Rp2.360.000 NTPN EFCEFF2G4UTKD1GKM 3. Rp840.000 NTPN 7DD1848VUIP5RGC 4. Rp360.000 NTPN 911A68N3DNL3SIAR 5. Rp680.000 NTPN 4179A7QLTT2OHQNK 6. Rp512.000 NTPN 527A655DEDB9161 7. Rp5.980.000 NTPN D57B3N3DNL503QL 8. Rp6.872.000 NTPN 0097948VUIP6V534 9. Rp512.000 NTPN 12B1761QU77VNS06	1	117.672.676	1	56.974.000,00								162.607.676,00
							10. Rp3.710.000 NTPN 93DF548VUIP6S144 11. Rp2.200.000 NTPN F52FC8N3DNL3SGTB 12. Rp400.000 NTPN 633DE3CIE06PFD6F 13. Rp5.364.000 NTPN 0891A3CIE06P9P3 14. Rp1.012.000 NTPN F08C40N9V8FK7DAC 15. Rp1.283.676 NTPN 4581A8N3DNL3SC1N 16. Rp512.000 NTPN 5739D8N3DNL3TFLN 17. Rp1.832.000 NTPN AA1DA7QLTT2NGDDG 18. Rp680.000 NTPN 2797148VUIP5RIR2 19. Rp2.035.000 NTPN F5AA18N3DNL3SDTD 20. Rp360.000 NTPN CDD1B48VUIP5R45M 21. Rp840.000 NTPN 407613CIE06PEFDV 22. Rp340.000 NTPN CDABE48VUIP5RIFQ 23. Rp2.360.000 NTPN 2351461QU7TUL9K 24. Rp2.540.000 NTPN F117455DEDB18DJT 25. Rp3.580.000 NTPN 5ACD41JNF32103G3 26. Rp300.000 NTPN 9CEFB2G4UTKE4BVK 27. Rp300.000 NTPN AA1C32G4UTKE4C10 28. Rp1.364.000 NTPN B70512G4UTKDOQRG tgl 1/5/2021 29. Rp1.012.000 NTPN 54793608E2GB1RAB tgl 2/5/2021 30. Rp1.800.000 NTPN B8DF46U8E2GC4K4L 31. Rp960.000 NTPN C33037608E2GB2BA6 32. Rp1.200.000 NTPN DB3A54VUIP5RBT0 33. Rp1.536.000 NTPN FBA3C7QCTI2OIAAN 34. Rp4.860.000 NTPN CB79CJNF3477H9 tgl 10/5/2021 35. Rp5.700.000 NTPN 85BE81JNF34E76TJ tgl 11/5/2021 36. Rp6.420.000 NTPN 6985A7QLTTSD1AP8 tgl 18/5/2021 3. Kota Bitung sebesar Rp12.944.000,00 NTPN ADC777QLTT83K9AO tanggal 9 Juni 2021 4. Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.080.000 dengan rincian 4.1. Rp5.700.000,00 NTPN E0EF28N3DNL50CP7 tgl 3 Mei 2021 4.2. Rp5.380.000 NTPN C260548VUIRREMHE tanggal 19 Mei 2021 5. Setoran Rp4.287.500,00 NTPN FAE611JNF3GGUCAD tgl 15/9/2021 6. Setoran Rp2.034.500,00 NTPN A53AE61QU8CLET81 tgl 22/9/2021												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah				
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Kekurangan Volume pada Tiga Paket Pekerjaan dan Penerimaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi pada Satu Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp323.695.870,00	1	323.695.870,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pada Biro Administrasi dan Biro TP3 serta Kepala Bagian Umum selaku Pengawas Pekerjaan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak	1	-	PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada : 1. Sdr La Bayoni sebagai PPK Biro TP3 sesuai dengan surat No 2315.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. Sdr Bashory sebagai PPK Biro Administrasi sesuai dengan surat No 2315.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. Sdr Watiaji sebagai Kepala Bagian Umum dan pengawas pekerjaan sesuai dengan surat No 2315.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021	1										
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Memerintahkan rekanan PT DCA untuk menyetorkan ke kas negara sebesar Rp143.530.820,00	1	143.530.820,00	PTL sem II Tahun 2021 : Telah disetor ke kas negara sebesar : 1. Rp49.903.952,00 tgl 20/8/2021 NTPN B44066U8E2RV5R09 2. Rp29.834.950,00 tgl 9/9/2021 NTPN 12AB17QLTTGSSJV6 3. Rp55.244.000,00 tgl 20/8/2021 NTPN CAB9B6U8E2RV5R7N 4. Rp14.921.050,00 tgl 20/8/2021 NTPN 72C3A2G4U014RGA	1	143.530.820									323.695.870,00
6	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Tidak Tertib	1	273.128.799,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk memproses kerugian negara melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan sesuai ketentuan	1	-	PTL Sem II Tahun 2021 : 1) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Mei 2021, senilai Rp10.000.000, STS No: 5.02.04/LAIN/V/2021 2) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 16 Juni 2021, senilai Rp5.000.000, STS No: 5.02.04/LAIN/VI/2021 3) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Juli 2021, senilai Rp13.000.000, STS No: 5.02.04/LAIN/VII/2021 4) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2021, senilai Rp7.000.000, STS No: 5.02.04/LAIN/VIII/2021 5) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Agustus 2021, senilai Rp4.000.000, STS No: 5.02.04/LAIN/VIII/2021 6) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 1 November 2021, senilai Rp5.000.000, STS No: 5.02/LAIN/XI/2021 7) Telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 November 2021, senilai Rp22.900.000, STS No: 5.02/LAIN/XI/2021	1										252.099.021,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) BPP Bawaslu Kota Manado, Bitung, Kabupaten Situbondo, Minahasa Utara, Nabire, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Cianjur, yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan penatausahaan kas sesuai ketentuan; 2) Kasek Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan	1		PTL Sem 2 Tahun 2021 Telah diindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada : 1. BPP Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2331.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. BPP Kab Situbondo sesuai dengan surat No 2313.M/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. BPP Kota Manado sesuai dengan surat No 2313.R/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. BPP Kab Sorong Selatan sesuai dengan surat No 2313.S/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 5. BPP Kab Nabire sesuai dengan surat No 2313.T/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. BPP Kota Bitung sesuai dengan surat No 2313.G/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 Sanksi kepada Kasek : 1. Korsek Kab Cianjur sesuai dengan surat No 2314.J/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. Korsek Kab Sorong Selatan sesuai dengan surat No 2314.K/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021	1									
			yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah; 3) Kasek Bawaslu Kabupaten Situbondo selaku atasan langsung BPP serta Kasek Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang lalai dalam melaporkan kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui; 4) KPA Satker Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah.			Sanksi kepada Kasek: 1. Korsek Kab Situbondo sesuai dengan surat No 2314.L/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. Kasek Prov Jawa Timur sesuai dengan surat No 2314.O/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 Sanksi kepada KPA : 1. KPA Bawaslu Prov Papua sesuai dengan surat No 2329.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. KPA Bawaslu prov Sulawesi Tenggara sesuai dengan surat No 2329.H/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. KPA Bawaslu Prov Jawa Barat sesuai dengan No 02331.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	Pemungutan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak pada Bendahara Pengeluaran Belum Tertib	1	252.041.488,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Memerintahkan BPP pada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Manokwari untuk menyetorkan ke kas negara senilai Rp47.022.973,00 dan Rp195.038.060,00	1	242.061.033,00	PTL Sem 2 Tahun 2021: PTL Sem 2 Tahun 2021: Sudah ditindaklanjuti sebesar Rp13.873.000,00 dengan rincian: 1. Rp1.440.000,00 NTPN Nomor 2387E4EQF1M1SN8J Tanggal 8 Juni 2021 2. Rp80.000,00 NTPN Nomor 37FE280GHA5MSHCR Tanggal 8 Juni 2021 3. Rp80.000,00 NTPN Nomor 47A0367LHL11HE9P Tanggal 8 Juni 2021 4. Rp1.384.000,00 NTPN Nomor E550B67LEMR9MKND Tanggal 8 Juni 2021 5. Rp60.000,00 NTPN Nomor E550B67LEMR9MKND Tanggal 8 Juni 2021 6. Rp72.500,00 NTPN Nomor 045A21PI2G53VFO6 Tanggal 8 Juni 2021 7. Rp52.500,00 NTPN Nomor 8582B67LHL12TKCD Tanggal 8 Juni 2021 8. Rp72.500,00 NTPN Nomor DD3B54EQHV56HMRP Tanggal 8 Juni 2021 9. Rp60.000,00 NTPN Nomor B0D2E5B81QEJCH3M Tanggal 8 Juni 2021 10. Rp52.500,00 NTPN Nomor 15E253D259RGH5G Tanggal 8 Juni 2021	9	20.195.000	1	221.866.033,00								30.175.455,00
							11. Rp180.000,00 NTPN Nomor 7B01F3ID27G1U13G Tanggal 25 Juni 2021 12. Rp80.000,00 NTPN Nomor 5A5284EQI21TQ67V Tanggal 25 Juni 2021 13. Rp72.500,00 NTPN Nomor DA61F1PI2IAOPR3E Tanggal 25 Juni 2021 14. Rp60.000,00 NTPN Nomor 8CEFC00N2T604DIS Tanggal 25 Juni 2021 15. Rp52.500,00 NTPN Nomor A8C9A2LVICT5FN7L Tanggal 25 Juni 2021 16. Rp80.000,00 NTPN Nomor BCAS40T4INOQV50V Tanggal 25 Juni 2021 17. Rp72.500,00 NTPN Nomor 0EF614EQI22CQ5L7 Tanggal 25 Juni 2021 18. Rp60.000,00 NTPN Nomor 277553ID27G0HQVK Tanggal 25 Juni 2021 19. Rp52.500,00 NTPN Nomor BCE710T4INORFQ5J Tanggal 25 Juni 2021 20. Rp80.000,00 NTPN Nomor 9360867LHN6D3G6P Tanggal 25 Juni 2021 21. Rp72.500,00 NTPN Nomor 014FE7431HOPU07K Tanggal 25 Juni 2021 22. Rp60.000,00 NTPN Nomor 788C100N2T5T6MG8 Tanggal 25 Juni 2021 23. Rp52.500,00 NTPN Nomor 047FF2LVICT2MKM5 Tanggal 25 Juni 2021 24. Rp80.000,00 NTPN Nomor 4884D4EQI220MO3B Tanggal 25 Juni 2021 25. Rp72.500,00 NTPN Nomor B0FB0T4INOFMEUN Tanggal 25 Juni 2021												

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							26. Rp60.000,00 NTPN Nomor 691633D27FLE580 Tanggal 25 Juni 2021 27. Rp52.500,00 NTPN Nomor 2C3503D27FLQDPS Tanggal 25 Juni 2021 28. Rp80.000,00 NTPN Nomor ED75C1PI2I9RM2NM Tanggal 25 Juni 2021 29. Rp72.500,00 NTPN Nomor 82B745B81SJEFTUU Tanggal 25 Juni 2021 30. Rp60.000,00 NTPN Nomor 3BP9A00N2T55CA2K Tanggal 25 Juni 2021 31. Rp52.500,00 NTPN Nomor 15A8E2LVICSAP9HT Tanggal 25 Juni 2021 32. Rp80.000,00 NTPN Nomor 62A0A2LVICSEMEC9 Tanggal 25 Juni 2021 33. Rp72.500,00 NTPN Nomor 09A1B1PI2IA2I9JM Tanggal 25 Juni 2021 34. Rp60.000,00 NTPN Nomor ACD2800N2T59VSMC Tanggal 25 Juni 2021 35. Rp52.500,00 NTPN Nomor 30DC30T4INNMAHF Tanggal 25 Juni 2021										
							36. Rp80.000,00 NTPN Nomor 9E6BB4EQI2IBJRGN Tanggal 25 Juni 2021 37. Rp72.500,00 NTPN Nomor D30373D27EVD4L8 Tanggal 25 Juni 2021 38. Rp60.000,00 NTPN Nomor OC1350T4INNQNEAV Tanggal 25 Juni 2021 39. Rp52.500,00 NTPN Nomor 7BCC300N2T5EEH8K Tanggal 25 Juni 2021 40. Rp80.000,00 NTPN Nomor 03D5974IHOKMSLO Tanggal 25 Juni 2021 41. Rp72.500,00 NTPN Nomor 7E43967LHN683A6T Tanggal 25 Juni 2021 42. Rp60.000,00 NTPN Nomor 10B9C4EQI21F3SDJ Tanggal 25 Juni 2021 43. Rp52.500,00 NTPN Nomor 57C204EQI21EU1VB Tanggal 25 Juni 2021 44. Rp80.000,00 NTPN Nomor B180F3D27FTST5K Tanggal 25 Juni 2021 45. Rp72.500,00 NTPN Nomor C914DOT4INOOCLBJ Tanggal 25 Juni 2021 46. Rp60.000,00 NTPN Nomor A8DD400N2T6BDVTG Tanggal 25 Juni 2021 47. Rp52.500,00 NTPN Nomor 94A98743IHPECDAG Tanggal 25 Juni 2021 48. Rp80.000,00 NTPN Nomor ED1DC4EQI224L61V Tanggal 25 Juni 2021 49. Rp72.500,00 NTPN Nomor C7E964EQI22542L7 Tanggal 25 Juni 2021 50. Rp60.000,00 NTPN Nomor 9FAB480GHCBN5DAF Tanggal 25 Juni 2021										

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							51. Rp52.500,00 NTPN Nomor 0A3A01P21B0HVJ2 Tanggal 25 Juni 2021 52. Rp80.000,00 NTPN Nomor EB7B03ID57KNHJ50 Tanggal 16 Juli 2021 53. Rp72.500,00 NTPN Nomor 83B9A4EQL274TEF Tanggal 16 Juli 2021 54. Rp60.000,00 NTPN Nomor FE9BC3ID57KO191K Tanggal 16 Juli 2021 55. Rp52.500,00 NTPN Nomor C63DE0T4LNTIV7BF Tanggal 16 Juli 2021 . 56. Rp80.000,00 NTPN Nomor 6BD6E4EQL272BVUB Tanggal 16 Juli 2021 57. Rp72.500,00 NTPN Nomor 135555B84SPF3MM6 Tanggal 16 Juli 2021 . 58. Rp60.000,00 NTPN Nomor 211987434HU84S90 Tanggal 16 Juli 2021 59. Rp52.500,00 NTPN Nomor D84010T4LNTHFUJV Tanggal 16 Juli 2021 60. Rp80.000,00 NTPN Nomor E887880GKCGONSU3 Tanggal 16 Juli 2021											
							61. Rp72.500,00 NTPN Nomor 8D92080GKCGP3T27 Tanggal 16 Juli 2021 62. Rp60.000,00 NTPN Nomor AFD67434HUCTMQK Tanggal 16 Juli 2021 63. Rp52.500,00 NTPN Nomor 32F0867LKNCO0749 Tanggal 16 Juli 2021 64. Rp80.000,00 NTPN Nomor CA63180GKCGQTVEV Tanggal 16 Juli 2021 65. Rp72.500,00 NTPN Nomor D1B3B67LKN29M4H Tanggal 16 Juli 2021 . 66. Rp60.000,00 NTPN Nomor D8D2067LKN2C86P Tanggal 16 Juli 2021 67. Rp52.500,00 NTPN Nomor C210B4EQL279LQB7 Tanggal 16 Juli 2021 68. Rp300.000,00 NTPN Nomor 19DDF31D8EG7G4B8 Tanggal 30 September 2021 69. Rp1.600.000,00 NTPN Nomor 53CB91P8PBCV5II Tanggal 30 September 2021 70. Rp270.000,00 NTPN Nomor 0C75D80GNCSSJIB Tanggal 30 September 2021 . 71. Rp1.696.000,00 NTPN Nomor DD3341P8PBE3NCA Tanggal 30 September 2021 72. Rp270.000,00 NTPN Nomor 74CDD80GNCJUFJR Tanggal 30 September 2021 . 73. Rp300.000,00 NTPN Nomor 21C5067LNU7FEH60 Tanggal 30 September 2021 74. Rp675.000,00 NTPN Nomor C22B11P8PBDIMHU Tanggal 1 Oktober 2021 75. Rp180.000,00 NTPN Nomor 8741867LNU7H9DVH Tanggal 30 September 2021											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yg tsb				
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							76. Rp288.000,00 NTPN Nomor 6892P00N9460VGP0 Tanggal 30 September 2021 77. Rp300.000,00 NTPN Nomor E3H375B883L60112 Tanggal 1 Oktober 2021 78. Rp270.000,00 NTPN Nomor 77F2D74370PV39G4 Tanggal 1 Oktober 2021 79. Rp300.000,00 NTPN Nomor B8B8C0T4OUOV0RCB Tanggal 30 September 2021 80. Rp180.000,00 NTPN Nomor 421C12LV0JTOB10P Tanggal 1 Oktober 2021 Sulawesi Utara 1. NTPN A53AE61U8CLET81 senilai Rp2.034.500 2. NTPN FAE611JNFSGGUCAD senilai Rp 4.287.500											
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) BPP Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Seruyan, dan Kotawaringin Barat yang lalai dalam melakukan pemungutan/pemotongan pajak; 2) BPP Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang lalai dalam mencatat dan menyetorkan pajak; 3) BPP pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang lalai dalam melakukan pelaporan SPT; 4) PPK pada Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Pangkajene Kepulauan,	1	- PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi disiplin kepada 1. BPP Prov Sulawesi Selatan sesuai dengan surat No 2314.A/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 2. BPP Kab Pangkajene sesuai dengan surat No 2314.B/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. BPP Kab Seruyan sesuai dengan surat No 2314.C/KP.08.03/SJ/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 4. BPP Kab Kotawaringin Barat sesuai dengan surat No	1											

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2020

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah (Rp)
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Seruyan, dan Kotawaringin Barat yang tidak optimal dalam memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pengeluaran;													
				5) PPSM Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah yang tidak cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.													
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: c. Memerintahkan BP dan BPP pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.	1		PTL Sem II Tahun 2021 Telah ditindaklanjuti dengan Surat sekretaris Jenderal No 0405/KU.02/DJ/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 ditujukan kepada Kepala Sekretariat Prov Sulawesi Utara	1									
	Jumlah	7	5.885.026.331,00	Jumlah	17	3.928.242.941,00	Jumlah	9	1.844.852.896,00	6	2.083.390.045,00	2		-	0	-	3.780.606.508,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemutakhiran Sistem Informasi Aplikasi Belum Menyelesaikan Permasalahan Data Anomali dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2021	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar melaksanakan koordinasi lebih intensif dengan Dijen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk penyempurnaan aplikasi dalam penyusunan Laporan Keuangan.	1	0,00							1					
2	Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Hibah Kurang Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal bekerja sama dengan Inspektoriat Utama agar merancang dan menerapkan manajemen risiko dan menetapkan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh untuk mengatasi kelemahan pengelolaan dana hibah.	1	0,00							1					
3	Terdapat Belanja Keperluan Perkantoran yang Tidak Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp66.341.000 Pada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu	1	66.341.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: a. KPA pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pembayaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya. b. PPK pada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pembayaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya. c. BPP pada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu yang lalai dalam melakukan pembayaran belanja keperluan perkantoran.	1	0,00							1					66.341.000,00
4	Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai dengan Standar Biaya Sebesar Rp22.515.000,00	1	22.515.000,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: a. KPA pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, dan NTB yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pembayaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya.	1	0,00							1					22.515.000,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)				
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Dindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				b.PPK pada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Kota Mataram, dan Bawaslu Kabupaten Bima yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas pembayaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya. c.BPP pada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kota Medan, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Kota Mataram, dan Bawaslu Kabupaten Bima lalai dalam melakukan pembayaran honorarium.															
5	Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah dan Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp335.974.650,00	1	335.974.650,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a.Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1.KPA pada Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pembayaran biaya perjalanan dinas; 2.BP pada Biro Fasilitasi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas; 3.BPP pada Bawaslu Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Lamongan yang tidak cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas; 4.PPK pada Biro Fasilitasi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan,	1	0,00							1						0,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Dimadukanjuti dengan alasan yang sah	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1				Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Lamongan yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran biaya perjalanan dinas, serta tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terkait biaya perjalanan dinas; dan 5. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.													
				b. Memerintahkan KPA Bawastu Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan untuk menginstruksikan PPK menyetorkan sisa belanja perjalanan dinas ke kas negara sebesar Rp110.322.700,00 yaitu: Tabel 13 Daftar Kekurangan Penyetoran Ke Kas Negara No. Urut dan Jumlah (Rp) 1. Bawastu Provinsi Kalimantan Selatan 102.620.000,00 2. Bawastu Kabupaten Banyuwangi 7.702.700,00 Total 110.322.700,00 sumber : hasil olahan	1	110.322.700,00		0,00		0,00	1	110.322.700,00		0,00		225.651.950,00	
6	Pengelolaan dan Pematusahaan Kas Tidak Tertib	1	0,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawastu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawastu untuk : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) BPP Bawastu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawastu Kabupaten Banjar, Bawastu Kabupaten Cianjur dan Bawastu Kota Depok yang tidak cermat	1	0,00											0,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml
1																
				dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan penatausahaan kas sesuai ketentuan; dan 2) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banjar, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah.												
				b. Memerintahkan Inspektorat Utama Bawaslu agar melakukan pemeriksaan atas kasus penjiangan dana hibah tahun 2021 antara Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Bawaslu Kota Depok.	1	0,00						1				0,00
7	Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib	1	6.466.603.486,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penyusun Laporan BMN Tingkat Kementerian/Lembaga yang tidak cermat dan tidak tertib melakukan input dan validasi dalam penyusunan Laporan BMN.	1	0,00						1				0,00
				b. Segera menyelesaikan dan menetapkan status keberadaan BMN yang tidak ditemukan senilai Rp6.466.603.486,00.	1	6.466.603.486,00			0,00		0,00	1	6.466.603.486,00	0,00		0,00
8	Pemungutan dan Penyetoran Pajak pada Bendahara Pengeluaran Belum Tertib	1	476.450.640,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk : a. Memerintahkan BPP di masing-masing satuan kerja untuk memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp390.224.665,00. b. Memerintahkan BPP di masing-masing satuan kerja untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp86.225.975,00.	1	390.224.665,00			0,00		0,00	1	390.224.665,00	0,00		0,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)		
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk : b. Memerintahkan BPP di masing-masing satuan kerja untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp86.225.975,00.	1	86.225.975,00			0,00		0,00	1	86.225.975,00		0,00		0,00
				c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP satker yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan.	1	0,00						1					0,00
				d. Memerintahkan KPA satker agar optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas ketentuan pajak.	1	0,00						1					0,00
	Jumlah	8	7.367.884.776,00	Jumlah	14	7.053.376.826,00	Jumlah	0	-	0	-	14	7.053.376.826,00	0	-		314.507.950,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)	
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml
1	3.1.Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Cukup dan Kompeten dalam Pengelola Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Memetakan kebutuhan personel dan pejabat pengelola keuangan yang memadai serta berkoordinasi lebih intensif dengan Menteri PANRB untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai Bawaslu tersebut dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024.	1	0,00					1				17	18
				BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Melakukan bimbingan dan sosialisasi serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi pengelola keuangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.	1	0,00					1					
2	3.2.Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Belum Sepenuhnya Efektif	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada, antara lain dengan mengatur: a. Format pembukuan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilkada Serentak yang mencantumkan kode akun atau mata anggaran sehingga memudahkan pengelompokan dalam pengesahan belanja yang bersumber dari hibah;	1	0,00					1					
				BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada, antara lain dengan mengatur: b. Tata cara pelaporan, pemantauan dan sanksi atas pelaksanaan revisi DIPA serta pengesahan belanja hibah;	1	0,00					1					

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan hibah pilkada, antara lain dengan mengatur: c. Standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pilkada Serentak dengan mencantumkan frekuensi dan volume kegiatan.	1	0,00						1						
3	3.3Pelaksanaan Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Belum Sepenuhnya Efektif	1	0,00	BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a. Menyempurnakan mekanisme pengelolaan dana hibah pilkada, dengan merinci tugas dan fungsi dan sanksi pada PPK dan PPSPM dalam melakukan verifikasi dan pengujian atas realisasi elanja yang Bersumber dari Hibah;	1	0,00						1						
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka transformasi digital dan digitalisasi dokumen pertanggungjawaban hibah di Bawaslu seluruh Indonesia;	1	0,00						1						
				BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: c. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi: 1) Pedoman Teknis Pengelolaan, Peraliran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kepada Satker-satker Bawaslu dan penganan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan; dan 2) Penggunaan Standar Biaya	1	0,00						1						

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Dindaklanjuti dengan alasan yang sah		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	3.4 Bawaslu belum Memiliki Aplikasi Terintegrasi dalam Pengelolaan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: a.Mengintegrasikan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada, antara pencatatan pada Bendahara dengan pengesahan hibah dan mengembangkan Aplikasi tersebut untuk dapat membukukan realisasi belanja yang bersumber dari hibah dengan mencantumkan kode akun atau mata anggaran;	1	0,00							1					
				BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk: b.Menyusun mekanisme pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada yang mengatur pemberian sanksi kepada satuan kerja yang tidak memutakhirkan data hibah dengan melibatkan Inspektorat Utama Bawaslu.	1	0,00							1					
5	3.5 Pedoman Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Belum Sepenuhnya Efektif	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan: a.Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu dan melakukan pemantauan secara periodik atas pengelolaan keuangan hibah pada satker-satker Bawaslu;	1	0,00							1					
				BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan: b.Inspektor Utama Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP: 1)Menyempurnakan standar prosedur dan analisis kartu kendali SPIP dari tingkat satker secara berjenjang;	1	0,00							1					

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2019 S.D. 2021

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp)			
	Judul	Jml	Nilai (Rp)	Uraian	Jml	Nilai (Rp)		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)			Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2)Menyusun manajemen risiko terkait identifikasi dan analisis risiko atas pengelolaan keuangan hibah Pilkada; dan 3)Menyusun rencana pengawasan intern yang berbasis penilaian risiko.														
6	3.6 Pelaksanaan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak 2020 pada Bawaslu Belum Memadai	1	0,00	BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan: a. Inspektur Utama Bawaslu untuk menyusun program pengawasan komprehensif terkait pengelolaan dana hibah Pilkada, antara lain mengatur cakupan pengawasan intern (audit coverage) yang memadai, manajemen risiko dan pembinaan SDM Pengawasan; BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu agar memerintahkan: b. Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis atas mekanisme pengelolaan keuangan hibah dan pemantauan atas pengelolaan hibah Pilkada pada satker-satker Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota secara periodik.	1	0,00							1					
	Jumlah	6	-	Jumlah	14	-	Jumlah	0	-	0	-	14	-	0	-			

LAMPIRAN III
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TINGKAT UAKPA TAHUN 2022 AUDITED

**LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100)

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100). Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah memadai.

Jakarta, 10 Februari 2023
Kepala Biro Keuangan dan BMN,



Pakerti Luhur, Ak. M.M.

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Peralatan dan Mesin
3. Tanah

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No.	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah.			

LAMPIRAN IV
CAPAIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILU
TAHUN 2022 *AUDITED*

CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN)

KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)					
		Pagu	Realisasi*	%	Target	Bulan Ini		S.d Bulan Ini		GAP**
						RVRO	PCRO (%)	RVRO	PCRO (%)	
QDB001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu	115.277.111.000,00	95.367.745.459,00	82,73	22	2	13,63	22	100	17,27
QDB001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu	26.092.552.000,00	23.324.579.007,00	89,39	1	0,09	32	1	100	10,61
QDB003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	28.462.788.000,00	26.521.001.228,00	93,18	1	0,5	21	1	100	6,82
UAB001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	13.600.000.000,00	12.086.219.068,00	88,87	2	1	26,7	2	100	11,13
PAH001	Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu	10.931.687.000,00	8.510.271.908,00	77,85	28	10,5	10,7	28	100	22,15
QDB002	Pengawasan Netralitas ASN	1.500.000.000,00	1.483.041.280,00	98,87	20	2	20	20	100	1,13

LAMPIRAN V
FACE E-REKON

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 500100

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	444,552,892,000	388,327,553,720	56,225,338,280	87	230,492,581,000	211,394,987,408	19,097,593,592	87
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

197412011993031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,289,220,969	137,876,501	1,151,344,468	835.05
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	428,553,333	(428,553,333)	(100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	773,000	(773,000)	(100.00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	176,258,179	185,258,179	(9,000,000)	(4.86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(16,891,569)	(926,291)	(15,965,278)	1,723.57
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	159,366,610	184,331,888	(24,965,278)	(13.54)
Persediaan	342,237,928	156,249,890	185,988,038	119.03
JUMLAH ASET LANCAR	1,790,825,507	907,784,612	883,040,895	97.27
ASET TETAP				
Tanah	99,806,795,296	86,987,072,933	12,819,722,363	14.74
Peralatan dan Mesin	79,741,035,906	75,977,010,461	3,764,025,445	4.95
Gedung dan Bangunan	44,556,760,764	33,446,055,684	11,110,705,080	33.22
Jalan, Irigasi dan Jaringan	569,111,000	569,111,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	11,387,350,252	7,672,270,350	3,715,079,902	48.42
AKUMULASI PENYUSUTAN	(63,205,682,042)	(58,362,164,736)	(4,843,517,306)	8.30
JUMLAH ASET TETAP	172,855,371,176	146,289,355,692	26,566,015,484	18.16
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	18,275,832,162	11,702,612,438	6,573,219,724	56.17
Aset Lain-lain	2,458,759,850	7,197,717,051	(4,738,957,201)	(65.84)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(12,456,093,564)	(14,952,110,290)	2,496,016,726	(16.69)
JUMLAH ASET LAINNYA	8,278,498,448	3,948,219,199	4,330,279,249	109.68
JUMLAH ASET	182,924,695,131	151,145,359,503	31,779,335,628	21.03
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,192,944,964	335,081,387	857,863,577	256.02
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,192,944,964	335,081,387	857,863,577	256.02
JUMLAH KEWAJIBAN	1,192,944,964	335,081,387	857,863,577	256.02
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	181,731,750,167	150,810,278,116	30,921,472,051	20.50
JUMLAH EKUITAS	181,731,750,167	150,810,278,116	30,921,472,051	20.50
JUMLAH EKUITAS	181,731,750,167	150,810,278,116	30,921,472,051	20.50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	182,924,695,131	151,145,359,503	31,779,335,628	21.03

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
197412011993031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	34,030,000	9,276,000	24,754,000	266.861
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	34,030,000	9,276,000	24,754,000	266.861
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	34,030,000	9,276,000	24,754,000	266.861
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	34,035,679,419	38,410,718,383	(4,375,038,964)	(11.39)
Beban Persediaan	3,709,779,228	2,960,046,112	749,733,116	25.328
Beban Barang dan Jasa	112,589,969,155	60,791,755,508	51,798,213,647	85.206
Beban Pemeliharaan	4,740,607,070	6,057,623,952	(1,317,016,882)	(21.741)
Beban Perjalanan Dinas	210,654,148,127	92,538,971,265	118,115,176,862	127.638
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14,294,691,141	13,552,254,633	742,436,508	5.478
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	15,965,278	926,291	15,038,987	1,623.57
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	380,040,839,418	214,312,296,144	165,728,543,274	77.33
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(380,006,809,418)	(214,303,020,144)	(165,703,789,274)	77.322
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(107,804,227)	(529,833,112)	422,028,885	(79.653)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	290,056,549	36,396,888	253,659,661	696.927
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	397,860,776	566,230,000	(168,369,224)	(29.735)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	342,582,069	175,584,669	166,997,400	95.109
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	342,582,069	175,584,669	166,997,400	95.109
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	234,777,842	(354,248,443)	589,026,285	(166.275)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(379,772,031,576)	(214,657,268,587)	(165,114,762,989)	76.92
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(379,772,031,576)	(214,657,268,587)	(165,114,762,989)	76.92

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

197412011993031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:27 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	150,810,278,116	158,184,267,793	(7,373,989,677)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(379,772,031,576)	(214,657,268,587)	(165,114,762,989)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,376,374	2,279,894,831	(2,277,518,457)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	35,337,500	(35,337,500)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,376,374	2,244,557,331	(2,242,180,957)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	410,691,127,253	205,003,384,079	205,687,743,174	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	30,921,472,051	(7,373,989,677)	38,295,461,728	-
EKUITAS AKHIR	181,731,750,167	150,810,278,116	30,921,472,051	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT
 197412011993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,289,220,969	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	176,258,179	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	16,891,569
0.0	117111	Barang Konsumsi	65,350,776	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	276,887,152	0
0.0	131111	Tanah	99,806,795,296	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	79,741,035,906	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	44,556,760,764	0
0.0	134113	Jaringan	569,111,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	10,251,996,061	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,135,354,191	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	57,174,160,894
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,621,238,862
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	212,682,286
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	197,600,000
0.0	162151	Software	16,582,935,662	0
0.0	162161	Lisensi	1,549,896,500	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	143,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,458,759,850	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,041,689,050
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,048,529,889
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	365,874,625
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	9,616,614
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	359,740,350
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	823,588,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	388,327,553,720
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	514,451,803	0
0.0	313211	Transfer Keluar	831,476,740	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,553,959,949
0.0	391111	Ekuitas	0	150,810,278,116
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,376,374
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	15,155,542,127
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	290,056,549
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	34,030,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,312,005
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	34,400,064
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	294,870,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,828,250,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	234,912	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	613,159,038	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	137,189,355	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	829,031,180	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	968,431,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	965,148,594	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	623,029,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,537,253,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	484,185,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,146,763,800	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	368,232,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	13,534,771,560	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	14,923,380,027	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43,343,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,128,648,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,497,040,559	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	220,234,924	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,994,147,370	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,939,850,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,818,733,225	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,185,866,456	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	528,707	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	289,785,549	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,884,204,137	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	2,040,353,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	19,151,202,121	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	11,877,977,199	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	21,283,451,347	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	296,254,157	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,650,705,226	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	6,910,496	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,082,991,348	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	67,038,632,937	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,666,976,802	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,129,548,063	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	74,355,025,260	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	463,965,065	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:28 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,565,963,683	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,194,587,142	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	15,773,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	2,329,175,199	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	154,989,650	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	34,202,342	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,092,475,371	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	617,303,857	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	15,965,278	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14,969,127	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	397,860,776	0
JUMLAH			640,387,991,043	640,387,991,043

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

197412011993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,927,880,027	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,146,763,800	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,818,733,225	0
3.0	522141	Belanja Sewa	18,722,648,788	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	81,624
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,312,005
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	220,234,924	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	9,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,821,493,820	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	968,431,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	503,375,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,673,440,470	0
3.0	521211	Belanja Bahan	22,995,848,994	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,086,390,690	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	201,493,820
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	19,190,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6,463,668
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,052,894,389
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	34,803,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	290,056,549
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,030,525,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	966,650,754	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	463,965,065	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	11,880,424,699	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,467,711,569
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	612,944,048	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	623,029,260	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	13,544,785,960	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	21,283,451,347	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	14,037,851,115	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	4,500,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,447,500
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	950,546,069
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	6,910,496	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	296,254,157	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	68,454,811,975	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	68,597,259,632	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (500100) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tgl Data : 16/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 19/05/23 2:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,128,648,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,497,040,559	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,939,850,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,884,204,137	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	2,040,353,250	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,801
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	167,276,565
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	807,756,576	0
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	388,327,553,720
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	238,396	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,691,102	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	289,050,119	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,650,705,226	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,270,303,848	0
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,684
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	137,109,501	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,537,253,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,407,919,649	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,203,384,136	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	368,232,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	43,343,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,136,698,415	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	514,451,803	0
JUMLAH			392,547,336,963	392,547,336,963

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

null, 19 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

null

FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

197412011993031001